Pemerintah
Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025



# Perubahan RKPD
# 2025


Laman Web Kami
**www.tegalkab.go.id**

Kontak Kami
**0283-491694**

Alamat Kami
**Jl. dr. Soetomo Nomor 1 Slawi**



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang:

a. bahwa sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, antara lain pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan, serta perubahan lainnya, Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat

Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengakomodasikan :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. pergeseran kegiatan antar jenis belanja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD digunakan sebagai :

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Penyusunan Rencana APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025; dan
b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2025
BUPATI TEGAL,

Ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**B.K. ARIBAWA, S.H., S.P., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 199403 1 004

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ..... **i**

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... **I-1**
1.1. LATAR BELAKANG ..... I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I-4
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I-4
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ..... I-5

**BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** ..... **II-1**
2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... II-2
2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKU PD) ..... II-4
2.3. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... II-19

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... III-1
3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal ..... III-1
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-9
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiyaan Daerah ..... III-13

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... **IV-1**
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1
4.1.1 Visi ..... IV-1
4.1.2 Misi ..... IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran ..... IV-5
4.1.4 Program Unggulan ..... IV-10
4.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 ..... IV-12
4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-12
4.2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... IV-13
4.2.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 ..... IV-17
4.2.4 Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ..... IV-47
4.2.5 Pelaksanaan Program Unggulan ..... IV-84
4.2.6 Pelaksanaan Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang ..... IV-84
4.2.7 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goal (TPB/SDGs) ..... IV-87
4.2.8 Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... IV-110

4.2.9 Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Kebijakan Spasial IV-119
4.2.10 Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi ..... IV-124
4.2.11 Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Penanganan Stunting ..... IV-132
4.2.12 Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Kemiskinan Ekstrem ..... IV-137
4.2.13 Inovasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten ..... IV-142
4.2.14 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tegal ..... IV-153

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ..... V-3
5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ..... V-8
5.3 URUSAN PILIHAN ..... V-16
5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PILIHAN ..... V-19
5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ..... V-21
5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN ..... V-23
5.7 UNSUR KEWILAYAHAN ..... V-24
5.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM ..... V-23

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VI-1**
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2025 ..... VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VI-2
6.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL ..... VI-33

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 1 | Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tegal | II-2 |
| Tabel 2. 2 | Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | II-4 |
| Tabel 2. 3 | Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | II-19 |
| Tabel 3.1 | Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal | III-1 |
| Tabel 3.2 | Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 | III-2 |
| Tabel 3.3 | Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2023 dan Target 2024 | III-2 |
| Tabel 3.4 | Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2024 | III-8 |
| Tabel 3.5 | Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 | III-12 |
| Tabel 3.6 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupate Tegal Tahun 2024 | III-14 |
| Tabel 4.1. | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia | IV-7 |
| Tabel 4.2. | Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 | IV-18 |
| Tabel 4.3 | Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024 | IV-21 |
| Tabel 4.4 | Sasaran, Prioritas Daerah dan Program Pembangunan Prioritas Tahun 2024 | IV-23 |
| Tabel 4.5 | Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Melalui Prioritas Pembangunan Daerah, Fokus Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2024 | IV-48 |
| Tabel 4.6. | Pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 | IV-84 |
| Tabel 4.7. | Dukungan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang | IV-85 |
| Tabel 4.8. | Integrasi Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian TPB/SDG's | IV-88 |
| Tabel 4.9. | Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah | IV-111 |
| Tabel 4.10. | Pendekatan Spasial Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024 di Sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | IV-123 |
| Tabel 4.11. | Prioritas Pembangunan Pendukug Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal | IV-124 |
| Tabel 4.12. | Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting | IV-132 |
| Tabel 4.13. | Desa Lokus Stunting Tahun 2024 | IV-136 |
| Tabel 4.14. | Prioritas Pembangunan Penanganan Kemiskinan Ekstrem | IV-137 |
| Tabel 4.15. | Kebutuhan Pemberdayaan Kelompok Sasaran Kemiskinan Ekstream | IV-141 |

Tabel 4.16. Desa Lokus Kemiskinan Ekstream ..... IV-141
Tabel 4.17. Kerangka Kerja Logis (KKL) Inovasi ABANG KUWAT ..... IV-143
Tabel 4.18. SOP ABANG KUWAT ..... IV-146
Tabel 4.19. Output Inovasi ABANG KUWAT ..... IV-148
Tabel 4.20. Inovasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal ..... IV-150
Tabel 5.1. Kerangka Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 ..... V-1
Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 ..... VI-1
Tabel 6. 2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 ..... VI-3
Tabel 6. 3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 ..... VI-33

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Delineasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tegal .. IV-121
Gambar 4. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Tegal ..... IV-122

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024. RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2019-2024 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada tahun 2024. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2024 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan dokumen penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. Sehingga dalam proses penyusunannya harus menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 memuat penyesuaian arah kebijakan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tegal diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 sampai dengan triwulan I (sampai dengan bulan Februari), dari dari 394 indikator, sebanyak 237 indikator (60,15%) berstatus Tinggi dan Sangat Tinggi, 11 indikator (2,79%) sedang, dan 146 indikator (37,06%) berstatus Rendah dan Sangat Rendah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD mendasari dari hasil evaluasi Triwulan I (sampai dengan bulan Februari pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini juga dapat menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomro 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) yang menyebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD disusun dari dokumen hasil evaluasi Triwulan I (sampai dengan bulan Februari) pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2024 serta dokumen hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Perubahan RKPD juga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini juga dapat menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk untuk melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS-P antara DPRD dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Tahun 2025 disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, serta Sitematika Perubahan RKPD.

BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Menguraikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah serta program dan kegiatan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan dengan triwulan II.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang perubahan kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk perubahan tahun 2024.

BAB IV PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I dan target yang direncanakan dalam RPD Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2026 yang tertuang dalam program dan kegiatan dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta rumusan program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Tahun 2025 baik yang dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025.

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA PPAS maka dalam rangka proses perubahan APBD tahun 2025 yang didasarkan pada KUPA dan PPAS-P harus terlebih dahulu dilakukan proses perubahan RKPD. RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya dalam rangka Perubahan RKPD tahun 2025 yang menjadi dasar KUPA PPAS-Perubahan tahun 2025 maka perlu adanya evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 untuk capaian sampai dengan Semester I tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi tersebut adalah juga sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanan pembangunan daerah adalah meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistim rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama.
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tegal diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026. Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dari 394 indikator, sebanyak 237 indikator (60,15%) berstatus Tinggi dan Sangat Tinggi, 11 indikator (2,79%) sedang, dan 146 indikator (37,06%) berstatus Rendah dan Sangat Rendah.

Secara umum, penyebab beberapa indikator berstatus Sedang, Rendah dan Sangat Rendah dikarenakan sampai dengan triwulan I:

a. kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian belum dapat dihitung;
b. kegiatannya belum dapat dilaksanakan pada triwulan I , karena menyesuaikan dengan aktivitas di luar rencana daerah (misalnya perhitungan APK, dapat dilakukan setelah tahun ajaran sekolah baru dimulai);
c. capaian indikator tidak dapat dihitung secara triwulan, dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan);

## 2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. 1**
**REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Opini; Tahunan | 80,15 | 77,6 | 96,82 | Sekretariat Daerah |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen; Tahunan | 87,53 | 86,22 | 98,50 | Sekretariat Daerah |
| 3. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Skor; Tahunan | 3,45 | 3,16 | 91,59 | Dinas Kominfo |
| 4. | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai; Tahunan | 65,15 | 65,58 | 100,66 | Sekretariat Daerah |
| 5. | Opini BPK | Opini; Tahunan | WTP | WTP | WTP | BPKAD |
| 6. | Indeks Sistem Merit | Poin; Tahunan | 0,75 | 0 | 0,00 | BKPSDM |
| 7. | Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan | Angka; Kumulatif | 79,22 | 82,99 | 104,76 | Dinas PUPR |
| 8. | Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap | Persen; Tahunan | 84,23 | 84,18 | 99,94 | Dinas PUPR |
| 9. | Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak | Persen; Tahunan | 78,14 | 85,31 | 109,18 | Dinas Perkim |
| 10. | Indeks Kinerja Perhubungan | Skor; Tahunan | 55 | 0 | 0,00 | Dinas Perhubungan |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin, Tahunan | 66,82 | 61,94 | 92,70 | Dinas LH |
| 12. | Pertumbuhan Ekonomi | Persen; Tahunan | 5,00 - 5,60 | 5,45 | 109,00 | Sekretariat Daerah |
| 13. | Laju PDRB Sektor Pertanian | Persen; Tahunan | 2,33 | -2,04 | -87,55 | Dinas KP TAN |
| 14. | Laju PDRB Sektor Industri | Persen; Tahunan | 4,65 | 5,13 | 110,32 | Dinas PERINTRANSNAKER |
| 15. | Laju PDRB Sektor Perdagangan | Persen; Tahunan | 3,15 | 4,99 | 158,41 | Dinas KOP,UKM, Perdagangan |
| 16. | Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten | Persen; Tahunan | 7,5 | 4,91 | 65,47 | Dinas PORAPAR |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai; | 71,78 | 71,7 | 99,89 | Sekretariat Daerah |
| 18. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Tahunan | 89,12 | 88,64 | 99,46 | Sekretariat Daerah |
| 19. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Poin ; Tahunan | 0,31 | 0 | 0,00 | Dinas P3AP2KB |
| 20. | Indeks Pendidikan | Poin ; Tahunan | 0,62 | 0,61 | 98,39 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 21. | Indeks Kesehatan | Tahun; Tahunan | 0,835 | 0,835 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 22. | Persentase Penduduk Miskin | Tahun; Tahunan | 6,40 – 6,70 | 6,81 | 93,59 | Dinas Sosial |
| 23. | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Persen; Tahunan | 0,78 | 0,97 | 75,64 | Dinas Sosial |
| 24. | Indeks Keparahan Kemiskinan | Poin; | 0,15 | 0,22 | 53,33 | Dinas Sosial |
| 25. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tahunan | 8,30 – 7,75 | 7,53 | 109,28 | Dinas PERINTRANSNAKER |
| 26. | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | Poin; | 87,55 | 93,66 | 106,98 | BADAN KESBANGPOL |
| 27. | Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan | Tahunan | 87,86 | 93,38 | 106,28 | SATPOL |
| 28. | Indeks Ketahanan Daerah | Persen; Tahunan | 0,89 | 0 | 0,00 | BPBD |
| 29. | Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana | Persen; Tahunan | 0,79 | 0 | 0,00 | BPBD |
| 30. | Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persen; Tahunan | 65,15 | 83,93 | 128,83 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 31. | Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan | Angka; Tahunan | 69,65 | 78,13 | 112,18 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKU PD)

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. 2 REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,07 | 7,05 | 7,03 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,79 | 12,76 | 12,73 | |
| 3. | Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan | Persen | 94,30 | 94,29 | 94,29 | |
| 4. | Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan | Persen | 80,94 | 79,13 | 77,34 | |
| 5. | Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan | Persen | 74,34 | 70,80 | 67,46 | |
| 6. | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,69 | 71,61 | 71,53 | Dinas Kesehatan |
| 7. | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 kelahiran Hidup | 60 | 63 | 67 | |
| 8. | Angka Kematian Bayi (AKB) | per 1.000 kelahiran Hidup | 6,6 | 6,7 | 6,8 | |
| 9. | Angka Kematian Balita (AKABA) | per 1.000 kelahiran Hidup | 7,4 | 7,5 | 7,6 | |
| 10. | Persentase Desa STBM | Persen | 10,00 | 9,00 | 7,00 | |
| 11. | Cakupan Balita Stunting | Persen | 12,0 | 12,2 | 12,3 | |
| 12. | Nilai IKM RSUD dr. Soeselo | Persen | 89 | 87 | 85 | RSUD dr Soeselo |
| 13. | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 14. | Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo | Grade | AA (90) | AA (86) | AA (82) | |
| 15. | Nilai IKM RSUD Suradadi | Persen | 83,00 | 82,00 | 80,00 | RSUD Suradadi |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 17. | Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD Suradadi | Grade | A (78,46) | A (77,36) | A (76,26) | |
| 18. | Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap | Persen | 83,78 | 82,12 | 80,09 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 19. | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap | Persen | 63,80 | 62,57 | 61,33 | |
| 20. | Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap | Persen | 87,26 | 86,04 | 84,60 | |
| 21. | Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Mantap | Persen | 82,25 | 79,52 | 72,42 | |
| 22. | Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif | Persen | 80,00 | 80,00 | 60,00 | |
| 23. | Persentase Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan | Persen | 89,00 | 88,00 | 87,00 | |
| 24. | Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak | Persen | 79,15 | 78,02 | 76,93 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| 25. | Persentase Infrastruktur Perumahan yang Layak | Persen | 93,80 | 94,04 | 93,80 | |
| 26. | Persentase Infrastruktur Kawasan | Persen | 39,78 | 35,82 | 31,85 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Permukiman yang Layak | | | | | |
| 27. | Persentase Penatagunaan Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 84,10 | |
| 28. | Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 90,66 | 88,66 | 86,66 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 29. | Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 90,66 | 88,66 | 86,66 | |
| 30. | Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik | Persen | 88,275 | 86,26 | 83,58 | Badan Kesbangpol |
| 31. | Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa | Persen | 90,37 | 86,91 | 84,02 | |
| 32. | Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Politik | Persen | 86,18 | 85,62 | 83,14 | |
| 33. | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | Angka | 0,89 | 0,80 | 0,72 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 34. | Persentase Kinerja Penanggulangan Bencana | Persen | 78,96 | 75,18 | 71,17 | |
| 35. | Indeks kedalaman kemiskinan | Angka | 0,78 | 0,78 | 0,82 | Dinas Sosial |
| 36. | Indeks keparahanan kemiskinan | Angka | 0,1 | 0,12 | 0,15 | |
| 37. | Indeks kesejahteraan sosial | Angka | 98,46 | 90,00 | 83,75 | |
| 38. | Persentase pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (Indikator APE) | Persen | 77,00 | 76 | 75 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39. | Persentase pencapaian pemenuhan hak anak(KLA) | Persen | 75,00 | 67 | 64 | |
| 40. | Persentase perempuan di Lembaga Legislatif | Persen | 0,22 | 25 | 25 | |
| 41. | Persentase cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Persen | 60,00 | 100 | 100 | |
| 42. | skor kabupaten layak anak | Skor | 71,41 | 670 | 640 | |
| 43. | Laju pertumbuhan penduduk(LPP) | Persen | 1,2 | 1,24 | 1,27 | |
| 44. | Persentase wanita yang pernah kawin usia 15-19 tahun | Persen | 0,92 | 1,02 | 1,12 | |
| 45. | Persentase peserta KB aktif | Persen | 69,54 | 69,34 | 69,14 | |
| 46. | persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan | Persen | 80 | 61 | 44 | |
| 47. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen; Tahunan | 55,83 | 55,48 | 55,33 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 48. | Indeks Kualitas Air (IKA) | Persen | 32.01 | 31.25 | 31.20 | |
| 49. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Persen | 86.66 | 86.24 | 85.82 | |
| 50. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Persen | 50.57 | 50.57 | 50.56 | |
| 51. | Nilai Status Pencemaran Air Sungai | Persen | 6.80 | 6.85 | 6.90 | |
| 52. | Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara | Persen | 88.05 | 87.53 | 87.01 | |
| 53. | Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan | Persen | 9.78 | 9.78 | 9.77 | |
| 54. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 85 | 84 | 83 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 55. | Indeks Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | Persen | 82 | 75 | 69 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56. | Persentase Desa tertib Laporan LPPDes | Persen | 100 | 100 | 75 | |
| 57. | Persentase Penataan infrastruktur Pemerintah Desa yang Baik | Persen | 29 | 26 | 23 | |
| 58. | Indeks Desa Membangun dan Klasifikasi Desa Maju dan Mandiri | Persen | 100 | 75 | 60 | |
| 59. | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | Persen | 98,33 | 79,00 | 61,72 | Dinas Perhubungan |
| 60. | Rasio Ijin Trayek | Persen | 90 | 87 | 85 | |
| 61. | Persentase Penurunan Rasio Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas | Persen | 69 | 63,5 | 58 | |
| 62. | Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman | OPD | 48 | 26 | 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 63. | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | Indeks | 2,5 | 2,4 | 2 | |
| 64. | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Indeks | 2,4 | 2,2 | 2,1 | |
| 65. | Indeks Domain Layanan SPBE | Indeks | 3 | 2,9 | 2,9 | |
| 66. | Indeks Manajemen SPBE | Indeks | 2,3 | 2,1 | 2 | |
| 67. | Nilai KIP Badan Publik | Skor | 90 | 88 | 87 | |
| 68. | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | 380 | 360 | 320 | |
| 69. | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 70. | Laju Pertumbuhan IKM bidang PTSP | Persen | 5,13 | 3,85 | 2,56 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 71. | IKM bidang PTSP | Nilai | 82 | 81 | 80 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72. | Nilai Investasi PMA (Rp) | Rp | 580 M | 560 M | 540 M | |
| 73. | Nilai Investasi PMDN (Rp) | Rp | 950 M | 925 M | 900 M | |
| 74. | Nilai Minat investasi PMA | Rp | 1,080 T | 1,029 T | 980 M | |
| 75. | Nilai Minat Investasi PMDN | Rp | 1,598 T | 1,522 T | 1,450 T | |
| 76. | IKM Bidang Perpustakaan | Skor | 78,9 | 78,75 | 78,65 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 77. | Status Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Status | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 78. | Status Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI | Status | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| 79. | Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) | Skor | 78,6 | 77,4 | 76,2 | |
| 80. | Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten | Persen | 2,25 | 2,23 | 1,99 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 81. | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Persen | 64,29 | 42,86 | 21,43 | |
| 82. | Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis | Orang | 600 | 500 | 400 | |
| 83. | Pencapaian Kota Layak Pemuda | Skor | Utama | Utama | Utama | |
| 84. | Laju Peningkatan prestasi olahraga | Persen | 39,34 | 22,95 | 14,75 | |
| 85. | Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian | Persen | 3,23 | 2,87 | 2,75 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 86. | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan | Persen | 0,25 | 0,25 | 0,20 | |
| 87. | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan | Persen | 1,30 | 1,20 | 1,15 | |
| 88. | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura | Persen | 1,40 | 1,30 | 1,20 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 89. | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan | Persen; Tahunan | | | | |
| 90. | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 80,63 | 80,52 | 80,41 | |
| 91. | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan | Persen | 1,67 | 1,62 | 1,57 | Dinas Perikanan |
| 92. | Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap | Persen; Kumulatif | 4,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 93. | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | Persen; Kumulatif | 3,45 | 1,00 | 0,75 | |
| 94. | Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan | Persen; Kumulatif | 0,700 | 0,20 | 0,15 | |
| 95. | Laju PDRB Sektor Perdagangan | Persen | 4,56 | 3,23 | 2,75 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 96. | Laju PDRB Sub Sektor Jasa Keuangan | Persen | 0,10 | 0,09 | 0,08 | |
| 97. | Indek Kinerja Koperasi dan UMKM | Persen | 7,1 | 5,54 | 4,0 | |
| 98. | Indek Kinerja Sektor Perdagangan | Persen | 15,95 | 12,98 | 10,01 | |
| 99. | Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri | Persen | 4,56 | 5,40 | 4,56 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 100. | Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing | Persen | 70 | 80 | 70 | |
| 101. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9,85-8,85 | 10,12-9,14 | 10,21-9,42 | |
| 102. | Persentase laju tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah | Persen | 124,47 | 96,41 | 68,35 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103. | Persentase penyelesaian hubungan industrial | Persen | 70 | 65 | 55 | |
| 104. | Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 68,69 (1.5) | 67,69 (1.5) | 66,69 (1.5) | Sekretariat Daerah |
| 105. | Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 84,50 (1.18) | 83,50 (1.19) | 82,50 (2.47) | |
| 106. | Peningkatan Nilai SAKIP | Nilai | 67,00 (1.0) | 66,00 (1.0) | 65,00 (-0.61) | |
| 107. | Peningkatan Nilai LPPD | Nilai | 3,6 (0.1) | 3,5 (0.1) | 3,4 (0.1) | |
| 108. | Persentase rencana tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembetukan perkada dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD yang baik | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 109. | Persentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 110. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Adiwerna | Persen | 80,87 | 1 | 1,25 | Kecamatan Adiwerna |
| 111. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Adiwerna | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 112. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Adiwerna | Persen | 4,76 | 4,76 | 0,00 | |
| 113. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Adiwerna | Persen | 14,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 114. | Laju Peningkatan Nilai IKM | Persen | 83,79 | 1 | 1,25 | Kecamatan Balapulang |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kecamatan Balapulang | | | | | |
| 115. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Balapulang | Persen | 100 | 20 | 20 | |
| 116. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Balapulang | Persen | 10,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 117. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Balapulang | Persen | 15,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 118. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Bojong | Persen | 84,12 | 1 | 1,25 | Kecamatan Bojong |
| 119. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bojong | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 120. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bojong | Persen | 17,65 | 5,88 | 0,00 | |
| 121. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Bojong | Persen | 35,29 | 5,88 | 0,00 | |
| 122. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Bumijawa | Persen | 92,03 | 1 | 1,25 | Kecamatan Bumijawa |
| 123. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bumijawa | Persen | 100 | 16 | 18 | |
| 124. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bumijawa | Persen | 11,11 | 5,56 | 0,00 | |
| 125. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Bumijawa | Persen | 27,78 | 5,56 | 5,56 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Dukuhturi | Persen | 81,94 | 1 | 1,25 | Kecamatan Dukuhturi |
| 127. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 128. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhturi | Persen | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 129. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhturi | Persen | 16,67 | 5,56 | 0,00 | |
| 130. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 83,87 | 1 | 1,25 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 131. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 70 | 10 | 10 | |
| 132. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 133. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Jatinegara | Persen | 84,20 | 1 | 1,25 | Kecamatan Jatinegara |
| 135. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Jatinegara | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 136. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Jatinegara | Persen | 11,76 | 0,00 | 5,88 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 137. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Jatinegara | Persen | 17,65 | 0,00 | 5,88 | |
| 138. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 86,00 | 1 | 1 | Kecamatan Kedungbanteng |
| 139. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 140. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 141. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 142. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Kramat | Persen | 83,48 | 1 | 1,25 | Kecamatan Kramat |
| 143. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kramat | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 144. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Kramat | Persen | 5,26 | 0,00 | 5,26 | |
| 145. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Kramat | Persen | 26,32 | 10,53 | 0,00 | |
| 146. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Lebaksiu | Persen | 83,25 | 1 | 1,25 | Kecamatan Lebaksiu |
| 147. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Lebaksiu | Persen | 95 | 21 | 18 | |
| 148. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Lebaksiu | Persen | 13,33 | 6,67 | 0,00 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Lebaksiu | Persen | 20,00 | 6,67 | 0,00 | |
| 150. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Margasari | Persen | 81,90 | 1 | 1,25 | Kecamatan Margasari |
| 151. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Margasari | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 152. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Margasari | Persen | 15,38 | 7,69 | 0,00 | |
| 153. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Margasari | Persen | 61,54 | 7,69 | 0,00 | |
| 154. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Pagerbarang | Persen | 82,13 | 1 | 1,25 | Kecamatan Pagerbarang |
| 155. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pagerbarang | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 156. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Pagerbarang | Persen | 7,69 | 7,69 | 7,69 | |
| 157. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Pagerbarang | Persen | 30,77 | 4,35 | 0,00 | |
| 158. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Pangkah | Persen | 83,24 | 1 | 1,25 | Kecamatan Pangkah |
| 159. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pangkah | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 160. | Peningkatan Persentase Desa | Persen | 4,35 | 4,35 | 0,00 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Mandiri Kecamatan Pangkah | | | | | |
| 161. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Pangkah | Persen | 8,70 | 4,35 | 0,00 | |
| 162. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Slawi | Persen | 84,17 | 1 | 1,25 | Kecamatan Slawi |
| 163. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Slawi | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 164. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Slawi | Persen | 40,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 165. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Slawi | Persen | 80,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 166. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Suradadi | Persen | 84,26 | 1 | 1,25 | Kecamatan Suradadi |
| 167. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Suradadi | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 168. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Suradadi | Persen | 9,09 | 9,09 | 0,00 | |
| 169. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Suradadi | Persen | 18,18 | 0,00 | 9,09 | |
| 170. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Talang | Persen | 77,70 | 1 | 1,25 | Kecamatan Talang |
| 171. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Talang | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 172. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Talang | Persen | 5,26 | 0,00 | 0,00 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 173. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Talang | Persen | 10,53 | 0,00 | 5,26 | |
| 174. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Tarub | Persen | 85,05 | 1 | 1,25 | Kecamatan Tarub |
| 175. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Tarub | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 176. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tarub | Persen | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 177. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Tarub | Persen | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178. | Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Warureja | Persen | 81,90 | 1 | 1,25 | Kecamatan Warureja |
| 179. | Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja | Persen | 100 | 21 | 18 | |
| 180. | Peningkatan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Warureja | Persen | 16,67 | 0,00 | 8,33 | |
| 181. | Peningkatan Persentase Desa Maju Kecamatan Warureja | Persen | 33,33 | 8,33 | 0,00 | |
| 182. | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | Inspektorat |
| 183. | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | 3,1 | 3,075 | 3,075 | |
| 184. | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 penuh | 3 DC (1 elemen) | 3 DC (2 elemen) | |
| 185. | Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Poin | 98,08 | 97,58 | 97,18 | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan |
| 186. | Indek Kelitbangan dan Pengelolaan Data | Poin | 94,70 | 91,18 | 87,40 | |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja RPD pada Tahun 2026 | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (TW I) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 187. | Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik dan tepat waktu | Persen | 80 | 70 | 60 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 188. | Persentase Pengelolaan BMD yang baik dan tepat waktu | Persen | 80 | 75 | 70 | |
| 189. | Prosentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 190. | Prosentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 191. | Indeks Sistem Merit | Indeks, Tahunan | 0,80 | 0,75 | 0,70 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 192. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai, Tahunan | 80,56 | 84,83 | 83,50 | |
| 193. | Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi | Persen, Tahunan | 50,18 | 47,29 | 44,39 | |
| 194. | Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kompetensi | Persen, Tahunan | 75,50 | 76,50 | 74,10 | |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 2.3. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. 3 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| NO | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH INDIKATOR | PREDIKAT CAPAIAN KINERJA | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ST | T | S | R | SR | N/A | |
| **1** | NON URUSAN | 1 | 60 | 4 | | | | 56 | | **60** |
| **2** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 5 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | | **22** |
| **3** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 4 | 18 | 13 | | 3 | | 2 | | **18** |
| **4** | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10 | 14 | 10 | 1 | | | 3 | | **14** |
| **5** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIMAN | 4 | 5 | 5 | | | | | | **5** |
| **6** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | 3 | 7 | 3 | 1 | | | 3 | | **7** |
| **7** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 6 | 6 | 5 | 1 | | | | | **6** |
| **8** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 4 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | **5** |
| **9** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | | **6** |
| **10** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 3 | 4 | 3 | 1 | | | | | **4** |
| **11** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | **3** |
| **12** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 10 | 12 | 7 | | 2 | | 3 | | **12** |
| **13** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 7 | 3 | | 1 | | 3 | | **7** |
| **14** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4 | 4 | 4 | | | | | | **4** |
| **15** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | **4** |
| **16** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 1 | 13 | 4 | 1 | | 1 | 7 | | **13** |
| **17** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | 4 | 3 | | | 1 | | | **4** |

| NO | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH INDIKATOR | PREDIKAT CAPAIAN KINERJA | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ST | T | S | R | SR | N/A | |
| **18** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 6 | 6 | 5 | 1 | | | | | **6** |
| **19** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 5 | 5 | 3 | 2 | | | | | **5** |
| **20** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2 | 4 | | | | | 4 | | **4** |
| **21** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1 | 1 | | | 1 | | | | **1** |
| **22** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1 | 1 | | 1 | | | | | **1** |
| **23** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | | **6** |
| **24** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 2 | | | | | | **2** |
| **25** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | **2** |
| **26** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4 | 7 | 1 | | | | 6 | | **7** |
| **27** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3 | 4 | 3 | | | | 1 | | **4** |
| **28** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 5 | 17 | 12 | 3 | 1 | | 1 | | **17** |
| **29** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 6 | 8 | 2 | | | 1 | 5 | | **8** |
| **30** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3 | 3 | 2 | | | 1 | | | **3** |
| **31** | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 1 | 1 | | | | | 1 | | **1** |
| **32** | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 3 | 12 | 10 | 1 | | 1 | | | **12** |
| **33** | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 8 | 20 | 8 | 1 | | | 11 | | **20** |
| **34** | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 2 | 5 | 4 | | | | 1 | | **5** |
| **35** | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 5 | 6 | 5 | 1 | | | | | **6** |
| **36** | UNSUR KEWILAYAHAN | 90 | 90 | 65 | 2 | | | 23 | | **90** |
| **TOTAL** | | **225** | **394** | **215** | **22** | **11** | **8** | **138** | **0** | **394** |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Dalam evaluasi dilakukan penilaian terhadap indikator program perurusan. Adapun penilaian (status) didasarkan pada tingkat capaian masing-masing indikator. Tingkat capaian indikator diperoleh dari persentase kondisi capaian indikator terhadap target tahun 2024. Adapun kriteria status dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi : dengan kriteria apabila prosentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target yaitu antara 91-100%
2. Tinggi : dengan kriteria apabila prosentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target yaitu antara 76-90%

3. Sedang : dengan kriteria apabila prosentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target yaitu antara 66-75%
4. Rendah : dengan kriteria apabila prosentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target yaitu antara 51-≤65%
5. Sangat Rendah : dengan kriteria apabila prosentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target yaitu antara ≤50%

Secara rinci hasil evaluasi kinerja program pembangunan daerah berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah perkiraan realisasi sampai dengan Triwulan I sebagai berikut.

## A. NON URUSAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Non Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**NON URUSAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| **NON URUSAN** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **SEMUA OPD** |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan | Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | DINAS DIKBUD |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan | Persen, tahunan | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | DINAS KESEHATAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | Sangat Rendah | RSUD dr SOESELO |
| | Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo | Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007 | 83,20 (AA) | 84,6 (AA) | 101,68 | Sangat Tinggi | RSUD dr SOESELO |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | RSUD SURADADI |
| | Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi | Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007 | 77,26 (A) | 78,50 (A) | 101,60 | Sangat Tinggi | RSUD SURADADI |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 13,00 | 13,00 | Sangat Rendah | DPUPR |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas PERKIM | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | DINAS PERKIM |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | Sangat Rendah | SATPOL PP |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD | Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019 | 100,00 | 27,13 | 27,13 | Sangat Rendah | BPBD |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 7,51 | 7,51 | Sangat Rendah | DINAS SOSIAL |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | DINAS P3AP2KB |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | | 0,00 | Sangat Rendah | DLH |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 95,00 | | 0,00 | Sangat Rendah | DISDUKCAPIL |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | | 0,00 | Sangat Rendah | DISPERMASDES |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | DINAS KOMINFO |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | DINAS PMPTSP |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | DISPORAPAR |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Arpus | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | DINAS PERPUSIP |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan | Persen ; Tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas KPTan | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 11,04 | 11,04 | Sangat Rendah | DINAS KPTAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Persen, Tahunan, Permendagri no 90/2019 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| | Presentase pemenuhan layanan penunjang pemerintahan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | DISPERINTRANSNAKER |
| | Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen | Nilai, tahunan Praturan Menteri PANRB 14/2017 IKU OPD | 84,83 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Predikat Nilai SAKIP Komponen | Nilai, tahunan, peraturan Menteri PANRB 12/2015 ; IKU OPD | 68,08 | 65,58 | 96,33 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Nilai Reformasi Birokrasi Komponen | Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 IKU OPD | 63,00 | 20,00 | 31,75 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017; IKU OPD | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017, IKU OPD | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD | 85,00 | 20,00 | 23,53 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD | 50,00 | 20,00 | 40,00 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD | Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 10,89 | 10,89 | Sangat Rendah | SEKRETARIAT DPRD |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappedalitbang | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | BAPPEDALITBANG |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,70 | 16,70 | Sangat Rendah | BPKAD |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BAPENDA | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 12,40 | 12,40 | Sangat Rendah | BAPENDA |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | BKPSDM |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | INSPEKTORAT |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN ADIWERNA |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN BALAPULANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,50 | 16,50 | Sangat Rendah | KECAMATAN BOJONG |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bumijawa | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 17,21 | 17,21 | Sangat Rendah | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN DUKUHWARU |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN JATINEGARA |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungbanteng | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kramat | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN KRAMAT |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN LEBAKSIU |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN MARGASARI |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,00 | 16,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN PANGKAH |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 12,00 | 12,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN SLAWI |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN SURADADI |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Talang | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 20,04 | 20,04 | Sangat Rendah | KECAMATAN TALANG |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 16,67 | 16,67 | Sangat Rendah | KECAMATAN TARUB |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Triwulan I | | | |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Warureja | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 12,04 | 12,04 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |
| | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa | Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | Sangat Rendah | BADAN KESBANGPOL |

*Sumber: RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 60 indikator diketahui bahwa 4 indikator berstatus sangat tinggi, dan 56 indikator berstatus sangat rendah. 56 indikator yang bertatus sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 5 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)**
**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 100,00 | 77,12 | 77,12 | Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 100,00 | 98,47 | 98,47 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | Sangat Rendah | DINAS DIKBUD |
| | Rata-rata Nilai Kelulusan SD | Nilai; Tahunan; PP 4/2022 | 80,00 | 79,06 | 98,83 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Rata-rata Nilai Kelulusan SMP | Nilai; Tahunan; PP 4/2022 | 82,00 | 83,55 | 101,89 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 68,00 | 76,01 | 111,78 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 73,00 | 77,65 | 106,37 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 47,00 | 64,98 | 138,26 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 50,00 | 72,25 | 144,50 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 71,80 | 74,32 | 103,51 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Indeks Iklim Keamanan SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,30 | 71,15 | 105,72 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Indeks Iklim Kebinekaan SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 69,00 | 72,62 | 105,25 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Indeks Iklim Inklusivitas SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 55,20 | 54,21 | 98,21 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Indeks Iklim Keamanan SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,24 | 69,15 | 102,84 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,00 | 73,01 | 108,97 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| | Indeks Iklim Inklusivitas SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 55,70 | 57,17 | 102,64 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase Muatan Lokal dalam KBM | Persen; Tahunan; Permendikbud 79/2014 | 100,00 | 5,26 | 5,26 | Sangat Rendah | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 73,00 | 82,65 | 113,22 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 51,50 | 37,23 | 72,29 | Sedang | DINAS DIKBUD |
| | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 75,00 | 64,13 | 85,51 | Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase Satuan Pendidikan Berizin | Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah | Persen; Tahunan; Peraturan Bupati | 100,00 | 65,00 | 65,00 | Rendah | DINAS DIKBUD |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 22 indikator diketahui bahwa 16 target indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah, 1 indikator berstatus sedang, dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Dua indikator yang bertatus sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 6 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **DINAS KESEHATAN** |
| **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | **DINAS KESEHATAN** |
| | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 0,91 | 0,10 | 10,79 | Sangat Rendah | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 69,10 | 69,10 | Sedang | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes | 100,00 | 71,40 | 71,40 | Sedang | DINAS KESEHATAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | | Nomor 4 Tahun 2019 | | | | | |
| | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 74,60 | 74,60 | Sedang | DINAS KESEHATAN |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 110,50 | 110,50 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 475,20 | 475,20 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, | 100,00 | 181,40 | 181,40 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | | Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | | | | | |
| | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 169,80 | 169,80 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 129,40 | 129,40 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 125,90 | 125,90 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan | Persen; Tahunan; Permendagri | 100,00 | 102,20 | 102,20 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | | | | | |
| | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 235,80 | 235,80 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | | **DINAS KESEHATAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 477,00 | 477,00 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis | Persen; Tahunan; IKU OPD | 89,70 | 89,70 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | | **DINAS KESEHATAN** |
| | Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman | Persen; Tahunan; IKU OPD | 59,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **DINAS KESEHATAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Persen; Tahunan; IKU OPD | 86,00 | 95,00 | 110,47 | Sangat Tinggi | DINAS KESEHATAN |

*Sumber : Dinas Kesehatan; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 18 indikator diketahui bahwa 13 target indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 3 indikator berstatus sedang, dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Dua indikator yang bertatus sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 3. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 7 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **DPUPR** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | DPUPR |
| | Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten | Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal. 276,02 Km. | 64,39 | 62,07 | 96,40 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | DPUPR |
| **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | **DPUPR** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak | Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 100,00 | 80,68 | 80,68 | Tinggi | DPUPR |
| | Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman | Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 35,72 | 34,54 | 96,70 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | DPUPR |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan | Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008 | 86,00 | 84,21 | 97,92 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Cakupan Akses Sanitasi Layak | Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 100,00 | 93,91 | 93,91 | Sangat Tinggi | DPUPR |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Cakupan Akses Sanitasi Aman | Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 1,37 | 1,83 | 133,58 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten | Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase. | 68,00 | 68,85 | 101,25 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan | Persentase; Tahunan | 85,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DPUPR |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persentase; Tahunan | 29,20 | 8,40 | 28,77 | Sangat Rendah | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata | Persen, Kumulatif: IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. | 88,00 | 87,51 | 99,44 | Sangat Tinggi | DPUPR |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap | Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit | 93,00 | 92,17 | 99,11 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Rasio tenaga konstruksi yang terlatih | Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019 | 80,00 | 100,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | DPUPR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **DPUPR** |
| | Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan | Persen; Tahunan: IKU OPD | 90,00 | 87,19 | 96,88 | Sangat Tinggi | DPUPR |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 14 indikator diketahui bahwa 10 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 2 indikator berstatus sangat rendah. Dua indikator yang bertatus sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIMAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 8 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten | Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |
| | Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin | Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan | Prosentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal | 52,28 | 64,11 | 122,63 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |
| **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni | Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020 | 25,36 | 24,82 | 97,87 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |
| **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentase ketersediaan PSU perumahan | Persentase; Kumulatif; IKU OPD | 86,30 | 95,19 | 110,30 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 5 indikator diketahui bahwa 5 target indikator berstatus sangat tinggi.

## 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 9 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTEBIAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **SATPOL PP** |
| | Presentase gangguan trantibun yang tertangani | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | SATPOL PP |
| | Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 89,89 | 89,89 | Tinggi | SATPOL PP |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | **BPBD** |
| | Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 45,75 | 45,75 | Sangat Rendah | BPBD |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BPBD |
| | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BPBD |
| | Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun | Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BPBD |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | SATPOL PP |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | SATPOL PP |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja; BPBD; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 7 indikator diketahui bahwa 3 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 3 target indikator berstatus sangat rendah. Tiga indikator yang bertatus sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 10 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |
| | Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 99,40 | 100,00 | 100,60 | Sangat Tinggi | DINAS SOSIAL |
| **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |
| | Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS SOSIAL |
| **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti . | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS SOSIAL |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |
| | Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial. | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS SOSIAL |
| **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 89,14 | 89,14 | Tinggi | DINAS SOSIAL |
| **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | | **DINAS SOSIAL** |
| | Persentase pengelolaan taman makam pahlawan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS SOSIAL |

*Sumber : Dinas Sosial; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 6 indikator diketahui bahwa 5 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 target berstatus tinggi.

## C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 11 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISPERINTRANSNAKER |
| **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 42.410 | 42.410 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISPERINTRANSNAKER |
| | Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 6,40 | 6,70 | 104,69 | Sangat Tinggi | DISPERINTRANSNAKER |
| **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 72,00 | 40,00 | 55,56 | Rendah | DISPERINTRANSNAKER |
| **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 9,53 | 8,48 | 88,98 | Tinggi | industri |

*Sumber : Dinas Perintransaker; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 5 indikator diketahui bahwa 3 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 1 target indikator berstatus rendah. Satu indikator yang rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 12 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase ARG pada belanja operasi APBD | Persen, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020 | 8,00 | 4,63 | 57,88 | Rendah | DINAS P3AP2KB |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Rasio, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020 | 7,25 | 1,77 | 24,41 | Sangat Rendah | DINAS P3AP2KB |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling | Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan/mediasi (PATBM, Puspaga, BKB,BKR, PPKS,dll) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS P3AP2KB |
| **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia | Persen, tahunan, laporan SIGA | 72,00 | 70,00 | 97,22 | Sangat Tinggi | DINAS P3AP2KB |
| **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak | Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA | 67,00 | 70,00 | 104,48 | Sangat Tinggi | DINAS P3AP2KB |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020 | 0,011 | 0,002 | 18,18 | Sangat Rendah | DINAS P3AP2KB |

*Sumber : Dinas P3AP2KB; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 6 indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 3 indikator berstatus sangat rendah. Tiga indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 13 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase penguatan cadangan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020 | 13,23 | 17,48 | 132,12 | Sangat Tinggi | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 | 60,00 | 52,00 | 86,67 | Tinggi | **DINAS KPTAN** |
| **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase penanganan daerah rawan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Sangat Tinggi | **DINAS KPTAN** |
| **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 | 81,00 | 92,86 | 114,64 | Sangat Tinggi | **DINAS KPTAN** |

*Sumber : Dinas KPTAN; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 3 indikator bertatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus tinggi.

## 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 14 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | DINAS PERKIM |
| **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentase implementasi redistribusi tanah | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 65,00 | 50,00 | 76,92 | Tinggi | DINAS PERKIM |
| **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentase Tanah yang tertata | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 70,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS PERKIM |
| **PROGRAM SURVEI PENGUKURUAN DAN PEMATAAN** | | | | | | | **DINAS PERKIM** |
| | Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 93,13 | 93,13 | Sangat Tinggi | DINAS PERKIM |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 3 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 1 target indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 15 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | |
| **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 36,36 | 36,36 | 100,00 | Sangat Tinggi | DLH |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentae Peningkatan Status Mutu Air Sungai | Nilai; Tahunan; IKU OPD | 18,51 | 18,51 | 100,00 | Sangat Tinggi | DLH |
| | Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 19,45 | 18,60 | 95,63 | Sangat Tinggi | DLH |
| **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | **DLH** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH | Persen, Kumulatif; IKU OPD | 24,50 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DLH |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis | Persen, Tahunan; IKU OPD | 81,30 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DLH |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Persen, Tahunan, IKU OPD | 70,00 | 71,00 | 101,43 | Sangat Tinggi | DLH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | | | |
| | Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak | Persen, Kumulatif, IKU OPD | 16,67 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DLH |
| **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 20,00 | 20,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DLH |
| **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | | **DLH** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat | Persen; Tahunan; IKU OPD | 38,46 | 44,79 | 116,46 | Sangat Tinggi | DLH |
| **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan | Persen, Tahunan; IKU OPD | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Sangat Tinggi | DLH |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | | **DLH** |
| | Persentase Sampah yang tertangani | Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008 | 70,00 | 50,27 | 71,81 | Sedang | DLH |
| | Persentase Pengurangan Sampah | Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008 | 25,00 | 17,94 | 71,76 | Sedang | DLH |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 12 indikator diketahui bahwa 7 target indikator berstatus sangat tinggi,  2 indikator berstatus sedang, dan 3 indikator berstatus rendah. Tiga indikator yang rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 16 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| | Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga | Persen; Tahunan; IKU OPD | 98,00 | 98,81 | 100,83 | Sangat Tinggi | DISDUKCAPIL |
| | Presentase Penduduk ber KTP el | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 99,00 | 100,00 | 101,01 | Sangat Tinggi | DISDUKCAPIL |
| | Presentase Anak Memiliki KIA | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 50,00 | 34,70 | 69,40 | Sedang | DISDUKCAPIL |
| | Presentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | |
| **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| | Presentase Penduduk Usia 0-18 tahun berakta kelahiran | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISDUKCAPIL |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Prosentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman | Persen; Tahunan; IKU OPD | 75,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISDUKCAPIL |
| **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | Sangat Tinggi | DISDUKCAPIL |

*Sumber :Dinas DUKCAPIL; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 7 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 3 target indikator berstatus sangat rendah. Tiga Indikator berstatus sangat rendah masih dalam proses implementasi.

## 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 17 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **DISPERMASDES** |
| **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | | **DISPERMASDES** |
| | Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISPERMASDES |
| **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | | | | | | | **DISPERMASDES** |
| | Persentase Desa yang melakukan kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD | 82,78 | 100,00 | 120,80 | Sangat Tinggi | DISPERMASDES |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **DISPERMASDES** |
| | Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa | Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD | 72,00 | 100,00 | 138,89 | Sangat Tinggi | DISPERMASDES |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | **DISPERMASDES** |
| | Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | 96,30 | 100,00 | 103,84 | Sangat Tinggi | DISPERMASDES |

*Sumber : Dinas PERMASDES; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 4 target indikator berstatus sangat tinggi.

## 8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 18 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | TFR (Angka Kelahiran Total) | Dokumen; Tahunan; BPS | 2,20 | 2,16 | 98,18 | Sangat Tinggi | DINAS P3AP2KB |
| **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence Rate*) CPR | Persen, bulanan, Permendagri No 86 Tahun 2020 | 69,65 | 64,76 | 92,98 | Sangat Tinggi | DINAS P3AP2KB |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) | Persen, bulanan, Permendagri No 86 Tahun 2020 | 11,60 | 7,77 | 66,98 | Sedang | DINAS P3AP2KB |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | | **DINAS P3AP2KB** |
| | Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan | Persen, tahunan | 50,00 | 41,32 | 82,64 | Tinggi | DINAS P3AP2KB |

*Sumber : Dinas P3AP2KB; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 1 target indikator berstatus sedang.

## 9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 19 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **DISHUB** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | **DISHUB** |
| | Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 60,00 | 60,00 | Rendah | DISHUB |
| | Persentase lokasi titik parkir berizin | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 50,00 | 108,00 | 216,00 | Sangat Tinggi | DISHUB |
| | Persentase Perlengkapan jalan dalam rangka MRLL | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 43,30 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | Persentase Rekomendasi dokumen andalalin | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 90,00 | 81,67 | 90,74 | Tinggi | DISHUB |
| | Persentase pemenuhan alat uji terstandar | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | persentase jumlah rampcheck angkutan umum | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | persentase angkutan umum | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | persentase dokumen perencanaan angkutan | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | persentase jalan memiliki perlengkapan jalan | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 43,30 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISHUB |
| | persentase prasaranan jalan | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 84,00 | 80,52 | 95,86 | Sangat Tinggi | DISHUB |

*Sumber : Dinas Perhubungan; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 13 indikator diketahui bahwa 4 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 7 target indikator berstatus sangat rendah. Tujuh indikator yang sangat rendah perlu perhatian tersebut saat ini masih dalam proses implementasi/pelaksanaan.

## 10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 20 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota | Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KOMINFO |
| **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| | Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KOMINFO |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 64,58 | 64,58 | Rendah | DINAS KOMINFO |
| | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020 | 85,00 | 77,79 | 91,52 | Sangat Tinggi | DINAS KOMINFO |

*Sumber : Dinas KOMINFO; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus rendah. Satu indikator yang rendah perlu perhatian tersebut saat ini masih dalam proses implementasi/pelaksanaan.

## 11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 21 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 26,57 | 23,28 | 87,62 | Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase SDM Koperasi yang kompetensi | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 19,27 | 51,77 | 268,66 | Sangat Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Koperasi bermitra | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 4,94 | 33,10 | 670,04 | Sangat Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 4,73 | 15,15 | 320,30 | Sangat Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | **DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 2,63 | 10,00 | 380,23 | Sangat Tinggi | DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 6 indikator diketahui bahwa 5 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus tinggi.

## 12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 22 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| | Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi | Persen; Kumulatif; IKU OPD; | 85,70 | 71,43 | 83,35 | Tinggi | DINAS PMPTSP |
| **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| | Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen | Persen; Tahunan; IKU OPD; | 57,10 | 50,00 | 87,57 | Tinggi | DINAS PMPTSP |
| **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| | Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu | Persen; Tahunan; IKU OPD; | 100,00 | 91,92 | 91,92 | Sangat Tinggi | DINAS PMPTSP |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| | Persentase Kepatuhan Perusahaan | Persen; Kumlatif; IKU OPD; | 74,25 | 75,00 | 101,01 | Sangat Tinggi | DINAS PMPTSP |
| **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **DINAS PMPTSP** |
| | Persentase data layanan yang termanfaatkan | Persen; Kumlatif; IKU OPD; | 14,21 | 17,00 | 119,63 | Sangat Tinggi | DINAS PMPTSP |

*Sumber : Dinas PMPTSP; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 5 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi.

## 13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 23 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **DINAS PORAPAR** |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | **DINAS PORAPAR** |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS PORAPAR |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS PORAPAR |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | **DINAS PORAPAR** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Peningkatan prestasi olahraga | Medali; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS PORAPAR |
| | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 80,58 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS PORAPAR |

*Sumber : Dinas PORAPAR; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 4 target indikator berstatus sangat rendah. Empat indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah BIdang Statistik sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 24 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| | Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia | Persen; Tahunan; IKU OPD | 87,50 | 64,18 | 73,35 | Sedang | DINAS KOMINFO |

*Sumber : Dinas KOMINFO; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 1 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus sedang.

## 15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Persandian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 25 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | **DINAS KOMINFO** |
| | Tingkat keamanan Informasi | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 75,00 | 68,22 | 90,96 | Tinggi | DINAS KOMINFO |

*Sumber : Dinas KOMINFO; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 1 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus tinggi.

## 16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 26 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | | | |
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase tradisi yang dikembangkan | Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017 | 88,71 | 86,54 | 97,55 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase Seni dan Kesenian yang dibina | Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017 | 90,23 | 100,00 | 110,83 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan | Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017 | 84,35 | 87,50 | 103,73 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010, Permendagri 18 Tahun 2020 | 62,60 | 61,54 | 98,31 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Persentase museum yang terkelola | Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS DIKBUD |
| **PROGRAM PERFILMAN NASIONAL** | | | | | | | **DINAS DIKBUD** |
| | Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah | Permendikbud 30 Tahun 2019 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS DIKBUD |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 6 indikator diketahui bahwa 5 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 target indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah BIdang Perpustakaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 27 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **DINAS PERPUSIP** |
| **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **DINAS PERPUSIP** |
| | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 70,26 | 70,00 | 99,63 | Sangat Tinggi | DINAS PERPUSIP |
| | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 30,92 | 48,08 | 155,50 | Sangat Tinggi | DINAS PERPUSIP |

*Sumber : Dinas PERPUSIP; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 2 indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus sangat tinggi.

## 18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan BIdang Kearsipan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 28 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **DINAS PERPUSIP** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | **DINAS PERPUSIP** |
| | Peningkatan nilai LAKE LKD | Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019 | 76,00 | 54,10 | 71,18 | Sedang | DINAS PERPUSIP |
| | Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 85,00 | 29,16 | 34,31 | Sangat Rendah | DINAS PERPUSIP |

*Sumber : Dinas PERPUSIP; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 2 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus sedang, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

### 1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 29 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **DINAS PERIKANAN** |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | **DINAS PERIKANAN** |
| | Produksi Perikanan Tangkap (Kg.) | Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 2.064.580 | 50.978 | 2,47 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.) | Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 14.302.337 | 1.295.041 | 9,05 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | **DINAS PERIKANAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Produksi Perikanan Budidaya (kg) | Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 2.859.551 | 527.725 | 18,45 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| | Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) | Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 154.861.032 | 33.607.626 | 21,70 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **DINAS PERIKANAN** |
| | Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing* | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS PERIKANAN |
| **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | **DINAS PERIKANAN** |
| | Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan | Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 5.531.431 | 968.647 | 17,51 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |
| | Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) | Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 132.453.283 | 25.502.272 | 19,25 | Sangat Rendah | DINAS PERIKANAN |

*Sumber : Dinas Perikanan; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 7 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 6 indikator berstatus sangat rendah. Enam Indikator yang sangat rendah dan rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 30 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **DISPORAPAR** |
| **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | **DISPORAPAR** |
| | Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 95,33 | 95,00 | 99,65 | Sangat Tinggi | DISPORAPAR |
| | Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 85,83 | 117,42 | 136,81 | Sangat Tinggi | DISPORAPAR |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | **DISPORAPAR** |
| | Persentase DTW yang dipromosikan | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 94,33 | 95,00 | 100,71 | Sangat Tinggi | DISPORAPAR |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | **DISPORAPAR** |
| | Persentase SDM Pariwisata yang dibina | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 70,57 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISPORAPAR |

*Sumber : Dinas PORAPAR; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 4 indikator diketahui bahwa 3 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus rendah. Satu Indikator yang rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 31 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 92,00 | 92,00 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi | Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020 | 75,80 | 80,54 | 106,25 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Luas Lahan Pertanian Organik | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 3,00 | 7,80 | 260,00 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 66,00 | 65,00 | 98,48 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 16,66 | 19,45 | 116,75 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Produksi daging (kg) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 13.444.166 | 12.205.885 | 90,79 | Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Produksi Telur (kg.) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 7.672.875 | 10.736.318 | 139,93 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Produksi Susu (kg.) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 488.408 | 718.394 | 147,09 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Indeks pertanaman | Indeks; Tahunan; IKU OPD | 1,73 | 1,68 | 97,11 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha) | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 3,70 | 3,34 | 90,27 | Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Luas Lahan Sawah Lestari | Persen; Kumulatif; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase Ternak terkendali status kesehatannya | Persen ; Tahunan; IKU OPD | 5,60 | 5,60 | 99,96 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH | Persen ; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 2,00 | 2,00 | Sangat Rendah | DINAS KPTAN |
| **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Persen; Tahunan; IKU OPD | < 2,5 | < 2,5 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |
| | Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi | Persen; Tahunan; IKU OPD | 1,50 | 1,25 | 83,33 | Tinggi | DINAS KPTAN |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | **DINAS KPTAN** |
| | Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan | Persen; Tahunan; IKU OPD | 29,00 | 20,00 | 68,97 | Sedang | DINAS KPTAN |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut | Persen; Tahunan; IKU OPD | 2,57 | 3,01 | 117,12 | Sangat Tinggi | DINAS KPTAN |

*Sumber : Dinas KPTAN; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 17 indikator diketahui bahwa 12 target indikator berstatus sangat tinggi, 3 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 32 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase rekomendasi pemberian izin yang diterbitkan | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020 | 100,00 | 31,00 | 31,00 | Sangat Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Pasar dalam kondisi tidak rusak berat | Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern | 32,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase pasar e-ritribusi | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 64,00 | 64,00 | Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik | Persen; Tahun; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase koefisien harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting stabil tahunan | Persen; Tahunan: IKU OPD | 90,00 | 92,00 | 102,22 | Sangat Tinggi | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Laju Nilai Ekspor | Persen; Tahun; IKU OPD | 10,00 | 3,89 | 38,90 | Sangat Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase alat UTTP sesuai standar | Persentase; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 72,00 | 17,00 | 23,61 | Sangat Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |
| **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | **DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN** |
| | Persentase Laju Penggunaan PDN | Persen; Tahunan; IKU OPD | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 8 indikator diketahui bahwa 2 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus rendah, dan 5 indikator berstatus sangat rendah. Lima indikator yang sangat rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 33 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP | Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019 | 58,00 | 100,00 | 172,41 | Sangat Tinggi | DISPERINTRANSNAKER |
| **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISPERINTRANSNAKER |

*Sumber : Dinas Perintrasnaker; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 3 indikator diketahui bahwa 1 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indiaktor berstatus tinggi, dan 1 indikator berstatus rendah. Satu Indikator yang Rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 34 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | **DISPERINTRANSNAKER** |
| | Transmigran yang ditempatkan | Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | DISPERINTRANSNAKER |

*Sumber : Dinas Perinstransnaker; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 1 indikator diketahui bahwa target indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator berstatus rendah. Satu Indikator yang Rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 35 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**SEKRETARIAT DAERAH**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD | 72,53 | 88,00 | 121,33 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik) | Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD | 50,00 | 93,94 | 187,88 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan | Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018 | 100,00 | 64,00 | 64,00 | Rendah | |
| | Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasililtasi | Persen; Tahunan: Permendagri 12 Tahun 2014 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | Persentase kinerja perangkat daerah rumpun koordinasi perekonomian pembangunan nilai SAKIP B | Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD | 100,00 | 81,81 | 81,81 | Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik) | Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik) | Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD | 50,00 | 90,91 | 181,82 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tecapai BAIK | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi | Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi | Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD | 15,00 | 17,00 | 113,33 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DAERAH |

*Sumber : Sekretariat Daerah; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 2. SEKRETARIAT DPRD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 36 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**SEKRETARIAT DPRD RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **SEKRETARIAT DPRD** |
| **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | **SEKRETARIAT DPRD** |
| | Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD | Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Sangat Tinggi | SEKRETARIAT DPRD |

*Sumber : Sekretariat DPRD; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 12 indikator diketahui bahwa 10 target indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 1 target indikator berstatus rendah. Satu Indikator yang rendah tersebut saat ini masih dalam proses implementasi

## F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. PERENCANAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Perencanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 37 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**PERENCANAAN**
**RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| **PERENCANAAN** | | | | | | | **BAPPEDALITBANG** |
| **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | **BAPPEDALITBANG** |
| | Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BAPPEDALITBANG |
| | Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BAPPEDALITBANG |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | **BAPPEDALITBANG** |
| | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen; Tahunan; IKU PD | 92,19 | 91,77 | 99,54 | Sangat Tinggi | BAPPEDALITBANG |
| | Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun | Persen; Tahunan; IKU PD | 80,00 | 84,55 | 105,69 | Sangat Tinggi | BAPPEDALITBANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | bidang Perekonomian dan SDA | | | | | | |
| | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen; Tahunan; IKU PD | 93,60 | 79,27 | 84,69 | Tinggi | BAPPEDALITBANG |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 2. KEUANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Keuangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 38 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**KEUANGAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **KEUANGAN** | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | **BPKAD** |
| | Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD | Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| | Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D | Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD | Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | **BPKAD** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Pembinaan, pengendalian & pengawasan BMD | Persen; Tahunan | 80,00 | 13,33 | 16,67 | Sangat Rendah | |
| | Persentase Penatausahaan BMD | Persen; Tahunan | 100,00 | 16,67 | 16,67 | Sangat Rendah | |
| | Persentase Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan Pengamanan BMD | Persen; Tahunan | 100,00 | 16,67 | 16,67 | Sangat Rendah | |
| | Persentase Perencanaan Kebutuhan, Penetapan status, dan pemanfaatan BMD | Persen; Tahunan | 85,00 | 14,16 | 16,66 | Sangat Rendah | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **BAPENDA** |
| | Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah | Persen, Tahunan; IKU OPD | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BAPENDA |
| | Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah | Persen, Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BAPENDA |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah | Persen, Tahunan; IKU OPD | 55,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BAPENDA |

*Sumber : BPKAD; Bapenda; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 3. KEPEGAWAIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kepegawaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 39 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**KEPEGAWAIAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **BKPSDM** |
| **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | **BKPSDM** |
| | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan | Persen, Tahunan; IKU OPD | 0,05 | 0,02 | 40,00 | Sangat Rendah | BKPSDM |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Perrsentase jabatan manajerial terisi | Persen, Tahunan; IKU OPD | 96,50 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BKPSDM |
| | Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi | Persen, Tahunan; IKU OPD | 45,50 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BKPSDM |

*Sumber : BKPSDM; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 40 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **BKPSDM** |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **BKPSDM** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase PNS mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda | Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | BKPSDM |

*Sumber : BKPSDM; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 41 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **BAPPEDALITBANG** |
| **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **BAPPEDALITBANG** |
| | Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah | Persen; Tahunan; IKU OPD | 81,20 | 73,44 | 90,44 | Tinggi | BAPPEDALITBANG |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 20 indikator diketahui 8 indikator tersebut berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, dan 11 target indikator berstatus sangat rendah. Sebelas indikator yang sangat rendah dan perlu perhatian tersebut saat ini masih dalam proses implementasi

## G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. INSPEKTORAT DAERAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 42 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**INSPEKTORAT DAERAH RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **INSPEKTORAT** |
| **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **INSPEKTORAT** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | **INSPEKTORAT** |
| | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | Persen; Tahunan; IKU OPD | 92,50 | 92,80 | 100,32 | Sangat Tinggi | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | Persen; Tahunan; IKU OPD | 80,00 | 80,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| | Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel | Persen; Tahunan; IKU OPD | 15,00 | 15,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| | Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persen; Tahunan; IKU OPD | 80,00 | 80,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | **INSPEKTORAT** |
| | Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | INSPEKTORAT |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 5 indikator diketahui bahwa 4 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah dan perlu perhatian tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## H. UNSUR KEWILAYAHAN

### 1. KECAMATAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kecamatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 43 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**KECAMATAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN** |
| **KECAMATAN** | | | | | | | **KECAMATAN** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN ADIWERNA** |
| | IKM Kecamatan Adiwerna | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 79,87 | 81,00 | 101,41 | Sangat Tinggi | KECAMATAN ADIWERNA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN BALAPULANG** |
| | IKM Kecamatan Balapulang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 84,00 | 94,10 | 112,02 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BALAPULANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN BOJONG** |
| | IKM Kecamatan Bojong | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 90,83 | 81,70 | 89,95 | Tinggi | KECAMATAN BOJONG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN BUMIJAWA** |
| | IKM Kecamatan Bumijawa | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 87,50 | 88,59 | 101,25 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BUMIJAWA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHTURI** |
| | IKM Kecamatan Dukuhturi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 80,44 | 89,20 | 110,89 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHTURI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHWARU** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | IKM Kecamatan Dukuhwaru | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 84,00 | 88,00 | 104,76 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHWARU |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN JATINEGARA** |
| | IKM Kecamatan Jatinegara | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 85,45 | 85,39 | 99,93 | Sangat Tinggi | KECAMATAN JATINEGARA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN KEDUNGABNTENG** |
| | IKM Kecamatan Kedungbanteng | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 85,00 | 87,87 | 103,38 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN KRAMAT** |
| | IKM Kecamatan Kramat | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 83,85 | 83,71 | 99,83 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KRAMAT |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN LEBAKSIU** |
| | IKM Kecamatan Lebaksiu | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 81,25 | 87,66 | 107,89 | Sangat Tinggi | KECAMATAN LEBAKSIU |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN MARGASARI** |
| | IKM Kecamatan Margasari | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 82,45 | 83,17 | 100,87 | Sangat Tinggi | KECAMATAN MARGASARI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN PAGERBARANG** |
| | IKM Kecamatan Pagerbarang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 84,00 | 82,13 | 97,77 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PAGERBARANG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN PANGKAH** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | IKM Kecamatan Pangkah | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 89,64 | 82,13 | 91,62 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PANGKAH |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN SLAWI** |
| | IKM Kecamatan Slawi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 85,71 | 89,44 | 104,35 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SLAWI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN SURADADI** |
| | IKM Kecamatan Suradadi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 81,26 | 89,86 | 110,58 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SURADADI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN TALANG** |
| | IKM Kecamatan Talang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 89,50 | 100,00 | 111,73 | Sangat Tinggi | KECAMATAN TALANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN TARUB** |
| | IKM Kecamatan Tarub | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 86,05 | 79,39 | 92,26 | Sangat Tinggi | KECAMATAN TARUB |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **KECAMATAN WARUREJA** |
| | IKM Kecamatan Warureja | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017 | 81,00 | 25,00 | 30,86 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN ADIWERNA** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN ADIWERNA |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN BALAPULANG** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN BALAPULANG |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN BOJONG** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN BOJONG |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN BUMIJAWA** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN BUMIJAWA |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHTURI** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN DUKUHTURI |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHWARU** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN DUKUHWARU |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN JATINEGARA** |
| | Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN JATINEGARA |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN KEDUNGABNTENG** |
| | Persentase LKD yang terfasilitasi kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN KRAMAT** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan kramat | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN KRAMAT |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN LEBAKSIU** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN LEBAKSIU |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN MARGASARI** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN MARGASARI |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN PAGERBARANG** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN PAGERBARANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN PANGKAH** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN PANGKAH |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN SLAWI** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN SLAWI |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN SURADADI** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN SURADADI |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN TALANG** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN TALANG |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN TARUB** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 23,33 | 34,99 | Sangat Rendah | KECAMATAN TARUB |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **KECAMATAN WARUREJA** |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 70,00 | 20,00 | 28,57 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN ADIWERNA** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN ADIWERNA |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BALAPULANG** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BALAPULANG |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BOJONG** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BOJONG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BUMIJAWA** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BUMIJAWA |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHTURI** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHTURI |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHWARU** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHWARU |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN JATINEGARA** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN JATINEGARA |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN KEDUNGABNTENG** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN KRAMAT** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KRAMAT |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN LEBAKSIU** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN LEBAKSIU |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN MARGASARI** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN MARGASARI |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN PAGERBARANG** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PAGERBARANG |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN PANGKAH** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PANGKAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN SLAWI** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SLAWI |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN SURADADI** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SURADADI |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN TALANG** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN TARUB** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN TARUB |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN WARUREJA** |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 40,00 | 47,06 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |
| | | | | | | | |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN ADIWERNA** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 90,30 | 100,00 | 110,74 | Sangat Tinggi | KECAMATAN ADIWERNA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BALAPULANG** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BALAPULANG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BOJONG** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BOJONG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN BUMIJAWA** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BUMIJAWA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHTURI** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHTURI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHWARU** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHWARU |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN JATINEGARA** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN JATINEGARA |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN KEDUNGABNTENG** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 100,00 | 117,65 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN KRAMAT** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KRAMAT |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN LEBAKSIU** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN LEBAKSIU |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN MARGASARI** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN MARGASARI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN PAGERBARANG** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PAGERBARANG |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN PANGKAH** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PANGKAH |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN SLAWI** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SLAWI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN SURADADI** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SURADADI |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN TALANG** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN TARUB** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN TARUB |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **KECAMATAN WARUREJA** |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |
| | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN ADIWERNA** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 74,00 | 100,00 | 135,14 | Sangat Tinggi | KECAMATAN ADIWERNA |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN BALAPULANG** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 60,00 | 50,00 | 83,33 | Tinggi | KECAMATAN BALAPULANG |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN BOJONG** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 76,00 | 105,56 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BOJONG |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN BUMIJAWA** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 100,00 | 153,85 | Sangat Tinggi | KECAMATAN BUMIJAWA |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHTURI** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 100,00 | 138,89 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHTURI |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN DUKUHWARU** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 78,80 | 90,00 | 114,21 | Sangat Tinggi | KECAMATAN DUKUHWARU |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN JATINEGARA** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 75,00 | 83,72 | 111,63 | Sangat Tinggi | KECAMATAN JATINEGARA |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN KEDUNGABNTENG** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KEDUNGABNTENG |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN KRAMAT** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 89,00 | 136,92 | Sangat Tinggi | KECAMATAN KRAMAT |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN LEBAKSIU** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 100,00 | 138,89 | Sangat Tinggi | KECAMATAN LEBAKSIU |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN MARGASARI** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 78,20 | 78,55 | 100,45 | Sangat Tinggi | KECAMATAN MARGASARI |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN PAGERBARANG** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 84,00 | 160,18 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PAGERBARANG |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN PANGKAH** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 91,00 | 89,00 | 97,80 | Sangat Tinggi | KECAMATAN PANGKAH |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN SLAWI** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SLAWI |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN SURADADI** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 68,00 | 100,00 | 147,06 | Sangat Tinggi | KECAMATAN SURADADI |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN TALANG** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 31,00 | 94,74 | 305,61 | Sangat Tinggi | KECAMATAN TALANG |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN TARUB** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 1,94 | 3,70 | Sangat Rendah | KECAMATAN TARUB |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **KECAMATAN WARUREJA** |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 80,00 | 12,04 | 15,05 | Sangat Rendah | KECAMATAN WARUREJA |

*Sumber : 18 Kecamatan; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 90 indikator diketahui bahwa 65 target indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, dan 23 indikator berstatus sangat rendah. Dua Puluh Tiga indikator yang sangat rendah dalam proses implementasi.

## I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

### 1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. 44 CAPAIAN KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)**
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I**

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| | Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 92,00 | 93,66 | 101,80 | Sangat Tinggi | BADAN KESBANGPOL |
| **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| | Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BADAN KESBANGPOL |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang menyelengarakan pendidikan politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 95,00 | 72,60 | 76,42 | Tinggi | BADAN KESBANGPOL |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| | Persentase Ormas yang Terbina | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BADAN KESBANGPOL |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |
| | Persentase Konflik yang tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BADAN KESBANGPOL |
| **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | **BADAN KESBANGPOL** |

| Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan; Sifat Data; Referensi | Realisasi Capaian Kinerja 2025 | | Presentase Capaian | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi Semester I | | | |
| | Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BADAN KESBANGPOL |

*Sumber : Badan KESBANGPOL; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dari sebanyak 6 indikator diketahui bahwa 5 target indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus sangat rendah. Satu indikator yang sangat rendah dan perlu perhatian tersebut saat ini masih dalam proses implementasi.

## 2.4 Evaluasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan aspek dan indikator kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan tingkat sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada sebagai berikut:

**TABEL 2. 45**
**EVALUASI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 SEMESTER I**

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | | | | | | |
| **A** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen; Tahunan | 87,53 | 77,60 | 88,66 | Sekretariat Daerah |
| 2. | Opini BPK | Opini; Tahunan | WTP | WTP | 100,00 | BPKAD |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi | Persen; Tahunan | 5,00–5,60 | 5,45 | 109,00 | Sekretariat Daerah |
| 4. | Kontribusi PDRB Sektor Pertanian | Persen; Tahunan | 2,33 | 0,00 | 0,00 | Dinas KP & Tan |
| 5. | Kontribusi PDRB Sektor Industri | Persen; Tahunan | 4,65 | 0,00 | 0,00 | Dinas PERINTRANSNAKER |
| 6. | Rasio PAD terhadap Pendapatan | Persen; Tahunan | 20,20 | 0,00 | 0,00 | BAPENDA |
| 7. | Laju PDRB Sektor Perdagangan (kontribusi) | Persen; Tahunan | 3,15 | 4,99 | 158,41 | Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan |
| 8. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai; Tahunan | 71,78 | 71,70 | 99,89 | Sekretariat Daerah |
| 9. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin ; Tahunan | 89,12 | 88,64 | 99,46 | Sekretariat Daerah |
| 10. | Indeks Pendidikan | Tahun; Tahunan | 0,62 | 0,61 | 98,39 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 11. | Indeks Kesehatan | Tahun; Tahunan | 0,84 | 0,84 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 12. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Poin ; Tahunan | 0,31 | 0,00 | 0,00 | Dinas P3AP2KB |
| 13. | Persentase Penduduk Miskin | Persen; Tahunan | 6,40–6,70 | 6,81 | 93,59 | Dinas Sosial |
| 14. | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Poin; Tahunan | 0,78 | 0,97 | 124,36 | Dinas Sosial |
| 15. | Indeks Keparahan Kemiskinan | Poin; Tahunan | 0,15 | 0,22 | 146,67 | Dinas Sosial |
| 16. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen; Tahunan | 8,30–7,75 | 7,53 | 102,84 | Dinas PERINTRANSNAKER |
| | | | | | | |
| **B** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | |
| 1. | Jumlah Anak Usia 5 (lima) Tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbud | 100,00 | 77,12 | 77,12 | DIKBUD |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ristek 311/2022 | | | | |
| 2. | Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 100,00 | 98,47 | 98,47 | DIKBUD |
| 3. | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 100,00 | 33,34 | 33,34 | DIKBUD |
| 4. | Rata-rata Nilai Kelulusan SD | Nilai; Tahunan; PP 4/2022 | 80,00 | 79,06 | 98,83 | DIKBUD |
| 5. | Rata-rata Nilai Kelulusan SMP | Nilai; Tahunan; PP 4/2022 | 82,00 | 83,55 | 101,89 | DIKBUD |
| 6. | Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 68,00 | 76,01 | 111,78 | DIKBUD |
| 7. | Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 73,00 | 77,65 | 106,37 | DIKBUD |
| 8. | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 47,00 | 64,98 | 138,26 | DIKBUD |
| 9. | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbud ristek 22/2022, Kepmendikbud ristek 311/2022 | 50,00 | 72,25 | 144,50 | DIKBUD |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 71,80 | 74,32 | 103,51 | DIKBUD |
| 11. | Indeks Iklim Keamanan SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,30 | 71,15 | 105,72 | DIKBUD |
| 12. | Indeks Iklim Kebinekaan SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 69,00 | 72,62 | 105,25 | DIKBUD |
| 13. | Indeks Iklim Inklusivitas SD | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 55,20 | 54,21 | 98,21 | DIKBUD |
| 14. | Indeks Iklim Keamanan SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,24 | 69,15 | 102,84 | DIKBUD |
| 15. | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 67,00 | 73,01 | 108,97 | DIKBUD |
| 16. | Indeks Iklim Inklusivitas SMP | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 55,70 | 57,17 | 102,64 | DIKBUD |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Persentase Muatan Lokal dalam KBM | Persen; Tahunan; Permendikbud 79/2014 | 100,00 | 5,26 | 5,26 | DIKBUD |
| 18. | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) | Tahunan, Persen, Permendikbud ristek 32 Tahun 2022 | 73,00 | 82,65 | 113,22 | DIKBUD |
| 19. | Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar | Tahunan, Persen, Permendikbud ristek 32 Tahun 2022 | 51,50 | 37,23 | 72,29 | DIKBUD |
| 20. | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN | Tahunan, Persen, Permendikbud ristek 32 Tahun 2022 | 75,00 | 64,13 | 85,51 | DIKBUD |
| 21. | Persentase Satuan Pendidikan Berizin | Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DIKBUD |
| 22. | Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah | Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018 | 100,00 | 65,00 | 65,00 | DIKBUD |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN** | | | | | |
| 23. | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | Angka; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 0,10 | 0,10 | 98,99 | DINAS KESEHATAN |
| 24. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 69,10 | 69,10 | DINAS KESEHATAN |
| 25. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 71,40 | 71,40 | DINAS KESEHATAN |
| 26. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 74,60 | 74,60 | DINAS KESEHATAN |
| 27. | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 110,50 | 110,50 | DINAS KESEHATAN |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 475,20 | 475,20 | DINAS KESEHATAN |
| 29. | Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 181,40 | 181,40 | DINAS KESEHATAN |
| 30. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 169,80 | 169,80 | DINAS KESEHATAN |
| 31. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 129,40 | 129,40 | DINAS KESEHATAN |
| 32. | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 125,90 | 125,90 | DINAS KESEHATAN |
| 33. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 102,20 | 102,20 | DINAS KESEHATAN |
| 34. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 235,80 | 235,80 | DINAS KESEHATAN |
| 35. | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS KESEHATAN |
| 36. | Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS KESEHATAN |
| 37. | Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan | Persen; Tahunan; IKU OPD | 100,00 | 477,00 | 477,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis | Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 | 89,70 | 89,70 | 100,00 | DINAS KESEHATAN |
| 39. | Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman | Persen; Tahunan; IKU OPD | 59,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 40. | Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Persen, tahunan, indikator kinerja program promosi kesehatan | 86,00 | 95,00 | 110,47 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| 41. | Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten | Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 650/755 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 8.968 Ha; | 64,39 | 62,07 | 96,40 | DPUPR |
| 42. | Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak | Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 100,00 | 80,68 | 80,68 | DPUPR |
| 43. | Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman | Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM | 35,72 | 34,54 | 96,70 | DPUPR |
| 44. | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan | Persen, Kumulatif, UU No. 18 Tahun 2008 | 86,00 | 84,21 | 97,92 | DPUPR |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik Layak | Persen; Kumulatif; Per mendagri 18 Tahun 2020, SPM | 100,00 | 93,91 | 93,91 | DPUPR |
| 46. | Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik Aman | Persen; Kumulatif; Per mendagri 18 Tahun 2020, SPM | 1,37 | 1,83 | 133,58 | DPUPR |
| 47. | Proporsi Ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten | Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal. | 68,00 | 0,00 | 0,00 | DPUPR |
| 48. | Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan | Persen; Tahunan; Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dibagi Jumlah Keseluruhan Permohonan (PBG) | 29,20 | 8,40 | 28,77 | DPUPR |
| 49. | Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persen; Tahunan; Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) non rumah tinggal dibagi jumlah keseluruhan pemohon SLF | 29,20 | 0,00 | 0,00 | DPUPR |
| 50. | Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | Persen; Kumulatif; Jumlah panjang jalan perkotaan yang tertata dibagi total panjang jalan dikawasan perkotaan yang seharusnya tertata | 100,00 | 91,50 | 91,50 | DPUPR |
| 51. | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap | Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal | 88,00 | 87,51 | 99,44 | DPUPR |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap | Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit | 93,00 | 92,17 | 99,11 | DPUPR |
| 53. | Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan | Persen; Tahunan; Jumlah ITR yang sesuai dengan Dokumen RTRW dibagi jumlah total Pengajuan ITR pada tahun berkenaan | 90,00 | 87,19 | 96,88 | DPUPR |
| 54. | Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih | Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019 | 80,00 | 100,00 | 125,00 | DPUPR |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | |
| 55. | Persentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | Persen; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PERKIM |
| 56. | Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin | Persentase; Kumulatif | 100,00 | 125,00 | 125,00 | DINAS PERKIM |
| 57. | Persentase ketersediaan PSU perumahan | Persentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal | 86,30 | 95,19 | 110,30 | DINAS PERKIM |
| 58. | Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan | Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH | 52,28 | 64,11 | 122,63 | DINAS PERKIM |
| 59. | Persentase penanganan perumahan tidak layak huni | Persentase | 25,36 | 24,82 | 97,87 | DINAS PERKIM |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Persentase gangguan trantibun yang tertangani | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SATPOL PP |
| 61. | Persentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 89,89 | 89,89 | SATPOL PP |
| 62. | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SATPOL PP |
| 63. | Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 45,75 | 45,75 | BPBD |
| 64. | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 65. | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPBD |
| 66. | Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun | Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | |
| 67. | Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 99,40 | 100,00 | 100,60 | DINAS SOSIAL |
| 68. | Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS SOSIAL |
| 69. | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti . | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS SOSIAL |
| 70. | Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial. | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS SOSIAL |
| 71. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 89,14 | 89,14 | DINAS SOSIAL |
| 72. | Persentase pengelolaan taman makam pahlawan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja | Persen, Tahun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 74. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen, Tahun | 42.410 | 42.410 | 100,00 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 75. | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi | Persen, Bulan | 6,40 | 6,70 | 104,69 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 76. | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah | Persen, Tahunan | 72,00 | 40,00 | 55,56 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 77. | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen, Bulan | 9,53 | 8,48 | 88,98 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | |
| 78. | Persentase ARG pada belanja operasi APBD | Persen, Tahunan, APBD | 8,00 | 4,63 | 57,88 | DINAS P3AP2KB |
| 79. | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen, Tahunan, Data SIMPONI | 7,25 | 1,77 | 24,41 | DINAS P3AP2KB |
| 80. | Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling | Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan | 0,07 | 0,09 | 128,57 | DINAS P3AP2KB |
| 81. | Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia | Persen, tahunan, laporan SIGA | 72,00 | 70,00 | 97,22 | DINAS P3AP2KB |
| 82. | Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak | Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA | 67,00 | 70,00 | 104,48 | DINAS P3AP2KB |
| 83. | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA | 0,011 | 0,002 | 18,18 | DINAS P3AP2KB |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | |
| 84. | Persentase penguatan cadangan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020 | 30,00 | 17,48 | 58,27 | DINAS KP & TAN |
| 85. | Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 | 60,00 | 52,00 | 86,67 | DINAS KP & TAN |
| 86. | Persentase penanganan daerah rawan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | DINAS KP & TAN |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan /OT.140/12/2 010 | 83,00 | 92,86 | 111,88 | DINAS KP & TAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | |
| 88. | Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat | Persen Kumulatif | 100,00 | 93,13 | 93,13 | DINAS PERKIM |
| 89. | Persentase implementasi redistribusi tanah | Persen; Kumulatif | 100,00 | 50,00 | 50,00 | DINAS PERKIM |
| 90. | Persentase Tanah yang tertata | Persen, Kumulatfif | 100,00 | 32,00 | 32,00 | DINAS PERKIM |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | |
| 91. | Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup | Persen; Kumulatif | 36,36 | 36,36 | 100,00 | DINAS LH |
| 92. | Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Persen, Kumulatif | 19,45 | 18,60 | 95,63 | DINAS LH |
| 93. | Persentase Peningkatan Status mutu air sungai | Persen, Tahunan | 18,51 | 18,51 | 100,00 | DINAS LH |
| 94. | Persentase Luasan areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal | Persen, Tahunan | 24,50 | 0,00 | 0,00 | DINAS LH |
| 95. | Persentase Progres penyusunan dokumen rincian teknis | Persen, Kumulatif | 81,30 | 0,00 | 0,00 | DINAS LH |
| 96. | Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Persen, Tahunan | 70,00 | 71,00 | 101,43 | DINAS LH |
| 97. | Persentase Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH | Persen, Kumulatif | 16,67 | 0,00 | 0,00 | DINAS LH |
| 98. | Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup | Persen, Kumulatif | 20,00 | 20,00 | 100,00 | DINAS LH |
| 99. | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat | Persen, Tahunan | 38,46 | 44,79 | 116,46 | DINAS LH |
| 100. | Persentase Pengaduan Lingkungan yang Dilakukan penanganan | Persen; Tahunan; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | DINAS LH |
| 101. | Persentase sampah yang tertangani | Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008 | 70,00 | 50,27 | 71,81 | DINAS LH |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | Persentase sampah yang terkurangi | Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008 | 25,00 | 17,94 | 71,76 | DINAS LH |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | |
| 103. | Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga | Persen; Tahunan; IKU OPD | 98,00 | 98,81 | 100,83 | DINAS DUKCAPIL |
| 104. | Perekaman KTP elektronik | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 99,00 | 100,00 | 101,01 | DINAS DUKCAPIL |
| 105. | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 50,00 | 34,70 | 69,40 | DINAS DUKCAPIL |
| 106. | Persentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS DUKCAPIL |
| 107. | Persentase Kepemilikan akta kelahiran | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 98,00 | 96,85 | 98,83 | DINAS DUKCAPIL |
| 108. | Persentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman | Persen; Tahunan; IKU OPD | 75,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS DUKCAPIL |
| 109. | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | DINAS DUKCAPIL |
| | | | | | | |
| . | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | |
| 110. | Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PERMASDES |
| 111. | Persentase Desa yang melakukan kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD | 82,78 | 100,00 | 120,80 | DINAS PERMASDES |
| 112. | Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa | Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri | 96,30 | 100,00 | 103,84 | DINAS PERMASDES |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 Tahun 2020 tentang LPPD | | | | |
| 113. | Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa | Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | 96,30 | 100,00 | 103,84 | DINAS PERMASDES |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | |
| 114. | TFR (Angka kelahiran Total) | Dokumen; Tahunan; BPS | 2,35 | 2,16 | 91,91 | DINAS P3AP2KB |
| 115. | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence Rate*) CPR | Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab | 70,00 | 64,76 | 92,51 | DINAS P3AP2KB |
| 116. | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) | Persen; Tahun | 11,62 | 7,77 | 66,87 | DINAS P3AP2KB |
| 117. | Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga | Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab | 21,90 | 41,32 | 188,68 | DINAS P3AP2KB |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | |
| 118. | Rasio konektivitas | Persen; Tahun/ Triwulan; Data | 0,79 | 0,00 | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 119. | Kinerja lalu lintas (V/C Rasio) | Rasio, Tahun, Data | 0,45 | 0,00 | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 120. | Rasio keselamatan | Rasio, Tahun, Data | 1,96 | 0,00 | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| 121. | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota | Persen; Tahunan | 72,69 | 80,00 | 110,06 | DINAS KOMINFO |
| 122. | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen; Tahunan | 65,06 | 77,79 | 119,57 | DINAS KOMINFO |
| 123. | Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan | Persen; Tahunan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS KOMINFO |
| 124. | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo | Persen; Tahunan | 32,06 | 64,58 | 201,43 | DINAS KOMINFO |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | Persentase Koperasi Berpredikat minimal "CUKUP SEHAT" | Persen; Tahun | 19,00 | 23,28 | 122,53 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| 126. | Persentase SDM Koperasi yang berkompeten | Persen; Tahun | 12,00 | 51,77 | 431,42 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| 127. | Persentase Koperasi Bermitra | Persen; Tahun | 4,00 | 5,00 | 125,00 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| 128. | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | Persen; Tahun | 2,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| 129. | Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi | Persen; Tahun | 11,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | |
| 130. | Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi | Persen; Tahunan | 85,70 | 71,43 | 83,35 | DINAS PMPTSP |
| 131. | Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen | Persen; Tahunan | 57,10 | 50,00 | 87,57 | DINAS PMPTSP |
| 132. | Persentase permohonan pelayanan yang diselesaikan tepat waktu | Nilai, Tahunan | 100,00 | 91,92 | 91,92 | DINAS PMPTSP |
| 133. | Persentase Kepatuhan Perusahaan | Persen; Tahunan | 74,25 | 75,00 | 101,01 | DINAS PMPTSP |
| 134. | Persentase Data Layanan yang tesajikan | Persen; Tahunan | 14,21 | 17,00 | 119,63 | DINAS PMPTSP |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | |
| 135. | Persentase peningkatan penyadaran pemuda | Persen; Tahunan | 0,86 | 0,00 | 0,00 | DINAS PORAPAR |
| 136. | Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina | Persen; Tahunan | 19,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PORAPAR |
| 137. | Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif | Persen; Tahunan | 70,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PORAPAR |
| 138. | Jumlah Atlit yang berprestasi | Angka; Tahunan | 80,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PORAPAR |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | |
| 139. | Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia | Persen; Tahunan | 87,50 | 64,18 | 73,35 | DINAS KOMINFO |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | |
| 140. | Tingkat keamanan Informasi | Persen; Tahunan | 52,15 | 68,22 | 130,81 | DINAS KOMINFO |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. | Persentase Tradisi yang Dikembangkan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 88,71 | 86,54 | 97,55 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| 142. | Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 90,23 | 100,00 | 110,83 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| 143. | Persentase Sejarah yang Terdokumentasikan | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 84,35 | 87,50 | 103,73 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| 144. | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020 | 62,60 | 61,54 | 98,31 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| 145. | Persentase museum yang terkelola | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| 146. | Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah | Permendikbud 30 Tahun 2019 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | |
| 147. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 67,00 | 70,00 | 104,48 | DINAS PERPUSIP |
| 148. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 49,50 | 48,08 | 97,13 | DINAS PERPUSIP |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | |
| 149. | Peningkatan nilai LAKE LKD | Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019 | 79,00 | 54,10 | 68,48 | DINAS PERPUSIP |
| 150. | Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup | Persen; Kumulatif | 24,00 | 29,16 | 121,50 | DINAS PERPUSIP |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| 151. | Produksi Perikanan Tangkap (Kg.) | Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 2.064.580 | 50.978 | 2,47 | DINAS PERIKANAN |
| 152. | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.) | Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 14.020.525 | 1.295.041 | 9,24 | DINAS PERIKANAN |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. | Produksi Perikanan Budidaya (kg) | Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 2.859.551 | 527.725 | 18,45 | DINAS PERIKANAN |
| 154. | Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) | Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 154.861.032 | 33.607.626 | 21,70 | DINAS PERIKANAN |
| 155. | Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) yang Bebas dari *Destructive Fishing* | Persen; Tahun | 100 | 100 | 100,00 | DINAS PERIKANAN |
| 156.. | Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan | Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 5.503.329 | 968.647 | 17,60 | DINAS PERIKANAN |
| 157. | Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) | Ribu Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng | 131.780.347 | 25.502.272 | 19,35 | DINAS PERIKANAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | |
| 158. | Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan | Persen; Tahunan | 93,33 | 95,00 | 101,79 | DINAS PORAPAR |
| 159. | Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | Unit; Komlatif | 153,00 | 117,42 | 76,75 | DINAS PORAPAR |
| 160. | Persentase DTW yang dipromosikan | Persen; Tahunan | 93,33 | 95,00 | 101,79 | DINAS PORAPAR |
| 161. | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi | Orang; Tahunan | 11,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PORAPAR |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | |
| 162. | Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) | Persen; Tahun | 89,93 | 92,00 | 102,30 | DINAS KP & TAN |
| 163. | Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi | Persen; Tahun, | 67,00 | 80,54 | 120,21 | DINAS KP & TAN |
| 164. | Luas Lahan Pertanian Organik | Persen; Tahun | 2,00 | 7,80 | 390,00 | DINAS KP & TAN |
| 165. | Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen | Persen; Tahun | 63,24 | 65,00 | 102,78 | DINAS KP & TAN |
| 166. | Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen | Persen; Tahun | 19,45 | 19,45 | 100,00 | DINAS KP & TAN |
| 167. | Produksi daging (kg) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 11.626.673 | 12.205.885 | 104,98 | DINAS PERIKANAN |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | Produksi Telur (kg.) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 11.086.547 | 10.736.318 | 96,84 | DINAS PERIKANAN |
| 169. | Produksi Susu (kg.) | Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng | 622.986 | 718.394 | 115,31 | DINAS PERIKANAN |
| 170. | Indeks pertanaman | Indeks; IKU OPD | 1,66 | 1,68 | 101,20 | DINAS KP & TAN |
| 171. | Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha) | Km/ha; Tahun | 3,70 | 3,34 | 90,27 | DINAS KP & TAN |
| 172. | Persentase Luas Lahan Sawah Lestari | Persen; Tahun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS KP & TAN |
| 173. | Persentase Ternak terkendali status kesehatannya | Persen ; Tahunan:; | 5,60 | 5,60 | 100,00 | DINAS PERIKANAN |
| 174. | Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH (Jenis). | Jenis ; Tahunan | 2,00 | 2,00 | 100,00 | DINAS PERIKANAN |
| 175. | Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Persen; Tahunan; IKU OPD | < 2,5 | < 0,63 | 25,20 | DINAS KP & TAN |
| 176. | Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi | Persen; Tahunan; IKU OPD | 2,00 | 1,25 | 62,50 | DINAS KP & TAN |
| 177. | Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya. | Kelompok/Tahunan/Renstra Disnak Provinsi Jateng | 2,00 | 2,00 | 100,00 | DINAS PERIKANAN |
| 178. | Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan | Persen; Tahunan | 20,00 | 20,00 | 100,00 | DINAS KP & TAN |
| 179. | Pertumbuhan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes) | Persen; Tahun | 11,00 | 13,00 | 118,18 | DINAS KP & TAN |
| 180. | Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut | Persen; Tahun | 2,57 | 3,01 | 117,12 | DINAS KP & TAN |
| 181. | Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya | Persen; Tahun | 1,93 | 1,94 | 100,52 | DINAS KP & TAN |
| 182. | Jumlah Gapoktan yang bermitra dengan BUMP | Gapoktan; Tahun | 5,00 | 5,00 | 100,00 | DINAS KP & TAN |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | |
| 183. | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | Persen; Tahun | 2,00 | 0,00 | 0,00 | DIN KOP UKM DAG |
| 184. | Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi | Persen; Tahun | 11,00 | 0,00 | 0,00 | DIN KOP UKM DAG |
| 185. | Persentase Rekomendasi Pemberian Izin yang diterbitkan | Persen; Tahun | 100,00 | 31,00 | 31,00 | DIN KOP UKM DAG |
| 186. | Persentase pasar dalam kondisi tidak rusak, tidak rusak berat | Persen; Tahun | 8,00 | 0,00 | 0,00 | DIN KOP UKM DAG |
| 187. | Persentase Pasar E-Retribusi | Persen; Tahun | 100,00 | 84,62 | 84,62 | DIN KOP UKM DAG |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. | Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik | Persen; Tahun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DIN KOP UKM DAG |
| 189. | Persentase koefisien Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil Tahunan | Persen; Tahun | 85,00 | 92,00 | 108,24 | DIN KOP UKM DAG |
| 190. | Persentase Laju Nilai Ekspor | Persen; Tahun | 10,00 | 3,89 | 38,90 | DIN KOP UKM DAG |
| 191. | Persentase Alat UTTP sesuai standar | Persen; Tahun | 72,00 | 17,00 | 23,61 | DIN KOP UKM DAG |
| 192. | Persentase Laju Penjualan PDN | Persen; Tahun | 10,00 | 0,00 | 0,00 | DIN KOP UKM DAG |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| 193. | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019 | 58,00 | 100,00 | 172,41 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 194. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen, Bulan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| 195. | Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas) | Persen, Bulan | 85,00 | 49,00 | 57,65 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | |
| 196. | Transmigran yang ditempatkan sesuai Kuota dari Provinsi | Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PERINTRANSNAKER |
| | | | | | | |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| 197. | Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik) | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 82,06 | 88,00 | 107,24 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 198. | Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik) | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 199. | Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik) | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 100,00 | 93,94 | 93,94 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 200. | Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 64,00 | 64,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 201. | Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasililtasi | Persen; Tahunan: Permendagri 12/2014 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202. | Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik) | Nilai, Tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015 | 81,97 | 81,81 | 99,80 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 203. | Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik) | Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017 | 81,93 | 100,00 | 122,06 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 204. | Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik) | Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020 | 90,92 | 90,91 | 99,99 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 205. | Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tecapai BAIK | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 206. | Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi | Level; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 2,00 | 3,00 | 150,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 207. | Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi | Level: Tahunan | 17,00 | 17,00 | 100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | |
| 208. | Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD | Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| | **PERENCANAAN** | | | | | |
| 209. | Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BAPPEDALITBANG |
| 210. | Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | BAPPEDALITBANG |
| 211. | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persen; Tahunan; IKU PD | 92,19 | 91,98 | 99,77 | BAPPEDALITBANG |
| 212. | Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA | Persen; Tahunan; IKU PD | 80,00 | 89,65 | 112,06 | BAPPEDALITBANG |
| 213. | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen; Tahunan; IKU PD | 93,60 | 82,21 | 87,83 | BAPPEDALITBANG |
| | | | | | | |
| | **KEUANGAN** | | | | | |
| 214. | Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD | Persen; Tahunan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPKAD |
| 215. | Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D | Persen; Tahunan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPKAD |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216. | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD | Persen; Tahunan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BPKAD |
| 217. | Persentase Pembinaan, Pengendalian & Pengawasan BMD | Persen; Tahunan | 80,00 | 13,33 | 16,67 | BPKAD |
| 218. | Persentase Penatausahaan BMD | Persen; Tahunan | 100,00 | 16,67 | 16,67 | BPKAD |
| 219. | Persentase Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pengamanan BMD | Persen; Tahunan | 100,00 | 16,67 | 16,67 | BPKAD |
| 220. | Persentase Perencanaan Kebutuhan, Penetapan Status, dan Pemanfaatan BMD | Persen; Tahunan | 85,00 | 14,16 | 16,66 | BPKAD |
| 221. | Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah | Persen, Tahunan | 10,00 | 0,00 | 0,00 | BAPENDA |
| 222. | Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah | Persen, Tahunan | 100,00 | 0,00 | 0,00 | BAPENDA |
| 223. | Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah | Persen, Tahunan | 55,00 | 0,00 | 0,00 | BAPENDA |
| | | | | | | |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | |
| 224. | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan | Persen, Tahunan | 0,04 | 0,02 | 50,00 | BKPSDM |
| 225. | Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya | Persen, Tahunan | 89,11 | 84,80 | 95,16 | BKPSDM |
| 226. | Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya | Persen, Tahunan | 100,00 | 34,06 | 34,06 | BKPSDM |
| 227. | Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) | Persen, Tahunan | 100,00 | 0,00 | 0,00 | BKPSDM |
| 228. | Rasio pegawai fungsional (%) | Persen, Tahunan | 18,53 | 23,49 | 126,77 | BKPSDM |
| 229. | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persen, Tahunan | 67,54 | 84,82 | 125,58 | BKPSDM |
| | | | | | | |
| | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | |
| 230. | Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20/jam | Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017 | 31,97 | 80,51 | 251,83 | BKPSDM |
| 231. | Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan | Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017 | 53,72 | 88,87 | 165,43 | BKPSDM |
| | | | | | | |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | |
| 232. | Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah | Persen; Tahunan; IKU OPD | 81,20 | 73,44 | 90,44 | BAPPEDALITBANG |
| | | | | | | |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233. | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | Persen; Tahunan: | 92,50 | 92,80 | 100,32 | INSPEKTORAT |
| 234. | Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | Persen; Tahunan: | 80,00 | 80,00 | 100,00 | INSPEKTORAT |
| 235. | Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel | Persen; Tahunan: | 15,00 | 15,00 | 100,00 | INSPEKTORAT |
| 236. | Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persen; Tahunan: | 80,00 | 80,00 | 100,00 | INSPEKTORAT |
| 237. | Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi | Persen; Tahunan: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | |
| | **KECAMATAN** | | | | | |
| 238. | IKM Kecamatan Adiwerna | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 79,87 | 81,00 | 101,41 | Kecamatan Adiwerna |
| 239. | IKM Kecamatan Balapulang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 84,00 | 94,10 | 112,02 | Kecamatan Balapulang |
| 240. | IKM Kecamatan Bojong | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 87,25 | 81,70 | 93,64 | Kecamatan Bojong |
| 241. | IKM Kecamatan Bumijawa | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 87,50 | 88,59 | 101,25 | Kecamatan Bumijawa |
| 242. | IKM Kecamatan Dukuhwaru | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 84,00 | 88,00 | 104,76 | Kecamatan Dukuhturi |
| 243. | IKM Kecamatan Dukuhturi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 80,44 | 89,20 | 110,89 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 244. | IKM Kecamatan Jatinegara | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 85,45 | 85,39 | 99,93 | Kecamatan Jatinegara |
| 245. | IKM Kecamatan Kedungbanteng | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 85,00 | 87,87 | 103,38 | Kecamatan Kedungabnteng |
| 246. | IKM Kecamatan Kramat | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 83,85 | 83,71 | 99,83 | Kecamatan Kramat |
| 247. | IKM Kecamatan Lebaksiu | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 81,25 | 87,66 | 107,89 | Kecamatan Lebaksiu |
| 248. | IKM Kecamatan Margasari | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 82,45 | 83,17 | 100,87 | Kecamatan Margasari |
| 249. | IKM Kecamatan Pagerbarang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 84,00 | 82,13 | 97,77 | Kecamatan Pagerbarang |
| 250. | IKM Kecamatan Pangkah | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 89,64 | 82,13 | 91,62 | Kecamatan Pangkah |
| 251. | IKM Kecamatan Slawi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 85,71 | 89,44 | 104,35 | Kecamatan Slawi |
| 252. | IKM Kecamatan Suradadi | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 81,26 | 89,86 | 110,58 | Kecamatan Suradadi |
| 253. | IKM Kecamatan Talang | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 89,50 | 100,00 | 111,73 | Kecamatan Talang |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. | IKM Kecamatan Tarub | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 86,05 | 79,93 | 92,89 | Kecamatan Tarub |
| 255. | IKM Kecamatan Warureja | Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017 | 81,00 | 25,00 | 30,86 | Kecamatan Warureja |
| 256. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | | 0,00 | Kecamatan Adiwerna |
| 257. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 50,00 | | 0,00 | Kecamatan Balapulang |
| 258. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | | 0,00 | Kecamatan Bojong |
| 259. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Bumijawa |
| 260. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Dukuhturi |
| 261. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 262. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Jatinegara |
| 263. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Kedungabnteng |
| 264. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Kramat |
| 265. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Lebaksiu |
| 266. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Margasari |
| 267. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Pagerbarang |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Pangkah |
| 269. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Slawi |
| 270. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Suradadi |
| 271. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 100,00 | | 0,00 | Kecamatan Talang |
| 272. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 66,67 | 23,33 | 34,99 | Kecamatan Tarub |
| 273. | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 | 70,00 | 20,00 | 28,57 | Kecamatan Warureja |
| 274. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Adiwerna |
| 275. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Balapulang |
| 276. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bojong |
| 277. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bumijawa |
| 278. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Dukuhturi |
| 279. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukhuturi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 280. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Jatinegara |
| 281. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Kedungabnteng |
| 282. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Kramat |
| 283. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Lebaksiu |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Margasari |
| 285. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pagerbarang |
| 286. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pangkah |
| 287. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Slawi |
| 288. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Suradadi |
| 289. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Talang |
| 290. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Tarub |
| 291. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 40,00 | 47,06 | Kecamatan Warureja |
| 292. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 90,30 | 100,00 | 110,74 | Kecamatan Adiwerna |
| 293. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Balapulang |
| 294. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bojong |
| 295. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bumijawa |
| 296. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Dukuhturi |
| 297. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 298. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Jatinegara |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 85,00 | 100,00 | 117,65 | Kecamatan Kedungabnteng |
| 300. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Kramat |
| 301. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Lebaksiu |
| 302. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Margasari |
| 303. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pagerbarang |
| 304. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pangkah |
| 305. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Slawi |
| 306. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Suradadi |
| 307. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Talang |
| 308. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Tarub |
| 309. | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | Kecamatan Warureja |
| 310. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 74,00 | 100,00 | 135,14 | Kecamatan Adiwerna |
| 311. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 60,00 | 50,00 | 83,33 | Kecamatan Balapulang |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 76,00 | 105,56 | Kecamatan Bojong |
| 313. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 100,00 | 153,85 | Kecamatan Bumijawa |
| 314. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 78,80 | 90,00 | 114,21 | Kecamatan Dukuhturi |
| 315. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 100,00 | 138,89 | Kecamatan Dukuhwaru |
| 316. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 75,00 | 83,72 | 111,63 | Kecamatan Jatinegara |
| 317. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Kecamatan Kedungabnteng |
| 318. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 89,00 | 136,92 | Kecamatan Kramat |
| 319. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 100,00 | 138,89 | Kecamatan Lebaksiu |
| 320. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 78,20 | 78,55 | 100,45 | Kecamatan Margasari |
| 321. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 84,00 | 160,18 | Kecamatan Pagerbarang |
| 322. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 91,00 | 89,00 | 97,80 | Kecamatan Pangkah |
| 323. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Slawi |
| 324. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 68,00 | 100,00 | 147,06 | Kecamatan Suradadi |
| 325. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 31,00 | 94,74 | 305,61 | Kecamatan Talang |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG | Satuan; Sifat Data; Referensi | TARGET 2025 | REALISASI | PRESENTASE CAPAIAN (%) | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 1,94 | 3,70 | Kecamatan Tarub |
| 327. | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 80,00 | 12,04 | 15,05 | Kecamatan Warureja |
| | | | | | | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | |
| 328. | Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 86,72 | 93,66 | 108,00 | BADAN KESBANGPOL |
| 329. | Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BADAN KESBANGPOL |
| 330. | Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelengarakan pendidikan politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 90,05 | 72,60 | 80,62 | BADAN KESBANGPOL |
| 331. | Persentase Ormas yang Terbina | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 90,05 | 100,00 | 111,05 | BADAN KESBANGPOL |
| 332. | Persentase Konflik yang tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BADAN KESBANGPOL |
| 333. | Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BADAN KESBANGPOL |
| | | | | | | |
| C | **Aspek Daya Saing** | | | | | |
| 1. | Persentase peningkatan Investasi di kabupaten Tegal | Persen; Tahunan | 3,13 | 0,00 | 0,00 | DINAS PMPTSP |
| 2. | Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen | Persen; Tahunan | 1,00 | 0,00 | 0,00 | DINAS PMPTSP |
| 3. | Indeks Kepuasaan Masyarakat Perijinan | Nilai; Tahunan | 81,00 | 91,92 | 113,48 | DINAS PMPTSP |
| 4. | Persentase Kepatuhan Perusahaan | Persentase | 70,28 | 75,00 | 106,72 | DINAS PMPTSP |
| 5. | Persentase frekuensi Peningkatan Update data | Persentase | 12,00 | 12,00 | 100,00 | DINAS PMPTSP |
| 6. | Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 88,72 | 93,66 | 105,57 | BADAN KESBANGPOL |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan 16 indikator kinerjanya diperoleh ketercapaian sebesar 43,75% atau sebanyak 7 (Tujuh) indikator mencapai target dan 56,25% atau sebanyak 9 (Sembilan) indikator belum mencapai target.

2. Aspek Pelayanan Umum dengan jumlah indikator 333, sebanyak 184 indikator atau 55,25% telah tercapai dan 149 indikator atau 44,74% belum tercapai.
3. Aspek Daya saing dengan 6 indikator dengan sebanyak 4 indikator telah mencapai target (66,66%) dan 2 indikator belum tercapai atau (33,33%).

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 47.721,31 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 29.444,38 miliar rupiah. „ Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu 5,07 persen (y-on-y), pertumbuhan ini meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,93 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,94 persen. Dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yaitu sebesar 17,24 persen.

Secara struktur, Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 36,45 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 82,04 persen.

Ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023
yang hanya tumbuh sebesar 4,93 persen. Pada tahun 2024 semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar meliputi Informasi dan Komunikasi (9,94 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,73 persen), dan Jasa Perusahaan (9,66 persen). Bertolak belakang dengan pertumbuhan industri pengolahan, dua kategori lapangan usaha dominan Kabupaten Tegal mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2023 seperti lapangan usahaPertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 0,29 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 6,62 persen.

Struktur Ekonomi Kabupaten Tegal menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Tegal masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 36,45 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,72 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,53. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Tegal mencapai 62,70 persen. Secara umum Total PDRB Kabupaten Tegal terdapat perbedaan dengan Total PDRB Jawa Tengah maupun Indonesia. Total PDRB Jawa Tengah dan Indonesia mencakup Minyak dan Gas (MIGAS), sedangkan PDRB Kabupaten Tegal merupakan PDRB tanpa MIGAS.

Sedangkan proyeksi pertumbuhan PDRB sektoral dan struktur perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2026 berdasarkan data series 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut.

**Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026**

| Lapangan Usaha/Industri | | Realisasi 2024 | Proyeksi Pertumbuhan (% ± 0,2) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,29 | 0,49 | 0,69 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,32 | 3,52 | 3,72 |
| C | Industri Pengolahan | 3,87 | 4,07 | 4,27 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,16 | 6,36 | 6,56 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,98 | 1,08 | 1,28 |
| F | Konstruksi | 7,99 | 8,19 | 8,19 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,62 | 6,82 | 6,92 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,74 | 3,94 | 4,14 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9,73 | 9,93 | 9,96 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,94 | 9,96 | 9,98 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,83 | 1,03 | 1,23 |
| L | Real Estate | 4,95 | 5,15 | 5,35 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 9,66 | 9,86 | 9,96 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,31 | 7,51 | 7,71 |
| P | Jasa Pendidikan | 6,42 | 6,62 | 6,82 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,37 | 5,57 | 5,77 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 5,67 | 5,87 | 5,97 |

*Sumber : analisis tim penyusun, 2024*

Sektor yang diperkirakan tumbuh dengan pesat adalah sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Perdagangan, dan Jasa Perusahaan. Hal ini sejalan dengan adanya pandemi, yang menjadikan sektor infokom mengalami pertumbuhan pesat karena berkurangnya mobilitas masyarakat, serta tumbuhnya sektor jasa kesehatan sebagai respons dari pandemi. Walaupun kondisi saat ini sudah mulai pulih, tetapi pertumbuhan kedua sektor tersebut diperkirakan masih tinggi.

**Tabel 3.2 Proyeksi Kontribusi Sektoral PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026**

| Lapangan Usaha/Industri | | Realisasi 2024 | Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 11,53 | 11,73 | 11,75 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,66 | 3,46 | 3,55 |
| C | Industri Pengolahan | 36,45 | 36,59 | 36,79 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| F | Konstruksi | 8,17 | 8,05 | 8,13 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,72 | 14,55 | 14,85 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,66 | 3,46 | 3,26 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,78 | 4,51 | 4,81 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,38 | 3,59 | 3,49 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,08 | 2,25 | 2,15 |
| L | Real Estate | 1,46 | 1,32 | 1,42 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,43 | 0,41 | 0,21 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,85 | 1,87 | 1,77 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,95 | 4,90 | 4,80 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,75 | 0,92 | 0,72 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 2,04 | 2,29 | 2,19 |

*Sumber : analisis tim penyusun, 2025*

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada masa pemulihan, kontribusi sektoral PDRB diperkirakan akan kembali mengikuti tren pada masa normal, yaitu adanya *structural transformation* di Kabupaten Tegal, dari wilayah yang berbasis agraris menjadi wilayah yang ditopang oleh industri pengolahan; lebih dari sepertiga perekonomian Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor ini. Sektor perdagangan dan pertanian mengikuti, dengan masing-masing sektor berkontribusi kurang dari 15%, dengan tren sektor pertanian semakin menurun kontribusinya.

Tren *structural transformation* merupakan situasi yang wajar dialami oleh daerah yang sedang berkembang. Di awal pertumbuhan, daerah akan bergantung pada sektor agraris. Dengan semakin majunya perekonomian, maka sektor yang dominan akan bergeser ke industri pengolahan. Selanjutnya, kawasan yang sudah maju dan menjadi pusat layanan bagi kawasan belakangnya akan banyak ditopang oleh sektor jasa.

Sementara, PDRB berdasarkan pengeluaran pada tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Proyeksi Kontribusi PDRB berdasarkan Pengeluaran Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026**

| Komponen Pengeluaran | Realisasi 2024 | Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2) | |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 |
| 1. Konsumsi RumahTangga | 82,04 | 82,15 | 82,18 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 1,72 | 1,65 | 1,62 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 5,53 | 4,53 | 5,05 |
| 4. PMTB | 23,07 | 23,17 | 23,05 |
| 5. Perubahan Inventori | 0,31 | 0,31 | 0,55 |
| 6. Ekspor Neto Barang dan Jasa | -12,66 | -11.81 | -12,45 |

*Sumber: analisis tim penyusun, 2025*

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor konsumsi (lebih dari 80%). Kondisi ini relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen). Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Hanya saja, dalam masa pandemi, investasi menjadi hal yang sangat terdampak. Pada saat hal ini terjadi, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi melalui pengeluaran pemerintah dalam rangka menopang perekonomian. Karena sumberdaya pemerintah terbatas, maka intervensi yang dilakukan perlu diprioritaskan pada sektor yang memiliki daya ungkit besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas, maka target indikator ekonomi makro daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal**

| NO | Indikator | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 |
| 1. | PDRB/PDB : | | | |
| | a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah) | 47.721,31 | 50.107,38 | 52.162,75 |
| | b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah) | 29.444,38 | 30.916,60 | 32.462,43 |
| 2. | Pertumbuhan Ekonomi (persen) | 5,07 | 5,12 – 5,25 | 5,25 – 5,33 |
| 3. | Inflasi (persen) | 2,19 | 3±1 | 3±1 |
| 4. | PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (juta rupiah) | 28,49 | 29,91 | 31,41 |
| 5. | a. Nilai Investasi PMA | 883 Milyar | 927 Milyar | 973 Milyar |
| | b. Nilai Investasi PMDN | 768 Milyar | 806 Milyar | 846 Milyar |

| NO | Indikator | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) | 7,53 | 7,52 | 7,51 |
| 7. | Kemiskinan (persen) | 6,81 | 6,81 – 6,70 | 6,70 – 6,40 |

*Sumber: Analisis tim penyusun, 2025*

Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. Tantangan ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Persaingan Pasar Global**
   Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas.
2. **Ketersediaan Bahan Baku Industri**
   Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.
3. **Peningkatan Investasi**
   Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.
4. **Laju Konversi Lahan Pertanian**
   Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.
5. **Kesiapan sebagai Destinasi Internasional**
   Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah dapat merasakan Kabupaten Tegal sebagai daerah yang *mbetahi* dan *ngangen*i.
6. **Kualitas Sumber Daya Manusia**
   Kabupaten Tegal memiliki potensi sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia

di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 48,43% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa **peluang** pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. **Migrasi Investasi dari Ibukota**
   Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai "pintu gerbang" Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga kompetitif.. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kacamatan Margasari dan pantura dalam Revisi RTRW.
2. **Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten**
   Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
3. **Tumbuhnya Destinasi Pariwisata Baru Berbasis Masyarakat**
   Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.
4. **Luasnya Pasar Domestik**
   "Ekspor" Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. **Keberadaan Sarana Unggulan**
   Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komporatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Learning Center Bawang Putih juga dapat menjadi pemicu litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
6. **Iklim Investasi yang Sehat**
   Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan

pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada, upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2025 sesuai dengan target sebesar 5,00 – 5,60% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal yang ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2025 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat, capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 4,80-5,60 %. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 2,5±1, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,00-5,60 % untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi **5,00 – 5,60%** dibandingkan tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar **4,93%**. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar **5,0 – 5,60%** untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian

wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Sementara **arah kebijakan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)**
   Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**
   PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. **Menurunkan Kemiskinan**
   Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.
4. **Melakukan Revisi Tata Ruang**
   RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari, serta penambahan beberapa Kawasan Peruntukan Industri ditandai dengan upaya revisi RTRW.
5. **Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat**
   Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.
6. **Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda**
   Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.
7. **Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein**
   Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan

untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidart untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. **Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Pertanian, Perdagangan)**
   Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.
9. **Meningkatkan Promosi Potensi Daerah**
   Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.
10. **Pengendalian Inflasi**
    Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.
11. **Meningkatkan Investasi Pemerintah**
    Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
   Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PAD Tahun 2025 dapat meningkatkan target penerimaan. Adapun arah kebijakan PAD sebagai berikut :
   a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023.
   b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
   c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
   d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
   e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
   f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu, PT BPR-BKK, dan PT BPR TGR berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
   g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
   h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
   i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
   j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan aset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
   k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
   l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
   m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.

2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):

a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber Pendapatan Transfer dimana menempati porsi terbesar diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Dimana proporsi pendapatan transfer masih diatas 70% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan target keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| No | Uraian | RKPD 2025 | APBD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.879.683.239.000** | **2.879.683.239.000** | **3.065.968.159.305** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **706.445.652.000** | **706.445.652.000** | **730.724.279.000** |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 370.066.609.000 | 370.066.609.000 | 347.087.633.000 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 309.707.181.000 | 309.707.181.000 | 347.307.181.000 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17.530.000.000 | 17.530.000.000 | 20.387.603.000 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 9.141.862.000 | 9.141.862.000 | 15.941.862.000 |
| | | | | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.173.237.587.000** | **2.173.237.587.000** | **2.335.243.880.305** |
| 4.2.1. | Transfer Pemerintah Pusat | 2.022.277.997.000 | 2.022.277.997.000 | 2.175.381.148.305 |
| 4.2.2 | Transfer Antar Daerah | 150.959.590.000 | 150.959.590.000 | 159.862.732.000 |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025*

**b. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.
   Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memperhatikan kebijakan belanja Rancangan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah yang bersangkutan serta yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dianggarkan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembiayaan program-program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2025 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah.
d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2025-2026 serta pencapaian target program – program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 ;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi.
5. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
7. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrim dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
8. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan dan fungsi infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan fungsi pengawasan (APIP) dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
9. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas keuangan, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
10. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Penyusunan RKPD tahun 2025 telah mengakomodir belanja pada perangkat daerah yang bersifat rutin dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan belanja program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Adapun belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 mencakup:

1. Pagu anggaran perangkat daerah telah dihitung untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah telah menghitung alokasi gaji Kepala Daerah, gaji DPRD dan gaji ASN. Untuk kegiatan rutin seperti jasa untuk tenaga harian/outsourcing, operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan ataupun lapangan, jasa listrik, air, serta BPJS untuk tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap dan dibayarkan selama satu tahun anggaran.

2. Pagu anggaran untuk program lainnya yang telah dialokasikan untuk setiap perangkat daerah baik yang bersifat mandatory maupun prioritas pembangunan.
3. Kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan masyarakat.

Belanja daerah pada RKPD telah dilakukan efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target dan indikator kinerja perangkat daerah dan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja rutin yang wajib dianggarkan selama satu tahun anggaran serta mengakomodir belanja prioritas tahun 2025.

**Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| No | Uraian | RKPD 2025 | APBD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **3.080.300.038.200** | **3.080.300.038.200** | **3.227.089.518.826** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.299.259.587.192** | **2.261.622.487.612** | **2.313.370.573.085** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.262.457.762.123 | 1.248.330.340.753 | 1.225.271.334.424 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 942.902.169.569 | 918.732.491.359 | 973.225.688.161 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 71.619.255.500 | 72.279.255.500 | 92.323.150.500 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 22.280.400.000 | 22.280.400.000 | 22.550.400.000 |
| **5.2.** | **BELANJA MODAL** | **274.833.210.208** | **312.820.309.788** | **410.932.216.741** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 7.921.511.000 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.142.263.753 | 84.142.263.753 | 121.632.697.150 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 94.810.309.165 | 95.560.309.165 | 82.949.828.401 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 103.337.394.040 | 109.674.493.620 | 178.735.686.050 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 22.231.743.250 | 23.131.743.250 | 19.461.215.060 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 311.500.000 | 10.900.000 | 231.279.080 |
| **5.3.** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **10.000.000.000** | **10.000.000.000** | **5.500.000.000** |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 5.500.000.00 |
| **5.4.** | **BELANJA TRANSFER** | **496.207.240.800** | **495.857.240.800** | **496.857.240.800** |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 40.192.149.300 | 40.192.149.300 | 25.900.000.000 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 456.015.091.500 | 455.665.091.500 | 471.386.729.000 |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025*

### c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA Bank TGR.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Penyertaan modal PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu dan PT BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Jawa Tengah dan BUMD.
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.

Selain penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiyaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

**Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| No | Uraian | RKPD 2025 | APBD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **214.116.799.200** | **214.116.799.200** | **169.621.359.521** |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA | 212.616.799.200 | 212.616.799.200 | 168.121.359.521 |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **13.500.000.000** | **13.500.000.000** | **8.500.000.000** |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | 12.500.00.000 | 12.500.00.000 | 7.500.000.000 |
| 3.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **200.616.799.200** | **200.616.799.200** | **161.121.359.521** |

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka disusun sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan bersifat strategis yang dilaksanakan pada tahun berkenaan sebagai satu kesatuan tahapan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan pada tahun berkenaan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam suatu rangkaian kebijakan jangka menengah.

Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan juga memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah. Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dalam mencapai visi dan misi Kepala daerah melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Provinsi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dan Prioritas Nasional sebagaimana Asta Cita Presiden dan Wakil Preisden;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2025 di Kabupaten Tegal; serta
4. Pengembangan sektor atau bidang potensial yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1.1. Visi

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 terdapat Visi Misi bupati dan wakil bupati tegal yang diinternalisasi menjadi visi misi Pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah :

**"Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh"**

**Arti Visi :**

**Maju** : Kondisi Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang **Inovatif, Adil dan Inklusif**. Inovasi adalah diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan terus berinovasi secara aktif mendorong, mendukung dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Sedangkan adil adalah menjadikan Kabupaten Tegal mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama serta menjadi inklusif dengan melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskiriminasi.

**Tangguh** : Tangguh dalam pembangunan yang dimaksud adalah **Berketahanan, Konsisten, Berintegras, Religius Dan Berbudaya**. Berketahanan yaitu Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai risiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau masalah-masalah lain yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah. Konsisten adalah terus tetap bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan melewati tantangan-tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat.

Berintegritas yaitu berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan

kejujuran. Religius dimana Kabupaten Tegal berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. Serta Berbudaya yaitu memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya.

### 4.1.2. Misi

Misi adalah bagian dari visi dan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Misi Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas**

   Misi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, aman, dan berstandar tinggi, diharapkan tercipta konektivitas yang lebih baik antarwilayah, aksesibilitas layanan publik yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Misi ini juga mencakup pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, serta penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman

2. **Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal**

   Misi ini bertujuan untuk membangun struktur perekonomian yang kuat, berkeadilan, dan mandiri dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal. Melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Selain itu, misi ini juga berfokus pada penciptaan peluang kerja baru dan pemberdayaan ekonomi lokal, guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perekonomian yang dihasilkan tidak hanya tangguh

menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

**3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan dilakukan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misi ini berfokus pada terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tangguh menghadapi bencana juga menjadi prioritas, guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

**4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta faktor kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mendorong produktivitas dan profesionalisme, serta adanya kesehatan dan perekonomian yang baik diharapkan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, etika, dan moral dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

**5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkarakter. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, serta pembangunan sosial yang inklusif, misi ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu dan komunitas. Ketahanan sosial diwujudkan melalui peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, ketahanan budaya difokuskan pada pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai identitas dan aset bangsa. Penguatan ketahanan keluarga

dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta membangun karakter keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

6. **Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif**

   Misi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, bersih, dan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, misi ini mengedepankan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sementara kecepatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode pembangunan daerah. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Mendasari pada RPJMD tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah **Menguatkan Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh,** dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

B. Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan dalam RPJMD 2025 -2029 adalah sejumlah 10 sasaran dengan indikator kinerja sejumlah 15 indikator, dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas.**

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Berkualitas

2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.**

   Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja :

   a. laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
   b. laju PDRB sektor industri pengolahan
   c. laju PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
   d. laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

3. **Menurunkan angka tingkat pengangguran**

   Sasaran ini diukur dengan indikator presentase tingkat pengangguran terbuka

4. **Meningkatkan Ketahanan Ekologi Dan Sumber Daya Alam**

   Sasaran ini diukur dengan indikator kualitas lingkungan hidup dan indeks risiko bencana

5. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Lebih Berkualitas, Produktif Dan Berbudaya**

   Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan

6. **Menurunkan Kemiskinan**

   Sasaran ini diukur dengan indikator persentase kemiskinan

7. **Meningkatkan Pelestarian Dan Pewarisan Kebudayaan**

   Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

8. **Meningkatkan Pembangunan Keluarga Berkualitas.**

   Sasaran ini dapat diukur dengan indikator indeks Pembangunan keluarga.

9. **Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama**

   Sasaran ini dapat diukur dengan indikator indeks kerukunan umat beragama,

10. **Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan**

    Sasaran ini diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Berikut ini tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 4. 1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029**

**Visi : Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | TARGET | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Visi: Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh | Menguatkan Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,12 | 5,33 | 5,45 | 5,51 | 5,58 | 5,65 | |
| | | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,8 | 72,06 | 72,34 | 72,62 | 72,9 | 73,18 | |
| Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas | | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas | Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas | 61,94 | 64,16 | 66,4 | 68,66 | 70,96 | 73,26 | |
| Misi 2: Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing | Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | 0,35 | 0,84 | 1,23 | 1,89 | 1,95 | 2,01 | |
| | | | Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) | 3,95 | 4,12 | 4,23 | 4,35 | 4,45 | 4,55 | |
| | | | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar | 5,25 | 5,43 | 5,61 | 5,73 | 5,86 | 5,99 | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | TARGET | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal | | | dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%) | | | | | | | |
| | | | Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,95 | 5,14 | 5,35 | 5,47 | 5,58 | 5,69 | |
| | | Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,52 | 7,51 | 7,41 | 7,31 | 7,21 | 7,11 | |
| Misi 3: Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup | | Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,43 | 75,48 | 75,53 | 75,58 | 75,65 | 75,65 | |
| | | | Indeks Risiko Bencana | 126 | 125 | 123,4 | 122,4 | 121,1 | 119,80 | |
| Misi 4: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya | | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | Indeks Pendidikan | 0,61 | 0,614 | 0,616 | 0,618 | 0,62 | 0,62 | |
| | | | Indeks Kesehatan | 0,61 | 0,61 | 0,616 | 0,618 | 0,62 | 0,62 | |
| | | Menurunnya Kemiskinan | Persentase Kemiskinan | 6,7 | 6,4 | 6,35 | 6,32 | 6,2 | 6,08 | |
| Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga | | Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan | Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 64,2 | 64,63 | 64,9 | 66,33 | 68,1 | 69,87 | |
| | | Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga | 84,4 | 84,93 | 85,4 | 85,93 | 86,4 | 86,87 | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | TARGET | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 83,2 | 83,66 | 84,12 | 84,58 | 85,05 | 85,52 | |
| Misi 6: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif | | Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | 78,1 | 78,49 | 78,92 | 79,36 | 79,79 | 80,22 | |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 4.1.4. Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur yang merata dengan aktivitas :
   a. Penanganan Jalan Bebas Lubang (Sah Lapor Sah Alus)
   b. Penerangan Jalan Utama
2. Penanganan rumah tidak layak huni warga miskin dengan aktivitas :
   a. Pelaksanaan Reahabilitasi/Pembangunan Rumah Layak Huni
3. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi, pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas, serta bantuan bagi petani dan nelayan dengan aktivitas :
   a. Pembangunan Jaringan Irigasi
   b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
   c. Hilirisasi Produk Pertanian Tegal
   d. Bantuan Beras Paceklik untuk Nelayan
   e. BPJS Tenaga Kerja Rentan bagi Nelayan dan Tenaga Kerja Rentan Lainnya
   f. Asuransi Pertanian
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pemajuan wirausaha serta *Link and match* tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, dengan aktivitas :
   a. Wirausaha Pemuda
   b. Program Layanan Pengembangan Usaha (PLPU)
   c. Bursa Kerja
   d. Pelatihan Link and Match untuk Pencari Kerja
   e. Revitaslisasi BLK
   f. Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa)
   g. Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
5. Konservasi lingkungan hidup, khususnya daerah resapan air, dan pengelolaan sampah yang terpadu dengan aktivitas :
   a. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
   b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sampah secara Terpadu

6. Peningkatan kualitas masyarakat dengan penguatan pendidikan dan keterampilan serta adanya pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi keluarga miskin, dengan aktivitas :
   a. Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun
   b. Beasiswa Miskin (Kartu Cerdas)
   c. Literasi Numerasi (Saba Latar dan Tegal Mendongeng)
   d. Satu Desa Satu Sarjana
7. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan aktivitas :
   a. Cek Kesehatan Gratis
   b. Pemberian Makanan Tambahan untuk Cegah Stunting
   c. Sosialisasi PHBS
   d. Sosialisasi NAPZA
   e. Integrasi Layanan Primer
8. Pemajuan desa bangga budaya dengan aktivitas :
   a. Pelestarian, Pembinaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
   b. Desa Bangga Budaya
9. Digitalisasi layanan publik pemerintahan dengan aktivitas :
   a. Pengembangan Layanan Publik TIK (Hardware dan Software)
10. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan aktivitas :
    a. Pembangunan dan Pengelolaan Database Riset dan Inovasi
    b. Pembentukan dan/atau Aktivasi Program Forum Kolaborasi Riset dan Inovasi sebagai Enabler Kebijakan Berbasis Bukti
    c. Peningkatan Produksi dan Kolaborasi Riset/Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah dan Isu Strategis
    d. KKN Tematik Berkelanjutan
    e. Perluasan Fasilitasi HKI yang mendorong Ekonomi Lokal

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

### 4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2025

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden diarahkan untuk mendukung tema dan arah

kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan sesuai dengan RPJMN tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

   Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Prioritas Nasional 2

   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Prioritas Nasional 3

   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Prioritas Nasional 4

   Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5

   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Prioritas Nasional 6

   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7

   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan keselarasan dari RKPD Kabupaten Tegal dengan prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan daerah tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Pembangunan pada tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah memiliki tema "**Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis"**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Prioritas Daerah (PD) Tahun 2026 yaitu:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Penjabaran prioritas daerah Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **PD 1. Penguatan Kapasitas Perekonomian Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Didukung Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas.** Pada prioritas ini fokus pada **:**
    a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
        1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
        2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;

3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste);
4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (green economy) dengan penetapan regulasi daerah terkait pembangunan ekonomi hijau dan penerapan pembangunan ekonomi biru (blue economy) di Provinsi Jawa Tengah.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota, dan pembangunan

sarpras SPALD regional, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;

3) pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM Pekerja Sosial, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, memperkuat peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS di luar panti, penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan kabupaten/kota, peningkatan kualitas layanan puskesos, serta pemberian layanan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan diantaranya melalui pengembangan layanan Trans Jateng untuk pemerataan pembangunan wilayah dan lebih berpihak kepada kelompok rentan; serta peningkatan kapasitas dan kualitas sistem transportasi (jalan, kereta api, bandara dan pelabuhan).

c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, uji sertifikasi kompetensi, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan,

dan akses pemasaran didukung dengan pembaharuan database pelaku usaha pertanian berkelanjutan.

2. **PD 2. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Lebih Pintar, Sehat, Bugar, Berkarakter, Dan Adaptif Secara Inklusif Dan Merata**, fokus pada prioritas ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui peningkatan tata kelola pendidikan dengan pendataan yang valid, manajemen berbasis sekolah dan peningkatan perencanaan berbasis evaluasi; peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan antara lain penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah blankspot; sertifikasi kompetensi tenaga pendidik dan siswa; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill, IT dan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics); pemenuhan sarpras pendidikan sesuai standar; penguatan pendidikan karakter berorientasi nilai agama, budaya, kearifan lokal, anti diskriminasi dan kekerasan, budaya literasi, berbudaya lingkungan, pembiasaan hidup bugar dan makan bergizi, kesadaran kesehatan mental; tanggap bencana; penguatan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/organisasi pendidikan;
   b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; perluasan implementasi sistem analisis kesehatan berbasis Big Data dan AI (kecerdasan buatan); penguatan implementasi perencanaan kebutuhan SDMK dan pemenuhan SDMK dengan memanfaatkan peluang yang ada ( P3K, CPNS, PIDI, PIDGI, PGDS, Nusantara sehat, PADINAKES, dan lainnya); penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vektor dan pengendalian faktor resiko; akselerasi dan kolaborasi layanan kesehatan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.

c. Meningkatkan kebugaran masyarakat, peningkatan perekonomian olahraga, peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet, dan peningkatan prestasi olahraga;
d. Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat;
e. Penguatan kepemimpinan, kepeloporan, pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui penguatan tata kelola kebudayaan termasuk sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan stakeholder dan masyarakat serta dukungan kebijakan dan regulasi; peningkatan kualitas SDM Kebudayaan menuju Manajemen Talenta Nasional (MTN) dengan sertifikasi dan standarisasi; kolaborasi efektif dan sinergis lintas sektor untuk peningkatan partisipasi kebudayaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; serta penyelenggaraan kearsipan dalam mewujudkan memori kolektif, identitas dan jatidiri bangsa;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan kualitas data pilah gender dan provinsi dan kabupaten/kota;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui penguatan kelembagaan UPTD PPA kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
i. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif.

3. **PD 3. Penguatan Ketahanan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup**, difokuskan pada :
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pemeliharaan dan pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas

dan fungsi lingkungan hidup, pembenahan tata kelola perizinan lingkungan dan pengendalian intensitas pemanfaatan sumber daya alam berbasis jasa lingkungan hidup, penguatan dukungan kebijakan dan regulasi serta penegakan aturan, meningkatkan kapasitas masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi dari bioprospeksi keanekaragaman hayati, penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup, pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, perluasan pemanfaatan elektrifikasi dan gas pada lingkup rumah tangga, industri, dan transportasi, mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi dengan penerapan manajemen energi di daerah, transisi energi yang terjangkau dan inklusif dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT);

c. c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air secara berkelanjutan dengan peningkatan konservasi air tanah, peningkatan kapasitas air baku, pengembangan SPAM regional, pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan

kabupaten/kota, pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4. **Pd 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dinamis Yang Lebih Adaptif Dan Kolaboratif,** difokuskan pada :
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan SOTK dan system, perencanaan pegawai berbasis pemetaan kesenjangan kompetensi dan kinerja, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penguatan perlindungan dan penghargaan yang adil dan layak bagi ASN, penguatan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kewilayahan, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik berbasis kebutuhan kompetensi, penataan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui penguatan kerja sama dengan badan usaha, masyarakat, daerah baik dalam dan luar negeri, termasuk aktif dalam forum internasional, serta peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,80 persen;
2. Inflasi sebesar 3,0+- 1 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47-4,37 persen;
4. Nilai Tukar Petani 107,68
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
6. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
7. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34;
8. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan

11. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00;

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 disusun berdasarkan isu strategis aktual yang kemungkinan terjadi ditahun 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2026 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

**A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 disusun dengan:

1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2025;
8. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025;
9. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam RPD Kabupaten Tegal 2025-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023;
10. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals /* SDGs) Tahun 2016-2030;
12. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur;
13. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
14. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender.

## B. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Pada dasarnya Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dengan memedomani

sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2026 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan RKPD ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**

**Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| No | Isu Kabupaten Tegal | Isu Provinsi Jawa Tengah |
|---|---|---|
| 1 | **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas** | Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan |
| 2 | **Infrastuktur Publik Dan Pengembangan Wilayah** | Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |
| 3 | **Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup** | |
| 4 | **Sumber Daya Manusia Yang Produktif** | Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif |
| 5 | **Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan** | Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif |
| 6 | **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** | Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 diarahkan untuk **"Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan**

**Pemerintahan”**. Dalam kerangka ini, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, memiliki arah kebijakan :
    a. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas
    b. Pembangunan permukiman layak huni
    c. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mantap berkualitas untuk mendukung konektivitas, mobilitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan wilayah.
    d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dan birokrasi melalui pelatihan serta penguatan sistem manajemen berbasis merit.
    e. Meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan guna menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang.
2. Misi Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal, memiliki arah kebijakan:
    a. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan
    b. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
    c. Memberdayakan ekonomi warga miskin dan rentan melalui pengembangan koperasi modern serta peningkatan usaha mikro dengan pelatihan dan akses permodalan.
    d. Menyiapkan sumber daya industri yang kompetitif serta meningkatkan akses pemasaran dan investasi untuk memperkuat basis industri daerah.
    e. Mendorong pola hidup sehat dan menyediakan layanan kesehatan bermutu serta meningkatkan konsumsi pangan sehat dan bergizi untuk kualitas SDM.

f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi, akses pasar, dan ketahanan pangan daerah.
g. Meningkatkan sinergi tenaga kerja lokal dengan lapangan kerja, hubungan industrial harmonis, layanan penempatan kerja, serta penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan ekonomi.

3. Misi Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup, memiliki arah kebijakan :
   a. Peningkatan kinerja pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana
   b. Melaksanakan konservasi lingkungan di daerah resapan dan menguatkan ekosistem untuk menjaga fungsi ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
   c. Meningkatkan pengelolaan kebencanaan secara komprehensif untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
   d. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
   e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem.
4. Misi Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif dan berbudaya, memiliki arah kebijakan :
   a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
   b. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
   c. Meningkatkan nilai kesehatan melalui kinerja blud (badan layanan umum daerah) dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
   d. Memperkuat tata kelola dan pemerataan akses pendidikan inklusif, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta menjamin wajib belajar 13 tahun dan mutu layanan pendidikan yang merata.

e. Memperluas akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat.

5. Misi Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga, memiliki arah kebijakan :
   a. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal
   b. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan, pemberdayaan keluarga
   c. Optimalisasi stabilitas wilayah
   d. Memperkuat pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk dan organisasi seni lokal.
   e. Mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan partisipasi inklusif dalam pembangunan.
   f. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan mengendalikan jumlah penduduk melalui program kependudukan terpadu dengan layanan kesehatan dan edukasi.
   g. Meningkatkan ketertiban, melindungi kelompok rentan, memperluas layanan sosial, dan memperkuat kerja sama masyarakat dalam penegakan hukum.
6. Misi Menguatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif, memiliki arah kebijakan :
   a. Penyiapan infrastruktur digital pemerintahan dan penguatan supervisi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penguatan SDM pemerintahan yang berinovasi dengan riset
   b. Menguatkan supervisi dan audit pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
   c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik secara menyeluruh dengan menyiapkan standar serta infrastruktur modern yang mudah diakses masyarakat.
   d. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan menguatkan supervisi serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah untuk memperkokoh persatuan dan efektivitas pembangunan.

## D. Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029, prioritas sasaran pembangunan daerah adalah :

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas sebesar 67,09 persen
3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan indikator kinerja:
   a. Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sebesar 0,84 %
   b. Laju PDRB sektor industri pengolahan sebesar 4,12%
   c. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,43 %
4) Memperluas lapangan kerja dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,51 persen
5) Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 75,48 persen dan indeks risiko bencana sebesar 125,00
6) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 0,61 dan indikator kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0,86
7) Menurunkan kemiskinan dengan indikator prosentase penduduk miskin sebesar 6,40
8) Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar 84,93
9) Meningkatkan pembangunan keluarga berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 64,63
10) Meningkatkan kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 83,66
11) Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,49

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**

**Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| Sasaran | Indikator Kinerja | Strategi Pembangunan Daerah | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas | Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah | 1. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas<br>2. Pembangunan permukiman layak huni<br>3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mantap berkualitas untuk mendukung konektivitas, mobilitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan wilayah.<br>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dan birokrasi melalui pelatihan serta penguatan sistem manajemen berbasis merit.<br>5. Meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan guna menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang. |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing | 1. Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)<br>2. Laju PDRB sektor industri pengolahan (%)<br>3. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)<br>4. Laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum | Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dengan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja | 1. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan<br>2. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja<br>3. Memberdayakan ekonomi warga miskin dan rentan melalui pengembangan koperasi modern serta peningkatan usaha mikro dengan pelatihan dan akses permodalan.<br>4. Menyiapkan sumber daya industri yang kompetitif serta meningkatkan akses pemasaran dan investasi untuk memperkuat basis industri daerah.<br>5. Mendorong pola hidup sehat dan menyediakan layanan kesehatan bermutu serta meningkatkan konsumsi pangan sehat dan bergizi untuk kualitas SDM.<br>6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi, akses pasar, dan ketahanan |
| Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran | Persentase TPT | | |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Strategi Pembangunan Daerah | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | pangan daerah.<br>7. Meningkatkan sinergi tenaga kerja lokal dengan lapangan kerja, hubungan industrial harmonis, layanan penempatan kerja, serta penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan ekonomi. |
| Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>2. Indeks Risiko Bencana | Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana | 1. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah yang Tangguh terhadap Bencan<br>2. Melaksanakan konservasi lingkungan di daerah resapan dan menguatkan ekosistem untuk menjaga fungsi ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim<br>3. Meningkatkan pengelolaan kebencanaan secara komprehensif untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.<br>4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.<br>5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem. |
| Terwujudnya SDM yang berkualitas | 1. Indeks Pendidikan<br>2. Indeks Kesehatan | Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kemiskinan | 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat<br>2. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miski<br>3. Meningkatkan nilai kesehatan melalui kinerja blud (badan layanan umum daerah) dalam pelayanan kesehatan masyarakat.<br>4. Memperkuat tata kelola dan pemerataan akses pendidikan inklusif, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta menjamin wajib belajar 13 tahun dan mutu layanan pendidikan yang merata<br>5. Memperluas akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Strategi Pembangunan Daerah | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat. |
| Menurunnya kemiskinan | Persentase Kemiskinan | | 1. Perluasan cakupan layanan kinerja sosial<br>2. Beasiswa dan Dukungan Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin |
| Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan | Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Meningkatkan Kondusivitas Wilayah, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal dengan Pengarusutamaan Gender dan Inklusif | 1. Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal<br>2. 2. Penguatan Pembangunan Gender dengan Kesetaraan, Pemberdayaan Keluarga<br>3. Optimalisasi Stabilitas Wilayah<br>4. Memperkuat pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk dan organisasi seni lokal. Mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan partisipasi inklusif<br>5. dalam pembangunan. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan mengendalikan jumlah penduduk melalui program kependudukan terpadu dengan layanan kesehatan dan edukasi.<br>6. Meningkatkan ketertiban, melindungi kelompok rentan, memperluas layanan sosial, dan memperkuat kerja sama masyarakat dalam penegakan hukum. |
| Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga | | |
| Meningkatnya kerukunan umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | |
| Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi,<br>2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan<br>3. yang berinovasi dengan riset<br>4. 2. Menguatkan supervisi dan audit pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin<br>5. transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.<br>6. 3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pelayanan<br>7. publik secara menyeluruh dengan menyiapkan standar serta infrastruktur<br>8. modern yang mudah diakses masyarakat. |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Strategi Pembangunan Daerah | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | 9. 4. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan menguatkan<br>10. supervisi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk<br>11. memperkokoh persatuan dan efektivitas pembangunan. |

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

## Tabel 4. 4

## Sasaran, Prioritas Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Yang Berkualitas | Indeks Kinerja Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Berkualitas | Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar Dan Aksesibilitas Wilayah | 1. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah Yang Berkualitas<br>2. Pembangunan Permukiman Layak Huni<br>3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Mantap Berkualitas Untuk Mendukung Konektivitas, Mobilitas, Pelayanan Dasar, Serta Pemerataan Pembangunan Wilayah.<br>4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Konstruksi Dan Birokrasi Melalui | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi (Di) Kewenangan Kabupaten Dengan Mantap | Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 Tanggal 25 Maret 2019 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 Di; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal. 276,02 Km. | 63,21 | 64,35 | Dinas Pupr |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Serta Penguatan Sistem Manajemen Berbasis Merit.<br>5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Guna Menjaga Keteraturan Dan Keberlanjutan Tata Ruang. | | | | | | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen;Kumulatif; Sk Bupati Tegal Nomor 600/528 Tahun 2022 | 66,00 | 72,50 | Dinas Pupr |
| | | | | | Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Mantap | Persen;Kumulatif; Sk Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 | 70,50 | 72,50 | Dinas Pupr |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak | Persen; Kumulatif; Permenpupr No 01/Prt/M/2014, Permenpupr No 18/Prt/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, Spm | 100,00 | 100,00 | Dinas Pupr |
| | | | | | Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman | Persen; Kumulatif; Permenpupr No 01/Prt/M/2014, Permenpupr No 18/Prt/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, Spm | 35,25 | 36,16 | Dinas Pupr |
| | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Cakupan Akses Sanitasi Layak | Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, Spm | 100,00 | 100,00 | Dinas Pupr |
| | | | | | Cakupan Akses Sanitasi Aman | Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, Spm | 2,39 | 2,95 | Dinas Pupr |
| | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Jumlah Tenaga Konstruksi Yang Terlatih | Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019 | 90,00 | 90,00 | Dinas Pupr |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Penyelanggaraan Penataan Ruang | Jumlah Kepatuhan Terhadap Itr Yang Diajukan | Persen; Tahunan: Iku Opd | 88,00 | 89,00 | Dinas Pupr |
| | | | | | Rasio Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan | Jumlah; Kumultif; Uu No. 18 Tahun 2008 | 47,76 | 49,25 | Dinas Pupr |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase; Tahunan; Permenpupr No 29/Prt/2018; Permendagri 18 Tahun 2020 | 0,37 | 0,37 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | | | | Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan | Persentase; Tahunan; Permenpupr No 29/Prt/2018; Permendagri 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Presentase Ketersediaan Psu Perumahan | Persentase; Kumulatif; Iku Opd | 20,63 | 36,50 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Kawasan Permukiman | Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh Yang Telah Ditetapkan | Prosentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Di Kabupaten Tegal | 64,31 | 64,52 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Presentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni | Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020 | 25,36 | 27,23 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | | | Program Penatagunaan Tanah | Persentase Tanah Yang Tertata | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | | | Program Survei Pengukuran Dan Pemetaan Tanah | Persentase Aset Lahan Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat | Persen; Tahunan; Iku Opd | 0,97 | 0,98 | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase Trayek Aktif | Persen; Tahunan | 76,90 | 77,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Persentase Kinerja Lalu Lintas | Persen;Tahunan | 0,33 | 0,33 | Dinas Perhubungan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Sarana Dan Prasarana Keselamatan Yang Berfungsi | Persen;Tahunan | 1,00 | 1,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing | Laju Pdrb Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (%) | Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Dengan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Dan Ketersediaan Lapangan Kerja | 1. Pengembangan Dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata Dan Perdagangan<br>2. Perluasan Lapangan Pekerjaan Dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja<br>3. Memberdayakan Ekonomi Warga Miskin Dan Rentan Melalui Pengembangan Koperasi Modern Serta Peningkatan Usaha Mikro Dengan Pelatihan Dan Akses Permodalan.<br>4. Menyiapkan Sumber Daya Industri Yang Kompetitif Serta Meningkatkan Akses Pemasaran Dan Investasi Untuk Memperkuat Basis Industri | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (Opt) | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 92,00 | 93.00 | Dinas Kptan |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Daerah.<br>5. Mendorong Pola Hidup Sehat Dan Menyediakan Layanan Kesehatan Bermutu Serta Meningkatkan Konsumsi Pangan Sehat Dan Bergizi Untuk Kualitas Sdm.<br>6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Teknologi, Akses Pasar, Dan Ketahanan Pangan Daerah.<br>7. Meningkatkan Sinergi Tenaga Kerja Lokal Dengan Lapangan Kerja, Hubungan Industrial Harmonis, Layanan Penempatan Kerja, Serta Penyiapan Tenaga Kerja Terampil Sesuai | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kebutuhan Ekonomi. | | | | | | |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 66,30 | 67,63 | Dinas Kptan |
| | | | | | Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 19,84 | 20,24 | Dinas Kptan |
| | | | | | Luas Lahan Pertanian Organik | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 8,00 | 10.00 | Dinas Kptan |
| | | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas Lahan Lp2b Yang Dipertahankan | Prosen | 100,00 | 100.00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Cakupan Jaringan Irigasi | Ha | 330,00 | 500.00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Cakupan Jaringanjalan Usaha Tani | Ha | 140,00 | 150.00 | Dinas Kptan |
| | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms) | Persen | 93,00 | 94.00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Populasi Ternak Besar | Jumlah | 6858,00 | 6926,00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Populasi Ternak Kecil | Jumlah | 247424,00 | 247671,00 | Dinas Kptan |
| | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Sdm Pertanian Yang Ditingkatkan | Persen;Tahunan | 3,00 | 6,00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Peningkatan Kelas Kelompok Tani | Persen;Tahunan | 2,67 | 5,34 | Dinas Kptan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rasio Serangan Hama Penyakit Tanaman | Persen; Tahunan; Iku Opd | 5,00 | 4.50 | Dinas Kptan |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.) | Rupiah; Tahunan; Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 63.376.653,00 | 64.238.576,00 | Dinas Kptan |
| | | | | | Produksi Perikanan Tangkap (Kg.) | Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 2.237.316,00 | 2.267.744,00 | Dinas Perikanan |
| | | | | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | Prosentase Wilayah Perairan Umum Daratan (Pud) Yang Terjaga Kelestarian Sumberdaya Ikannya | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 11,11 | 33,33 | Dinas Perikanan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) | Rupiah; Tahunan; Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 124.594.259,00 | 124.905.744,00 | Dinas Perikanan |
| | | | | | Produksi Perikanan Budidaya (Kg) | Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 2.868.705,00 | 2.875.877,00 | Dinas Perikanan |
| | | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) | Rupiah; Tahunan Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 150.774.549,00 | 151.181.640,00 | Dinas Perikanan |
| | | | | | Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan | Kilogram; Tahunan; Manual Iku Kementrian Kkp; Renstra Dinas Kp Provinsi Jateng | 5.836.019,00 | 5.851.776,00 | Dinas Perikanan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laju Pdrb Sektor Industri Pengolahan (%) | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Terhadap Rencana Pembangunan Sentra Industri Unggulan Daerah | Persen | 20,00 | 40,00 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupatan/Kota | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | Persen | 100,00 | 100,00 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Industri Yang Memiliki 7 Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini (Siinas) | Persen | 50,00 | 55,00 | Disperintransnaker |
| | Laju Pertumbuhan Pdrb Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (%) | | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Pengawasan Pemeriksaan Koperasi | Persen; Tahunan; | | | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian | Persentase Sdm Koperasi Yang Berkualitas | Persen; Tahunan; | | | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas | Persen; Tahunan; | | | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam Yang Terfasilitasi | Persen; Tahunan; | 100,00 | 100,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase Sdm Koperasi Yang Memliki Kompetensi | Persen; Tahunan; | 55,00 | 58,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase Koperasi Bermitra | Persen; Tahunan; | 5,50 | 6,23 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Pemberdayaan Umkm | Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal | Persen; Tahunan; | | | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengembangan Umkm | Proporsi Usaha Mikro Yang Menjalin Kemitraan | Persen; Tahunan; | | | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase Peningkatan Umkm Yang Bermitra | Persen; Tahunan; | 11,00 | 12,10 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil | Persen; Tahunan; | 11,00 | 12,10 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Perijinan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2021 | 56,00 | 64,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting | Persentase Stabilisasi Harga Bapokting | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2022 | 94,00 | 90,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Standarisasi Perlindungan Konsumen | Indeks Tertib Ukur | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2023 | 75,00 | 60,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Pengembangan Ekspor | Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekspor | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2024 | 9,00 | 9,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | | | | Program Pengggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi | Persen; Tahunan: Permendagri 18/2025 | 50,00 | 50,00 | Dinas Kop,Ukm Dan Perdagangan |
| | Laju Pdrb Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang / Tahun) | Orang/Tahunan | 1057455,00 | 1110328,00 | Disporapar |
| | | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Dtw Yang Dipromosikan | Kegiatan/Tahunan | 50,88 | 59,65 | Disporapar |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Sdm Pariwisata Yang Dibina | Orang/Tahunan | 16,67 | 33,33 | Disporapar |
| Menurunnya Angka Tingkat Penganggur an | Persentase Tpt | | | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja | Persen | 100,00 | 100,00 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Pelatihan | Persen;Tahunan | 4,40 | 4,40 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah | Persen | 40,00 | 45,00 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak | Persen;Tahunan | 8,84 | 9,19 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Sesuai Kuota Dari Provinsi | Persen; Tahunan; Uu No. 29 Tahun 2009 | 100,00 | 100,00 | Disperintransnaker |
| | | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Lokasi Potensial Yang Memiliki Profil Investasi | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 85,70 | 90,00 | Dinas Pmptsp |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 90,00 | 92,00 | Dinas Pmptsp |
| | | | | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 90,00 | 92,00 | Dinas Pmptsp |
| Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Yang Tangguh Bencana | 1. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Yang Tangguh Terhadap Bencana<br>2. Melaksanakan Konservasi Lingkungan Di Daerah Resapan Dan Menguatkan Ekosistem Untuk Menjaga Fungsi Ekosistem Serta Meningkatkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim.<br>3. Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan Secara Komprehensif Untuk | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti | Persen Kumulatif Iku Opd | 100,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meminimalisir Dampak Bencana Dan Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat.<br>4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Dan Limbah Secara Berkelanjutan, Terpadu, Dan Ramah Lingkungan Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan.<br>5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Pengendalian Pencemaran Dan Pemulihan Ekosistem. | | | | | | |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 19,45 | 19,94 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentae Peningkatan Status Mutu Air Sungai | Nilai; Tahunan; Iku Opd | 18,51 | 18,70 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Luasan Ruang Terbuka Yang Dilakukan Penghijauan | Hektar;Kumulatif | 3,00 | 3,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 Yang Terkelola | Persen;Tahun | 57,00 | 60,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase Pelaku Usaha Yang Berkomitmen Dalam Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Persen, Tahunan, Iku Opd | 71,00 | 72,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Presentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persen Kumulatif | 67,00 | 70,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diperoleh Masyarakat | Persen; Tahunan; Iku Opd | 38,60 | 38,89 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Pengaduan Lingkungan Yang Dilakukan Penanganan | Persen, Tahunan; Iku Opd | 100,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Sampah Yang Tertangani | Persen; Tahunan ; Pp 27 Tahun 2020; Uu 18 Tahun 2008 | 52,65 | 33,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Persentase Sampah Terkelola | Persen; Tahunan ; Pp 27 Tahun 2020; Uu 18 Tahun 2008 | 20,00 | 29,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Risiko Bencana | | | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana Yang Mempeloleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana | Persen; Tahunan; Spm; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 100,00 | Bpbd |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Yg Memperloleh Layanan Pencegahan Dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana | Persen; Tahunan; Spm; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 100,00 | Bpbd |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Yg Memperloleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana | Persen; Tahunan; Spm; Permendagri 59/2021 | 100,00 | 100,00 | Bpbd |
| | | | | | Persentase Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Tersusun | Persen ; Tahunan ; Permendagri 90/2019 | 100,00 | 100,00 | Bpbd |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana | Persen; Tahunan; Permendagri 90/2019 | 100,00 | 100,00 | Bpbd |
| | | | | Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen, Tahunan, Permendagri 18 Tahun 2020 | 100,00 | 100,00 | Satpol Pp |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Sdm Yang Berkualitas | Indeks Pendidikan | Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sdm Masyarakat Serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Kemiskinan | 1. Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat<br>2. Penguatan Dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin Dan Rentan Miskin<br>3. Meningkatkan Nilai Kesehatan Melalui Kinerja Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat.<br>4. Memperkuat Tata Kelola Dan Pemerataan Akses Pendidikan Inklusif, Meningkatkan Kualitas Guru Dan Kurikulum, | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (Aps) 5-6 Tahun | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Serta Menjamin Wajib Belajar 13 Tahun Dan Mutu Layanan Pendidikan Yang Merata.<br>5. Memperluas Akses Dan Mutu Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Sehat. | | | | | | |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (Aps) 7-15 Tahun | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah (Aps) 7-18 Tahun Kesetaraan | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Rata-Rata Nilai Kelulusan Sd | Nilai; Tahunan; Pp 4/2022 | 79,10 | 79,20 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Rata-Rata Nilai Kelulusan Smp | Nilai; Tahunan; Pp 4/2022 | 83,75 | 84,00 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Kemampuan Literasi Sd | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 77,28 | 77,55 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Kemampuan Literasi Smp | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 77,93 | 78,14 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kemampuan Numerasi Sd | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 65,33 | 65,79 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Kemampuan Numerasi Smp | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 72,63 | 72,98 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Proporsi Jumlah Satuan Paud Terakreditasi Minimal B | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 74,66 | 74,99 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Iklim Keamanan Sd | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 71,56 | 71,83 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Iklim Kebinekaan Sd | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 72,88 | 73,09 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Iklim Inklusivitas Sd | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 54,53 | 55,02 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Iklim Keamanan Smp | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 69,33 | 69,94 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Iklim Kebinekaan Smp | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 73,74 | 74,15 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Iklim Inklusivitas Smp | Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022 | 57,93 | 58,34 | Dinas Dikbud |
| | | | | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Muatan Lokal Dalam Kbm | Persen; Tahunan; Permendikbud 79/2014 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Proporsi Guru Paud Dengan Kualifikasi S1/D4 | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 82,97 | 83,37 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 37,61 | 37,93 | Dinas Dikbud |
| | | | | | Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Asn | Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022 | 64,73 | 65,04 | Dinas Dikbud |
| | | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal Digunakan Di Sekolah | Persen; Tahunan; Peraturan Bupati | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |
| | Indeks Kesehatan | | | Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Daya Tampung Rs Terhadap Jumlah Penduduk | Tahunan; Permendagri No 18 Th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 0,90 | 0,90 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Rs Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi | %; Tahunan; Permendagri No 18 Th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) | %; Tahunan; Perpres Nomor 12 Tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 98,00 | 98,25 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Penderita Dm Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Odgj Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase Orang Terduga Tbc Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar | %; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan Pelayanan Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan | %; Tahunan; Iku Opd; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Cakupan Puskesmas Yang Mempunyai 9 Tenaga Kesehatan Strategis | %; Tahunan; Permenkes No 21 Th 2020; Dinas Kesehatan Kab Tegal | 89,70 | 93,10 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Pemenuhan Persyaratan Perijinan, Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Pada Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | %; Tahunan; Iku Opd; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 59,00 | 69,00 | Dinas Kesehatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) | %; Tahunan; Permenkes Nomor 2269/Menkes/Per/Xi/2011; Dinas Kesehatan Kab. Tegal | 86,00 | 87,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rs. Soeselo) | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | Persen ; Tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100 | 100 | Rs. Soeselo |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Rs Suradadi) | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | Persen ; Tahunan ; Permendagri 86/2017 | 100 | 100 | Rs.Suradadi |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Ekonomi Mandiri | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 0,03 | 0,05 | Dinas Porapar |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Kemasyarakatan | Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020 | 0,15 | 0,22 | Dinas Porapar |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunnya Kemiskinan | Persentase Kemiskinan | | 1. Perluasan Cakupan Layanan Kinerja Sosial<br>2. Beasiswa Dan Dukungan Pendidikan Bagi Anak Dari Keluarga Miskin | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Ppks, Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Jumlah Cakupan Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 75,48 | 77,30 | Dinas Sosial |
| | | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis Dan Ppks Lainnya Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti. | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 87,49 | 87,49 | Dinas Sosial |
| | | | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Psks Perseorangan,Keluarga Dan Kelembagaan Yang Pernah Dibina Dan Diberdayakan. | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 20,83 | 20,86 | Dinas Sosial |
| | | | | Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah / Kabupaten | Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017 | 100,00 | 100,00 | Dinas Sosial |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pelestarian Dan Pewarisan Kebudayaan | Persentase Pelestarian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | **Meningkatkan Kondusivitas Wilayah, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal Dengan Pengarusutamaan Gender Dan Inklusif** | 1. Optimalisasi Pelestarian Budaya Serta Kearifan Lokal<br>2. Penguatan Pembangunan Gender Dengan Kesetaraan, Pemberdayaan Keluarga<br>3. Optimalisasi Stabilitas Wilayah<br>4. Memperkuat Pelestarian Budaya Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Produk Dan Organisasi Seni Lokal.<br>5. Mendorong Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Dan Partisipasi Inklusif Dalam Pembangunan.<br>6. Meningkatkan Penggunaan Kontrasepsi Dan | Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah Tradisi Yang Dikembangkan Terhadap Jumlah Tradisi Yang Ada | Persen; Tahunan; Uu No. 5 Tahun 2017 | 86,82 | 87,21 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mengendalikan Jumlah Penduduk Melalui Program Kependudukan Terpadu Dengan Layanan Kesehatan Dan Edukasi.<br>7. Meningkatkan Ketertiban, Melindungi Kelompok Rentan, Memperluas Layanan Sosial, Dan Memperkuat Kerja Sama Masyarakat Dalam Penegakan Hukum. | | | | | | |
| | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Kesenian Yang Dilestarikan | Persen; Tahunan; Uu No. 5 Tahun 2017 | 53,13 | 55,57 | Dinas Dikbud |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Sumber Sejarah Yang Terdokumentasikan | Persen; Tahunan; Uu No. 5 Tahun 2017 | 87,60 | 87,98 | Dinas Dikbud |
| | | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen; Tahunan; Uu No. 11 Tahun 2010, Permendagri 18 Tahun 2020 | 66,67 | 71,43 | Dinas Dikbud |
| | | | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Museum Yang Terkelola | Persen; Tahunan; Uu No. 11 Tahun 2010 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dikbud |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) | Persen, Bulanan, Laporan Siga | 7,72 | 7,67 | Dinas P3ap2kb |
| | | | | Program Peningkatan Dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | Persentase Keluarga Yang Mendapat Pelayanan Di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Kecamatan | Persen, Bulanan, Laporan Siga | 0,25 | 0,52 | Dinas P3ap2kb |
| | | | | Program Pengendalian Penduduk | Tfr (Angka Kelahiran Total) | Poin, Tahunan, Bps | 2,15 | 2,14 | Dinas P3ap2kb |
| Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Trantibum Yang Tertangani | Persen; Tahunan; Permendagri No.18/2020 | 100,00 | 100,00 | Satpol Pp |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Diselesaikan | Persen; Tahunan; Permendagri No.18/2020 | 100,00 | 100,00 | Satpol Pp |
| | | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Presentase Masyarakat Yang Memahami Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 92,00 | 95,00 | Badan Kesbangpol |
| | | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas Yang Terbina | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2018 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesbangpol |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Persentase Konflik Yang Tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesbangpol |
| | | | | Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Tertangani | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesbangpol |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Parpol Yang Melaksanakan Pendidikan Politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 100,00 | 100,00 | Badan Kesbangpol |
| | | | | | Persentase Lembaga Pendidikan Sma/Smk Dan Pt Yang Menyelengarakan Pendidikan Politik | Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017 | 73,00 | 74,00 | Badan Kesbangpol |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, Dan Budaya Antikorupsi Dalam Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Menguatkan Sumberdaya Dan Sistem Pemerintahan Yang Mengutamakan Riset Dan Inovasi | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan Dan Penguatan Supervisi, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Serta Penguatan Sdm Pemerintahan Yang Berinovasi Dengan Riset<br>2. Menguatkan Supervisi Dan Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menjamin Transparansi, Akuntabilitas, Dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran.<br>3. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Publik Secara Menyeluruh | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Nilai Website Dan Medsos Ppid | Nilai | 87,60 | 88,00 | Dinas Kominfo |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dengan Menyiapkan Standar Serta Infrastruktur Modern Yang Mudah Diakses Masyarakat.<br>4. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat Dan Menguatkan Supervisi Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Efektivitas Pembangunan. | | | | | | |
| | | | | | Nilai Rata-Rata Saq, Visitasi Dan Uji Publik | Nilai | 89,67 | 89,93 | Dinas Kominfo |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Opd Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Dinas Kominfo | Persen; Tahunan; | 62,50 | 66,67 | Dinas Kominfo |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Terpenuhi Kebutuhan Tik Dalam Digitalisasi Pemerintahan | Persen; Tahunan; | 100,00 | 100,00 | Dinas Kominfo |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen; Tahunan; I | 100,00 | 100,00 | Dinas Kominfo |
| | | | | | Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persen; Tahunan | 100,00 | 100,00 | Dinas Kominfo |
| | | | | Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | 68,22 | 70,96 | Dinas Kominfo |
| | | | | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perlindungan Arsip | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 0,14 | 0,18 | Dinas Perpusip |
| | | | | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase Perlindungan Arsip | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 0,14 | 0,18 | Dinas Perpusip |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Adiwerna | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 74,00 | 76,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Balapulang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 60,00 | 70,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Bojong | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 76,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Bumijawa | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 66,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 74,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhwaru | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 75,00 | 85,00 | Kecamatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Jatinegara | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 75,00 | 85,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 90,00 | 92,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Kramat | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 65,00 | 70,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Lebaksiu | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 72,00 | 74,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Margasari | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 78,20 | 78,90 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Pagerbarang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 61,44 | Kecamatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Pangkah | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 91,00 | 94,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Slawi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 100,00 | 100,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Suradadi | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 68,00 | 71,00 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Talang | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 31,00 | 39,40 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Tarub | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 52,44 | 62,26 | Kecamatan |
| | | | | | Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja | Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 | 80,00 | 81,00 | Kecamatan |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemerintahan | Rata-Rata Kinerja Opd Rumpun Pemerintahan Tercapai Lkjip | Persentase | 51,55 | 51,58 | Sekda |
| | | | | | Persentase Pelayanan Publik Opd Rumpun Pemerintahan Yang Sesuai Standard (Ikm) | Persentase | 85,83 | 85,85 | Sekda |
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Kesejahteraan Rakyat | Rata-Rata Nilai Kinerja Opd Rumpun Kesra Tercapai Lkjip | Persentase | 87,53 | 87,56 | Sekda |
| | | | | | Persentase Pelayanan Publik Opd Rumpun Kesra Yang Sesuai Standard (Ikm) | Persentase | 85,38 | 85,40 | Sekda |
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum | Persentase Pembentukan Perda Yang Terselesaikan | Persentase | 100,00 | 100,00 | Sekda |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi | Persentase | 100,00 | 100,00 | Sekda |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan-Bagian Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Opd Rumpun Perekonomian Dan Pembangunan Tercapai Lkjip | Persentase | 55,58 | 55,61 | Sekda |
| | | | | | Persentase Pelayanan Publik Opd Rumpun Perekonomian Dan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Standar (Ikm) | Persentase | 87,65 | 87,67 | Sekda |
| | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan-Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa | Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Tercapai Baik | Persentase | 100,00 | 100,00 | Sekda |
| | | | | | Tingkat Maturitas Ukpbj Terpenuhi | Level | 3,00 | 3,00 | Sekda |
| | | | | | Tingkat Standardisasi Lpse Terpenuhi | Tingkat | 17,00 | 17,00 | Sekda |
| | | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Integrasi Renja Dprd Ke Dalam Renja Sekretariat Dprd | Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017 | 90,00 | 90,00 | Sekretariat Dprd |
| | | | | Program Pencatatan Sipil | Kepemilikan Akta Kelahiran | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 98,00 | 98,00 | Dinas Dukcapil |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Penduduk Ber Akta Kematian | Persen; Tahunan; Iku Opd | 75,00 | 75,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | Persen; Tahunan; Iku Opd | 98,00 | 98,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | Presentase Perekaman Ktp El | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 99,00 | 99,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki Kia | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 50,00 | 50,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Opd Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 100,00 | 100,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | Presentase Aktifasi Ikd Penduduk Ber Ktp El | Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020 | 15,00 | 15,00 | Dinas Dukcapil |
| | | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Lokasi Potensial Yang Memiliki Profil Investasi | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 85,70 | 90,00 | Dpmptsp |
| | | | | | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 90,00 | 92,00 | Dpmptsp |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 85,00 | 85,00 | Dpmptsp |
| | | | | | Persentase Perizinan Non Berusaha Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 85,00 | 85,00 | Dpmptsp |
| | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 53,52 | 53,52 | Dpmptsp |
| | | | | Program Pengendalian Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha | Persen; Kumulatif; Iku Opd; | 92,00 | 93,00 | Dpmptsp |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran Sesuai Ketentuan | Persen | 50,00 | 50,00 | Bapenda |
| | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | | Persentase Tersusunya Dokumen Perbendaharaan Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Tersusunya Laporan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | | Persentase Tersusunya Dokumen Rekonsiliasi Bmd Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Tersusunya Laporan Rekonsiliasi Bmd Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | | Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan Bmd Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | | Persentase Tersusunya Dokumen Penatausahaan Bmd Sesuai Ketentuan | Persen | 100,00 | 100,00 | Bpkad |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Desa | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 12,09 | 20,00 | Inspektorat |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah Berkinerja Tinggi Dan Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase; Kuantitatif; Bappeda Litbang Kab Tegal | 58,30 | 66,67 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah Berakuntabiltas Kinerja Minimal Baik | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 54,17 | 66,67 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 82,00 | 85,00 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase Pemantauan Tptgr | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 90,00 | 95,00 | Inspektorat |
| | | | | Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah Terfasilitasi Pembangunan Zi | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah Terfasilitasi Penerapan Manajemen Risiko | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah Terfasilitasi Penilaian Mandiri Maturitas Spip | Persentase; Kuantitatif; Inspektorat Kab.Tegal | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |
| | | | | Program Pemberdayaan Lembaga, Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Berdaya | Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan Permen Desa, Pdt Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Prosentase Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya | Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan Permen Desa, Pdt Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |
| | | | | Program Penataan Desa | Persentase Lembaga Pemerintahan Desa Yang Bekerja Sesuai Fungsinya | Persentase. Komulatif. Permendagri 112 Tahun 2014 Dan Permendagri 83 Tahun 2015 | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |
| | | | | Program Administrasi Pemerintah Desa | Jumlah Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama | Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Lppd | 82,78 | 82,81 | Dispermasdes |
| | | | | Program Administrasi Pemerintah Desa | Jumlah Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa | Persen; Kumulatif; Iku Opd | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |
| | | | | Program Pengembangan Desa | Persentase Perkembangan Bumdes Tumbuh Dan Berkembang | Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan Permen Desa, Pdt Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Pengembangan Desa | Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |
| | | | | | Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan | Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan Permen Desa, Pdt Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 100,00 | Dispermasdes |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Rpjmd Dan Rkpd | Persen | 95,80 | 96,60 | Bappedalitbang |
| | | | | | Persentase Keselarasan Rpjmd Dan Renstra Pd | Persen | 100,00 | 100,00 | Bappedalitbang |
| | | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah | Presentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | Persen | 95,02 | 95,52 | Bappedalitbang |
| | | | | | Presentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd Bidang Perekonomian Dan Sda | Persen | 95,02 | 95,52 | Bappedalitbang |
| | | | | | Presentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan | Persen | 95,02 | 95,52 | Bappedalitbang |
| | | | | Program Riset Dan Inovasi Daerah | Persentase Hasil Riset Inovasi Yang Termanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen; Kumulatif; Pp No.11 Tahun 2017 | 87,85 | 88,05 | Bappedalitbang |
| | | | | Program Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Asn | Persen, Tahunan; Iku Opd | 67,47 | 68,27 | Bkpsdm |

| Sasaran RPJMD | Indikator Sasaran RPJMD | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan;Sifat Data;Referensi | Kondisi Awal 2024 | 2025 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % Jabatan Manajerial Terisi | Persen, Tahunan; Iku Opd | 85,65 | 86,50 | Bkpsdm |
| | | | | | % Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Mernegah Dasar (Tidak Termasuk Guru & Kesehatan) | Persen, Tahunan; Iku Opd | 92,08 | 93,00 | Bkpsdm |
| | | | | | % Rasio Pegawai Fungsional (Tidak Termasuk Guru & Kesehatan) | Persen, Tahunan; Iku Opd | 96,50 | 97,50 | Bkpsdm |
| | | | | | % Jf Bersertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru & Kesehatan) | Persen, Tahunan; Iku Opd | 45,50 | 51,50 | Bkpsdm |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase Asn Mengikuti Seminar/Workshop/Sejenisnya Sesuai Tupoksi Jabatan | Persen; Kumulatif; Pp No.11 Tahun 2017 | 89,00 | 89,20 | Bkpsdm |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 4.2.4. Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Berikut disajikan keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Provinsi dengan Prioritas Daerah, fokus kebijakan dan kabupaten dan program pembangunan prioritas tahun 2025.

**Tabel 4. 5**

**Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Melalui Prioritas Pembangunan Daerah, Fokus Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif. | Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | 1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya<br>2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH |
| | | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| | | | Penguatan Pembangunan Gender | 1. Pemberdayaan dan perlindungan gender<br>2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan<br>3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA |
| | | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | | Optimalisasi Stabilitas Wilayah | Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | | PROGRAM PENCEGGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan | 1.Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran<br>2. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi<br>3. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi<br>4. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | PD1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah yang berkualitas | Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah yang berkualitas pada wilayah pendukung aktivitas pemerintahan dan daerah tertinggal | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| | | | | | PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM |
| | | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
| | | | | | PROGRAM SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, | Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | Perluasan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | adaptif secara inklusif dan merata | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA |
| | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBREDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
| | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | | | Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin | 1. Peningkatan akses layanan perlindungan dan jaminan sosial<br>2. pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan | 1.Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran<br>2. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi<br>3. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi<br>4. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
| | | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. | Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan | 1.Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran<br>2. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi<br>3. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi<br>4. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |
| | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
| | | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif | Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi, Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan yang berinovasi dengan riset | 1. Penyiapan Standar dan Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah<br>2. penguatan kualitas supervisi Perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta partisipasi pembangunan<br>3. Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah<br>4.Penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN<br>5. Penguatan inovasi dan riset | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
| | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | | |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, sena peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapar masyarakat yang adil dan makmur | Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata | Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | 1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya<br>2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH |
| | | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| | | | Penguatan Pembangunan Gender | 1. Pemberdayaan dan perlindungan gender<br>2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan<br>3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA |
| | | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | | Optimalisasi Stabilitas Wilayah | Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| | | | | | PROGRAM PENCEGGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| | | Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif | Pembangunan wilayah yang berkelanjutan | 1. Penguatan pengendalian, monitoring perlindungan lingkungan hidup strategis<br>2. manajemen persampahan dan | 1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Strategi | Arah Kebijakan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | tatakelola lingkungan hidup<br>3. pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (IKA, IKU, IKL)<br>4. penyiapan sumber daya desa tangguh bencana | 2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| | | | | | 3.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
| | | | | | 4. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 1.2.3. Pelaksanaan Program Unggulan

Mendasari dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 didapatkan program unggulan yang akan diusung oleh Bupati dan wakil Bupati menjadi program unggulan daerah. Pembangunan Strategis Daerah sebagai kelanjutan program unggulan antara lain:

**Tabel 4. 6**

**Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2025**

| NO | PROGRAM UNGGULAN | PROGRAM RKPD |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Infrastruktur yang Merata | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | PROGRAM LLAJ |
| 2 | Penanganan rumah tidak layak huni warga miskin | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3 | Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian Melalui Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur Irigasi yang Berkualitas, Serta Bantuan Bagi Petani dan Nelayan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (BPJS Ketenagakerjaan) |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (BPJS Ketenagakerjaan) |
| 4 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemajuan Wirausaha Serta *Link and Match* Tenaga Kerja dan Lapangan Pekerjaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| 5 | Konservasi Lingkungan Hidup, Khususnya Daerah Resapan Air, dan Pengelolaan Sampah yang Terpadu | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |

| NO | PROGRAM UNGGULAN | PROGRAM RKPD |
|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| 6 | Peningkatan Kualitas Masyarakat Dengan Penguatan Pendidikan dan Keterampilan serta Adanya Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Keluarga Miskin | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| | | PROGRAM RISET DAN INOVASI |
| 7 | Peningkatan pelayanan kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| 8 | Pemajuan desa bangga budaya | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 9 | Digitalisasi layanan publik pemerintahan | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
| 10 | Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | PROGRAM RISET DAN INOVASI |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 4.2.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tujuan dan sasaran Global. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tegal menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan komitmen internasional dan nasional tersebut, maka bentuk integrasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 7**

**Integrasi Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian TPB/SDG's**

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 |
| **Tujuan 1.Mengurangi Kemiskinan** | | | | | |
| **Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.** | | | | | |
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) | Satgas P3KE | % | 0,24 | 0,19 |
| **Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional** | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan | BPS | % | 7,3 | 6,7 |
| 1.2.2* | Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | BPS (tidak ada rincian menurut penduduk miskin, jadi penyebutnya Penduduk/Rumah tangga kab.tegal) | % | | |
| | *(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan* | | % | 51,92 | |
| | *(b) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan* | | % | 14,18 | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(c) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP* | | % | 46,86 | |
| | *(d) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah* | | % | 0,77 | |
| | *(e) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik* | | % | 0 | |
| | *(f) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih* | | % | 81,69 | |
| | *(g) Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)* | | % | 1,41 | |
| | *(h) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah* | | % | 4,3 | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(i) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji* | | % | 97 | |
| | *(j) Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif* | | % | 3,06 | |
| | *(k) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran* | | % | 96,92 | |
| | *(l) Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet* | | % | 36,81 | |
| **Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan** | | | | | |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima **program perlindungan sosial:** | BPJS Kesehatan; Dinkes | Jiwa | PKH 18.8%, PBI 40%, Sembako 11.53% | PKH 18.8%, PBI 40%, Sembako 11.53% |
| | a. PKH | | | | |
| | b. PBI | | | | |
| | c. Sembako | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | BPJS Kesehatan; Dinkes | % | 87,3 | 98 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | BPJS Ketenagakerjaan; BPS ; perinaker | % | a). BPJS Ketenagakerjaan (pembilang) : 76.394 orang<br>b). BPS (penyebut) Buruh/Pegawai : 301.962 orang | 31,92% |
| **Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan** | | | | | |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar | BPS | % | | |
| | *(a) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan air minum layak* | | | 98.17 (air minum layak) | 98,75 |
| | *(b) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi layak* | | | 88.87 (sanitasi dasar) | 89,6 |
| | *(c) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas* | | | 87,1 | 87,8 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)* | | | | |
| 1.4.2* | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: | BPS | % | | |
| | *(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri* | | | 80,29 | 80,8 |
| | *(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak* | | | 1,39 | 1,4 |
| **Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.** | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | SET. BPBD | Jiwa | 0,20416 | 0,15 |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko | SET. BPBD | Dokumen | 1 KRB; 1 RPB; 7 Rencana Kontijensi | 1 KRB; 1 RPB; 9 Rencana Kontijensi |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | bencana (PRB) tingkat kab/kota | | | | |
| **Tujuan 2. Tanpa Kelaparan** | | | | | |
| **Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil** | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting | DINKES | % | 16,1 | 13 |
| 2.2.2* | Prevalensi wasting | DINKES | % | 8,3 | 6,8 |
| **Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca** | | | | | |
| 2.4.1(a) | a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<br>b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | DINAS PERTANIAN; DINAS PUPR (PERDA RTRW) | Hektar | LP2b 36088 LCP2B 5484 | LP2b 36088 LCP2B 5487 |
| **Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk** | | | | | |
| 2.a.1* | Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. | DINAS PERTANIAN; DINAS LH; DINAS PU; BPS | Indeks | 0,055 | 0,057 |
| **Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera** | | | | | |
| **Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup** | | | | | |
| 3.1.1* | Jumlah kasus kematian ibu (AKI) | DINKES | Kasus | 77,6 | 77,5 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang | BPS | % | a). 100 | a). 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | proses melahirkan terakhirnya | | | | |
| | (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; | | | b). 100 | b). 100 |
| | (b) di fasilitas kesehatan | | | | |
| **Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi heaptitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya** | | | | | |
| 3.3.2* | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | DINKES | Kasus baru per 100.000 penduduk | 304 | 269 |
| 3.3.3* | Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu | DINKES | Orang | | |
| 3.3.4* | Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu | DINKES | Orang | 216 | |
| 3.3.5* | Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta | DINKES | Orang | | |
| **Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan** | | | | | |
| 3.4.1 (a) | Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau | BPS | % | 26,92 | 26 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | selama sebulan terakhir | | | | |
| 3.4.1.(b) | Jumlah kasus hipertensi | DINKES | Kasus | 153.005 | 187.520 |
| 3.4.1.(c) | Jumlah kasus obesitas (diabetes) | DINKES | Kasus | 27.100 | 30.190 |
| **Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang** | | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | BPS | % | 6,5 | 5,8 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Dinkes | % | 87,3 | 98 |
| **Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat** | | | | | |
| 3.a.1* | Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir | BPS | % | 26,92 | 26 |
| **Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil** | | | | | |
| 3.c.1* | Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas): | DINKES | Orang | 80 | 90 37 82 340 799 52 40 64 64 |
| | a. Dokter | | | 32 | |
| | b. Dokter gigi | | | 82 | |
| | c. Tenaga kefarmasian | | | 340 | |
| | d. Perawat | | | 799 | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | e. Bidan | | | 52 | |
| | f. Nutrisionis | | | 40 | |
| | g. Sanitarian | | | 62 | |
| | h. Promosi Kesehatan | | | 64 | |
| | i. Ahli Teknik Laboratorium Medik | | | | |
| | | | | | |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | | | | |
| | a. Apoteker | | | | |
| | b. Bidan | | | | |
| | c. Dokter Gigi | | | | |
| | d. Dokter Spesialis | | | | |
| | e. Dokter Umum | | | | |
| | f. Perawat | | | | |
| | g. Tenaga Gizi | | | | |
| | h. Tenaga Kesehatan Lingkungan | | | | |
| | i. Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | | |
| | j. Tenaga Keteknisian Medis | | | | |
| | k. Tenaga Keterapian Fisik | | | | |
| | l. Tenaga Psikolog Klinik | | | | |
| | m. Tenaga Teknik Biomedika | | | | |
| **Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas** | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif** | | | | | |
| 4.1.1 (a) | Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi | KEMDIKBUD<br>(Rapor Pendidikan) | % | *Literasi SD : 60,14<br>*Literasi SMP : 70,00<br>*Numerasi SD : 46,36<br>*Numerasi SMP : 61,72 | *Literasi SD : 64,28<br>*Literasi SMP : 78,77<br>*Numerasi SD : 48,50<br>*Numerasi SMP : 70,35 |
| 4.1.2* | Angka melanjutkan SD/sederajat | DINDIKBUD; KEMENAG | Angka | *Angka Melanjutkan SD : 93,62 | *Angka Melanjutkan SD : 94,56 |
| | Angka melanjutkan SMP/sederajat | | | *Angka Melanjutkan SMP : 87,46 | *Angka Melanjutkan SMP : 90,32 |
| 4.1.2 (a) | Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th | DINDIKBUD; BAPPEDA | Orang | 2977 | 982 |
| **Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar** | | | | | |
| 4.2.2* | Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah | BPS | % | 30,4 | 33 |
| **Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas** | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1* | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal. | DINDIKBUD; DISNAKER; KEMENAG; BPS | % | *Pembilang (Dikbud: SMP 47.636, SMA 11.913, SMK 39.488, LKP 316, PAKET 7.142) disnaker 952)<br>*BPS hanya penyebut: 1.147.688 (usia 15-64) | * Dikbud : 107.071<br>*Disperintransnaker 510 |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). | BPS | % | **25,46** | 28 |
| **Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan** | | | | | |
| 4.4.1 (a) | Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir. | BPS | % | 9,01 | 12 |
| **Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak** | | | | | |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, | BPS | % | a) APM SD/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 98,75;<br>b) APM SD/Sederajat Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%= 104,35; | a) APM SD/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 98,75;<br>b) APM SD/Sederajat Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%= 104,35; |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, | | | c) APK SMP/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 95,24; | c) APK SMP/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 95,24; |
| | | | | d) APK SMA/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 119,71; | d) APK SMA/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 119,71; |
| | | | | e) APK Perguruan Tinggi Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 112,85; | e) APK Perguruan Tinggi Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 112,85; |
| | | | | f) APK SMP/Sederajat,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=98,19; | f) APK SMP/Sederajat,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=98,19; |
| | | | | g) APK SMA/Sederajat,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=92,20; | g) APK SMA/Sederajat,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=92,20; |
| | | | | h) APK Perguruan Tinggi,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=116,63 | h) APK Perguruan Tinggi,Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=116,63 |
| **Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi** | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf | BPS | % | 94,83 | 97 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 5. Kesetaraan Gender** | | | | | |
| **Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat** | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah | SETWAN | % | 26 | 26 |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: | BKD | % | 0,11 | 0,19 |
| | (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil) | | | | |
| | b) Proporsi perempuan yang menempati jabatan eselon II | | | | |
| **Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta** | | | | | |
| 5.6.2* | Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dokumen | 3 | 3 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | seksual dan reproduksi | | | | |
| **Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan** | | | | | |
| 5.b.1* | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir | BPS | % | 75,07 | 75,8 |
| **Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak** | | | | | |
| **Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua** | | | | | |
| 6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak. | BPS | % | 98,17 | 98,75 |
| **Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat** | | | | | |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas | BPS | % | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | cuci tangan dengan air dan sabun. | | | | |
| | *(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air* | | % | 87,1 | 87,8 |
| | *(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak* | | % | 85.87 (sanitasi dasar) | 86,5 |
| | *(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar* | | % | 1,41 | 1 |
| | *(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)* | DPUPR | % | 0,32 | 0.39 |
| **Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat** | | | | | |
| 6.3.1 | Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman | DINAS LH; KLHK | % | 15 | 20 |
| **Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau** | | | | | |
| **Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern** | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | BPS | % | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | BPS | % | 97 | 97 |
| **Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | |
| **Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang** | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita. | BPS | % | 7,65 | 7,65 |
| 8.1.1.(a) | PDRB per kapita. | BPS | Rupiah | 26.85 juta/tahun | 26.85 juta/tahun |
| **Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya** | | | | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun. | BPS | % | N/A | N/A |
| **Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur** | | | | | |
| **Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata** | | | | | |
| 9.1.1 (a) | Kondisi Mantap Jalan KabKota | DPU BMCK | % | 86,04 | 89 |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang | DISHUB | Orang | 133593/130271 | 145000 |
| **Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi** | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur. | BPS | % | 5,1 | 5,4 |
| **Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan** | | | | | |
| **Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional** | | | | | |
| 10.1.1 (a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan | BPS | % | 7,3 | 6,7 |
| 10.1.1.(b) | Jumlah desa tertinggal. | KEMENDESA; DINAS PMD | Desa | 12 | 2 |
| 10.1.1.(c) | Jumlah Desa Mandiri. | KEMENDESA; DINAS PMD | Desa | 3 | 13 |
| **Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut** | | | | | |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | DINAS P3A PPKB; BAG. HUKUM SETDA | Kebijakan | 0 | 0 |
| **Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar** | | | | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | BPJS KETENAGAKERJAAN; BPS | % | a). BPJS Ketenagakerjaan (pembilang) : 76.394 orang<br>b). BPS (penyebut) Buruh/Pegawai : 301.962 orang | 31,92% |
| **Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin** | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | SET. BPBD | Jiwa | 0,20416 | 0,15 |
| 11.5.2.(a) | Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB | SET. BPBD; BPS | % | 0,035 | 0,031 |
| **Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota** | | | | | |
| 11.6.1.(b) | Persentase sampah yang terkelola | DINAS PERKIM; DINAS LH | % | 70,19 | 97 |
| 11.6.2.(b) | Indeks Kualitas Udara | KLHK; DINAS LH | Indeks | 86,24 | 88,34 |
| **Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas** | | | | | |
| 11.7.1.(a) | Proporsi Ruang Terbuka Hijau | OPD yang menangani urusan lingkungan atau permukiman atau PU | % | 37,5 | 25 |
| **Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab** | | | | | |
| **Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen** | | | | | |
| 12.3.1.(a) | Persentase sisa makanan | Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK<br>http://sipsn.menlhk.go.id/ | % | 37 | 30 |
| **Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah** | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2* | Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan | KLHK; DINAS LH | | | |
| | *(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)* | KLHK; DINAS LH | ton | 18.071 | 24.000 |
| **Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali** | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah sampah yang dikelola | Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sipsn.menlhk.go.id/ | Ton | 155.000 | 204.120 |
| **Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.** | | | | | |
| 12.8.1.(a) | Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup | DINAS LH | Unit | 239 | 251 |
| **Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim** | | | | | |
| **Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara** | | | | | |
| 13.1.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang | SET. BPBD | Jiwa | 0,20416 | 0,15 |
| **Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh** | | | | | |
| **Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun** | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan | KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL | Kasus | 3 | 0 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | pembunuhan pada satu tahun terakhir | | | | |
| 16.1.2(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL; SATPOL PP | Kematian/ 100.000 Penduduk | 0 | 0 |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL; SATPOL PP | % | 0,011086995 | 0 |
| **Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua** | | | | | |
| 16.3.1.(b) | Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi | BAG. HUKUM SETDA | % | 100% | 100% |
| **Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya** | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas) | INSPEKTORAT | Nilai | 75,99 | 76,5 |
| **Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat** | | | | | |
| 16.6.1.(a) | Nilai Opini BPK | INSPEKTORAT; BPKPAD | Nilai | WTP | WTP |
| 16.6.1.(b) | Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B | BAG.ORGANISASI SETDA; INSPEKTORAT | % | 64,25 | 71,31 |
| 16.6.1.(c) | Nilai RB Kabupaten/Kota | BAG.ORGANISASI SETDA | Nilai | 77,6 | 79,07 |
| 16.6.2.(a) | Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA | Instansi | 48 | 48 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | pelayanan publik kategori baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | |
| **Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan** | | | | | |
| 16.7.1(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | SETWAN | % | 26 | 26 |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II). | BKD | % | 0,11 | 0,19 |
| **Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran** | | | | | |
| 16.9.1* | Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil | BPS | % | 91,78 | 94 |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah. | BPS | % | 95,47 | 95,9 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.1.(b) | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun | BPS | % | 96,92 | 97,6 |
| **Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran** | | | | | |
| 16.10.2.(a) | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | KIP; DISKOMINFO | Nilai | 87 | 92 |
| **Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan** | | | | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | DINAS P3A PPKB; BAG. HUKUM SETDA | Kebijakan | 0 | 0 |
| **Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan** | | | | | |
| **Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya** | | | | | |
| 17.1.1* | Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB | BPKAD | % | 6,33 | 5,56 |
| 17.1.1.(a) | Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB | BPKAD | % | 0,43 | 0,55 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh | BPKAD | % | 22,57 | 20,55 |

| Kode Indikator | Nama Indikator Kabupaten/Kota | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline 2022/2023) | Target Pencapaian 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| **Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi** | | | | | |
| 17.8.1* | Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir | BPS | % | 66,13 | 66,9 |
| **Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama** | | | | | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. | BAPPEDA | Dokumen | 0 | 0 |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 4.2.6. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Isu-isu pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui program pembangunan prioritas daerah dan prioritas program daerah sebagaimana table berikut:

**Tabel 4. 8**

**Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah**

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| 1 | Bidang Urusan Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini | 11 | Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 77,12 | 100 | | DINAS DIKBUD |
| | | Pendidikan Dasar | 12 a | Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar | 107,03 | 100 | | DINAS DIKBUD |
| | | | 12 b | Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam | 105,99 | 100 | | DINAS DIKBUD |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | | | | | pendidikan menengah | | | | |
| | | Pendidikan Kesetaraan | 13 | Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | 33,34 | 100,00 | | DINAS DIKBUD |
| 2 | Bidang Urusan Kesehatan | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 21 | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 69,10 | 100,00 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 22 | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 71,40 | 100,00 | | DINAS KESEHATAN |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 23 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 74,60 | 100,00 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan balita | 24 | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 110,50 | 100,00 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 25 | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 475,2 | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 26 | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 181,4 | 100 | | DINAS KESEHATAN |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 27 | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 169,8 | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 28 | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 129,40 | 100,00 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 29 | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 125,9 | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan | 210 | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan | 102,2 | 100 | | DINAS KESEHATAN |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | gangguan jiwa berat | | terlayani kesehatan | | kesehatan jiwa sesuai standar | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis | 211 | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 235,8 | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 212 | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan | | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 | 100 | | DINAS KESEHATAN |
| 3 | Bidang Urusan Pekerjaan Umum | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | 31 | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Cakupan Akses Layanan Air Minum | 80,68 | 100 | | DPUPR |
| | | Penyediaan Pelayanan | 32 | Jumlah warga negara yang | PROGRAM PENGELOLAAN | Cakupan Akses | 34,54 | 34,71 | | DPUPR |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | Pengolahan Air Limbah Domestik | | memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Sanitasi/ Limbah Domestik | | | | |
| 4 | Bidang Urusan Perumahan Rakyat | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana | 41 | Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | 33 | 37 | | DINAS PERKIM |
| | | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | 42 | Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | | | | | | |
| 5 | Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 51 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan | 93,38 | 100 | | SATPOL PP |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | | | hukum Perda dan perkada | | | | | | |
| | | Pelayanan informasi rawan bencana | 52 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 27,06 | 100 | | SATPOL PP |
| | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 53 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 81,91 | 100 | | BPBD |
| | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi | 54 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan | | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh | 1,88 | 100 | | BPBD |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | korban bencana | | penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | | | | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 55 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 31,8 | 100,00 | | SATPOL PP |
| 6 | Bidang Urusan Sosial | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti | 56 | Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan | 100 | 100 | | DINAS SOSIAL |
| | | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 57 | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | | | | | | |
| | | Rehabilitasi sosial dasar | 58 | Jumlah warga negara lanjut usia | | | | | | |

| No | Bidang SPM | Jenis Pelayanan Dasar | | Indikator Pencapaian | Program Pembangunan Prioritas | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp. (000) | |
| | | lanjut usia terlantar di luar panti | | terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | | dasarnya diluar panti . | | | | |
| | | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 59 | Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | | | | | | |
| | | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten | 510 | Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial. | 97,99 | 100 | | DINAS SOSIAL |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

### 4.2.7. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Tahun 2025 ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Berikut disajikan tabel prioritas pembangunan daerah pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4. 7**

**Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal**

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Produktifitas Pariwisata | Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | |
| | | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 767.500.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 2. | Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan | | Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | | |
| | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UKM dan Investasi | Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 399.970.000 | DAGKOP-UKM |
| | | | | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | |
| | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat | 70.000.000 | DAGKOP-UKM |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | |
| **3.** | Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan | | Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran dan Investasi | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | |
| | | | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 490.000.000 | Dinas Perintransnaker |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | 75.000.000 | Dinas Perintransnaker |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | |
| | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 75.000.000 | Dinas Perintransnaker |
| | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 10.000.000 | Dinas Perintransnaker |
| | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 50.000.000 | Dinas Perintransnaker |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Informasi Industri Nasional | | |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 60.430.000 | Dinas Perintransnaker |
| | | | | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa | 16.000.000 | Dinas Perintransnaker |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | |
| **4.** | Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian | | Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2 | Rp93.360.000 | Dinas KPTan |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Rp320.000.000 | |
| | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Rp450.000.000 | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp237.800.000 | |
| | | | | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Rp258.000.000 | |
| | | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Rp20.000.000 | |
| | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Rp1.000.000.000 | |
| | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rp486.640.000 | |
| | | | | Pengendalian Organisme Pengganggu | Rp200.000.000 | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Rp35.000.000 | |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2026 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar pada pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor yang menjadi prioritas adalah sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Sementara, usaha khusus untuk menurunkan angka pengangguran juga akan menjadi perhatian.

Sektor pariwisata di Kabupaten Tegal cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, beberapa obyek wisata sudah menjadi ikon kabupaten seperti Guci, Pantai Purwahamba, dan Museum Semedo. Pariwisata juga menyumbangkan PAD yang cukup besar. Usaha yang akan dilakukan Pemkab Tegal di tahun 2026 adalah peningkatan layanan kualitas obyek wisata, perbaikan fasilitas obyek wisata, dan finalisasi obyek wisata baru yaitu hidroterapi di kawasan Guci. Pemkab Tegal juga akan tetap mendorong perkembangan obyek wisata yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa untuk mendorong kemandirian desa.

Perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar pada PDRB, hampir mencapai 17%. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja, memiliki efek pengganda pendapatan yang cukup besar (1,07), serta menghasilkan daya ungkit yang kuat (1,82). Pada tahun 2024, Pemkab Tegal akan melaksanakan upaya pemulihan UMKM pasca pandemi, rehabilitasi pasar rakyat, dan stabilisasi harga komoditas melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Industri pengolahan adalah sektor dengan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Tegal dengan share lebih dari 32%. Berdasarkan tabel input-output, komoditas pada sektor ini juga memiliki daya ungkit dan daya dorong yang besar pada perekonomian. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri logam, dan memiliki akses pada perusahaan besar multinasional (Astra, Komatsu, dsb). Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, Pemkab Tegal pada tahun 2024 akan memfokuskan upaya untuk mempermudah kegiatan usaha industri kecil dan menengah yang berbasis masyarakat (komunal). Hal ini dilaksanakan dengan fasilitasi industri logam dengan perusahaan tier 1 dan tier 2, serta dukungan pengembangan layanan klinik industri (bantuan pengurusan PIRT, merk, ijin berusaha, dan SNI). Sementara, untuk menarik investor baru, Pemkab Tegal berupaya untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, karena sistem bertani di Kabupaten Tegal sebagian besar masih dilaksanakan secara manual (*labor intensive*). Sektor ini merupakan satu-satunya sektor dominan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di masa pandemi dan menjadi bantalan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengembangan sektor pertanian dengan beberapa cara di tahun 2026. Secara langsung, Pemkab akan meningkatkan layanan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tata usaha tani, serta memberikan bantuan sarpras pertanian pada petani, termasuk pengembangangan Klinik Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian (TTP). Di sisi pengembangan teknologi, Pemkab akan melanjutkan kerjasama dengan IPB, utamanya dengan pelaksanaan KKN Tematik pertanian dan kolaborasi pengembangan produk unggulan (saat ini masih berfokus pada bawang putih dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia serta pengembangan padi organik, namun diharapkan akan dapat semakin meluas pada produk lain). Pemerintah

kabupaten juga akan menginisiasi matching fund dengan perguruan tinggi, sebagai komitmen difusi inovasi teknologi pertanian. Pada komoditas ternak, Pemkab akan mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dengan mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal juga akan mendapat perhatian khusus, mengingat tren yang semakin meningkat. Bonus demografi yang dialami Kabupaten Tegal belum termanfaatkan secara optimal, sehingga angka pengangguran bertambah meskipun beberapa investasi yang masuk membutuhkan belasan ribu tenaga kerja. Upaya tercepat yang dapat dilakukan adalah mengarahkan pencari kerja yang ada untuk dapat diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu, Pemkab Tegal akan melakukan *link and match* pelatihan. Usulan kegiatan pelatihan yang berasal dari pagu indikatif kecamatan akan diarahkan agar tema pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, juga melobi pada investor agar mau menyerap tenaga kerja peserta pelatihan. Dengan demikian, peserta pelatihan akan dapat langsung bekerja.

Pemerintah kabupaten juga akan memfasilitasi *link* and *match* dengan sekolah vokasi (khususnya SMK) yang ada di Kabupaten Tegal, sesuai dengan amanat Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sedangkan di sisi demand pasar tenaga kerja, Pemkab akan mendorong kemudahan perijinan untuk menarik investasi baru. Selanjutnya, wirausaha juga akan dikembangkan. Pemkab berkomitmen untuk melanjutkan program Wirausaha Pemuda (WP) dan Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) sebagai inkubator alumni WP untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan, para alumni WP akan mandiri dalam berusaha dan dapat membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, semua usaha yang dilakukan Pemkab bermuara pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

### 4.2.8. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menuntaskan kasus stunting. Pembangunan daerah tahun 2026 ditargetkan untuk mengurangi kasus stunting melalui prioritas daerah yang disajukan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 8**

**Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting**

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | |
| | | | | Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 854.924.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kesehatan Masyarakat | | |
| | | | | Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 1.659.345.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 948.155.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 800.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sosialisasi dan Pemicuan STBM Stunting | 400.000.000 | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 227.835.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pengelolaan Kegiatan Gizi Masyarakat | 1.158.621.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 100.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pelaksanaan Bimwin Catin Tk. Kabupaten | 350.630.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | |
| | | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | |
| | | | | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | |
| | | | | Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 100.000.000 | Dinas Permasdes |
| | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Gender | Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK Remaja dan PEK/UPPKS) | 8.493.580.000 | Dinas P3AP2KB |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap | Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan | Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 3.000.000 | Dinas Kominfo |
| | | | Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 1.000.000.000 | Dinas PUPR |
| | | | | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 794.581.300 | Dinas PUPR |
| | | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1.805.000.000 | Dinas PUPR |
| **3.** | Menurunnya Kedalaman dan Keparahan | Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga | Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah | 500.000.000 | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kemiskinan | Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin | | | |
| **4.** | Menurunnya Ketimpangan Gender | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Pemberdayaan dan Perlindungan Gender | Program Pengelolaan Pendidikan | | |
| | | | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 3.245.564.000 | Dinas Dikbud |
| **5** | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Gender | Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 8.493.580.000 | Dinas P3AP2KB |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (BKB,BKR,BKL ,PIK Remaja dan PEK/UPPKS) | | |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui skema 5 Pilar dan 8 Aksi konvergensi stunting. 5 pilar percepatan penurunan stunting meliputi komitmen pimpinan, pengarusutamaan perubahan perilaku, aksi spesifik dan sensitif, kecukupan pangan dan gizi serta pengelolaan sistem data dan informasi. Sementara 8 aksi konvergensi meliputi analisis situasi, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rembug stunting, penyusunan regulasi daerah, pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), manajemen data, dan evaluasi pelaporan.

Pada tahun 2025 mendasari analisis situasi yang dilakukan, ditetapkan 20 desa lokus intervensi stunting. Lokus intervensi stunting ini mendasari prevalensi stunting serta keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tegal. Desa-desa lokus stunting pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 9**

**Tabel Desa Lokus Stunting Tahun 2025**

| No | Kecamatan | Puskesmas | Desa | Tahun Awal Penetapan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balapulang | Balapulang | Balapulang Wetan | 2024 |
| 2 | Balapulang | Kalibakung | Banjar Anyar | 2024 |
| 3 | Balapulang | Kalibakung | Bukateja | 2024 |
| 4 | Balapulang | Kalibakung | Danareja | 2024 |
| 5 | Bojong | Bojong | Karangmulyo | 2024 |
| 6 | Bojong | Bojong | Tuwel | 2024 |
| 7 | Bumijawa | Bumijawa | Bumijawa | 2024 |
| 8 | Bumijawa | Bumijawa | Muncanglarang | 2024 |
| 9 | Bumijawa | Bumijawa | Sokasari | 2024 |
| 10 | Dukuhturi | Kupu | Sidakaton | 2024 |

| No | Kecamatan | Puskesmas | Desa | Tahun Awal Penetapan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jatinegara | Jatinegara | Gantungan | 2024 |
| 12 | Jatinegara | Jatinegara | Luwijawa | 2024 |
| 13 | Lebaksiu | Lebaksiu | Yamansari | 2024 |
| 14 | Margasari | Margasari | Karangdawa | 2024 |
| 15 | Suradadi | Jatibogor | Gembongdadi | 2024 |
| 16 | Suradadi | Jatibogor | Jatibogor | 2024 |
| 17 | Suradadi | Suradadi | Jatimulya | 2024 |
| 18 | Suradadi | Suradadi | Kertasari | 2024 |
| 19 | Warureja | Warureja | Banjar Agung | 2024 |
| 20 | Warureja | Warureja | Demangharjo | 2024 |

*Sumber: Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2025*

### 4.2.9. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan daerah tahun 2025 ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan melalui prioritas daerah yang disajukan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 10**

**Prioritas Pembangunan Penanganan Kemiskinan Ekstrem**

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan | Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin | Perluasan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Warga Miskin dan Rentan Miskin | Program Rehabilitasi Sosial | | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlatar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandanga | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pengemis di luar panti sosial | | |
| | | | | Penyediaan Permakanan | 2.153.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin | Pemberian layanan rujukan | 10.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | |
| **2.** | Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak | Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Program Kawasan Permukiman | | |
| | | | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1.400.000.000 | Dinas Perkim |
| | | | | RTLH (Musrenbangcam 2022) | 3.900.000.000 | Dinas Perkim |
| | | | | RTLH (Musrenbangcam 2022) | 3.900.000.000 | Dinas Perkim |
| | | | | Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022) | 2.400.000.000 | Dinas LH |
| | | | | Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022) | 2.400.000.000 | Dinas LH |
| | | | | | | |
| **3.** | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat | Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan | Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK | Program pengelolaan pendidikan | | |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kesehatan era tatanan baru | | | | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 2.200.000.000 | Dinas Dikbud |
| | | | | | | |
| **4.** | Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian | Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan | Pemberdayaan petani | Program Penyuluhan Pertanian | | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 50.000.000 | Dinas KPTan |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani | 40.000.000 | Dinas KPTan |
| | | | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 50.000.000 | Dinas KPTan |
| | | | Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | |
| | | | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 5.000.000 | Dinas Perikanan |
| | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan | 40.000.000 | Dinas Perikanan |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 250.000.000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | |
| **5.** | Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan | Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 876.229.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 836.229.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 20.000.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 20.000.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | 60.000.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 20.000.000 | Dinas Perinaker |
| | | | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di | 30.000.000 | Dinas Perinaker |

| No | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Fokus | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | |
| **6.** | Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan | Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan | Pemulihan dan Pengembangan UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | | |
| | | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 100.000.000 | Dinas Kop UKM Dag |
| | | | | | | |
| **7.** | Meningkatnya pemberdayaan gender | Peningkatan produktivitas pemuda dan olah raga berbasis gender | Pengendalian Kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | | |
| | | | | Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 7.510.950.000 | Dinas P3AP2KB |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

**Strategi percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.** Mengurangi pengeluaran dilakukan antara lain melalui jaminan sosial, bantuan sosial, sifatnya *Charity* pada sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim. Sementara meningkatkan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi pada sasaran dan Lokus Kemiskinan Ekstrim.

**Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah** metode Pemberdayaan yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diasesmen berdasarkan penyebab kemiskinannya. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui pemberdayaan ekonomi

**Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah** metode *Charity*, yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diklaster berdasarkan ciri fisik kemiskinan. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui program *Charity*.

**Pedoman Pemberdayaan Ekonomi (Inovasi penanggulangan kemiskinan OPD) antara lain:**

a. Kegiatan bersifat lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan)
b. Dianggarkan secara cukup tuntas
c. Kelompok sasaran diberdayakan tuntas (jumlah peserta tidak harus banyak, antara 50-100 orang)
d. Kelompok sasaran harus warga miskin ekstrim sesuai data DTKS Dinsos (kluster 1.169 orang)
e. Desain program dapat pemberdayaan kelompok, diutamakan pemberdayaan individu/keluarga
f. Setiap sasaran menerima layanan program secara lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan) hingga terentaskan dari kemiskinan ekstrim
g. Nomenklatur resmi kegiatan inovasi mengikuti Sub Kegiatan yang relevan dalam Renstra/Renja
h. Nomenklatur Publik kegiatan inovasi ditetapkan OPD dalam bahasa yang mudah diingat publik
i. Anggaran kegiatan inovasi bersumber dari anggaran Pagu Reguler OPD dan atau Pagu Kegiatan Strategis Kepala Daerah
j. Dilakukan asistensi kematangan inovasi oleh Bidang Kelitbangan Bappedalitbang
k. Dilakukan asistensi penyusunan Renja oleh Bidang Perekonomian SDA Bappedalitbang

**Pedoman *Charity* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim:**

a. Dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin ekstrim
b. Dilakukan untuk mengintervensi program:
    1. RTLH (Disperkim)
    2. Jamban (Disperkim)
    3. Listrik
    4. BST (Dinsos)
    5. PKH (Dinsos)
    6. BLT DD (Dinsos)
    7. KIS (Dinsos)
    8. KIP (Dinsos)
    9. Desa Merdeka Sampah (DLH)
    10. Yuh Sekolah Maning (DisDikbud)
c. Kegiatan yang sudah ada, diarahkan dilakukan dengan kelompok sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim.

Untuk mengetahui kebutuhan pemberdayaan terhadap kelompok sasaran kemiskinan ekstrem telah dilakukan asesment oleh TKPKD Kab. Tegal dengan pelaksana Dinsos dan pelaksana lapangan pendamping PKH di masing-masing kecamatan. Hasil asesmen pemberdayaan meliputi jenis-jenis kebutuhan kelompok sasaran sebagai berikut.

**Tabel 4. 11**

**Kebutuhan Pemberdayaan Kelompok Sasaran Kemiskinan Ekstrem**

| KEBUTUHAN | JML | % |
|---|---|---|
| PELATIHAN UEP DAN MODAL USAHA | 360 | 43.64 |
| PELATIHAN , PERALATAN (GEROBAK,ETALASI,DAGANG) DAN MODAL KERJA | 20 | 2.42 |
| PELATIHAN DAN MODAL USAHA PETERNAKAN (KAMBING, SAPI, UNGGAS) | 168 | 20.36 |
| ALAT BENGKEL DAN MODAL USAHA | 2 | 0.24 |
| ALAT PERTUKANAN DAN MODAL USAHA | 11 | 1.33 |
| ALAT BANTU PENDENGARAN | 1 | 0.12 |
| MODAL DAN PERALATAN PERTANIAN | 60 | 7.27 |
| BANTUAN UANG UNTUK PENGOBATAN | 3 | 0.36 |
| BIAYA SEWA TEMPAT USAHA PIJAT | 2 | 0.24 |
| GEROBAK UNTUK CARI RONGSOKAN | 1 | 0.12 |
| MESIN JAHIT BESERTA PERLENGKAPANNYA | 15 | 1.82 |
| MODAL USAHA, PELATIHAN TATA BOGA | 34 | 4.12 |
| MODAL DAN PELATIHAN ONLINE | 2 | 0.24 |
| MODAL DAN PERALATAN ANYAMAN BAMBU | 1 | 0.12 |
| PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA ARANG, MODAL KERJA | 1 | 0.12 |
| PENGUATAN (MOTIVASI) | 17 | 2.06 |
| PENGEMBANGAN USAHA LAS | 1 | 0.12 |
| PERALATAN LOUNDRY | 1 | 0.12 |
| PERALATAN SERVIS ELEKTRONIK | 1 | 0.12 |
| PERALATAN SOUNDSYSTEM | 1 | 0.12 |
| PERLENGAKAPAN USAHA LAYOS | 1 | 0.12 |
| TIDAK DITEMUKAN | 2 | 0.24 |
| PENAMPINGAN LANSIA | 120 | 14.55 |
| TOTAL JUMLAH | 825 | 100.00 |

***Sumber: TKPKD, 2023***

Adapun desa lokus kemiskinan ekstrem adalah:

**Tabel 4. 12**

**Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem**

| No. | Kecamatan | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Balapulang | Balapulang Wetan |
| | | Danareja |
| | | Danawarih |
| | | Harjowinangun |
| | | Kaliwungu |
| | | Karangjambu |
| | | Pamiritan |
| | | Tembongwah |
| 2 | Bojong | Cikura |
| | | Kajenengan |

| No. | Kecamatan | Desa |
|---|---|---|
| | | Karangmulya |
| | | Lengkong |
| | | Puncangluwuk |
| | | Suniarsih |
| 3 | Bumijawa | Begawat |
| | | Cintamanik |
| | | Dukuhbenda |
| | | Traju |
| | | Gunungagung |
| | | Muncanglarang |
| | | Sokatengah |
| | | Sokasari |
| 4 | Lebaksiu | Slarangkidul |
| | | Lebakgowah |
| | | Dukuhlo |
| 5 | Margasari | Jatilabar |

*Sumber: SK Bupati Penetapan Lokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, 2025*

### 4.2.10. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal

Sebagai penyelaras program program kegiatan Perangkat Daerah yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding yaitu:

1. **Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan**, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;

b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Pemberdayaan Kelurahan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

9) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
10) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan Mebel
11) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD/Peningkatan Kapasitas DPRD/Publikasi dan Dokumentasi Dewan
12) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13) Administrasi Pemerintahan Desa/Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintaha Desa/Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
14) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. **Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, dengan fokus kebijakan pada Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan. Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
   1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
   2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   3) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
   4) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Berkala Jalan
   5) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Rekonstruksi Jalan

6) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pelebaran Jalan Menuju Standar
7) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pembangunan Jalan
8) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pembangunan Jembatan
9) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Rehabilitasi Jembatan
10) Penyediaan Perlengkapan Jalan/Penyediaan Perlengkapan Jalan dai Jalan Kabupaten/ Kota/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
13) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)/Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan/Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
14) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Pemberdayaan Kelurahan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
15) Pengelolaan Keuangan Daerah/ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah/ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

3. **Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan**, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran;
   b. Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran Investasi;
   c. Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Investasi;
   d. Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata/ Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota/ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
4) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Pembangunan Prasarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Pembangunan Prasarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
6) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional/ Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota/ Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
7) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri/ Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga/Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
9) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

10) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

4. **Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender**, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
   b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.

   Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

   1) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pengadaan Mebel Sekolah
   2) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD
   3) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD
   4) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pembangunan Ruang Kelas Baru
   5) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Pengadaan Perlengkapan Sekolah
   6) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
   7) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
   8) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pengadaan perlengkapan paud
   9) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
   10) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pembangunan Fasilitas Parkir

11) Pengembangan Kurikulum/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
12) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar
13) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP
14) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Mebel Sekolah
15) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP
16) Pengelolaan Pendidikan/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
17) Pengembangan Kurikulum/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
18) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
19) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
21) Perlindungan Perempuan/Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

22) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan/Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
23) Perlindungan Perempuan/ Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

5. **Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja**, dengan fokus kebijakan pada :
   c. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
   d. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
   e. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.

   Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
   1) Pemberdayaan Sosial/ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
   2) Pemberdayaan Sosial/ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan/ Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
6. **Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal**, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
   b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
   c. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya.

   Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejateraan Rakyat/Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peninglatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasil Politik/Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
4) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya/Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota/Pengembangan Cagar Budaya
5) Pengembangan Kebudayaan/ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasikan.

### 4.2.11. Inovasi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinsiasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

## Tabel 4. 13

## Inovasi Kebijakan Pembangunan

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| **1** | Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi | | | |
| | | DIGITALISASI ARSIP LAPORAN KEUANGAN (GITARAN) | Mewujudkan pengelolaan arsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin | Manfaat dari Digitalisasi Arsip Dokumen Laporan Keuangan ini antara lain sebagai berikut: Dengan adanya back up arsip secara digital, membuat arsip dan dokumen-dokumen lain menjadi lebih aman. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, terdapat salinan atau back up arsip secara digital. Sehingga kemungkinan hilang atau rusaknya arsip dapat diminimalisir<br>Penyimpanan arsip secara digital mempermudah dalam penataan arsip. Digitalisasi arsip dapat mempermudah perncarian arsip apabila arsip akan digunakan oleh stakeholder sesuai kepentingannya. |
| | | DOI (Dhateng Olih Izin) DPMPTSP | Memudahkan pemohon khususnya untuk usaha mikro mendapatkan izin yang dibutuhkan / IUMK. | Kecepatan pelayanan perizinan khususnya untuk usaha mikro;− Jangkauan pelayanan yang lebih luas karena langsung dapat menjangkau wilayah kecamatan yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten (Slawi). |
| | | LAPOR BUPATI [versi Android] | Meningkatkan peran pemerintah melalui membuka akses | Upaya reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik, dengan menyediakan kanal pengaduan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan laporan, keluhan dan lainnya. | |
| | | ALAT PERLENGKAPAN PARKIR PERMBAYARAN ONLINE | 1. Untuk menyederhanakan proses pembayaran retribusi parkir, yang dahulu melibatkan banyak pihak menjadi lebih sederhana karena menggunakan metode pembayaran online;<br>2. Memangkas waktu pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan 1 x 24 jam;<br>3. Sebagai salah satu sarana dan prasarana yang dapat memberikan segala kemudahan baik dalam hal pembayaran retribusi parkir , program ini juga mampu menyajikan data base kondisi parkir yang ada di Kabupaten Tegal , serta secara real time mampu menyajikan data pendapatan /retribusi parkir yang sudah dibayarkan ; | Manfaat dari inovasi SINGKEREN diantaranya Program ini mampu menyederhanakan mekanisme pembayaran retribusi parkir , menjadi lebih efektif , efisien , transparan dan akuntabel. Kendala lama nya waktu pembayaran retribusi parkir dapat teratasi melalui program ini.Setiap harinya program akan menerbitkan kode id billing , sebagai dasar pembayaran retribusi parkir yang menjadi tanggungan juru parkir. Kode id billing pada setiap juru parkir berbeda beda. Apabila juru parkir pada hari tersebut belum melakukan pembayaran makan akan muncuk notifikasi pada progam APIKEPOL bahwa tagihan belum terbayarkan. Sedangkan apabila retribusi parkir sudah dibayarkan maka akan muncul notifikasi pada program APIKEPOL bahwa tagihan sudah terbayarkan. Juru parkir akan mendapatkan struk pembayaran dari sistem, sebagai bukti bahwa tagihan sudah dibayarkan. |
| | | ANTOR (ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH) | Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat jalan | 1. Berkurangnya antrian tunggu obat di instalasi farmasi<br>2. Meningkatnya standard mutu nasional pelayanan kesehatan (minimal waktu tunggu pelayanan) |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | 3. Meningkatnya kualitas kinerja petugas dalam pelayanan kefarmasian<br>4. Meningkatnya kepuasan pasien/masyarakat |
| | | APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL I-PUSDAKAB TEGAL | Tersedianya layanan perpustakaan digital yang bisa diakses secara online selama 24 jam melalui smartphone. | Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan bahan bacaan / referensi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke gedung layanan perpustakaan daerah. |
| | | E-PENDAPATAN | Kemudahan dalam mengirimkan laporan pendapatan dari OPD pemungut pendapatan ke pengelola pendapatan. Percepatan dalam penyajian laporan bagi pengelola pendapatan. | OPD pemungut pendapatan dapat mengirimkan data pendapatan dengan cepat dan mudah.<br>Pengelola pendapatan dapat menyajikan data pendapatan dengan cepat dan akurat. |
| | | E-Retribusi V2 | Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pemungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik; Meningkatkan kepercayaan pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang pelayanan; Efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar; | 1. Juru Pungut tidak lagi membawa uang tunai hasil Pungutan;<br>2. Data pembayaran langsung masuk ke database Aplikasi;<br>3. Pelaporan sesuai data yang masuk pada Bank Pengampu;<br>4. Mempermudah Pengawasan;<br>5. Mempermudah Pelayanan ;<br>6. Meminimalisir resiko keuangan / mengurangi Kebocoran Pungutan;<br>7. Menyajikan laporan yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel karena tercatat by sistem. |
| | | EPBB - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ELEKTRONIK | Mempermudah monitoring dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Desa/Kelurahan | Monitoring dan pengelolaan PBBP2 lebih mudah di tingkat Desa/Kelurahan.<br>Pelayanan mutasi PBBP2 lebih mudah di tingkat |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Mempermudah pelayanan mutasi PBBP2 di tingkat Desa/Kelurahan Mempermudah pembayaran PBBP2 di tingkat Desa/ Kelurahan | Desa/Kelurahan. Pembayaran lebih mudah di tingkat Desa/Kelurahan. |
| | | INOVASI FORDIS SADEWA ( Forum Diskusi Antar Desa Se Kecamatan Warureja ) | 1. Bertukar informasi tentang Program dan kabar antar pemerintah desa serta koordinasi penyelesaian pekerjaan /  permasalahan yang dihadapi oleh masing - masing Desa. 2. Menambah wawasan  ilmu pengetahuan ( edukasi ) serta pemahaman terhadap realitas tertentu pada pekerjaan yang dihadapi oleh masing- masing desa. 3. Menghasilkan pemahaman  yang sama dan benar setelah diadakan forum diskusi untuk Keberhasilan Suatu Kegiatan / kerja. | 1. Terciptanya koordinasi kinerja yang baik antara Perangkat Desa dengan kecamatan. 2. Komunikasi  dan sharing  pekerjaan - pekerjaan yang masih dalam proses dan pertanggungjawaban untuk  dapat diselesaikan bersama. 3. Menyatukan visi dan misi untuk menghasilkan pemahaman  yang sama dan benar setelah diadakan forum diskusi Fordis sadewa guna menindaklanjuti setiap program. |
| | | INSENTIF PENELITIAN TERAPAN TEMATIK DOSEN | Menciptakan harmonisasi stakeholder (Pemerintah Daerah dan Lembaga akademisi dalam kegiatan riset terapan untuk memecahkan isu/permasalahan pembangunan. | Meningkatkan capaian kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Tegal |
| | | Layanan Antar Izin Gratis (LARIS) | Tujuan dari inovasi mesin antrian terintegrasi pada Mal | Inovasi Mesin Antrian Terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik "Satya |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Pelayanan Publik "Satya Dahayu" adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa tujuan khusus dari inovasi ini adalah: Mengurangi Waktu Tunggu: Salah satu tujuan utama inovasi ini adalah mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam proses antrian. Dengan penerapan sistem antrian terintegrasi, diharapkan pemohon izin atau layanan publik lainnya dapat lebih cepat dilayani, menghindari pemborosan waktu dan meningkatkan produktivitas. Memberikan Informasi yang Jelas dan Akurat: Inovasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang nomor antrian, perkiraan waktu tunggu, dan jenis layanan yang tersedia. Hal ini akan memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang proses antrian yang mereka hadapi. Meningkatkan Kenyamanan Pemohon: Dengan mengoptimalkan | Dahayu" akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak berwenang yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Beberapa manfaat dari inovasi ini adalah: 1. Efisiensi Antrian: Dengan sistem antrian terintegrasi, waktu tunggu masyarakat akan berkurang secara signifikan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik di "Satya Dahayu". 2. Pengalaman Antrian yang Lebih Nyaman: Proses antrian yang teratur dan terkendali akan menciptakan pengalaman antrian yang lebih nyaman bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik. 3. Informasi yang Jelas dan Akurat: Sistem antrian terintegrasi akan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang nomor antrian dan estimasi waktu tunggu. Hal ini akan menghindari kebingungan dan memudahkan masyarakat dalam menentukan kapan mereka akan dilayani. 4. Peningkatan Transparansi: Informasi tentang nomor antrian dan status layanan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik di "Satya Dahayu". 5. Monitoring dan Evaluasi yang |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | proses antrian, diharapkan masyarakat akan mengalami pengalaman antrian yang lebih nyaman dan teratur. Kekacauan dalam antrian dapat dihindari, sehingga memberikan kesan positif terhadap mal pelayanan publik "Satya Dahayu".<br>Meningkatkan Pengawasan dan Monitoring: Inovasi mesin antrian terintegrasi memungkinkan pengawasan dan monitoring yang lebih baik oleh pihak berwenang. Data real-time tentang antrian dan kinerja layanan dapat diakses, sehingga memungkinkan evaluasi dan perbaikan sistem secara cepat.<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan efisiensi antrian dan kenyamanan pemohon yang dihadirkan oleh inovasi ini, mal pelayanan publik "Satya Dahayu" dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<br>Meningkatkan Citra dan Reputasi: Implementasi | Lebih Baik: Sistem antrian terintegrasi memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time. Data ini akan membantu dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan.<br>6. Penghematan Waktu dan Biaya: Proses antrian yang lebih efisien akan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.<br>7. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Dengan memberikan pelayanan yang lebih efisien, nyaman, dan transparan, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di "Satya Dahayu" akan meningkat.<br>8. Peningkatan Citra dan Reputasi: Implementasi inovasi ini akan meningkatkan citra dan reputasi "Satya Dahayu" sebagai mal pelayanan publik yang modern, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<br>9. Meningkatkan Daya Saing: Dengan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, "Satya Dahayu" akan menjadi lebih kompetitif dalam menarik penggunaan layanan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.<br>10. Inovasi bagi Sektor Pelayanan Publik: Kesuksesan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | inovasi yang modern dan efisien ini akan membantu meningkatkan citra dan reputasi mal pelayanan publik "Satya Dahayu". Mal ini akan dikenal sebagai tempat yang ramah dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Lainnya: Keberhasilan inovasi ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pelayanan publik lainnya untuk mengadopsi teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. | inovasi ini dapat menjadi contoh bagi sektor pelayanan publik lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. |
| | | LOAKK (LAIR OLIH AKTA KELAHIRAN KARO KARTU KELUARGA PLUS KIA) | Mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Tegal. Meningkatkan efektifitas dan koordinasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan baik bagi Petugas selaku pengelola dan pemberi layanan maupun masyarakat selaku penerima layanan. | Dengan layanan melalui Program LOAKK, manfaat yang diterima masyarakat yaitu lebih mudah dan cepat dalam memperoleh dokumen kependudukan setelah peristiwa kelahiran. Sedangkan bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan angka capaian kepemilikan dokumen kependudukan. |
| | | Pembayaran Retribusi PBG Secara Elektronik (ePBG) | Inovasi ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendorong implementasi inovasi pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung secara elektronik | Inovasi ini memiliki manfaat yang signifikan dalam pengimplementasian inovasi pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung secara elektronik (ePBG). Berikut adalah beberapa |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | (ePBG). Adapun tujuan spesifik dari inovasi ini adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat proses pembayaran: Tujuan utama dari ePBG adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung. Dengan mengadopsi sistem pembayaran elektronik, pemohon dapat melakukan pembayaran secara online dengan cepat dan tanpa harus mengunjungi loket pembayaran fisik. 2) Meningkatkan efisiensi administrasi: Dengan ePBG, proses administrasi terkait dengan pembayaran retribusi dapat diotomatisasi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan tenaga kerja. 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sistem ePBG dapat mencatat secara otomatis setiap transaksi pembayaran | manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan ePBG: Kemudahan Akses: Penerapan ePBG akan memberikan kemudahan akses kepada pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi. Mereka dapat melakukan pembayaran melalui platform elektronik yang dapat diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi loket pembayaran fisik dan mengurangi keterbatasan geografis atau waktu. Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan ePBG, pemohon tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan perjalanan ke loket pembayaran fisik. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform elektronik. Ini mengurangi biaya transportasi, biaya parkir, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pembayaran retribusi. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ePBG akan mencatat setiap transaksi pembayaran secara otomatis dan menyediakan catatan digital yang terverifikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembayaran retribusi dan memungkinkan pemohon serta pihak berwenang untuk melacak dan memverifikasi pembayaran |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | retribusi yang terjadi. Hal ini akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembayaran dan mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi.<br>4) Meningkatkan pelayanan kepada pemohon: Dengan adopsi ePBG, pemohon akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran retribusi. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk datang ke loket pembayaran fisik, sehingga meningkatkan kepuasan pemohon dalam proses perizinan bangunan.<br>5) Meminimalkan kesalahan dan keterlambatan: Dengan adopsi ePBG, kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam proses pembayaran dapat dikurangi. Selain itu, proses pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.<br>6) Mendukung transformasi digital: Implementasi ePBG merupakan langkah | dengan mudah. Ini juga mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pembayaran.<br>Peningkatan Efisiensi Administrasi: Implementasi ePBG akan mengurangi beban administratif yang terkait dengan proses pembayaran retribusi. Proses administrasi yang terkait dengan pengolahan dan pencatatan pembayaran dapat diotomatisasi, mengurangi kebutuhan untuk pekerjaan manual yang memakan waktu. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengalokasikan sumber daya mereka pada tugas-tugas yang lebih penting dan strategis |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | konkret dalam mendukung transformasi digital dalam sektor perizinan dan pembangunan gedung. Hal ini akan membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. | |
| | | REMPEYEK (REKAM MEDIK PELAYANAN ELEKTRONIK) RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL | Inovasi Rempeyek (Rekam Medik Pelayanan Elektronik Rawat Jalan) dikembangkan karena untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, mengefisiensi penambahan ruang penyimpanan dokmumen rekam medik pasien serta mempermudah laporan administrasi. Tujuan penerapan inovasi Rempeyek sebagai berikut:<br>a. Peningkatan kepuasan masyarakat<br>b. Efisiensi anggaran  <br>c. Kecepatan pelaporan administrasi<br>d. Penurunan waktu tunggu pasien di rawat jalan | Manfaat dari kegiatan Rempeyek di antara lain sebagai berikut:<br>1. Penghematan biaya karena rekam medik elektronik pengelolaannya tanpa kertas dan tidak membutuhkan ruang yang besar dan semakin bertambah untuk pengelolaan berkas dokumen rekam medik kertas.<br>2. Mendorong profesionalisme tenaga kesehatan untuk bekerja lebih taat standard dan kompetensi. Dengan rekam medik elektronik sistem rekam medis dapat terstandarisasi.<br>3. Mengurangi kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan dalam rekam medis. Dengan rekam medis elektronik validasi data dapat dilakukan dengan sistem elektronik.<br>4. Mendorong rumah sakit digital berkualitas tinggi menuju e-hospital. Sehingga dapat mempercepat tersedianya data medik untuk pelayanan pasien ataupun dalam pengambilan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | keputusan manajemen.<br>5. Memiliki barang bukti hukum yang valid dan akurat dengan rekam medik elektronik yang terstandarisasi.<br>6. Untuk dokter rekam medik elektronik dapat membuat catatan medis yang jelas, rapi, standar sehingga menghindari bahaya medis tersembunyi karena tulisan tangan yang potensial keliru terbaca oleh tenaga kesehatan lainnya. |
| | | Si Pentol (Sistem Pendaftaran Online) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat jalan | Berkurangnya antrian Pendaftaran<br>Meningkatnya standard mutu nasional pelayanan kesehatan (minimal waktu tunggu pelayanan)<br>Meningkatnya kualitas kinerja petugas<br>Meningkatnya kepuasan pasien/masyarakat<br>Meminimalisir terjadinya kerumunan |
| | | SIMANTAPBAJA (Sistem Informasi Pemantauan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa) | Tujuan pembuatan aplikasi, sebagai berikut:<br>Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (e-procurement) ditinjau dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya.<br>Menjelaskan dan menganalisis hambatan apa saja yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah | Manfaat yang diperoleh, antara lain:<br>Dapat melengkapi hasil-hasil aplikasi yang lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<br>Menambah pengetahuan di bidang hukum, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<br>Memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tujuan pengadaan dapat tercapai. |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | secara elektronik (e-procurement) di Kantor Setda Kabupaten Tegal.<br>Menganalisis upaya apa saja yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui elektronik (e-procurement) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran belanja pemerintah. | |
| | | SISTEM INFORMASI PENYIMPANAN DOKUMEN ELEKTRONIK PERKANTORAN (PENDEKAR) | Tersedianya aplikasi penyimpanan dokumen/arsip perkantoran secara online dan penyajian dokumen/arsip lebih mudah dan cepat karena sudah dilakukan secara elektronik. | Sistem Informasi Penyimpanan Dokumen Elektronik Perkantoran bisa menghemat anggaran dan ruangan/sarana penyimpanan dokumen manual, dan bisa diakses secara online selama 24 jam dari mana saja dan kapan saja tanpa harus ke kantor untuk mencari dokomen/arsip. |
| | | | | |
| **2** | Pemerataan Infrastruktur Dasar | | | |
| | | DATABASE PERUMAHAN FASOS FASUM DI KABUPATEN TEGAL | Tersedianya database fasum dan fasos perumahan secara akuntabel, terpadu, bersifat interaktif dan realistis.b. Sebagai acuan untuk keperluan perencanaan, pemantauan dan pengembangan fasum | Untuk membantu dalam perencanaan maupun pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan fasum dan fasos perumahan agar semakin akuntabel, informatif dan uptodate |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | dan fasos di Kabupaten Tegal | |
| | | Digitalisasi Geospasial Data Kawasan Permukiman (SPADA) | Inovasi dibangun dengan tujuan untuk : Mempermudah dalam menginput data kawasan permukiman Mempermudah penyediaan data agar mudah diakses oleh seluruh perencana dan pembuat perencanaan dan kebijakan Menjadikan perencanaan yang lebih efisien Pengambilan keputusan berbasis bukti: Keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan Pemantauan dan pengendalian yang lebih baik | Perencana di bappedalitbang baik bidang yang mengampu ataupun bidang lain dapat menjadikan data kawasan permukiman sebagai data pertimbangan pembuatan kebijakan mempermudah mengetahui kebutuhan penanganan atau perencanaan program yang perlu dilakukan dengan lokasi tepat sasaran |
| | | MATARAM (INFORMASI DIGITAL PEMELIHARAAN JALAN KECAMATAN) | Inovasi Mataram, sebuah aplikasi informasi digital pemeliharaan jalan yang dikembangkan untuk Kecamatan Kramat di Kabupaten Tegal, memiliki berbagai tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi ini | A.Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah: 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi SOP pelayanan  bidang pekerjaan umum; 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemeliharaan dan peningkatan infrastuktur jalan; 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan UPTD bidang pekerjaan umum; 4) Meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | dirancang untuk memberikan solusi yang lebih proaktif dan partisipatif dalam menghadapi tantangan pemeliharaan infrastruktur jalan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari Inovasi Mataram:<br>1. Pemeliharaan Jalan yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran: Tujuan utama dari Inovasi Mataram adalah meningkatkan efisiensi pemeliharaan jalan di Kecamatan Kramat. Dengan menggunakan teknologi sensor dan sistem pemantauan yang terintegrasi, aplikasi ini memungkinkan pendeteksian dini kerusakan dan masalah jalan secara otomatis. Informasi ini akan langsung masuk ke dalam sistem, memungkinkan pihak terkait untuk merespons dengan cepat dan melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan proaktif ini, perawatan rutin dan perbaikan jalan darurat dapat dilakukan sebelum masalah memburuk, mengurangi biaya dan upaya yang diperlukan dalam perbaikan. | pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan;<br>5) Meningkatkan capaian Renja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.<br>B.Bagi masyarakat adalah :<br>1.Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengadukan jalan yang rusak;<br>2.Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses jadwal pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan,<br>3.Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum;<br>4.Memperlancar moda transportasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat.<br>C.Bagi pemangku kepentingan/stakeholders pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai data atau bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan berbasis Geografic Information System (GIS)<br>D.Bagi Pemerintah Daerah Turut berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | 2. Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan: Salah satu tujuan krusial dari Inovasi Mataram adalah meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan di Kecamatan Kramat. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan jalan secara cepat, risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat dikurangi secara signifikan. Jalan yang terawat dengan baik juga akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan, termasuk pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.<br>3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Inovasi Mataram berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Aplikasi ini menyediakan fitur pelaporan dari masyarakat, di mana penduduk setempat dapat dengan mudah melaporkan masalah jalan yang mereka temui. Dengan adanya saluran pelaporan yang mudah | |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | diakses dan terintegrasi, masyarakat menjadi bagian dari proses pemeliharaan jalan dan berperan dalam memberikan informasi penting tentang kondisi jalan di lingkungannya. Partisipasi masyarakat ini juga membantu menciptakan iklim kerjasama antara pemerintah dan warga, sehingga meningkatkan tanggung jawab bersama dalam merawat infrastruktur jalan. 4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Inovasi Mataram menyediakan platform informasi yang transparan tentang kondisi jalan, proyek pemeliharaan, dan alokasi anggaran. Data mengenai proyek pemeliharaan dan kemajuan pekerjaan dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui aplikasi ini. Dengan demikian, aplikasi ini memperkuat akuntabilitas pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan dan penggunaan dana pemeliharaan jalan. Transparansi ini juga membantu masyarakat untuk lebih memahami | |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | alokasi anggaran dan prioritas proyek pemeliharaan, menciptakan kepercayaan dan pengertian yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.<br>5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Inovasi Mataram bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan di Kecamatan Kramat. Dengan pemeliharaan yang teratur dan efisien, kualitas jalan akan terjaga dan memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di wilayah ini. Jalan yang baik dan terawat juga berkontribusi pada meningkatnya aksesibilitas ke berbagai tempat, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta membuka peluang investasi dan pariwisata yang lebih besar.<br>Dengan mewujudkan berbagai tujuan tersebut, Inovasi Mataram berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih | |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | aman, dan lebih terhubung bagi masyarakat di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Inovasi ini dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam upaya menghadapi tantangan pemeliharaan jalan secara lebih efisien dan berkelanjutan di era digital. | |
| | | PEMBUATAN DATABASE JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL | Ada kemampuan menjelaskan pengelolaan data perumahan Penyusunan dan penyediaan basis data mendukung kebijakan | Pemerintah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman secara lebih baik |
| | | DATABASE PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL | Tersedianya data atau informasi terkait perumahan yang ada di Kabupaten Tegal beserta Fasum Fasosnya yang merupakan upaya awal untuk proses serah terima PSU dari pengembang ke Pemerintah Daerah | Tersedianya database perumahan yang akuntabel, informatif dan up to date |
| | | SI JAMBLANG (SISTEM INFORMASI JALAN MANTAP BEBAS LUBANG) | Tercapainya target monitoring prosentase kerusakan jalan tiap tahunnya | A. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah :<br>1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi SOP pelayanan  bidang pekerjaan umum;<br>2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemeliharaan dan peningkatan infrastuktur jalan;<br>3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan UPTD bidang pekerjaan umum; |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | 4) Meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan;<br>5) Meningkatkan capaian Renja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.<br>B. Bagi masyarakat adalah :<br>1. Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengadukan jalan yang rusak;<br>2. Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses jadwal pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan,<br>3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum;<br>4. Memperlancar moda transportasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat.<br>C. Bagi pemangku kepentingan/stakeholders pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai data atau bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan berbasis Geografic Information System (GIS)<br>E. Bagi Pemerintah Daerah Turut berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | meningkatkan perekonomian masyarakat |
| **3** | Lingkungan Hidup | | | |
| | | TITIR_CETAR (Cepat Tanggap dan Responsif) | Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan alat bantu bagi pengambilan keputusan dalam kebencanaan Kabupaten Tegal serta memberikan informasi yang ditujukan bagi masyarakat luas khusunya terkait kondisi kebencanaan. | Penyediaan sistem informasi kebencanaan di Kabupaten Tegal yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang meliputi, peta dasar dan peta kebencanaan Kabupaten Tegal, informasi terkait sebaran kebencanaan untuk kebutuhan mengambil kebijakan seperti informasi titik lokasi evakuasi bencana, informasi sebaran dan luasan tiap kebencanaan dan data base kebutuhan data terkait kebencanaan di Kabupaten Tegal. |
| | | BANK SAMPAH ANKSA | MEMENUHI TARGET JAKSTRADA KABUPATEN TEGAL | Mengetahui pengurangan sampah dengan mengetahui volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA penujah |
| | | BERLIMPAH (BERKAH MELALUI SAMPAH) RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL | 1. Meningkatnya pengelolaan sampah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal<br>2. Meningkatkan kepedulian petugas/karyawan terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar<br>3. Meningkatkan lingkungan yang bersih, rapi sehat dan nyaman di tempat kerja<br>4. Dapat pengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna<br>5. Menjadikan bank sampah Berlimpah sebagai percontohan bagi bank sampah daerah lain | 1. Lingkungan menjadi lebih bersih nyaman dan sehat di lingkungan kerja<br>2. Hasil sampah menjadi barang ekonomis<br>3. Berkurangnya volume dan jenis sampah yang dibuang ke TPA<br>4. Meningkatnya perekonomian pegawai Rumah SakiT<br>5. Mudah di replikasi |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | yang telah terbentuk maupun akan terbentuk<br>6. Mengembangkan manajemen pengelolaan bank sampah | |
| | | DESA MERDEKA SAMPAH | Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah<br>Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah<br>Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah<br>Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah<br>Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah<br>Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah<br>Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah<br>Meningkatkanya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah<br>Meningkatnya teknologi, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah |
| | | E-JUKNIS PERTEK (E-book Petunjuk Teknis Permohonan Persetujuan Teknis) | Dalam rangka menjalankan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam Restra yaitu Meningkatkan nilai indeks kualitas udara dan | Adanya keseragaman dokumen teknis <br>Memudahkan penilai dalam memeriksa dokumen<br>Memudahkan pelaku usaha dalam menyusun dokumen |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Indeks Kualitas Air maka perlu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi baru yaitu terkait permohonan persetujuan teknis | teknis dan memahami alur permohonan persetujuan teknis Meningkatkan kualitas dokumen teknis |
| | | Kabupaten Tegal Tersenyum | Pemberdayaan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup agar fungsi lingkungan hidup dapat terjaga, mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ( Go Green ), masyarakat dapat hidup sehat ( Go Health ), dan hidup berkah ( Go Berkah ) dalam pendekatan gerakan sedekah minyak jelantah | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal Meningkatkan kesadaran  masyarakat bahwa melakukan sedekah semudah kita tersenyum. Meningkatnya kegiatan sosial di masyarakat desa. |
| | | PantauanKu (Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup) | 1.Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat . 2.Memudahkan masyarakat/OPD dalam mengakses data kualitas lingkungan | Data menjadi lebih mudah diakses  dan terdokumentasi dengan baik. |
| | | SIMONTIR GOCAR (Sistem Monitoring Tindak Lanjut Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup melalui Google Classroom) | Memudahkan pelaku usaha dan pengawas lingkungan hidup dalam memonitor tenggat waktu pelaksanaan kewajiban/perintah dalam sanksi administrasi. Memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan bukti tindak lanjut sanksi | Mengurangi mobilitas pelaku usaha ke Dinas Lingkungan Hidup (efisiensi waktu) dalam memberikan tindak lanjut kewajiban/perintah dalam sanksi administrasi |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | administrasi.<br>Memudahkan koordinasi antar pengawas lingkungan hidup terkait tindak lanjut sanksi administrasi | |
| | | SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN (SIDUL) | Memudahkan masyarakat dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan Hidup | Mengurangi mobilitas masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup  dalam mengurus Persetujuan Lingkungan |
| | | SISTEM INFORMASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NEW GENERATION | Memberikan pelayanan prima pada masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bebas dari pungli serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga masyarakat tidak ragu melakukan uji berkala kendaraannya guna menjamin keselamatan berlalu lintas dan laik jalan kendaraan. | Manfaat dari inovasi SINGKEREN diantaranya Peningkatan perolehan pendapatan asli daerah retribusi pengujian kendaraan bermotor; Peningkatan pelayanan yang lebih prima, akuntabel, efektif, dan efisien; Tidak adanya lagi potensi pungli dalam pelayanan; masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; |
| | | Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tegal (SIRUNTAH BANTAL) | Memudahkan masyarakat maupun stakeholder terkait yang membutuh data RTH Publik Kawasan Perkotaan Slawi | Memberikan informasi data secara spasial berbentuk peta maupun data tabular terkait lokasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Slawi yang dapat lebih mudah dipahami dan diakses secara digital oleh masyarakat maupun stakeholder terkait yang membutuh |
| | | TESTA (Taman Edukasi Sampah Terpadu dan Agrowisata) | Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah <br>Meningkatkanya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah. | sampah  Meningkatnya teknologi, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah |
| **4** | Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan | | | |
| | | BATIR TEGAL | Mewadahi kolaborasi government-to-government (G2G), Government to Society (G2S), dan  Society to  Society (S2S) sebagai penanganan dan pemulihan multisektor | Mempercepat pemulihan pasca pandemi  khususnya pada   sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | akibat COVID-19 yang terintegrasi | |
| | | KENALI SEJARAH TEGAL | Tujuan dari inovasi Kenali Sejarah Tegal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melalui  Bidang Kebudayaan telah melakukan kegiatan untuk mengenalkan sejarah Tegal kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. | Inovasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang luar biasa  dalam keberhasilan  pembelajaran sejarah kepada generasi muda dan masyarakat, antara lain :<br>1. meningkatnya sumber sejarah yang tadinya  sangat terbatas jumlahnya dan sulit  untuk ditemukan, maka dengan inovasi ini mampu meningkatkan  jumlah sumber sejarah melalui kenali sejarah Tegal<br>2. menambah media pembelajaran  yang semula pengenalan atau pembelajaran sejarah hanya tekstual atau hafalan maka dengan inovasi ini akan dapat menambah  media pembelajaran melalui pengenalan lapangan dan digitalisasi<br>3. Ketertarikan siswa terhadap  pelajaran sejarah  lebih meningkat dibandingkan  mereka hanya  mendengarkan guru bercerita<br>4. Sebagai salah satu  metode pembelajaran  sejarah dengan mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik Kenali sejarah melalui digitalisasi mampu mempercepat  peningkatan  dan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | efisiensi dalam penyaluran informasi Sejarah Tegal |
| | | Akselerasi pemBANGunan melalui Kolaborasi UMKM-WirausahA Kabupaten Tegal (ABANG KUWAT) | Mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan jiwa wirausaha dan pembangkitan UMKM sekaligus dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran | Meningkatkan ekonomi pemuda Kabupaten Tegal |
| | | Wirausaha Pemuda | Pengentasan pengangguran Usia Pemuda melalui kemudahan akses Aplikasi dan partisipasi di Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal | Pemuda Kabupaten Tegal lebih mudah (efektif dan efisien) dalam merencanakan dan merealisasikan ide gagasan bisnisnya melalui Aplikasi Wirausaha Pemuda (lebih mudah mengakses dan berpartisipasi di Program Wirausaha Pemuda). Pemuda Kabupaten Tegal lebih mudah memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usahanya |
| | | DOLAN (dodolan Online) V2 | Mempromosikan produk UMKM asli Kabupaten Tegal, melalui pemasaran virtual. | Produk Asli Kabupaten Tegal dapat lebih dikenal secara luas ; Pelaku Usaha Lokal mampu memasarkan Produknya secara mobile; Meningkatkan volume pemasaran produk asli Tegal oleh Pelaku Usaha Lokal; Memudahkan Konsumen untuk berbelanja Produk Asli Tegal; |
| | | Kandang komunal sebagai usaha pengembangan peternakan sapi potong masyarakat | Mengoptimalisasikan peternakan sapi potong rakyat dengan konsep kandang komunal | Keuntungan yang diperoleh peternak dan masyarakat sekitar dengan adanya kandang komunal, yaitu adanya peningkatan derajat kesehatan ternak dan lingkungan sekitar, keamanan ternak lebih |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | Desa Dukuh Tengah | | terjamin, dan dapat mengefisienkan waktu pemeliharan dan tenaga kerja. Selain itu, manfaat sistem kandang komunal adalah memudahkan transfer inovasi teknologi, karena komunikasi tidak perlu dilakukan dengan cara menemui petani satu persatu, melainkan cukup dilakukan di kandang kelompok maupun dalam pertemuan rutin setiap bulan. Menurut Edwina et al. (2010), kelompok mempunyai fungsi sebagai tempat pembinaan yang memudahkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dikarenakan kelompok memiliki kegiatan budidaya yang sama, terjadi proses belajar bersama, dan adanya tanggung jawab bersama atas program bantuan yang diberikan. Penyuluhan melalui pembinaan kelompok telah menumbuhkan penerapan zooteknik beternak sapi potong pada tingkat yang cukup tinggi dan tinggi (Isbani 2002). |
| | | Klinik Industri | Klinik Industri dibentuk dengan tujuan: Menjadi wadah bagi pelaku IKM untuk berkonsultasi mengenai pegembangan usahanya; Mendekatkan layanan dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal kepada pelaku IKM yang terdapat di seluruh | Manfaat dari Klinik Industri antara lain sebagai berikut: Memberikan solusi bagi Pelaku usaha Industri Kecil Menengah ketika dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan usahanya; Mendekatkan dan menipiskan ‘gap informasi’ terkait dengan semua aspek yang berkaitan dengan dunia industri antara pelaku usaha |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | wilayah Kabupaten Tegal; <br>Memperluas jangkauan pelayanan dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;<br>Memberi layanan dengan lebih efektif dan efisien kepada pelaku IKM;<br>Meningkatkan daya saing industri;<br>Mendukung inovasi dan pengembangan produk pelaku IKM;<br>Memperluas Jaringan Bisnis IKM<br>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri.  | Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Pemerintah;<br>Bentuk nyata pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha Industri Kecil Menengah. |
| | | KREDIT BERKAH (BERTAMBAH KEBAIKAN HIDUP) MELAWAN RENTENIR SECARA ONLINE | Tujuan dengan dilaunchingnya produk Kredit Berkah  adalah sebagai berikut :<br>Memajukan dan Mengembangkan Pelaku Usaha UMK di Kabupaten Tegal.<br>Mengurangi ketergantungan/Pengaruh entitas kredit informal/Legal ( Pelepas Uang luar/rentenir) | Bagi Masyarakat dengan adanya kredit Berkah mendapatkan manfaat dari  dalam hal pendanaan tanpa agunan dengan bunga yang rendah.<br>Bagi Perangkat  Daerah dapat Kemudahan  dan  kecepatan  proses penyusunan dokumen perencanaan.<br>Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Tercapainya visi dan misi Bupati Tegal mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah dan peran serta perempuan. |
| | | KURDA (KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH) | Maksud dari pelaksanaan program KURDa kepada usaha mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses | Program KURDa kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam menanggulangi dampak covid-19 dan untuk meningkatkan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :<br>a. Pembelajaran kepada usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan<br>b. Membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan pelepas uang<br>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan<br>d. Untuk dapat  membantu likuiditas dan permodalan pelaku usaha mikro agar dapat bertahan di masa pandemi covid-19 dengan suku bunga yang lebih kompetitif.<br>e. Turut serta dalam menggerakan roda perekonomian khususnya diwilayah Kabupaten Tegal. | kemampuan permodalan usaha mikro di Kabupaten Tegal. Program ini sangat strategis karena dapat menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha mikro. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan pemulihan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Tegal. Persetujuan Bupati Tegal atas usulan pinjaman tanpa bunga kepada PT BPR Bank TGR untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro dengan bunga murah dapat direalisasikan disamping dukungan dan peran serta semua pihak sangat membantu suksesnya program ini. |
| | | PENDAMPINGAN NASABAH KURDA UMKM | Secara umum, berlangsungnya pertumbuhan kegiatan UMKM cenderung organik dan umumnya digerakkan oleh individu atau anggota keluarga, membuat keahlian  dalam hal pengelolaan usaha | Bagi pelaku usaha (UMKM) penerima kredit setelah mendapatkan pendampingan usaha dapat mengelola usahanya dengan baik,  memaksimalkan modal dan mengurangi biaya produksi yang tidak perlu, yang pada akhirnya bisa mengembalikan pinjaman secara tepat |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | cenderung lemah. Sedikitnya anggota penggerak dalam suatu unit UMKM membuat fokus pekerjaan hanyalah pada produksi produk. Walaupun saat ini terdapat kemudahan berusaha bagi UMKM secara online seperti pemasaran e-commerce atau seri pembelajaran manajemen pengelolaan usaha, dan lain lain , rupanya upaya ini masih dirasa cukup sulit terutama bagi umkm yang kurang menguasai teknologi.<br>Adapun tujuan Pendampingan Usaha bagi UMKM penerima kredit KURDa, adalah : Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha UMKM tersebut Mampu merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dalam pengembangan usahanya.<br>Mampu menguasai managemen usaha mulai dari rantai pasok bahan baku hingga pemasaran hasil akhir produksinya Adapun tujuan  Pendampingan Usaha dari sisi Bank adalah, bisa menjaga tingkat kelancaran pinjaman dari | waktu.Dari sisi Bank, adalah terjaganya NPL pada tingkat yang wajar dan terkendali |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | UMKM penerima kerdit, karena bisa mengantisipasi secara dini bila terjadi kredit macet. | |
| | | Pengembangan Biopestisida Dalam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan | Mencakup target capaian penyelenggaraan inovasi (apa yang ingin diubah inovasi)<br>Tujuan inovasi ini adalah untuk menyediakan beragam produk formulasi biopestisida yang telah teruji efektifitasnya, mudah aplikasinya dan murah didapat sehingga dapat mendukung terwujudnya pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi biaya produksi. Kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat atau menjadi target inovasi adalah para pelaku usaha di sektor pertanian (petani). Produk inovasinya adalah ragam formulasi biopestisida yang dikemas dalam kemasan siap pakai dan isolat murni agens hayati yang bisa diperbanyak sendiri oleh petani. | Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi Inovasi pengembangan biopestisida memberikan kontribusi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, membantu menjaga ekosistem dan memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Penurunan penggunaan pestisida kimia dan peningkatan penggunaan biopestisida akan berdampak positif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu beberapa produk biopestisida yang dikembangkan memiliki fungsi sebagai biofertilizer yang terbukti dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman sehingga inovasi ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. |
| | | Pengembangan Padi Organik Kabupaten Tegal Dengan | Meningkatkan kesejahteraan petani organik | Meningkatnya produktivitas padi organik |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | Teknologi Mikroba-intensif | Meningkatkan luasan lahan pertanian organik | |
| | | SIMPASAR (Sistem Informasi Manajemen Pedagang, Stok dan Harga Pasar Rakyat Kab. Tegal) | Inovasi SIMPASAR bertujuan untuk menyampaikan Informasi kepada Masyarakat untuk mengetahui Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting | Bagi Masyarakat, manfaatnya adalah Masyarakat akan semakin mudah mengakses Informasi Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting yang tersedia di Pasar melalui Gadget (Smartphone, Laptop) tanpa harus menuju Pasar;<br>Bagi OPD, manfaatnya adalah OPD dapat mengetahui Informasi Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting dengan lebih cepat, sehingga dapat melakukan kebijakan yang dianggap perlu dengan lebih cepat pula apabila terjadi kenaikan Harga secara signifikan maupun kekurangan stok barang tertentu. |
| | | TEGAL VIRTUAL TOURISM | Untuk memperkenalkan beberapa tempat wisata di Kabupaten Tegal secara luas melalui Virtual Tour sebagai strategi promosi yang interaktif. | Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada DTW yang ditawarkan dan Meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata. |
| | | Tegalan Batik Festival Kabupaten Tegal (TELIK) | Mewujudkan kolaborasi antara usaha pariwisata dan UMKM dari industri batik lokal | Meningkatkan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi pengrajin batik |
| | | | | |
| **5** | Kualitas Sumber Daya Manusia | | | |
| | | aPLIKASI E LITERASI | untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya degradasi terhadap minat berliterasi. | MENINGKATKAN LITERASI PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | memunculkan generasi penerus bangsa yang inovatif dan kreatif. | |
| | | GENIT BAE (Gerakan Monitoring Bayi ASI Ekslusif) | Tujuan Umum : Meningkatkan cakupan ASI Ekslusif dan menurunkan angka stunting.<br>Tujuan Khusus :<br>1. Ibu bayi mengetahui pentingnya ASI Ekslusif<br>2. Ibu bayi memahami cara pemberian ASI yang baik dan benar<br>3. Menaikan cakupan ASI Ekslusif <br>4. Menurunkan angka Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Danasari | Dapat meningkatkan cakupan ASI Ekslusif dan menurunkan angka stunting. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat : Menambah wawasan, pengetahuan dan cara menyusui yang baik dan benar. |
| | | KEREN MOBILE - (KELUARGA TERENCANA) MOBILE | Tersosialisasinya materi yang berkaitan dengan kespro remaja dan PKBR(Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja)sehingga semakin banyak remaja yang bisa meng akses kesehatan reproduksi remaja. Dengan semakin banyaknya remaja yang mmeng akses informasi tentang kesehatan reproduksi remaka akan makin banyak remaja yang meng eestafetkan informasi kesehatan reproduksi remaja kepada teman sebayanya | Semakin banyak remaja yang menerima materi semakin banyak pendidik sebaya dan konselor sebaya dan semakin banyak peluang tersebarnya materi sosialisasi pada kelompok remaja sebaya melalui organisasi kepemudaan, kelompok kegiatan remaja dll. Tak hanya terbatas pada tersebarnya informasi secara langsung, remaja juga akan makin kreatif membuat konten tentang materi kespro melalui medsos yang mereka punyai. Di era digital ini penyampaian inforrmasi lewat medsos cukup efektif. |
| | | MELATI PAGIKU (Melayani Sepenuh hati | Melakukan deteksi dini orang dengan ODMK/ODGJ | Meningkatkan akses layanan Kesehatan Jiwa kepada masyarakat di wilayah kerja |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | Penderita Gangguan Jiwa dan Keluarga) | Meningkatkan peran serta kader kesehatan jiwa<br>Mensosialisasikan melalui media massa baik online maupun offline<br>Membantu pengobatan pasien ODGJ semaksimal mungkin baik di puskesmas ataupun rujuk ke Rumah Sakit | Puskesmas Pangkah melalui pendekatan keluarga, pemberdayaan dan kemitraan Lintas sektoral serta kerjasama Lintas Program sehingga tercapai derajat Kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. |
| | | PAGUYUBAN MOTIVATOR KESEHATAN IBU DAN ANAK PUSKESMAS ADIWERNA ( PAMORINA ) | Tujuan Umum : Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak secara menyeluruh<br>Tujuan Khusus<br>a.Menurunkan AKI dan AKB<br>b.Meningkatkan Cakupan K1<br>c.Meningkatkan Cakupan K4<br>d.Meningkatkan Cakupan Persalinan Nakes<br>e.Meningkatkan Kun jungan Neonatus<br>f.Meningkatkan Kunjungan Ibu Nifas<br>g.Meningkatkan Cakupan Penanganan Komplikasi Maternal dan Neonatal<br>h.Meningkatkan Cakupan KB aktif<br>i.Meningkatkan Cakupan UCI<br>j.Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif<br>k.Meningkatkan Cakupan MTBSM | Kegiatan kader Motivator kesehatan ibu dan Anak dalam mengawasi ibu hamiL, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir sangatlah bermanfaat karena ibu hamil yang berada di suatu wilayah akan terdaftar, selanjutnya akan mendapatkan pelayanan dari Tenaga kesehatan , ibu bisa mengerti kondisi kehamilan yg sedang dilalui, bisa lebih waspada terhadap kehamilannya terutam bila terjadi tanda tanda kegawatdaruratan, ibu yg bersalin merasa nyaman karena ada kader yg bisa mendampingi sampai ketempat pelayanan , setelah masa nifas ibu merasa lebih diperhatikan karena kader sudah mempunyai bekal dalam mengenali kesehatan ibu dan bayi . Ibu hamil dengan resiko tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih insentif baik dari kader motivator maupun tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya.  |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | PENINGKATAN LAYANAN RAWAT JALAN DENGAN SIPUT PERKASA TERINTEGRASI DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL | meningkatnya pendapatan rumah sakit yang di tandai kondisi-kondisii. Tingkat kunjungan pasien rawat jalan meningkatii. Angka kepuasan masyarakat meningkat | Dengan adanya inovasi ini maka diharapkan tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat termasuk juga kepercayaan masyarakat terhadap stakeholder lainnya Disamping itu juga dengan adanya inovasi ini maka diharapkan angka harapan hidup masyarakat kabupaten tegal semakin tinggi dan tentunya sesuai dengan tujuan RPJMD dan sasaran RPJMD kabupaten tegal |
| | | SIGAP TANGI ( akSI tangGAP TANGani masalah gizI) | Tujuan Umum : Tersedianya pedoman bagi Programmer Gizi dalam melaksanakan Inovasi Penanganan masalah Gizi SIGAP TANGI.<br>Tujuan Khusus :<br>1. Terlaksananya pelayanan perawatan TFC rawat inap bagi gizi buruk dan stunting.<br>2. Terlaksananya kegiatan Posyandu Terpadu( POSGITER) di Tingkat Puskesmas secara optimal.<br>3. Terlaksananya tata laksana rawat jalan bagi gizi buruk dan stunting.<br>4. Terlaksananya Pendampingan Gizi buruk sesuai kriteria yang ditetapkan.<br>5. Terlaksananya EDZI MOBILE( Edukasi Gizi Mobile ) bagi gizi buruk pasca pemulihan.<br>6. Terbentuknya Desa | Stunting dan gizi buruk dapat terjaring lebih cepat dan dapat ditangani secara dini dan komprehensif<br>Balita Gizi buruk dengan komplikasi atau tanpa komplikasi dilaksanakan upaya pemulihan dengan  tatalaksana gizi buruk rawat inap TFC<br>Balita stunting, Gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi dapat terpantau baik klinis maupun status gizinya dengan rawat jalan TFC<br>Keluarga Gizi buruk pasca rawat inap maupun dengan kriteria tertentu mendapatkan pendampingan gizi secara komprehensif<br>Keluarga Balita gizi buruk dan stunting dengan kriteria yg ditentukan mendapatkan edukasi gizi<br>Terbentuknya Desa Peduli Gizi Buruk ( CFC )<br>Terlaksananya pos Gizi CFC di Desa CFC<br>Terlaksananya kelas balita CFC |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Peduli Gizi Buruk /CFC. 7. Terlaksananya kegiatan Pos Gizi /CFC8. Terlaksananya Kelas CFC sesuai sasaran. 9. Terlaksananya Penelitian dan pengembangan (LITBANG) berkaitan pemulihan masalah Gizi dan Stunting. | di wilayah Puskesmas Bumijawa Menjadikan masyarakat tertarik untuk Menyusui secara ASI Eksklusif sebagai upaya pencegahan stunting dan gizi buruk lewat kegiatan Garang ASI desa dan Garang Asi tk. Kecamatan Terbentuknya Kelompok peduli Asi dari Unsur ORMAS sebagai upaya pencegahan stunting dan Gizi buruk Terlibatnya masyarakat , lintas program, lintas sektor maupun lintas OPD dalam upaya pencegahan dan pemulihan gizi buruk dan stunting di wilayah kerja Puskesmas Bumijawa |
| | | Asesmen Berbasis Gamifikasi (ABG) | Tersedia inovasi Asesmen Berbasis Gamifikasi yan dapat diakses oleh guru dan siswa kapanpun dan dimanapun melalui smarphone. | Siswa lebih mudah mengakses asesmen/ penilaian pembelajaraan menggunakan gawai mereka dan menumbuhkan motivasi belajar. Adapun manfaat bagi guru, guru dapat memanfaatkan ABG ini agar pekerjaan terkait evaluasi terhadap siswa lebih efektif dan efisien. Selain berhemat waktu dalam menganalisis soal-soal asesmen, juga menghemat penggunaan kertas. |
| | | BALAKURAWA (BERI ASUHAN LANGSUNG KUNJUNGAN KELUARGA RAWAN) | Meningkatkan kemandirian individu, keluarga, kelompok atau masyarakat (rawan kesehatan) untuk mengatasi masalah kesehatan dengan pelayanan keperawatan sesuai kewenangannya sehingga tercapai | Individu dan keluarga mampu mandiri dalam merawat diri sendiri atau keluarga sebagai upaya meningkatkan kesehatannya. Terintegrasinya semua program yang ada di puskesmas Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal | |
| | | GEMASTING (Gerakan Masyarakat Sadar Stunting) | Memberikan perlindungan dan menjamin pelayananbagi Balita Stunting berdasarkan Hak Azazi Manusia<br>Untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting pada bayi dan balita dan evaluasi perkembangan status gizi balita | Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi1. Pemberdayagunakan keluarga yang mempunyai Balita Stunting2. Keterlibatan Lintas sektoral dalam penanganan dan penurunan Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kupu |
| | | GENIT BAE ( GErakan moNIToring Bayi Asi Eksklusif ) | Tujuan Umum : Meningkatkan cakupan ASI Ekslusif dan menurunkan angka stunting.<br>Tujuan Khusus :<br>1. Ibu bayi mengetahui pentingnya ASI Ekslusif<br>2. Ibu bayi memahami cara pemberian ASI yang baik dan benar<br>3. Menaikan cakupan ASI Ekslusif <br>4.Menurunkan angka Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Danasari | Dapat meningkatkan cakupan ASI Ekslusif dan menurunkan angka stunting. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat : Menambah wawasan, pengetahuan dan cara menyusui yang baik dan benar. |
| | | GEPENG TAFEMIA (Gerakan Pengawasan Minum Tablet Fe Cegah Anemia) | Meningkatkan kepatuhan ibu hamil minum  tablet fe<br>Menambah pengetahuan ibu hamiltentang pentingnya minum fe<br>Memudahkan dalam melakukan evaluasi kepada pasien hamil<br>Menurunkan Kejadian Anemia | Mempermudah mengevaluasi ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe<br>Meningkatkan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet Fe<br>Meningkatkan kualitas pelayanan di poli KIA<br>Mempercepat penurunan kejadian anemia<br>Menurunkan stunting<br>Menurunkan AKI dan AKB |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | Menurunkan AKIdan AKB<br>Menurunkan bayi lahir premature | |
| | | KAFETA (Kafe Bayi dan Balita) | Tujuan umum Kafeta adalah menyediakan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebagai pemenuhan nutrisi bayi & balita yang dikelola oleh desa melalui kader kesehatan yang sudah dibekali pengetahuan mengenai PMBA (Pemberian Makan Bayi & Anak) dengan menggunakan anggaran Dana Desa. Makanan yang disediakan di Kafeta diberikan secara gratis bagi sasaran dengan masalah gizi dan dijual dengan harga terjangkau kepada sasaran lain. | Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi Lebih jauh lagi, Kafeta diharapkan mempunyai dampak positif: (1) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi & kesehatan melalui konsultasi gizi atau melalui media sosial, (2) pemberdayaan serta peningkatan kemampuan & peran serta kader dalam upaya mencegah kekurangan gizi pada bayi balita, (3) peningkatan peran serta desa sektor lain dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, (4) peningkatan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting. |
| | | KURMAPATI (KUNJUNGAN RUMAH PASIEN TB) | Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Penderita TBC bagi PENDERITA TBC berdasarkan hak asasi manusia. | Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi :<br>1. Pemberdayagunakan keluarga yang mempunyai PENDERITA TBC untuk pengawasan, perawatan dan pemberian obat.<br>2. Keterlibatan Lintas sectoral dalam penanganan dan pengawasan PENDERITA TBC di wilayah kerja Puskesmas Jatinegara. |
| | | Pelayanan Responsif GEDSI ( Gender | Pelayanan responsif GEDSI yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Tirta | Inovasi pelayanan ramah GEDSI dapat menjadi terobosan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | Equality and Social Inclusion) | Ayu bertujuan untuk memastikan agar tidak ada kelompok masyarakat maupun pelanggan yang diabaikan atau ditinggalkan oleh perusahaan dalam seluruh aspek layanannya (no one left behind), sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mulai dari diseminasi informasi, administrasi pemasangan baru, penyediaan air dengan kualitas yang sesuai dengan standard kesehatan, sampai dengan pelayanan pengaduan. Tujuan akhir dari pelayanan responsif GEDSI adalah agar semua anggota masyarakat di Tegal dapat menikmati manfaat air bersih air minum dengan akses yang mudah dan terjangkau, sebagaimana pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6. | Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Pelayanan inklusif diberikan langsung kepada pelanggan yang datang dan diwujudkan dengan adanya bangunan dan gedung yang aksesibel bagi seluruh kelompok termasuk kelompok rentan. Peningkatan aksesbilitas mengakomodir kebutuhan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas maupun berkebutuhan khusus yang diwujudkan dengan penyediaan jalan landai, kursi roda, toilet khusus penyandang disabilitas, rambu dan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas dan ruang laktasi. Pembangunan aksesibilitas ini sesuai dengan Pedoman Pengarusutamaan GESI Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Peningkatan aksesibilitas juga berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Perumda Air Minum Tirta Ayu tahun 2022 secara global dengan hasil 81,233 ( Baik). Peningkatan juga ditunjukkan dalam unsur sarana dan prasarana dari skor 2,983 (kategori kurang baik) di tahun 2021 menjadi 3,340 (kategori baik).<br>Sosialisasi inklusif adalah sosialisasi yang menjangkau dan dapat diakses seluruh anggota masyarakat tanpa terkendala oleh gender, umur, keterbatasan |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | fisik, maupun faktor penghalang lainnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh audiens yang berpartisipasi tanpa terkecuali, dan audiens dapat memberikan umpan balik. Sosialisasi inklusif dilaksanakan dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya yang merata kepada seluruh kelompok. Sosialisasi inklusif dipedomani dengan Panduan Sosialisasi Inklusif Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Penerapan sosialisasi inklusif sudah diterapkan di tahun 2022, meskipun baru terlaksana satu kali karena terkendala pandemi Covid-19, kedepannya akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan sosialsiasi. Selain dengan sosialisasi, keterbukaan akses informasi bagi semua kelompok juga didapatkan melalui adanya akses media sosial (Facebok, Twitter, Instagram dan Youtube), layanan Call Center 24 jam serta kerjasama dengan beberapa organisasi non pemerintah yang ramah disabilitas seperti Difabel Slawi Mandiri (DSM). Informasi yang aksesibel dan sosialisasi inklusif juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat dalam unsur prosedur dengan skor |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | 3,130 (baik) serta unsur prosedur online, yang memiliki skor 3,283 (Baik).<br>Dengan adanya kedua inovasi tersebut juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah pelanggan ditengah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Sesuai Laporan Tahun 2021 jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal mencapai 52.000 SR, meningkat sebesar 6,63% dari tahun 2020 dengan total pelanggan 45.648 SR. Eksistensi pelaksanaan inovasi juga diawasi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev).<br>Monev dilakukan secara internal dengan manajemen dibantu dengan pihak ketiga, dalam hal ini Konsultan. |
| | | PORTAL JAWA (POJOK LITERASI BUMIJAWA) | Tujuan utama inovasi ini adalah untuk meminimalisir kebosanan dan kejenuhdan masyarakat ketika menunggu proses administrasi;<br>Menciptakan kenyamanan masyarakat ketika menunggu proses administrasi dengan membaca;<br>Menambah pengetahuan masyarakat dengan menambah literatur | Meminimalisir kejenuhan masyarakat ketika menunggu proses administrasi Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya baca masyarakat dengan literatur |
| | | Rumah Paten Ramah Anak (MANTEN MANAK) | Menyediakan ruang paten yang memberi kenyamanan pada anak | Masyarakat merasa nyaman ketika datang ke rumah paten walaupun dengan membawa anak |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | RUMAH PELITA (Rumah Pemulihan Gizi Balita) | Tujuan utama pelaksanaan Rumah Pelita adalah untuk membantu memulihkan kondisi gizi balita yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Namun, selain itu, ada beberapa tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan Rumah Pelita antara lain:<br>1.Mencegah timbulnya masalah gizi pada balita di masa depan dengan memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat kepada keluarga dan masyarakat.<br>2.Memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terpadu kepada balita yang mengalami kekurangan gizi, termasuk pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi.<br>3.Meningkatkan kualitas hidup balita dan membantu memperbaiki kondisi kesehatannya.<br>4.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan keluarga dalam merawat dan mengasuh balita dengan baik.<br>5.Mendorong partisipasi masyarakat dan keluarga dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk pada balita. | Rumah Pelita memiliki banyak manfaat yang dapat memberikan dampak positif bagi balita yang mengalami stunting dan kekurangan gizi akut dan keluarganya diantaranya:<br>Meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, balita yang mengalami stunting/kekurangan gizi akut akan diperiksa kesehatannya oleh dokter Puskesmas dan dirujuk ke rumah Sakit sesuaiprosedur, memberikan PMT yang berbasis pangan lokal yang padat gizi secara gratis untuk meningkatkan nafsu makan sehingga membantu balita yang mengalami malnutrisi untuk meningkatkan BB, TB,dan memperbaiki kondisi kesehatannya, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,<br>memberikan dukungan psikososial bagi balita dan keluarga selama masa penanganan di rumah Pelita, dan dapat membantu meningkatkan motivasi balita dan keluarga untuk terus mematuhi program, serta mencapai target penurunan angka balita stunting. Dengan adanya rumah pemulihan gizi balita, balita yang mengalami masalah gizi buruk memiliki kesempatan untuk pulih secara optimal dan mengalami perbaikan dalam |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | 6.Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi balita yang membutuhkan perawatan khusus. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan program Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Balita dapat membantu mengurangi angka kekurangan gizi pada balita dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masa depan. | kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup mereka. |
| | | Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Trengginas | Percepatan penaganan masalah sosial yang ada di Kabupaten Tegal | Permasalahan sosial dan layanan sosial dapat terselesaikan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat |
| | | VISUALISASI DATA MELALUI PEMETAAN BALITA STUNTING DI DESA BUMIJAWA, KECAMATAN BUMIJAWA, KABUPATEN TEGAL | memberikan gambaran atau visualisasi penyebaran kasus stunting di Kabupaten Tegal secara digital dan mempermudah proses intervensi yang dilakukan pihak-pihak terkait | 1. Data bersifat dinamis sehingga dapat diperbarui secara berkala, 2. Menunjukkan sebaran data balita stunting ,3. Mengetahui lokasi serta rute menuju rumah balita stunting dengan akurat. |
| | | | | |
| **6** | Menekan Laju Kemiskinan | | | |
| | | Aplikasi New Order Sembako (SINOKe) Dinas Sosial | Tujuan Aplikasi New Order Sembako (SINOKe) adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat khususnya | Meningkatkan peran aktif penerima program bantuan sosial sembako akan hak dan kewajibannya Meningkatkan kinerja OPD |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | penerima Program Bantuan Sosial Sembako Mempermudah Penerima Program Bantuan Sosial Sembako dalam memilih dan memesan komoditi sembako yang dibutuhkan Menggerakkan roda perekonomian dengan pemberdayaan komoditi lokal dengan melibatkan pedagang kecil dan petani lokal. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial•    Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengentasan kemiskinan Mempermudah monitoring, evaluasi dan pelaporan program Meningkatkan kredibilitas Dinas Sosial selaku pelaksana program bantuan sosial sembako Memperbaiki pola pikir penerima program bantuan sosial sembako Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi | dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan program Memfasilitasi pedagang kecil dan petani lokal agar dapat berperan serta dalam program bantuan sosial sembako |
| | | Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak | Melindungi hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan | Biaya hidup diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi penunggu pasien tidak |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | Mampu/Keluarga Miskin (Living Cost) | kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Mendapat jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/ duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan natkah, yang berada di luar kekuasaannya. Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial di bidang kesehatan, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin | mampu selama menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan sehingga bisa mengurangi beban pengeluaran. |
| **7** | Menekan Laju Pengangguran | | | |
| | | AVOCADO (Aplikasi Lacak Data Pelaku Usaha Kabupaten Tegal) | Menyediakan database pelaku usaha di Kabupaten Tegal | Manfaat dari ide gagasan pembuatan sistem informasi atau aplikasi lacak data pelaku usaha Kabupaten Tegal 'Avocado' ini antara lain sebagai berikut:<br>1. Menyediakan database pelaku usaha, utamanya yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. |

| No | Isu Kabupaten Tegal | Inovasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama Inovasi | Tujuan Inovasi | Manfaat Inovasi |
| | | | | 2. Memudahkan pelacakan dan pencarian data pelaku usaha.<br>3. Memudahkan updatting atau pembaharuan data pelaku usaha. |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2025 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| KODE | URAIAN | RKPD 2025 | APBD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.879.683.239.000** | **2.879.683.239.000** | **3.065.968.159.305** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **706.445.652.000** | **706.445.652.000** | **730.724.279.000** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 370.066.609.000 | 370.066.609.000 | 347.087.633.000 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 309.707.181.000 | 309.707.181.000 | 347.307.181.000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 17.530.000.000 | 17.530.000.000 | 20.387.603.000 |
| 1.14 | Lain-lain PAD Yang Sah | 9.141.862.000 | 9.141.862.000 | 15.941.862.000 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **2.173.237.587.000** | **2.173.237.587.000** | **2.335.243.880.305** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 2.022.277.997.000 | 2.022.277.997.000 | 2.175.381.148.305 |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 150.959.590.000 | 150.959.590.000 | 159.862.732.000 |
| | | | | |
| **2** | **BELANJA** | **3.080.300.038.200** | **3.080.300.038.200** | **3.227.089.518.826** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **2.299.259.587.192** | **2.261.622.487.612** | **2.313.370.573.085** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.262.457.762.123 | 1.248.330.340.753 | 1.225.271.334.424 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 942.902.169.569 | 918.732.491.359 | 973.225.688.161 |
| 2.1.3 | Belanja Hibah | 71.619.255.500 | 72.279.255.500 | 92.323.150.500 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 22.280.400.000 | 22.280.400.000 | 22.550.400.000 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **274.833.210.208** | **312.820.309.788** | **410.932.216.741** |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **10.000.000.000** | **10.000.000.000** | **5.500.000.000** |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **504.648.110.300** | **504.648.110.300** | **496.857.240.800** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 68.012.149.300 | 68.012.149.300 | 25.900.000.000 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 436.635.961.000 | 436.635.961.000 | 471.386.729.000 |
| | | | | |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | **(200.616.799.200)** | **(200.616.799.200)** | **(161.121.359.521)** |
| | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **214.116.799.200** | **214.116.799.200** | **169.621.359.521** |
| 3.1.1 | SiLPA | 212.616.799.200 | 212.616.799.200 | 168.121.359.521 |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **13.500.000.000** | **13.500.000.000** | **8.500.000.000** |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Daerah | 12.500.00.000 | 12.500.00.000 | 7.500.000.000 |
| 3.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan | 0 | 0 | 0 |
| | **Pembiayaan Netto** | **200.616.799.200** | **200.616.799.200** | **161.121.359.521** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN** | **0** | **0** | **0** |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam BAB III disebutkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tegal kedepan diproyeksikan akan terus meningkat.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu belanja daerah yang bersifat mandatory juga menjadikan proyeksi belanja daerah semakin meningkat. Dengan adanya mandatory terkait pendanaan yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya, belanja diprioritaskan untuk pencapaian SPM dan pelayanan public.

Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau ***Sustainable Development Goals*** (**SDGs**) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Penurunan angka stunting juga merupakan prioritas dalam kebijakan belanja daerah.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum / kewilayahan.

### 5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

**1. Pendidikan**

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;

b. **Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

**e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah.

**f. Program Perfilman Nasional**

Program ini diarahkan pada banyaknya film warisan budaya yang diproduksi di Kabupaten Tegal.

**2. Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat**.**

b. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**
Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan kabupaten; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) kabupaten, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.

**d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana system pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat.

e. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan jaringan drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.

f. **Program Penataan Bangunan Gedung**
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.

h. **Program Penyelenggaraan Jalan**
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju standart, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan rehabilitasi / penggantian jembatan pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

i. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

j. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Perumahan**
Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin, serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah kabupaten.

**b. Program Kawasan Permukiman**
Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

**c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sebelumnya rehabilitasi RTLH berupa bantuan keuangan kepada desa. Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penanganan perumahan tidak layak huni.

**d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

**5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. **Program Penanggulangan Bencana**
Program ini diarahkan pada pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas, penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pemberdayaan Sosial**
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan social (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam kabupaten.

b. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
Program ini diarahkan pada koordinasi dan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

c. **Program Rehabilitasi Sosial**
Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.

e. **Program Penanganan Bencana**
Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.

## 5.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan Tenaga Kerja**
Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. **Program Penempatan Tenaga Kerja**
Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten.

d. **Program Hubungan Industrial**
Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan

upah minimum Kabupaten (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
   Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten.
b. **Program Perlindungan Perempuan**
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
c. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
   Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
d. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
   Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.
e. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
   Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
f. **Program Perlindungan Khusus Anak**
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

**3. Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi- umbian dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.
b. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa *stunting* dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan
c. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

**4. Pertanahan**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah**
   Program ini diarahkan pada pemetaan aset lahan milik Pemerintah daerah yang telah bersertifikat.
b. **Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah *Absentee*.**
   Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
c. **Program Penatagunaan Tanah**
   Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indikator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.

**5. Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
b. **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
   Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.
c. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
   Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.
d. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
   Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.
e. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
   Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/ UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).
f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.

g. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
   Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indicator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.
i. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
   Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
j. **Program Pengelolaan Persampahan**
   Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pendaftaran Penduduk**
   Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam kabupaten, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten.
b. **Program Pencatatan Sipil**
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.
c. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten, dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penataan Desa**
Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa.

b. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**
Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di dalam kabupaten.

c. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**
Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**
Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**
Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

**9. Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).** Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan

perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan kabupaten.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
   Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.
b. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
   Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

**11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**
   **Program ini diarahkan pada ijin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi.**
b. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di kabupaten.
c. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
   Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.
d. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.
e. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**
   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.
f. **Program Pengembangan UMKM**
   Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

**12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.
b. **Program Promosi Penanaman Modal**
   Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.
c. **Program Pelayanan Penanaman Modal**
   Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.
d. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
   Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
e. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
   Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data, dan informasi penanaman modal.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,** diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
b. **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan,** diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

**14. Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

**15. Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi,** yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*.

**16. Kebudayaan**

Rencana **program** prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Kebudayaan**
   Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).
b. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.
c. **Program Pembinaan Sejarah,** diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.
d. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**
   Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.
e. **Program Pengelolaan Permuseuman** diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

**17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Perpustakaan.** Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kabupaten sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum kabupaten.

**18. Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan Arsip.** Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten dan perangkat daerah.

## 5.3. Urusan Pilihan

1. **Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.
b. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.

c. **Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

d. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di kabupaten melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. **Pariwisata**
Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya Tarik wisata unggulan; penetapan kawasan stategis pariwisata kabupaten; perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerbitan tanda usaha pariwisata dalam kabupaten; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. **Program Pemasaran Pariwisata**
Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. **Pertanian**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. **Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. **Perdagangan**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**
   Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan.
b. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
   Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi kabupaten serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).
c. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**
   Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam kabupaten yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.
d. **Program Pengembangan Ekspor**
   Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah kabupaten/kota dan penguatan ekspor Kabupaten dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).
e. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah kabupaten melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah kabupaten melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.
f. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,** Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kabupaten.

5. **Perindustrian**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

6. **Transmigrasi**

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan pelatihan transmigrasi lokal.

### 5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**1. Sekretariat Daerah**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar., kegiatan administrasi umum yang

menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

b. **Program Perekonomian dan Pembangunan**
Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.** Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

### 5.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

**1. Perencanaan**

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan

pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

**b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

**2. Keuangan**

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

**3. Kepegawaian**

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assestment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan system merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan

dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi.

4. **Pendidikan dan Pelatihan,** Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. **Penelitian dan Pengembangan** Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

### 5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**
Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### 5.7. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

### 5.8. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

c. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. TEGAL
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **1.059.393.155.800,00** | **1.064.471.554.880,00** | **1.069.338.232.420,00** | **9.945.076.620,00** | | | | | | | **1.018.974.995.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.057.707.396.800,00** | **1.062.785.795.880,00** | **1.067.595.568.713,00** | **9.888.171.913,00** | | | | | | | **1.016.039.995.000,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **1.057.707.396.800,00** | **1.062.785.795.880,00** | **1.067.595.568.713,00** | **9.888.171.913,00** | | | | | | | **1.016.039.995.000,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **733.978.711.800,00** | **732.507.110.880,00** | **751.648.500.047,00** | **-63.307.362.800,00** | | | | | | | **670.671.349.000,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 228.084.500,00 | 228.084.500,00 | 134.349.500,00 | -93.735.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 335.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 107.120.000,00 | -17.880.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 103.084.500,00 | 103.084.500,00 | 27.229.500,00 | -75.855.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 729.729.711.800,00 | 728.258.110.880,00 | 747.479.402.543,00 | 17.749.690.743,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 664.116.849.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 6969 Orang /bulan | 6969 Orang /bulan | 729.429.711.800,00 | 727.958.110.880,00 | 747.197.238.793,00 | 17.767.526.993,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-TPG PNSD<br>DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD<br>DAK NON FISIK-TKG PNSD<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU<br>DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU | - | - | | | 663.766.849.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 282.163.750,00 | -17.836.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Perrsentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 23.743.200,00 | -26.256.800,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 23.743.200,00 | -26.256.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 179.425.000,00 | -575.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 380.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 85 Orang | 85 Orang | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 179.425.000,00 | -575.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 831.615.500,00 | 831.615.500,00 | 735.583.769,00 | -96.031.731,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.658.818,00 | -341.182,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 151.050.500,00 | 151.050.500,00 | 150.373.725,00 | -676.775,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.456.500,00 | -543.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 153.780.000,00 | 153.780.000,00 | 153.543.750,00 | -236.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 23.662.500,00 | -5.537.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 166.085.000,00 | 166.085.000,00 | 135.687.875,00 | -30.397.125,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 191.700.601,00 | -58.299.399,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 430.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 426.784.250,00 | 296.784.250,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 1.407.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - Unit | - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 805.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 57 Unit | 57 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.622.500,00 | -377.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 102.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 377.161.750,00 | 297.161.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 2.368.800.000,00 | 2.368.800.000,00 | 2.198.468.985,00 | -170.331.015,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 2.607.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 400 Laporan | 400 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 590.000.000,00 | 590.000.000,00 | 529.606.485,00 | -60.393.515,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 1.771.300.000,00 | 1.771.300.000,00 | 1.661.362.500,00 | -109.937.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 460.500.000,00 | 460.500.000,00 | 470.742.800,00 | 10.242.800,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 110.500.000,00 | 110.500.000,00 | 113.300.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 61 Unit | 61 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 53.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 72 Unit | 72 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 105.265.300,00 | 5.265.300,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 179.377.500,00 | -622.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 375.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Indeks Iklim Kebinekaan SMP<br>Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Indeks Iklim Keamanan SD<br>Rata-rata Nilai Kelulusan SMP<br>Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan<br>Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Iklim Inklusivitas SMP<br>Indeks Iklim Keamanan SMP** | | | | **67<br>47<br>67,3<br>82<br>100<br>50<br>55,7<br>67,24 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%** | **67<br>47<br>67,3<br>82<br>100<br>50<br>55,7<br>67,24 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%** | **283.128.685.000,00** | **287.578.685.000,00** | **274.801.434.066,00** | **24.569.961.000,00** | | | | | | **307.698.646.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 159.284.523.500,00 | 161.434.523.500,00 | 154.466.541.600,00 | -4.817.981.900,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 170.341.286.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 350.734.000,00 | 350.734.000,00 | 330.032.000,00 | -20.702.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 49 Unit | 49 Unit | 6.547.221.000,00 | 6.547.221.000,00 | 4.747.537.750,00 | -1.799.683.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.357.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 7 Ruang | 7 Ruang | 1.041.546.000,00 | 1.041.546.000,00 | 952.736.000,00 | -88.810.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.305.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 172 Paket | 172 Paket | 3.306.282.000,00 | 3.806.282.000,00 | 3.399.588.000,00 | 93.306.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.373.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 230.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 770.000.000,00 | 770.000.000,00 | 626.564.300,00 | -143.435.700,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.174.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 681 Satuan Pendidikan | 681 Satuan Pendidikan | 885.254.000,00 | 885.254.000,00 | 576.469.400,00 | -308.784.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 681 Satuan Pendidikan | 681 Satuan Pendidikan | 116.852.000.000,00 | 116.852.000.000,00 | 117.710.390.000,00 | 858.390.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAK NON FISIK-BOS REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | - | | | 116.852.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 1366 Orang | 1366 Orang | 324.829.500,00 | 324.829.500,00 | 120.080.650,00 | -204.748.850,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 1000 Unit | 1000 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0034 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi* | | | | 54 Orang | 54 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 180 Orang | 180 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 79.995.000,00 | -20.005.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 108 Konten Digital | 108 Konten Digital | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 117.440.100,00 | -32.559.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 180 Orang | 180 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 69.740.100,00 | -30.259.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 124.519.800,00 | -75.480.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 61.300.400,00 | -13.699.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 8 Komunitas | 8 Komunitas | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 23.632.200,00 | -31.367.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 21 Paket | 21 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 56.116.500,00 | 56.116.500,00 | 38.824.400,00 | -17.292.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 2000 Buku | 2000 Buku | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 211.656.600,00 | -128.343.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 340.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 2500 Paket | 2500 Paket | 4.000.000.000,00 | 5.450.000.000,00 | 5.445.553.100,00 | 1.445.553.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 3.411.906.000,00 | 3.511.906.000,00 | 2.841.990.000,00 | -569.916.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.568.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 833.975.000,00 | 833.975.000,00 | 603.140.000,00 | -230.835.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.058.975.005,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 683 Satuan Pendidikan | 683 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 32 Ruang | 32 Ruang | 10.922.559.500,00 | 11.022.559.500,00 | 11.053.044.500,00 | 130.485.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.826.511.495,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0053 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun* | | | | 14 Ruang | 14 Ruang | 1.315.500.000,00 | 1.315.500.000,00 | 805.717.500,00 | -509.782.500,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.315.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 10000 Peserta Didik | 10000 Peserta Didik | 4.821.600.000,00 | 4.821.600.000,00 | 2.480.460.800,00 | -2.341.139.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 21 Paket | 21 Paket | 2.825.000.000,00 | 2.825.000.000,00 | 2.046.129.000,00 | -778.871.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | - | | | 1.875.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 85.293.451.000,00 | 87.593.451.000,00 | 81.303.469.566,00 | -3.989.981.434,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 85.549.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 411.870.100,00 | -13.129.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 298.590.000,00 | 98.590.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 334.165.000,00 | -835.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.580.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 20 Ruang | 20 Ruang | 3.355.000.000,00 | 3.355.000.000,00 | 3.302.001.000,00 | -52.999.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.905.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 515.000.000,00 | 515.000.000,00 | 510.417.000,00 | -4.583.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 268.681.000,00 | 268.681.000,00 | 261.343.900,00 | -7.337.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 688.000.000,00 | 688.000.000,00 | 681.761.500,00 | -6.238.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 688.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.800.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 2.256.485.000,00 | 456.485.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 870.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.700.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 8.744.437.750,00 | 1.044.437.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.355.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 8341 Peserta Didik | 8341 Peserta Didik | 5.730.750.000,00 | 5.730.750.000,00 | 1.053.635.000,00 | -4.677.115.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.355.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1000 Peserta Didik | 1000 Peserta Didik | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 699.188.016,00 | -811.984,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 121 Satuan Pendidikan | 121 Satuan Pendidikan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 117 Satuan Pendidikan | 117 Satuan Pendidikan | 54.871.500.000,00 | 54.871.500.000,00 | 53.851.855.000,00 | -1.019.645.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | - | | | 54.871.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 351 Orang | 351 Orang | 281.744.900,00 | 281.744.900,00 | 200.000.000,00 | -81.744.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 436.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 500 Unit | 500 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0047 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi* | | | | 117 Orang | 117 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 117 Orang | 117 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 117 Konten Digital | 117 Konten Digital | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 242 Orang | 242 Orang | 209.715.700,00 | 209.715.700,00 | 209.715.700,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.059.400,00 | 43.059.400,00 | 23.059.400,00 | -20.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 11 Komunitas | 11 Komunitas | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 117 Satuan Pendidikan | 117 Satuan Pendidikan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 4.643.000.000,00 | 4.643.000.000,00 | 4.586.089.500,00 | -56.910.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.893.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 5000 Buku | 5000 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 945.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.625.000.000,00 | 3.025.000.000,00 | 2.963.162.500,00 | 338.162.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 517.000.000,00 | 517.000.000,00 | 507.693.200,00 | -9.306.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 517.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | - | 4 Paket | 0,00 | 0,00 | 238.000.000,00 | 238.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | - | | | 228.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 27.208.610.500,00 | 27.208.610.500,00 | 27.727.701.050,00 | 519.090.550,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 31.584.649.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 319.776.500,00 | -223.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.909.850,00 | -90.150,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0008 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 38000 Peserta Didik | 38000 Peserta Didik | 920.236.000,00 | 920.236.000,00 | 812.172.500,00 | -108.063.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.012.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 848 Satuan Pendidikan | 848 Satuan Pendidikan | 404.737.400,00 | 404.737.400,00 | 378.188.000,00 | -26.549.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.201.012.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 848 Satuan Pendidikan | 848 Satuan Pendidikan | 23.491.800.000,00 | 23.491.800.000,00 | 23.197.752.000,00 | -294.048.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | - | - | | | 23.491.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 848 Orang | 848 Orang | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 34.904.400,00 | -35.095.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0021 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi* | | | | 36 Orang | 36 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 36 Orang | 36 Orang | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 9.570.000,00 | -30.430.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 18 Konten Digital | 18 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 36 Orang | 36 Orang | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 10.954.000,00 | -29.046.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.027.000,00 | -39.973.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 331.682.100,00 | 331.682.100,00 | 39.163.200,00 | -292.518.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 331.682.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.362.800,00 | -637.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 995.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 18 Komunitas | 18 Komunitas | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 25.141.000,00 | -34.859.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 499.550.000,00 | -450.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.368.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0031 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 18 Paket | 18 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 270.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0032 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* | | | | 18 Ruang | 18 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 37626 Peserta didik | 37626 Peserta didik | 137.945.000,00 | 137.945.000,00 | 78.262.500,00 | -59.682.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 137.945.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0035 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 1000 Buku | 1000 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 18.796.000,00 | -31.204.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0038 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.210.000,00 | 42.210.000,00 | 42.045.750,00 | -164.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 42.210.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 4 Paket | 34 Paket | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 1.994.537.350,00 | 1.524.537.350,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 20 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 7.588.200,00 | -22.411.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 11.342.100.000,00 | 11.342.100.000,00 | 11.303.721.850,00 | -38.378.150,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 20.223.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 660 Peserta Didik | 660 Peserta Didik | 1.965.000.000,00 | 1.965.000.000,00 | 1.898.264.000,00 | -66.736.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.475.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 486.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 51 Satuan Pendidikan | 51 Satuan Pendidikan | 140.250.000,00 | 140.250.000,00 | 108.038.600,00 | -32.211.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 473.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 25 Satuan Pendidikan | 25 Satuan Pendidikan | 7.295.100.000,00 | 7.295.100.000,00 | 8.171.880.000,00 | 876.780.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | - | - | | | 7.312.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 75 Orang | 75 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 51.772.850,00 | -8.227.150,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 12.068.000,00 | -17.932.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 15.026.500,00 | -39.973.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 15.200.500,00 | -19.799.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.718.600,00 | -19.281.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 1 Komunitas | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 14.607.900,00 | -10.392.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 40.654.250,00 | -29.345.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0032 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi* | | | | 26 Orang | 26 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0033 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia* | | | | 28 Paket | 28 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0034 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 39.000.000,00 | -51.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 250 Peserta Didik | 250 Peserta Didik | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 36.194.400,00 | -13.805.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 500 Paket | 500 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 247.213.250,00 | -2.786.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 396.909.500,00 | -3.090.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 950.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 126.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 32 Orang | 32 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 6000 Peserta Didik | 6000 Peserta Didik | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 123.885.850,00 | -126.114.150,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0047 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 425.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 65.693.400,00 | -4.306.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 526.750.000,00 | 526.750.000,00 | 56.594.250,00 | -470.155.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase Muatan Lokal dalam KBM** | | | | **100 %** | **100 %** | **7.880.000.000,00** | **9.980.000.000,00** | **9.585.209.400,00** | **-6.930.000.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Perrsentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 7.780.000.000,00 | 9.880.000.000,00 | 9.532.935.400,00 | 1.752.935.400,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia* | | | | 500 Buku | 500 Buku | 7.600.000.000,00 | 9.700.000.000,00 | 9.398.344.600,00 | 1.798.344.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 207 Orang | 207 Orang | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 101.719.800,00 | -28.280.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah* | | | | 1 Buku | 1 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 32.871.000,00 | -17.129.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | *Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 52.274.000,00 | -47.726.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.987.000,00 | -24.013.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 26.287.000,00 | -23.713.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar** | | | | **73 75 51,5 % % %** | **73 75 51,5 % % %** | **32.600.000.000,00** | **32.600.000.000,00** | **31.497.183.800,00** | **3.400.000.000,00** | | | | | | | **36.000.000.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 32.600.000.000,00 | 32.600.000.000,00 | 31.497.183.800,00 | -1.102.816.200,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 36.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 32.600.000.000,00 | 32.600.000.000,00 | 31.497.183.800,00 | -1.102.816.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase Satuan Pendidikan Berizin** | | | | **100 %** | **100 %** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **35.543.400,00** | **150.000.000,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 26.334.800,00 | -23.665.200,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 26.334.800,00 | 26.334.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Persentase Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 9.208.600,00 | -10.791.400,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.058.500,00 | -4.941.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.150.100,00 | -5.849.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6. | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | **Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah** | | | | **100 %** | **100 %** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **27.698.000,00** | **450.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 27.698.000,00 | -22.302.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi* | | | | 200 Buku | 200 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.06.2.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 116 Peserta Didik | 116 Peserta Didik | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 27.698.000,00 | -22.302.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.685.759.000,00** | **1.685.759.000,00** | **1.742.663.707,00** | **56.904.707,00** | | | | | | | **2.935.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **1.685.759.000,00** | **1.685.759.000,00** | **1.742.663.707,00** | **56.904.707,00** | | | | | | | **2.935.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase Tradisi yang Dikembangkan** | | | | **66,66 %** | **66,66 %** | **1.240.000.000,00** | **1.240.000.000,00** | **1.142.199.710,00** | **290.000.000,00** | | | | | | | **1.530.000.000,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Peresentase kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 209.339.750,00 | -20.660.250,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tega | | 230.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 4 Objek | 4 Objek | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 209.339.750,00 | -20.660.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 230.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Perrsentase kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | 932.859.960,00 | -77.140.040,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tega | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | 932.859.960,00 | -77.140.040,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase Seni dan Kesenian yang dibina** | | | | **88,18 %** | **88,18 %** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **29.649.545,00** | **525.000.000,00** | | | | | | | **555.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.649.545,00 | -350.455,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tega | | 555.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.649.545,00 | -350.455,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 555.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan** | | | | **90 %** | **90 %** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **38.771.500,00** | **110.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 38.771.500,00 | -1.228.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tega | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 38.771.500,00 | -1.228.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Terlestarikannya Cagar Budaya** | | | | **75 %** | **75 %** | **354.759.000,00** | **354.759.000,00** | **519.899.500,00** | **290.241.000,00** | | | | | | | **645.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | | | | - Objek | - Objek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 354.759.000,00 | 354.759.000,00 | 519.899.500,00 | 165.140.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal | | 630.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 354.759.000,00 | 354.759.000,00 | 519.899.500,00 | 165.140.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 630.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase Museum yang Terkelola** | | | | **100 %** | **100 %** | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **12.143.452,00** | **34.000.000,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang Terlaksana* | | | | 100 % | 100 % | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 12.143.452,00 | -8.856.548,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tega | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 12.143.452,00 | -8.856.548,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi* | | | | - Unit | - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **239.822.592.800,00** | **239.872.592.800,00** | **200.343.085.021,00** | **-39.479.507.779,00** | | | | | | | **328.922.130.200,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **239.822.592.800,00** | **239.872.592.800,00** | **200.343.085.021,00** | **-39.479.507.779,00** | | | | | | | **328.922.130.200,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **239.822.592.800,00** | **239.872.592.800,00** | **200.343.085.021,00** | **-39.479.507.779,00** | | | | | | | **328.922.130.200,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **104.077.474.160,00** | **104.127.474.160,00** | **102.902.313.308,00** | **71.535.956.840,00** | | | | | | | **175.613.431.000,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 347.000.000,00 | 347.000.000,00 | 233.284.500,00 | -113.715.500,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 347.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 247.000.000,00 | 247.000.000,00 | 179.033.250,00 | -67.966.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 247.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 54.251.250,00 | -45.748.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 98.794.767.600,00 | 98.794.767.600,00 | 96.042.664.350,00 | -2.752.103.250,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 85.494.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1326 Orang /bulan | 1326 Orang /bulan | 98.213.465.600,00 | 98.213.465.600,00 | 95.604.465.600,00 | -2.609.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 85.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 581.302.000,00 | 581.302.000,00 | 438.198.750,00 | -143.103.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 494.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.037.900,00 | -24.962.100,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.037.900,00 | -24.962.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.975.000,00 | -3.025.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.975.000,00 | -3.025.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 300.539.625,00 | -24.460.375,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 184.845.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.999.125,00 | -875,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.300.000,00 | -2.700.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 25.838.000,00 | -14.162.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | | | | 35 Orang | 35 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 14.745.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.902.500,00 | -97.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 70 Orang | 70 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 648.000.000,00 | 648.000.000,00 | 473.005.866,00 | -174.994.134,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 648.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.884.625,00 | -115.375,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.998.966,00 | -1.034,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.696.500,00 | -21.303.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 53.175.000,00 | -16.825.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 8.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 138.250.775,00 | -136.749.225,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 275.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 1.124.000.000,00 | 1.124.000.000,00 | 3.011.033.222,00 | 1.887.033.222,00 | | | - | - | - | | 7.325.989.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 1.099.454.322,00 | 739.454.322,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.020.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 544.000.000,00 | 544.000.000,00 | 1.697.898.400,00 | 1.153.898.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 544.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.680.500,00 | -6.319.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 5.311.989.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.434.546.560,00 | 1.434.546.560,00 | 1.417.795.670,00 | -16.750.890,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 1.338.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.997.750,00 | -2.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 532.546.560,00 | 532.546.560,00 | 515.797.920,00 | -16.748.640,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 428.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.334.160.000,00 | 1.384.160.000,00 | 1.381.977.175,00 | 47.817.175,00 | | | - | - | - | | 1.052.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 705.000.000,00 | 705.000.000,00 | 703.562.425,00 | -1.437.575,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 705.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 77 Unit | 77 Unit | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 | 146.849.000,00 | -151.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 47.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 482.160.000,00 | 532.160.000,00 | 531.565.750,00 | 49.405.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 79.152.297.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 29 Unit Kerja | 29 Unit Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 79.152.297.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan<br>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi<br>Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk** | | | | **100<br>100<br>9.09<br>Persen<br>%<br>per 1.000 penduduk** | **100<br>100<br>9.09<br>Persen<br>%<br>per 1.000 penduduk** | **130.805.629.170,00** | **130.805.629.170,00** | **94.869.839.343,00** | **4.143.400.530,00** | | | | | | | **134.949.029.700,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk* | | | | 0,909 per 1.000 penduduk | 0,909 per 1.000 penduduk | 40.767.879.200,00 | 40.767.879.200,00 | 39.229.731.969,00 | -1.538.147.231,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 43.881.844.530,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 12.040.000.000,00 | 12.040.000.000,00 | 8.452.422.000,00 | -3.587.578.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 12.700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 29 Unit | 29 Unit | 4.800.000.000,00 | 4.800.000.000,00 | 10.395.541.172,00 | 5.595.541.172,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 4.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 578.921.000,00 | 578.921.000,00 | 578.414.000,00 | -507.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 578.921.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 1.815.000.000,00 | 1.815.000.000,00 | 690.000.000,00 | -1.125.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.715.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 154.000.000,00 | -46.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 181 Unit | 181 Unit | 3.841.437.200,00 | 3.841.437.200,00 | 2.254.622.997,00 | -1.586.814.203,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 3.841.437.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 31 Unit | 31 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 29 Unit | 29 Unit | 283.995.000,00 | 283.995.000,00 | 50.000.000,00 | -233.995.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 283.995.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 16.746.640.000,00 | 16.746.640.000,00 | 16.469.166.800,00 | -277.473.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 12.119.955.330,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas* | | | | 18735 Keluarga | 18735 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 461.886.000,00 | 461.886.000,00 | 185.565.000,00 | -276.321.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 322.536.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar*<br>*Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir*<br>*persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan*<br>*persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil*<br>*Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*<br>*Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*<br>*Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar*<br>*Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi*<br>*Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* | | | | 100 % | 100 % | 89.711.942.020,00 | 89.711.942.020,00 | 55.549.873.474,00 | -34.162.068.546,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 90.164.634.870,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 25600 Orang | 25600 Orang | 2.737.930.000,00 | 2.737.930.000,00 | 200.000.000,00 | -2.537.930.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.407.770.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 24436 Orang | 24436 Orang | 2.974.718.000,00 | 2.974.718.000,00 | 1.536.000.000,00 | -1.438.718.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.465.673.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 23273 Orang | 23273 Orang | 1.232.108.170,00 | 1.232.108.170,00 | 403.842.000,00 | -828.266.170,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.612.388.170,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 93091 Orang | 93091 Orang | 1.759.345.000,00 | 1.759.345.000,00 | 569.000.000,00 | -1.190.345.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.659.345.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 230581 Orang | 230581 Orang | 1.594.882.300,00 | 1.594.882.300,00 | 100.000.000,00 | -1.494.882.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.594.882.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 627899 Orang | 627899 Orang | 2.210.000.000,00 | 2.210.000.000,00 | 1.210.000.000,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 137750 Orang | 137750 Orang | 658.555.000,00 | 658.555.000,00 | 184.800.000,00 | -473.755.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.163.295.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 185424 Orang | 185424 Orang | 779.820.000,00 | 779.820.000,00 | 400.000.000,00 | -379.820.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 779.820.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 29853 Orang | 29853 Orang | 2.993.357.000,00 | 2.993.357.000,00 | 330.000.000,00 | -2.663.357.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 2.854.757.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 3594 Orang | 3594 Orang | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 70.000.000,00 | -380.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 21600 Orang | 21600 Orang | 3.199.593.800,00 | 3.199.593.800,00 | 4.051.632.200,00 | 852.038.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.696.479.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 30040 Orang | 30040 Orang | 437.935.000,00 | 437.935.000,00 | 155.000.000,00 | -282.935.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 57.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.187.800.000,00 | 6.187.800.000,00 | 1.135.284.000,00 | -5.052.516.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 6.196.730.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.002.145.000,00 | 1.002.145.000,00 | 57.300.000,00 | -944.845.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 1.287.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 592.261.000,00 | 592.261.000,00 | 645.954.175,00 | 53.693.175,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 503.683.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 58.434.700,00 | -41.565.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 596.577.400,00 | 596.577.400,00 | 112.553.500,00 | -484.023.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 800.005.100,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 3420 Orang | 3420 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8.272.567.350,00 | 8.272.567.350,00 | 470.000.000,00 | -7.802.567.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 7.939.825.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.360.695.200,00 | 38.360.695.200,00 | 38.604.625.000,00 | 243.929.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 37.800.695.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 870 Orang | 870 Orang | 27.812.000,00 | 27.812.000,00 | 0,00 | -27.812.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 102.000.000,00 | -53.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 202.578.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 228.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.982.643.800,00 | 9.982.643.800,00 | 4.060.935.899,00 | -5.921.707.901,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 9.656.062.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 13 Dokumen | 1 Dokumen | 30.325.000,00 | 30.325.000,00 | 101.166.000,00 | 70.841.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.170.000,00 | 28.170.000,00 | 0,00 | -28.170.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 128.530.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 19.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 4210 Orang | 4210 Orang | 350.364.000,00 | 350.364.000,00 | 25.000.000,00 | -325.364.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 856.084.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 525 Orang | 525 Orang | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 15.850.000,00 | -54.650.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 174.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.625.000,00 | -4.375.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 4 Tatanan | 4 Tatanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 136.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 119.942.500,00 | 119.942.500,00 | 0,00 | -119.942.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 119.942.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.751.894.500,00 | 2.751.894.500,00 | 899.871.000,00 | -1.852.023.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.856.299.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 198.855.950,00 | 198.855.950,00 | 70.483.500,00 | -128.372.450,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 682.550.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 198.855.950,00 | 198.855.950,00 | 70.483.500,00 | -128.372.450,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 682.550.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasyankes yang memenuhi persyaratan perizinan* | | | | 100 % | 100 % | 126.952.000,00 | 126.952.000,00 | 19.750.400,00 | -107.201.600,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 220.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.750.400,00 | -249.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 106.952.000,00 | 106.952.000,00 | 0,00 | -106.952.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan** | | | | **89,7 100 % Persen** | **89,7 100 % Persen** | **2.345.388.830,00** | **2.345.388.830,00** | **1.162.953.000,00** | **5.095.246.670,00** | | | | | | | **7.440.635.500,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan* | | | | 100 % | 100 % | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 23.265.000,00 | -21.735.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 550 Dokumen | 550 Dokumen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 23.265.000,00 | -21.735.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis* | | | | 89,7 % | 89,7 % | 478.325.830,00 | 478.325.830,00 | 210.809.000,00 | -267.516.830,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 295 Orang | 295 Orang | 274.735.000,00 | 274.735.000,00 | 160.000.000,00 | -114.735.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 203.590.830,00 | 203.590.830,00 | 50.809.000,00 | -152.781.830,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan puskesmas yangmempunyai 9 tenaga kesehatan strategis* | | | | 89,7 % | 89,7 % | 1.822.063.000,00 | 1.822.063.000,00 | 928.879.000,00 | -893.184.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | sumber daya manusia kesehatan | | 6.290.635.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 2200 Orang | 2200 Orang | 1.822.063.000,00 | 1.822.063.000,00 | 928.879.000,00 | -893.184.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 6.290.635.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman** | | | | **59 %** | **59 %** | **1.056.094.000,00** | **1.056.094.000,00** | **901.606.750,00** | **-159.780.000,00** | | | | | | | **896.314.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Cakupan pemenuhan persyaratan perizinan sarana pelayanan kefarmasian* | | | | 60 % | 60 % | 263.730.000,00 | 263.730.000,00 | 181.505.000,00 | -82.225.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 263.730.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 248 Dokumen | 248 Dokumen | 263.730.000,00 | 263.730.000,00 | 181.505.000,00 | -82.225.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 263.730.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | *Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 48 % | 48 % | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 60.000.000,00 | -52.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | 112.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 180 Dokumen | 180 Dokumen | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 60.000.000,00 | -52.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 112.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 78,1 % | 78,1 % | 339.100.000,00 | 339.100.000,00 | 409.975.000,00 | 70.875.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Industri Rumah Tangga | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 339.100.000,00 | 339.100.000,00 | 409.975.000,00 | 70.875.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 9,3 % | 9,3 % | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 28.436.750,00 | -6.563.250,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 28.436.750,00 | -6.563.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | *Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 8,2 % | 8,2 % | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 5.000.000,00 | -27.750.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | 35.584.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 5.000.000,00 | -27.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 35.584.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut Pengawasan* | | | | 72 % | 72 % | 273.514.000,00 | 273.514.000,00 | 216.690.000,00 | -56.824.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 180 Unit | 180 Unit | 273.514.000,00 | 273.514.000,00 | 216.690.000,00 | -56.824.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)** | | | | **86 Persen** | **86 Persen** | **1.538.006.640,00** | **1.538.006.640,00** | **506.372.620,00** | **8.484.713.360,00** | | | | | | | **10.022.720.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)* | | | | 86 % | 86 % | 505.175.240,00 | 505.175.240,00 | 349.572.620,00 | -155.602.620,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 455.175.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 505.175.240,00 | 505.175.240,00 | 349.572.620,00 | -155.602.620,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 455.175.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)* | | | | 86 % | 86 % | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 115.000.000,00 | -140.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 766.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 115.000.000,00 | -140.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat* | | | | 353064 Keluarga | 353064 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 316.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Posyandu Aktif* | | | | 82 % | 82 % | 777.831.400,00 | 777.831.400,00 | 41.800.000,00 | -736.031.400,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Masyarakat Kab. Tegal | | 8.801.545.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 777.831.400,00 | 777.831.400,00 | 41.800.000,00 | -736.031.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 8.801.545.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DANASARI** | | | | | | | **1.684.382.000,00** | **1.684.382.000,00** | **2.252.509.359,00** | **568.127.359,00** | | | | | | | **2.326.362.359,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.684.382.000,00** | **1.684.382.000,00** | **2.252.509.359,00** | **568.127.359,00** | | | | | | | **2.326.362.359,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.684.382.000,00** | **1.684.382.000,00** | **2.252.509.359,00** | **568.127.359,00** | | | | | | | **2.326.362.359,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.684.382.000,00** | **1.684.382.000,00** | **1.698.807.640,00** | **14.425.640,00** | | | | | | | **1.698.807.640,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.684.382.000,00 | 1.684.382.000,00 | 1.698.807.640,00 | 14.425.640,00 | | | - | - | - | | 1.698.807.640,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.684.382.000,00 | 1.684.382.000,00 | 1.698.807.640,00 | 14.425.640,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.698.807.640,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **543.952.719,00** | **617.805.719,00** | | | | | | | **617.805.719,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 543.952.719,00 | 543.952.719,00 | | | - | - | - | | 617.805.719,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 640 Orang | 0,00 | 0,00 | 47.232.000,00 | 47.232.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 47.232.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 452 Orang | 0,00 | 0,00 | 23.853.000,00 | 23.853.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 23.853.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 452 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 23.853.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 4.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 38 Orang | 0,00 | 0,00 | 9.970.000,00 | 9.970.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 9.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 98.780.000,00 | 98.780.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 98.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 2.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.856.000,00 | 4.856.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 4.856.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 810.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 138.314.500,00 | 138.314.500,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 138.314.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 149.481.219,00 | 149.481.219,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 149.481.219,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 43.416.000,00 | 43.416.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 43.416.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 690.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 10.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **9.749.000,00** | **9.749.000,00** | | | | | | | **9.749.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 9.749.000,00 | 9.749.000,00 | | | - | - | - | | 9.749.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.749.000,00 | 9.749.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 9.749.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KESAMIRAN** | | | | | | | **1.638.000.000,00** | **1.638.000.000,00** | **2.060.550.930,00** | **422.550.930,00** | | | | | | | **2.060.550.931,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.638.000.000,00** | **1.638.000.000,00** | **2.060.550.930,00** | **422.550.930,00** | | | | | | | **2.060.550.931,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.638.000.000,00** | **1.638.000.000,00** | **2.060.550.930,00** | **422.550.930,00** | | | | | | | **2.060.550.931,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.638.000.000,00** | **1.638.000.000,00** | **1.647.181.756,00** | **9.181.756,00** | | | | | | | **1.647.181.756,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.638.000.000,00 | 1.638.000.000,00 | 1.647.181.756,00 | 9.181.756,00 | | | - | - | - | | 1.647.181.756,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.638.000.000,00 | 1.638.000.000,00 | 1.647.181.756,00 | 9.181.756,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.647.181.756,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **405.600.674,00** | **405.600.675,00** | | | | | | | **405.600.675,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 405.600.674,00 | 405.600.674,00 | | | - | - | - | | 405.600.675,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 624 Orang | 0,00 | 0,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 52.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2300 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 150 Orang | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 180 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.075.000,00 | 6.075.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.075.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 87.663.016,00 | 87.663.016,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 87.663.016,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 30 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.170.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 137 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.215.000,00 | 10.215.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.215.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 35 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.098.400,00 | 11.098.400,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 11.098.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | | 1,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 500 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 176 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 80.328.000,00 | 80.328.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 80.328.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 45 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 113.541.258,00 | 113.541.258,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 113.541.258,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 11 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 990.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **7.768.500,00** | **7.768.500,00** | | | | | | | **7.768.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 7.768.500,00 | 7.768.500,00 | | | - | - | - | | 7.768.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.768.500,00 | 7.768.500,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.768.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MARGASARI** | | | | | | | **3.800.000.000,00** | **3.800.000.000,00** | **4.600.920.171,00** | **800.920.171,00** | | | | | | | **4.615.860.171,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.800.000.000,00** | **3.800.000.000,00** | **4.600.920.171,00** | **800.920.171,00** | | | | | | | **4.615.860.171,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.800.000.000,00** | **3.800.000.000,00** | **4.600.920.171,00** | **800.920.171,00** | | | | | | | **4.615.860.171,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.800.000.000,00** | **3.800.000.000,00** | **3.898.099.357,00** | **98.099.357,00** | | | | | | | **3.898.099.357,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 3.898.099.357,00 | 98.099.357,00 | | | - | - | - | | 3.898.099.357,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 3.898.099.357,00 | 98.099.357,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 3.898.099.357,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **691.617.000,00** | **706.557.000,00** | | | | | | | **706.557.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 691.617.000,00 | 691.617.000,00 | | | - | - | - | | 706.557.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 3120 Orang | 0,00 | 0,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 132.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 270 Orang | 0,00 | 0,00 | 35.460.000,00 | 35.460.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 35.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 140 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 19.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 230 Orang | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 7480 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 158.648.500,00 | 158.648.500,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 158.648.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 24 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 180 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 144 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.584.500,00 | 14.584.500,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.584.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 46 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.070.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1053 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 159.437.000,00 | 159.437.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 159.437.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 472 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 150.646.000,00 | 150.646.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 150.646.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 27 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.566.000,00 | 1.566.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.566.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 21 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 665.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 240 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **11.203.814,00** | **11.203.814,00** | | | | | | | **11.203.814,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 11.203.814,00 | 11.203.814,00 | | | - | - | - | | 11.203.814,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 189 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.203.814,00 | 11.203.814,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 11.203.814,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KESAMBI** | | | | | | | **1.910.500.000,00** | **1.910.500.000,00** | **2.546.213.949,00** | **635.713.949,00** | | | | | | | **2.552.906.686,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.910.500.000,00** | **1.910.500.000,00** | **2.546.213.949,00** | **635.713.949,00** | | | | | | | **2.552.906.686,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.910.500.000,00** | **1.910.500.000,00** | **2.546.213.949,00** | **635.713.949,00** | | | | | | | **2.552.906.686,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.910.500.000,00** | **1.910.500.000,00** | **1.947.406.686,00** | **36.906.686,00** | | | | | | | **1.947.406.686,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.910.500.000,00 | 1.910.500.000,00 | 1.947.406.686,00 | 36.906.686,00 | | | - | - | - | | 1.947.406.686,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.910.500.000,00 | 1.910.500.000,00 | 1.947.406.686,00 | 36.906.686,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.947.406.686,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **594.385.263,00** | **600.500.000,00** | | | | | | | **600.500.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 594.385.263,00 | 594.385.263,00 | | | - | - | - | | 600.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 136.108.000,00 | 136.108.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 138.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 46.440.000,00 | 46.440.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 47.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.625.000,00 | 5.625.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 164.937.000,00 | 164.937.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 17.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.032.000,00 | 11.032.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 60.994.000,00 | 60.994.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 62.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 129.887.263,00 | 129.887.263,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 130.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.717.000,00 | 2.717.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **4.422.000,00** | **5.000.000,00** | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 4.422.000,00 | 4.422.000,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.422.000,00 | 4.422.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BUMIJAWA** | | | | | | | **6.498.880.000,00** | **6.498.880.000,00** | **8.055.238.144,00** | **1.556.358.144,00** | | | | | | | **8.044.597.572,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.498.880.000,00** | **6.498.880.000,00** | **8.055.238.144,00** | **1.556.358.144,00** | | | | | | | **8.044.597.572,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **6.498.880.000,00** | **6.498.880.000,00** | **8.055.238.144,00** | **1.556.358.144,00** | | | | | | | **8.044.597.572,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.498.880.000,00** | **6.498.880.000,00** | **6.509.520.572,00** | **0,00** | | | | | | | **6.498.880.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 6.498.880.000,00 | 6.498.880.000,00 | 6.509.520.572,00 | 10.640.572,00 | | | - | - | - | | 6.498.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 6.498.880.000,00 | 6.498.880.000,00 | 6.509.520.572,00 | 10.640.572,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 6.498.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **1.545.717.572,00** | **1.545.717.572,00** | | | | | | | **1.545.717.572,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.545.717.572,00 | 1.545.717.572,00 | | | - | - | - | | 1.545.717.572,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1340 Orang | 0,00 | 0,00 | 230.040.000,00 | 230.040.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 230.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 104 Orang | 0,00 | 0,00 | 26.055.000,00 | 26.055.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 26.055.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 200 Orang | 0,00 | 0,00 | 30.420.000,00 | 30.420.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 30.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 660.240.000,00 | 660.240.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 660.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.910.000,00 | 17.910.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 17.910.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.411.450,00 | 8.411.450,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.411.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 207.715.000,00 | 207.715.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 207.715.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 313.281.122,00 | 313.281.122,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 313.281.122,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 35 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.225.000,00 | 9.225.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.225.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.380.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BOJONG** | | | | | | | **3.066.250.000,00** | **3.066.250.000,00** | **3.951.288.113,00** | **885.038.113,00** | | | | | | | **3.951.288.113,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.066.250.000,00** | **3.066.250.000,00** | **3.951.288.113,00** | **885.038.113,00** | | | | | | | **3.951.288.113,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.066.250.000,00** | **3.066.250.000,00** | **3.951.288.113,00** | **885.038.113,00** | | | | | | | **3.951.288.113,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.066.250.000,00** | **3.066.250.000,00** | **3.098.844.591,00** | **32.594.591,00** | | | | | | | **3.098.844.591,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 3.066.250.000,00 | 3.066.250.000,00 | 3.098.844.591,00 | 32.594.591,00 | | | - | - | - | | 3.098.844.591,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 3.066.250.000,00 | 3.066.250.000,00 | 3.098.844.591,00 | 32.594.591,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.098.844.591,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **847.509.022,00** | **847.379.022,00** | | | | | | | **847.379.022,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 847.509.022,00 | 847.509.022,00 | | | - | - | - | | 847.379.022,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1326 Orang | 0,00 | 0,00 | 81.445.000,00 | 81.445.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 94.770.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 206 Orang | 0,00 | 0,00 | 22.140.000,00 | 22.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 22.950.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 210 Orang | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 37.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 2551 Orang | 0,00 | 0,00 | 20.585.000,00 | 20.585.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 11.715.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10821 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 329.481.000,00 | 329.481.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 336.951.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.495.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 88 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.370.000,00 | 8.370.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 51 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.684.650,00 | 8.684.650,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.426.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 44 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 36 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 154.601.000,00 | 154.601.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 131.873.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 169.247.522,00 | 169.247.522,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 164.207.522,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 90 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.030.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.429.850,00 | 1.429.850,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.401.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 156 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.720.000,00 | 9.720.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **4.934.500,00** | **5.064.500,00** | | | | | | | **5.064.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 4.934.500,00 | 4.934.500,00 | | | - | - | - | | 5.064.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.934.500,00 | 4.934.500,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.064.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BALAPULANG** | | | | | | | **4.492.000.000,00** | **4.492.000.000,00** | **5.837.093.385,00** | **1.345.093.385,00** | | | | | | | **5.168.070.999,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.492.000.000,00** | **4.492.000.000,00** | **5.837.093.385,00** | **1.345.093.385,00** | | | | | | | **5.168.070.999,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.492.000.000,00** | **4.492.000.000,00** | **5.837.093.385,00** | **1.345.093.385,00** | | | | | | | **5.168.070.999,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.492.000.000,00** | **4.492.000.000,00** | **5.161.022.386,00** | **0,00** | | | | | | | **4.492.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 4.492.000.000,00 | 4.492.000.000,00 | 5.161.022.386,00 | 669.022.386,00 | | | - | - | - | | 4.492.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 4.492.000.000,00 | 4.492.000.000,00 | 5.161.022.386,00 | 669.022.386,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 4.492.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **672.110.999,00** | **672.110.999,00** | | | | | | | **672.110.999,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 672.110.999,00 | 672.110.999,00 | | | - | - | - | | 672.110.999,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1840 Orang | 0,00 | 0,00 | 83.299.000,00 | 83.299.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 83.299.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 38 sekolah Orang | 0,00 | 0,00 | 27.729.000,00 | 27.729.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 27.729.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 10 desa Orang | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 10 desa Orang | 0,00 | 0,00 | 5.925.900,00 | 5.925.900,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.925.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 249 orang Dokumen | 0,00 | 0,00 | 180.390.000,00 | 180.390.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 180.390.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 48 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.233.000,00 | 2.233.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.233.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 138 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.420.000,00 | 12.420.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 10 desa Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.629.750,00 | 7.629.750,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.629.750,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 10 desa Orang | 0,00 | 0,00 | 2.439.000,00 | 2.439.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.439.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 10 desa Dokumen | 0,00 | 0,00 | 126.544.000,00 | 126.544.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 126.544.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 126 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 188.685.349,00 | 188.685.349,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 188.685.349,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 84 orang Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.217.000,00 | 5.217.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.217.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 10 kasus Dokumen | 0,00 | 0,00 | 999.000,00 | 999.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 999.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 10 desa Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.960.000,00** | **3.960.000,00** | | | | | | | **3.960.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | | | - | - | - | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 10 desa Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KALIBAKUNG** | | | | | | | **2.326.800.000,00** | **2.326.800.000,00** | **3.006.258.068,00** | **679.458.068,00** | | | | | | | **2.984.490.498,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.326.800.000,00** | **2.326.800.000,00** | **3.006.258.068,00** | **679.458.068,00** | | | | | | | **2.984.490.498,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.326.800.000,00** | **2.326.800.000,00** | **3.006.258.068,00** | **679.458.068,00** | | | | | | | **2.984.490.498,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.326.800.000,00** | **2.326.800.000,00** | **2.348.117.570,00** | **0,00** | | | | | | | **2.326.800.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.326.800.000,00 | 2.326.800.000,00 | 2.348.117.570,00 | 21.317.570,00 | | | - | - | - | | 2.326.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.326.800.000,00 | 2.326.800.000,00 | 2.348.117.570,00 | 21.317.570,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.326.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **654.466.650,00** | **653.689.998,00** | | | | | | | **653.689.998,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 654.466.650,00 | 654.466.650,00 | | | - | - | - | | 653.689.998,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 37 Orang | 0,00 | 0,00 | 85.060.000,00 | 85.060.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 85.060.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 59 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 8000 Orang | 0,00 | 0,00 | 24.840.000,00 | 24.840.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 24.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1000 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.515.000,00 | 7.515.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.470.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 190 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 201.790.000,00 | 201.790.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 201.845.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 79 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 125 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 26 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.094.650,00 | 4.094.650,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.336.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 20 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 117.832.000,00 | 117.832.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 118.087.300,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 179.320.000,00 | 179.320.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 180.262.248,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 21 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 3.485.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.449.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 44 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.673.848,00** | **4.000.500,00** | | | | | | | **4.000.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.673.848,00 | 3.673.848,00 | | | - | - | - | | 4.000.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.673.848,00 | 3.673.848,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.000.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PAGERBARANG** | | | | | | | **2.770.500.000,00** | **2.770.500.000,00** | **3.744.700.324,00** | **974.200.324,00** | | | | | | | **4.153.972.949,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.770.500.000,00** | **2.770.500.000,00** | **3.744.700.324,00** | **974.200.324,00** | | | | | | | **4.153.972.949,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.770.500.000,00** | **2.770.500.000,00** | **3.744.700.324,00** | **974.200.324,00** | | | | | | | **4.153.972.949,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.770.500.000,00** | **2.770.500.000,00** | **3.090.529.502,00** | **320.029.502,00** | | | | | | | **3.090.529.502,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.770.500.000,00 | 2.770.500.000,00 | 3.090.529.502,00 | 320.029.502,00 | | | - | - | - | | 3.090.529.502,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.770.500.000,00 | 2.770.500.000,00 | 3.090.529.502,00 | 320.029.502,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 3.090.529.502,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **650.540.822,00** | **1.059.553.947,00** | | | | | | | **1.059.553.947,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 650.540.822,00 | 650.540.822,00 | | | - | - | - | | 1.059.553.947,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1040 Orang | 0,00 | 0,00 | 77.220.000,00 | 77.220.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 94.380.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1755 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 77.220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 8232 Orang | 0,00 | 0,00 | 24.030.000,00 | 24.030.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 20.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 8287 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 24.030.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 154 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1349 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.470.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1304 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 11.025.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 183 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 145.247.875,00 | 145.247.875,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 142.978.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 183 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 145.247.875,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.325.000,00 | 12.325.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.325.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 195 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.850.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 42 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.123.250,00 | 10.123.250,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.902.100,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 40 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 10.123.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 153 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 0 0 | 0,00 | 0,00 | 142.365.000,00 | 142.365.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 140.726.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | | 140.726.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 bulan Dokumen | 0,00 | 0,00 | 185.364.697,00 | 185.364.697,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 184.668.022,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 2683 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.170.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 5 kasus Dokumen | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 891.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 bulan Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.630.000,00** | **3.889.500,00** | | | | | | | **3.889.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | | | - | - | - | | 3.889.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.889.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS LEBAKSIU** | | | | | | | **2.515.552.000,00** | **2.515.552.000,00** | **3.259.523.335,00** | **743.971.335,00** | | | | | | | **3.245.739.272,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.515.552.000,00** | **2.515.552.000,00** | **3.259.523.335,00** | **743.971.335,00** | | | | | | | **3.245.739.272,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.515.552.000,00** | **2.515.552.000,00** | **3.259.523.335,00** | **743.971.335,00** | | | | | | | **3.245.739.272,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.515.552.000,00** | **2.515.552.000,00** | **2.529.336.063,00** | **0,00** | | | | | | | **2.515.552.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.515.552.000,00 | 2.515.552.000,00 | 2.529.336.063,00 | 13.784.063,00 | | | - | - | - | | 2.515.552.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.515.552.000,00 | 2.515.552.000,00 | 2.529.336.063,00 | 13.784.063,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.515.552.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **728.207.272,00** | **728.207.272,00** | | | | | | | **728.207.272,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 728.207.272,00 | 728.207.272,00 | | | - | - | - | | 728.207.272,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2560 Orang | 0,00 | 0,00 | 126.270.000,00 | 126.270.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 126.270.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 740 Orang | 0,00 | 0,00 | 27.450.000,00 | 27.450.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 27.450.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 160 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 196 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.835.000,00 | 10.835.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.835.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 153.514.375,00 | 153.514.375,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 153.514.375,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 242 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.990.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 122 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.855.000,00 | 9.855.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.855.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 137 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 20.526.500,00 | 20.526.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 20.526.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 468 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 154.786.200,00 | 154.786.200,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 154.786.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 75 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 188.280.197,00 | 188.280.197,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 188.280.197,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.430.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 45 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.050.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 200 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.840.000,00 | 12.840.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **1.980.000,00** | **1.980.000,00** | | | | | | | **1.980.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | | | - | - | - | | 1.980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 13 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KAMBANGAN** | | | | | | | **2.063.455.000,00** | **2.063.455.000,00** | **2.719.370.229,00** | **655.915.229,00** | | | | | | | **2.686.245.268,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.063.455.000,00** | **2.063.455.000,00** | **2.719.370.229,00** | **655.915.229,00** | | | | | | | **2.686.245.268,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.063.455.000,00** | **2.063.455.000,00** | **2.719.370.229,00** | **655.915.229,00** | | | | | | | **2.686.245.268,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.063.455.000,00** | **2.063.455.000,00** | **2.096.579.961,00** | **0,00** | | | | | | | **2.063.455.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.063.455.000,00 | 2.063.455.000,00 | 2.096.579.961,00 | 33.124.961,00 | | | - | - | - | | 2.063.455.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.063.455.000,00 | 2.063.455.000,00 | 2.096.579.961,00 | 33.124.961,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.063.455.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **616.656.668,00** | **618.203.268,00** | | | | | | | **618.203.268,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 616.656.668,00 | 616.656.668,00 | | | - | - | - | | 618.203.268,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2240 Orang | 0,00 | 0,00 | 83.300.000,00 | 83.300.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 131.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 7523 Orang | 0,00 | 0,00 | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 38.370.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 106 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.890.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 767 Orang | 0,00 | 0,00 | 12.580.000,00 | 12.580.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.580.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 138.641.000,00 | 138.641.000,00 | - | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 139.133.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.755.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 19.563.250,00 | 19.563.250,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.124.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 280 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.710.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 122.595.000,00 | 122.595.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 110.427.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 165.877.418,00 | 165.877.418,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 139.354.268,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 740.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 18.760.000,00 | 18.760.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **6.133.600,00** | **4.587.000,00** | | | | | | | **4.587.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.133.600,00 | 6.133.600,00 | | | - | - | - | | 4.587.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.133.600,00 | 6.133.600,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.587.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS JATINEGARA** | | | | | | | **5.150.000.000,00** | **5.150.000.000,00** | **6.271.462.560,00** | **1.121.462.560,00** | | | | | | | **6.285.556.829,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.150.000.000,00** | **5.150.000.000,00** | **6.271.462.560,00** | **1.121.462.560,00** | | | | | | | **6.285.556.829,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **5.150.000.000,00** | **5.150.000.000,00** | **6.271.462.560,00** | **1.121.462.560,00** | | | | | | | **6.285.556.829,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.150.000.000,00** | **5.150.000.000,00** | **5.351.153.329,00** | **201.153.329,00** | | | | | | | **5.351.153.329,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 5.150.000.000,00 | 5.150.000.000,00 | 5.351.153.329,00 | 201.153.329,00 | | | - | - | - | | 5.351.153.329,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 5.150.000.000,00 | 5.150.000.000,00 | 5.351.153.329,00 | 201.153.329,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 5.351.153.329,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **915.126.231,00** | **923.490.000,00** | | | | | | | **923.490.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 915.126.231,00 | 915.126.231,00 | | | - | - | - | | 923.490.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 100% bumil DILAYANI Orang | 0,00 | 0,00 | 125.800.000,00 | 125.800.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 145.350.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 100% Orang | 0,00 | 0,00 | 20.250.000,00 | 20.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 100% Orang | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 18.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 100% Orang | 0,00 | 0,00 | 13.680.000,00 | 13.680.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 177.133.484,00 | 177.133.484,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 182.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 14.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.165.000,00 | 6.165.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 5.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.617.500,00 | 11.617.500,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 11.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 100% Orang | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 2.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 263.259.000,00 | 263.259.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 243.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 273.321.247,00 | 273.321.247,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 226.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 13.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **5.183.000,00** | **10.913.500,00** | | | | | | | **10.913.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.183.000,00 | 5.183.000,00 | | | - | - | - | | 10.913.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.183.000,00 | 5.183.000,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 100% Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 5.413.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KEDUNGBANTENG** | | | | | | | **2.583.132.000,00** | **2.583.132.000,00** | **3.233.780.164,00** | **650.648.164,00** | | | | | | | **3.257.540.164,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.583.132.000,00** | **2.583.132.000,00** | **3.233.780.164,00** | **650.648.164,00** | | | | | | | **3.257.540.164,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.583.132.000,00** | **2.583.132.000,00** | **3.233.780.164,00** | **650.648.164,00** | | | | | | | **3.257.540.164,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.583.132.000,00** | **2.583.132.000,00** | **2.620.325.240,00** | **37.193.240,00** | | | | | | | **2.620.325.240,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.583.132.000,00 | 2.583.132.000,00 | 2.620.325.240,00 | 37.193.240,00 | | | - | - | - | | 2.620.325.240,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.583.132.000,00 | 2.583.132.000,00 | 2.620.325.240,00 | 37.193.240,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.620.325.240,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **613.274.924,00** | **637.034.924,00** | | | | | | | **637.034.924,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 613.274.924,00 | 613.274.924,00 | | | - | - | - | | 637.034.924,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1485 Orang | 0,00 | 0,00 | 65.340.000,00 | 65.340.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 89.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 90 Orang | 0,00 | 0,00 | 27.620.000,00 | 27.620.000,00 | - | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 27.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 198 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.170.000,00 | 10.170.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.170.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 302 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 94.850.000,00 | 94.850.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 94.850.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.571.000,00 | 5.571.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.571.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 103 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.355.000,00 | 5.355.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.355.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 113 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.559.000,00 | 12.559.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.559.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 373 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 121.623.000,00 | 121.623.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 121.623.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 42 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 226.888.000,00 | 226.888.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 226.888.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.268.924,00 | 2.268.924,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.268.924,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 172 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 34.730.000,00 | 34.730.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 34.730.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | | | | | | | **180.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | - | - | - | | 180.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 180.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PANGKAH** | | | | | | | **2.846.865.000,00** | **2.846.865.000,00** | **4.005.418.145,00** | **1.158.553.145,00** | | | | | | | **4.005.418.145,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.846.865.000,00** | **2.846.865.000,00** | **4.005.418.145,00** | **1.158.553.145,00** | | | | | | | **4.005.418.145,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.846.865.000,00** | **2.846.865.000,00** | **4.005.418.145,00** | **1.158.553.145,00** | | | | | | | **4.005.418.145,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.846.865.000,00** | **2.846.865.000,00** | **2.910.203.559,00** | **63.338.559,00** | | | | | | | **2.910.203.559,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.846.865.000,00 | 2.846.865.000,00 | 2.910.203.559,00 | 63.338.559,00 | | | - | - | - | | 2.910.203.559,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.846.865.000,00 | 2.846.865.000,00 | 2.910.203.559,00 | 63.338.559,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.910.203.559,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **1.088.794.586,00** | **1.088.794.586,00** | | | | | | | **1.088.794.586,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.088.794.586,00 | 1.088.794.586,00 | | | - | - | - | | 1.088.794.586,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 392 Orang | 0,00 | 0,00 | 166.600.000,00 | 166.600.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 166.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 744 Orang | 0,00 | 0,00 | 60.360.000,00 | 60.360.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 60.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 28 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.113.500,00 | 5.113.500,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 5.113.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 70 Orang | 0,00 | 0,00 | 18.650.000,00 | 18.650.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 18.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 331.590.000,00 | 331.590.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 331.590.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 2.670.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.460.000,00 | 8.460.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 8.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 25.013.000,00 | 25.013.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 25.013.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 76 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 3.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 192.972.000,00 | 192.972.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 192.972.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 211.560.386,00 | 211.560.386,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 211.560.386,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 130 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.695.700,00 | 3.695.700,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 3.695.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 16 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 11 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 57.970.000,00 | 57.970.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 57.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **6.420.000,00** | **6.420.000,00** | | | | | | | **6.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | | | - | - | - | | 6.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | - | | | 6.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PENUSUPAN** | | | | | | | **1.955.400.000,00** | **1.955.400.000,00** | **2.664.578.760,00** | **709.178.760,00** | | | | | | | **2.600.200.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.955.400.000,00** | **1.955.400.000,00** | **2.664.578.760,00** | **709.178.760,00** | | | | | | | **2.600.200.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.955.400.000,00** | **1.955.400.000,00** | **2.664.578.760,00** | **709.178.760,00** | | | | | | | **2.600.200.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.955.400.000,00** | **1.955.400.000,00** | **2.034.382.273,00** | **0,00** | | | | | | | **1.955.400.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.955.400.000,00 | 1.955.400.000,00 | 2.034.382.273,00 | 78.982.273,00 | | | - | - | - | | 1.955.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.955.400.000,00 | 1.955.400.000,00 | 2.034.382.273,00 | 78.982.273,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.955.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **623.927.987,00** | **638.300.000,00** | | | | | | | **638.300.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 623.927.987,00 | 623.927.987,00 | | | - | - | - | | 638.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 44 Orang | 0,00 | 0,00 | 114.419.000,00 | 114.419.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 312 Orang | 0,00 | 0,00 | 20.070.000,00 | 20.070.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 48 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 205.857.000,00 | 205.857.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.735.000,00 | 7.735.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 24 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 123.061.000,00 | 123.061.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 131.779.987,00 | 131.779.987,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 132.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 54 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.186.000,00 | 3.186.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **6.268.500,00** | **6.500.000,00** | | | | | | | **6.500.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.268.500,00 | 6.268.500,00 | | | - | - | - | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.268.500,00 | 6.268.500,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SLAWI** | | | | | | | **2.636.000.000,00** | **2.636.000.000,00** | **3.353.218.709,00** | **717.218.709,00** | | | | | | | **3.353.218.709,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.636.000.000,00** | **2.636.000.000,00** | **3.353.218.709,00** | **717.218.709,00** | | | | | | | **3.353.218.709,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.636.000.000,00** | **2.636.000.000,00** | **3.353.218.709,00** | **717.218.709,00** | | | | | | | **3.353.218.709,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.636.000.000,00** | **2.636.000.000,00** | **2.668.642.193,00** | **32.642.193,00** | | | | | | | **2.668.642.193,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.636.000.000,00 | 2.636.000.000,00 | 2.668.642.193,00 | 32.642.193,00 | | | - | - | - | | 2.668.642.193,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.636.000.000,00 | 2.636.000.000,00 | 2.668.642.193,00 | 32.642.193,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.668.642.193,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **671.393.516,00** | **671.393.516,00** | | | | | | | **671.393.516,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 671.393.516,00 | 671.393.516,00 | | | - | - | - | | 671.393.516,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2040 Orang | 0,00 | 0,00 | 89.760.000,00 | 89.760.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 89.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 9584 Orang | 0,00 | 0,00 | 18.675.000,00 | 18.675.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.675.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1604 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 146.035.000,00 | 146.035.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 146.035.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.260.000,00 | 10.260.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.260.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 14 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.319.000,00 | 15.319.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.319.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 186 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 188.098.500,00 | 188.098.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 188.098.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 135.021.016,00 | 135.021.016,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 135.021.016,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 18.180.000,00 | 18.180.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.180.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.082.000,00 | 3.082.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.082.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.193.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **13.183.000,00** | **13.183.000,00** | | | | | | | **13.183.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 13.183.000,00 | 13.183.000,00 | | | - | - | - | | 13.183.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.183.000,00 | 13.183.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.183.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS ADIWERNA** | | | | | | | **2.683.996.000,00** | **2.683.996.000,00** | **3.616.976.911,00** | **932.980.911,00** | | | | | | | **3.631.097.411,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.683.996.000,00** | **2.683.996.000,00** | **3.616.976.911,00** | **932.980.911,00** | | | | | | | **3.631.097.411,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.683.996.000,00** | **2.683.996.000,00** | **3.616.976.911,00** | **932.980.911,00** | | | | | | | **3.631.097.411,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.683.996.000,00** | **2.683.996.000,00** | **2.854.284.738,00** | **170.288.738,00** | | | | | | | **2.854.284.738,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.683.996.000,00 | 2.683.996.000,00 | 2.854.284.738,00 | 170.288.738,00 | | | - | - | - | | 2.854.284.738,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.683.996.000,00 | 2.683.996.000,00 | 2.854.284.738,00 | 170.288.738,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.854.284.738,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **755.046.820,00** | **762.966.820,00** | | | | | | | **762.966.820,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 755.046.820,00 | 755.046.820,00 | | | - | - | - | | 762.966.820,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2250 Orang | 0,00 | 0,00 | 110.400.000,00 | 110.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 110.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 5527 Orang | 0,00 | 0,00 | 46.220.000,00 | 46.220.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 46.220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 74 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.920.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 386 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 187.124.970,00 | 187.124.970,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 187.124.970,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 14 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.745.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 104 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.930.000,00 | 6.930.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.930.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 55 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.881.850,00 | 15.881.850,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.881.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 21 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.890.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 186 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 177.100.000,00 | 177.100.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 177.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 168 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 171.126.000,00 | 171.126.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 171.126.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.934.000,00 | 8.934.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.934.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | - | 74 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.920.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.945.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 630.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 140 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **7.645.353,00** | **13.845.853,00** | | | | | | | **13.845.853,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 7.645.353,00 | 7.645.353,00 | | | - | - | - | | 13.845.853,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.645.353,00 | 7.645.353,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.645.353,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.200.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PAGIYANTEN** | | | | | | | **2.421.900.000,00** | **2.421.900.000,00** | **3.118.201.763,00** | **696.301.763,00** | | | | | | | **3.065.416.377,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.421.900.000,00** | **2.421.900.000,00** | **3.118.201.763,00** | **696.301.763,00** | | | | | | | **3.065.416.377,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.421.900.000,00** | **2.421.900.000,00** | **3.118.201.763,00** | **696.301.763,00** | | | | | | | **3.065.416.377,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.421.900.000,00** | **2.421.900.000,00** | **2.474.685.386,00** | **0,00** | | | | | | | **2.421.900.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.421.900.000,00 | 2.421.900.000,00 | 2.474.685.386,00 | 52.785.386,00 | | | - | - | - | | 2.421.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.421.900.000,00 | 2.421.900.000,00 | 2.474.685.386,00 | 52.785.386,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.421.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **637.112.877,00** | **636.872.877,00** | | | | | | | **636.872.877,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 637.112.877,00 | 637.112.877,00 | | | - | - | - | | 636.872.877,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 762 Orang | 0,00 | 0,00 | 98.494.000,00 | 98.494.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 146.608.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1523 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.389.750,00 | 7.389.750,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.857.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 80 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.915.000,00 | 3.915.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 2960 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 130.871.000,00 | 130.871.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 133.226.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 16 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 104 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.680.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 377 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.112.800,00 | 15.112.800,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.290.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 56 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.520.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 2321 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 102.048.827,00 | 102.048.827,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 104.473.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 4432 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 250.981.500,00 | 250.981.500,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 199.468.477,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 68 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.060.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 42 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.890.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 284 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 12.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **6.403.500,00** | **6.643.500,00** | | | | | | | **6.643.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.403.500,00 | 6.403.500,00 | | | - | - | - | | 6.643.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 147 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.403.500,00 | 6.403.500,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.643.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TALANG** | | | | | | | **1.932.000.000,00** | **1.932.000.000,00** | **2.720.493.439,00** | **788.493.439,00** | | | | | | | **2.720.493.439,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.932.000.000,00** | **1.932.000.000,00** | **2.720.493.439,00** | **788.493.439,00** | | | | | | | **2.720.493.439,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.932.000.000,00** | **1.932.000.000,00** | **2.720.493.439,00** | **788.493.439,00** | | | | | | | **2.720.493.439,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.932.000.000,00** | **1.932.000.000,00** | **2.120.767.924,00** | **188.767.924,00** | | | | | | | **2.120.767.924,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.932.000.000,00 | 1.932.000.000,00 | 2.120.767.924,00 | 188.767.924,00 | | | - | - | - | | 2.120.767.924,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.932.000.000,00 | 1.932.000.000,00 | 2.120.767.924,00 | 188.767.924,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.120.767.924,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **595.555.015,00** | **595.765.515,00** | | | | | | | **595.765.515,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 595.555.015,00 | 595.555.015,00 | | | - | - | - | | 595.765.515,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1258 Orang | 0,00 | 0,00 | 117.792.000,00 | 117.792.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 65.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 57 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.960.000,00 | 15.960.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 17.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 108 Orang | 0,00 | 0,00 | 19.620.000,00 | 19.620.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 19.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 97 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 139.298.000,00 | 139.298.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 141.388.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 94 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 118 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.306.100,00 | 9.306.100,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 11.070.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 76 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.962.900,00 | 9.962.900,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.773.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 14 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.260.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 186 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 104.199.000,00 | 104.199.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 122.063.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 62 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 143.254.515,00 | 143.254.515,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 167.561.265,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 20 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.692.500,00 | 2.692.500,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.660.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 450.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 260 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 23.280.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **4.170.500,00** | **3.960.000,00** | | | | | | | **3.960.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 4.170.500,00 | 4.170.500,00 | | | - | - | - | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 38 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.170.500,00 | 4.170.500,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KALADAWA** | | | | | | | **1.738.200.000,00** | **1.738.200.000,00** | **2.563.796.777,00** | **825.596.777,00** | | | | | | | **2.563.796.777,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.738.200.000,00** | **1.738.200.000,00** | **2.563.796.777,00** | **825.596.777,00** | | | | | | | **2.563.796.777,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.738.200.000,00** | **1.738.200.000,00** | **2.563.796.777,00** | **825.596.777,00** | | | | | | | **2.563.796.777,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.738.200.000,00** | **1.738.200.000,00** | **1.905.556.759,00** | **167.356.759,00** | | | | | | | **1.905.556.759,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.738.200.000,00 | 1.738.200.000,00 | 1.905.556.759,00 | 167.356.759,00 | | | - | - | - | | 1.905.556.759,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.738.200.000,00 | 1.738.200.000,00 | 1.905.556.759,00 | 167.356.759,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.905.556.759,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **654.557.018,00** | **654.557.018,00** | | | | | | | **654.557.018,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 654.557.018,00 | 654.557.018,00 | | | - | - | - | | 654.557.018,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2484 Orang | 0,00 | 0,00 | 108.972.000,00 | 108.972.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 108.972.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 62 Orang | 0,00 | 0,00 | 13.230.000,00 | 13.230.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 36 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 108 orang Dokumen | 0,00 | 0,00 | 213.051.000,00 | 213.051.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 213.051.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 35 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.450.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 34 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.935.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.768.000,00 | 9.768.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.768.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 810.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 254 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 121.166.000,00 | 121.166.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 121.166.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 400 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 154.267.018,00 | 154.267.018,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 154.267.018,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 678.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 216 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.720.000,00 | 9.720.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.683.000,00** | **3.683.000,00** | | | | | | | **3.683.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.683.000,00 | 3.683.000,00 | | | - | - | - | | 3.683.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 30 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.683.000,00 | 3.683.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.683.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DUKUHTURI** | | | | | | | **2.216.363.000,00** | **2.216.363.000,00** | **2.941.437.017,00** | **725.074.017,00** | | | | | | | **2.945.339.017,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.216.363.000,00** | **2.216.363.000,00** | **2.941.437.017,00** | **725.074.017,00** | | | | | | | **2.945.339.017,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.216.363.000,00** | **2.216.363.000,00** | **2.941.437.017,00** | **725.074.017,00** | | | | | | | **2.945.339.017,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.216.363.000,00** | **2.216.363.000,00** | **2.314.159.715,00** | **97.796.715,00** | | | | | | | **2.314.159.715,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.216.363.000,00 | 2.216.363.000,00 | 2.314.159.715,00 | 97.796.715,00 | | | - | - | - | | 2.314.159.715,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.216.363.000,00 | 2.216.363.000,00 | 2.314.159.715,00 | 97.796.715,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.314.159.715,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **621.547.302,00** | **623.375.302,00** | | | | | | | **623.375.302,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 621.547.302,00 | 621.547.302,00 | | | - | - | - | | 623.375.302,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1230 Orang | 0,00 | 0,00 | 41.580.000,00 | 41.580.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 60.352.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 430 Orang | 0,00 | 0,00 | 16.530.000,00 | 16.530.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 21.728.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 112 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 503 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 150.538.000,00 | 150.538.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 151.639.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 16 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.665.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 114 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.830.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 30 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.733.000,00 | 2.733.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.733.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 48 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 265 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 176.069.000,00 | 176.069.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 134.784.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 53 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 187.412.302,00 | 187.412.302,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 193.724.302,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.350.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 34 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **5.730.000,00** | **7.804.000,00** | | | | | | | **7.804.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | | | - | - | - | | 7.804.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.902.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.902.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KUPU** | | | | | | | **1.629.118.000,00** | **1.629.118.000,00** | **2.219.002.067,00** | **589.884.067,00** | | | | | | | **2.340.180.551,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.629.118.000,00** | **1.629.118.000,00** | **2.219.002.067,00** | **589.884.067,00** | | | | | | | **2.340.180.551,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.629.118.000,00** | **1.629.118.000,00** | **2.219.002.067,00** | **589.884.067,00** | | | | | | | **2.340.180.551,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.629.118.000,00** | **1.629.118.000,00** | **1.645.679.915,00** | **16.561.915,00** | | | | | | | **1.645.679.915,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.629.118.000,00 | 1.629.118.000,00 | 1.645.679.915,00 | 16.561.915,00 | | | - | - | - | | 1.645.679.915,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.629.118.000,00 | 1.629.118.000,00 | 1.645.679.915,00 | 16.561.915,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.645.679.915,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **566.620.952,00** | **687.799.436,00** | | | | | | | **687.799.436,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 566.620.952,00 | 566.620.952,00 | | | - | - | - | | 687.799.436,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 202 Orang | 0,00 | 0,00 | 83.904.000,00 | 83.904.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 83.904.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 476 Orang | 0,00 | 0,00 | 17.595.000,00 | 17.595.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 17.595.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 48 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 59 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.670.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 111.452.484,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 121.178.484,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 111.452.484,00 | 111.452.484,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.045.000,00 | 9.045.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.045.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.857.900,00 | 13.857.900,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.857.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.260.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 120.322.200,00 | 120.322.200,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 120.322.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 167.827.268,00 | 167.827.268,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 167.827.268,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.752.000,00 | 10.752.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.752.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 545.100,00 | 545.100,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 545.100,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **6.701.200,00** | **6.701.200,00** | | | | | | | **6.701.200,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.701.200,00 | 6.701.200,00 | | | - | - | - | | 6.701.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.701.200,00 | 6.701.200,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.701.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DUKUHWARU** | | | | | | | **3.495.705.500,00** | **3.495.705.500,00** | **4.318.027.535,00** | **822.322.035,00** | | | | | | | **4.324.185.035,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.495.705.500,00** | **3.495.705.500,00** | **4.318.027.535,00** | **822.322.035,00** | | | | | | | **4.324.185.035,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.495.705.500,00** | **3.495.705.500,00** | **4.318.027.535,00** | **822.322.035,00** | | | | | | | **4.324.185.035,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.495.705.500,00** | **3.495.705.500,00** | **3.610.114.763,00** | **114.409.263,00** | | | | | | | **3.610.114.763,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 3.495.705.500,00 | 3.495.705.500,00 | 3.610.114.763,00 | 114.409.263,00 | | | - | - | - | | 3.610.114.763,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 3.495.705.500,00 | 3.495.705.500,00 | 3.610.114.763,00 | 114.409.263,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 3.610.114.763,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **688.288.772,00** | **701.755.272,00** | | | | | | | **701.755.272,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 688.288.772,00 | 688.288.772,00 | | | - | - | - | | 701.755.272,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 862 Orang | 0,00 | 0,00 | 127.440.000,00 | 127.440.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 129.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 12960 Orang | 0,00 | 0,00 | 23.580.000,00 | 23.580.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 24.660.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1400 Orang | 0,00 | 0,00 | 9.810.000,00 | 9.810.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.680.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 180 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 197.056.372,00 | 197.056.372,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 195.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.907.900,00 | 8.907.900,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.011.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.680.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 180 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 137.968.500,00 | 137.968.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 117.667.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 46 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 144.900.000,00 | 144.900.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 179.440.772,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.255.000,00 | 4.255.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.290.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | 756.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 756.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **19.624.000,00** | **12.315.000,00** | | | | | | | **12.315.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Posyandu Aktif* | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 19.624.000,00 | 19.624.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 12.315.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 19.624.000,00 | 19.624.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.157.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.157.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TARUB** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | **3.294.458.500,00** | **4.002.574.640,00** | **708.116.140,00** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | **3.294.458.500,00** | **4.002.574.640,00** | **708.116.140,00** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | **3.294.458.500,00** | **4.002.574.640,00** | **708.116.140,00** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.294.458.500,00** | **3.294.458.500,00** | **3.341.209.017,00** | **0,00** | | | | | | | **3.294.458.500,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 3.294.458.500,00 | 3.294.458.500,00 | 3.341.209.017,00 | 46.750.517,00 | | | - | - | - | | 3.294.458.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 3.294.458.500,00 | 3.294.458.500,00 | 3.341.209.017,00 | 46.750.517,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 3.294.458.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **649.525.923,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 649.525.923,00 | 649.525.923,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1440 Orang | 0,00 | 0,00 | 84.600.000,00 | 84.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 168 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 260 Orang | 0,00 | 0,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 246 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 178.770.000,00 | 178.770.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 246 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 38 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 157 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.130.000,00 | 14.130.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 88 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.711.600,00 | 17.711.600,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1578 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 102.155.700,00 | 102.155.700,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 77 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 179.113.623,00 | 179.113.623,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 180 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.960.000,00 | 12.960.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **11.839.700,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 11.839.700,00 | 11.839.700,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.839.700,00 | 11.839.700,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KRAMAT** | | | | | | | **1.845.540.000,00** | **1.845.540.000,00** | **2.746.185.536,00** | **900.645.536,00** | | | | | | | **2.736.015.536,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.845.540.000,00** | **1.845.540.000,00** | **2.746.185.536,00** | **900.645.536,00** | | | | | | | **2.736.015.536,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.845.540.000,00** | **1.845.540.000,00** | **2.746.185.536,00** | **900.645.536,00** | | | | | | | **2.736.015.536,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.845.540.000,00** | **1.845.540.000,00** | **2.009.414.766,00** | **163.874.766,00** | | | | | | | **2.009.414.766,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.845.540.000,00 | 1.845.540.000,00 | 2.009.414.766,00 | 163.874.766,00 | | | - | - | - | | 2.009.414.766,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.845.540.000,00 | 1.845.540.000,00 | 2.009.414.766,00 | 163.874.766,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.009.414.766,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **734.290.770,00** | **722.605.770,00** | | | | | | | **722.605.770,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 734.290.770,00 | 734.290.770,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | - | | 722.605.770,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2145 Orang | 0,00 | 0,00 | 121.110.000,00 | 121.110.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 121.110.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 6660 Orang | 0,00 | 0,00 | 39.240.000,00 | 39.240.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 39.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.390.000,00 | 6.390.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.390.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1480 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 7.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 203.540.000,00 | 203.540.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 203.540.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 2.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.981.500,00 | 17.981.500,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 17.981.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 121.525.000,00 | 121.525.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 121.525.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 173.934.270,00 | 173.934.270,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 162.434.270,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.930.000,00 | 14.930.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 14.717.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 478.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 13.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **2.480.000,00** | **3.995.000,00** | | | | | | | **3.995.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | | | - | - | - | | 3.995.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.995.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BANGUNGALIH** | | | | | | | **1.746.300.000,00** | **1.746.300.000,00** | **2.353.586.034,00** | **607.286.034,00** | | | | | | | **2.334.156.115,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.746.300.000,00** | **1.746.300.000,00** | **2.353.586.034,00** | **607.286.034,00** | | | | | | | **2.334.156.115,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.746.300.000,00** | **1.746.300.000,00** | **2.353.586.034,00** | **607.286.034,00** | | | | | | | **2.334.156.115,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.746.300.000,00** | **1.746.300.000,00** | **1.765.729.919,00** | **0,00** | | | | | | | **1.746.300.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.746.300.000,00 | 1.746.300.000,00 | 1.765.729.919,00 | 19.429.919,00 | | | - | - | - | | 1.746.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.746.300.000,00 | 1.746.300.000,00 | 1.765.729.919,00 | 19.429.919,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.746.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **582.916.115,00** | **582.916.115,00** | | | | | | | **582.916.115,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 582.916.115,00 | 582.916.115,00 | | | - | - | - | | 582.916.115,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 639 Orang | 0,00 | 0,00 | 55.044.000,00 | 55.044.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 55.044.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 4873 Orang | 0,00 | 0,00 | 17.010.000,00 | 17.010.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 17.010.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 94 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 788 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.010.000,00 | 8.010.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.010.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 131.479.000,00 | 131.479.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 131.479.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 810.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.570.000,00 | 15.570.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.570.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.052.250,00 | 7.052.250,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.052.250,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.260.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 147.956.000,00 | 147.956.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 147.956.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 188.520.865,00 | 188.520.865,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 188.520.865,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.890.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 834.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **4.940.000,00** | **4.940.000,00** | | | | | | | **4.940.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | | | - | - | - | | 4.940.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 0 0 | 0,00 | 0,00 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.940.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SURADADI** | | | | | | | **2.086.000.000,00** | **2.086.000.000,00** | **2.832.326.623,00** | **746.326.623,00** | | | | | | | **2.832.326.623,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.086.000.000,00** | **2.086.000.000,00** | **2.832.326.623,00** | **746.326.623,00** | | | | | | | **2.832.326.623,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.086.000.000,00** | **2.086.000.000,00** | **2.832.326.623,00** | **746.326.623,00** | | | | | | | **2.832.326.623,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.086.000.000,00** | **2.086.000.000,00** | **2.165.090.484,00** | **79.090.484,00** | | | | | | | **2.165.090.484,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 2.086.000.000,00 | 2.086.000.000,00 | 2.165.090.484,00 | 79.090.484,00 | | | - | - | - | | 2.165.090.484,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.086.000.000,00 | 2.086.000.000,00 | 2.165.090.484,00 | 79.090.484,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 2.165.090.484,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **663.353.639,00** | **663.353.639,00** | | | | | | | **663.353.639,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 663.353.639,00 | 663.353.639,00 | | | - | - | - | | 663.353.639,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 01800 Orang | 0,00 | 0,00 | 109.350.000,00 | 109.350.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 109.350.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 28.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 7 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.150.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 105 Orang | 0,00 | 0,00 | 16.270.000,00 | 16.270.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 16.270.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 187.865.000,00 | 187.865.000,00 | - | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 187.865.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.720.000,00 | 9.720.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 29.452.000,00 | 29.452.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 29.452.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 121.540.000,00 | 121.540.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 121.540.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 130.341.639,00 | 130.341.639,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 130.341.639,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.615.000,00 | 6.615.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 6.615.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 420.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 16.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.882.500,00** | **3.882.500,00** | | | | | | | **3.882.500,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.882.500,00 | 3.882.500,00 | | | - | - | - | | 3.882.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.882.500,00 | 3.882.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 3.882.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS JATIBOGOR** | | | | | | | **1.994.800.000,00** | **1.994.800.000,00** | **2.572.862.740,00** | **578.062.740,00** | | | | | | | **2.560.985.512,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.994.800.000,00** | **1.994.800.000,00** | **2.572.862.740,00** | **578.062.740,00** | | | | | | | **2.560.985.512,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.994.800.000,00** | **1.994.800.000,00** | **2.572.862.740,00** | **578.062.740,00** | | | | | | | **2.560.985.512,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.994.800.000,00** | **1.994.800.000,00** | **2.006.677.228,00** | **0,00** | | | | | | | **1.994.800.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 1.994.800.000,00 | 1.994.800.000,00 | 2.006.677.228,00 | 11.877.228,00 | | | - | - | - | | 1.994.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 1.994.800.000,00 | 1.994.800.000,00 | 2.006.677.228,00 | 11.877.228,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 1.994.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **562.465.512,00** | **562.144.512,00** | | | | | | | **562.144.512,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 562.465.512,00 | 562.465.512,00 | | | - | - | - | | 562.144.512,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 0,00 | 51.168.000,00 | 51.168.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 51.168.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 408 Orang | 0,00 | 0,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 18.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 240 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 10.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 192 Orang | 0,00 | 0,00 | 9.276.000,00 | 9.276.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 155.364.000,00 | 155.364.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 165.684.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.440.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.720.000,00 | 9.720.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.368.600,00 | 10.368.600,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 9.945.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 16 Orang | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 146.612.300,00 | 146.612.300,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 146.649.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 123.260.012,00 | 123.260.012,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 122.855.512,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.315.000,00 | 8.315.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 681.600,00 | 681.600,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 681.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.380.000,00 | 16.380.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 7.020.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3.720.000,00** | **4.041.000,00** | | | | | | | **4.041.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | | | - | - | - | | 4.041.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.041.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS WARUREJO** | | | | | | | **4.130.200.000,00** | **4.130.200.000,00** | **5.095.933.794,00** | **965.733.794,00** | | | | | | | **5.095.933.794,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.130.200.000,00** | **4.130.200.000,00** | **5.095.933.794,00** | **965.733.794,00** | | | | | | | **5.095.933.794,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.130.200.000,00** | **4.130.200.000,00** | **5.095.933.794,00** | **965.733.794,00** | | | | | | | **5.095.933.794,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.130.200.000,00** | **4.130.200.000,00** | **4.335.935.929,00** | **205.735.929,00** | | | | | | | **4.335.935.929,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 4.130.200.000,00 | 4.130.200.000,00 | 4.335.935.929,00 | 205.735.929,00 | | | - | - | - | | 4.335.935.929,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 0 0 | 0 0 | 4.130.200.000,00 | 4.130.200.000,00 | 4.335.935.929,00 | 205.735.929,00 | - | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 4.335.935.929,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **751.413.865,00** | **751.313.865,00** | | | | | | | **751.313.865,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 751.413.865,00 | 751.413.865,00 | | | - | - | - | | 751.313.865,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2340 Orang | 0,00 | 0,00 | 82.450.000,00 | 82.450.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 140.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 113 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.255.000,00 | 15.255.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 2.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 26.345.000,00 | 26.345.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.710.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 251.037.000,00 | 251.037.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 254.520.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 21 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.390.000,00 | 6.390.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 1.890.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.580.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.843.050,00 | 16.843.050,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 11.698.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 5.220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 52 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 172.548.815,00 | 172.548.815,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 157.133.150,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 149.230.000,00 | 149.230.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 132.257.015,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 30 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.255.000,00 | 4.255.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 4.290.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 585.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 24 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 15.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **8.584.000,00** | **8.684.000,00** | | | | | | | **8.684.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 8.584.000,00 | 8.584.000,00 | | | - | - | - | | 8.684.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.584.000,00 | 8.584.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - | | | 8.684.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD DR. SOESELO** | | | | | | | **196.620.324.600,00** | **196.620.324.600,00** | **310.236.705.121,00** | **113.616.380.521,00** | | | | | | | **202.581.186.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **196.620.324.600,00** | **196.620.324.600,00** | **310.236.705.121,00** | **113.616.380.521,00** | | | | | | | **202.581.186.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **196.620.324.600,00** | **196.620.324.600,00** | **310.236.705.121,00** | **113.616.380.521,00** | | | | | | | **202.581.186.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo [deleted] Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo** | | | | **100 83,20 86,15 (AA) Persen Nilai Grade** | **100 83,20 86,15 (AA) Persen Nilai Grade** | **195.620.324.600,00** | **195.620.324.600,00** | **296.150.705.121,00** | **6.960.861.400,00** | | | | | | | **202.581.186.000,00** | |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 33.149.049.600,00 | 33.149.049.600,00 | 31.859.149.600,00 | -1.289.900.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Pegawai ASN RSUD dr. Soeselo | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 420 Orang/ bulan | 420 Orang/ bulan | 33.149.049.600,00 | 33.149.049.600,00 | 31.859.149.600,00 | -1.289.900.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia* | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 6.860.000.000,00 | 6.860.000.000,00 | | | - | - | Unit Kerja BLUD RSUD dr. Soeselo | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 1.312.000.000,00 | 1.312.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 5.548.000.000,00 | 5.548.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN | - | - | | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase honor PTT yang terpenuhi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 71.275.000,00 | 71.275.000,00 | 71.275.000,00 | 0,00 | | | - | - | Pegawai PTT RSUD dr. Soeselo | | 81.186.000,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 71.275.000,00 | 71.275.000,00 | 71.275.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 81.186.000,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Nilai Kinerja Keuangan Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Nilai Kinerja Pelayanan* | | | | 19,00 Nilai Bobot 30,90 Nilai Bobot 31,25 Nilai Bobot 36,25 Nilai Bobot | 19,00 Nilai Bobot 30,90 Nilai Bobot 31,25 Nilai Bobot 36,25 Nilai Bobot | 162.400.000.000,00 | 162.400.000.000,00 | 257.360.280.521,00 | 94.960.280.521,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Penerima manfaat pelayanan RSUD dr. Soeselo | | 202.500.000.000,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 6 Unit Kerja | 6 Unit Kerja | 162.400.000.000,00 | 162.400.000.000,00 | 257.360.280.521,00 | 94.960.280.521,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 202.500.000.000,00 | RSUD DR. SOESELO |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Pemenuhan Kesehatan Masyarakat (UKM)** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **14.086.000.000,00** | **-1.000.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di RSUD dr. Soeselo* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 14.086.000.000,00 | 13.086.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Pengguna Layanan | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | - | 21 Unit | 0,00 | 0,00 | 14.086.000.000,00 | 14.086.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)<br>DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN | - | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 0,00 | RSUD DR. SOESELO |
| | | **RSUD SURADADI** | | | | | | | **49.669.749.000,00** | **49.669.749.000,00** | **54.185.327.103,00** | **4.515.578.103,00** | | | | | | | **50.806.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **49.669.749.000,00** | **49.669.749.000,00** | **54.185.327.103,00** | **4.515.578.103,00** | | | | | | | **50.806.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **49.669.749.000,00** | **49.669.749.000,00** | **54.185.327.103,00** | **4.515.578.103,00** | | | | | | | **50.806.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi** | | | | **82 Persen** | **77,36 100 Nilai Persen** | **48.669.749.000,00** | **48.669.749.000,00** | **54.121.387.103,00** | **2.136.251.000,00** | | | | | | | **50.806.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*<br>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Laporan 178 Orang/ bulan | 12 Laporan 178 Orang/ bulan | 10.660.789.000,00 | 10.660.789.000,00 | 10.243.839.000,00 | -416.950.000,00 | | | - | - | ASN | | 11.085.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 178 Orang/ bulan | 178 Orang/ bulan | 10.619.749.000,00 | 10.619.749.000,00 | 10.202.799.000,00 | -416.950.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)<br>OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 41.040.000,00 | 41.040.000,00 | 41.040.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | PAJAK AIR TANAH | - | - | | | 85.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*<br>*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 1.856.060.000,00 | 1.856.060.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Karyawan dan Masyarakat | | 1.500.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 356.060.000,00 | 356.060.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 958.960.000,00 | 958.960.000,00 | 958.960.000,00 | 0,00 | | | - | - | Karyawan dan Masyarakat | | 971.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 908.350.000,00 | 908.350.000,00 | 908.350.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | PAJAK AIR TANAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 910.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.610.000,00 | 50.610.000,00 | 50.610.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | PAJAK AIR TANAH | - | - | | | 61.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 747.431.125,00 | -2.568.875,00 | | | - | - | Karyawan dan Masyarakat | | 750.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 747.431.125,00 | -2.568.875,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 750.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 31 Unit Kerja | 31 Unit Kerja | 36.300.000.000,00 | 36.300.000.000,00 | 40.315.096.978,00 | 4.015.096.978,00 | | | - | - | Karyawan dan Masyarakat | | 36.500.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 3 Unit Kerja | 3 Unit Kerja | 36.300.000.000,00 | 36.300.000.000,00 | 40.315.096.978,00 | 4.015.096.978,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 36.500.000.000,00 | RSUD SURADADI |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | | **82 Persen** | **82 Persen** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **63.940.000,00** | **-1.000.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 100 Persen | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 63.940.000,00 | -936.060.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | Karyawan dan Masyarakat | | 0,00 | RSUD SURADADI |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 63.940.000,00 | -936.060.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender | | | 0,00 | RSUD SURADADI |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **189.529.850.200,00** | **190.241.455.620,00** | **261.713.866.000,00** | **72.184.015.800,00** | | | | | | | **155.827.586.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **189.529.850.200,00** | **190.241.455.620,00** | **261.713.866.000,00** | **72.184.015.800,00** | | | | | | | **155.827.586.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **189.529.850.200,00** | **190.241.455.620,00** | **261.713.866.000,00** | **72.184.015.800,00** | | | | | | | **155.827.586.000,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **23.449.528.300,00** | **23.649.528.300,00** | **22.956.984.350,00** | **1.506.325.700,00** | | | | | | | **24.955.854.000,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 78.862.500,00 | -31.137.500,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 155.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.887.500,00 | -11.112.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 39.975.000,00 | -20.025.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 12.528.439.800,00 | 12.528.439.800,00 | 12.270.399.800,00 | -258.040.000,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 11.990.854.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 181 Orang/ bulan | 181 Orang/ bulan | 12.178.439.800,00 | 12.178.439.800,00 | 11.916.539.800,00 | -261.900.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 11.525.034.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 118.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 155.820.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 570 Dokumen | 570 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 9.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.860.000,00 | -4.140.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 365.096.000,00 | 365.096.000,00 | 264.461.000,00 | -100.635.000,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 517.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 9.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.615.000,00 | -21.385.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 120.096.000,00 | 120.096.000,00 | 94.296.000,00 | -25.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.550.000,00 | -8.450.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.504.000,00 | -2.496.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 62.996.000,00 | -37.004.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.500.000,00 | -6.500.000,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 112.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 300.250.000,00 | -119.750.000,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 720.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 300 Paket | 300 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.550.000,00 | -7.450.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.250.000,00 | -24.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 111.150.000,00 | -38.850.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 42.300.000,00 | -7.700.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 733.508.000,00 | 733.508.000,00 | 611.543.600,00 | -121.964.400,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 760.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 43.508.000,00 | 43.508.000,00 | 77.041.100,00 | 33.533.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 224.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 27.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 133.502.500,00 | -31.497.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 170.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 24.500.000,00 | -125.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.500.000,00 | -4.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 2.243.484.500,00 | 2.243.484.500,00 | 2.662.090.400,00 | 418.605.900,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 3.300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 493.980.500,00 | 493.980.500,00 | 433.020.600,00 | -60.959.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 259.309.000,00 | 209.309.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 686.179.800,00 | 236.179.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | 135.077.000,00 | 34.077.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 48.504.000,00 | 48.504.000,00 | 48.504.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 3.374.000.000,00 | 3.374.000.000,00 | 3.190.474.500,00 | -183.525.500,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 3.735.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.962.000.000,00 | 2.962.000.000,00 | 2.783.474.500,00 | -178.525.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 3.650.000.000,00 | 3.850.000.000,00 | 3.560.402.550,00 | -89.597.450,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 3.665.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 37 Unit | 37 Unit | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 713.402.550,00 | -36.597.450,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 750.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 700.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1.200.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.197.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 835.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | | | | 0 Ha | 0 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten** | | | | **64.39 %** | **64.39 %** | **6.500.000.000,00** | **6.500.000.000,00** | **5.762.290.500,00** | **-500.000.000,00** | | | | | | | **6.000.000.000,00** | |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten* | | | | 64,39 % | 64,39 % | 6.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 | 5.762.290.500,00 | -737.709.500,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 2.06 KM | 2.06 KM | 2.845.000.000,00 | 2.845.000.000,00 | 2.241.458.000,00 | -603.542.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.345.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 92,36 KM | 92,36 KM | 3.222.000.000,00 | 3.222.000.000,00 | 3.084.083.000,00 | -137.917.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.222.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya* | | | | 104 DI | 104 DI | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 130.147.000,00 | -69.853.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 233.000.000,00 | 233.000.000,00 | 306.602.500,00 | 73.602.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 233.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman** | | | | **100 35,72 % %** | **100 35,72 % %** | **3.955.000.000,00** | **3.955.000.000,00** | **3.751.054.500,00** | **495.000.000,00** | | | | | | | **4.450.000.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak* | | | | 100 % 35,72 % | 100 % 35,72 % | 3.955.000.000,00 | 3.955.000.000,00 | 3.751.054.500,00 | -203.945.500,00 | | | - | - | Masyarakat di Kabupaten Tegal | | 4.450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 382.930.000,00 | 382.930.000,00 | 255.984.500,00 | -126.945.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 0 Liter/Detik | 0 Liter/Detik | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.475.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 1 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 511.760.000,00 | 511.760.000,00 | 508.380.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 300 SR | 300 SR | 1.560.310.000,00 | 1.560.310.000,00 | 1.511.690.000,00 | -48.620.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan** | | | | **86,00 %** | **86,00 %** | **214.875.000,00** | **214.875.000,00** | **2.663.465.500,00** | **1.685.125.000,00** | | | | | | | **1.900.000.000,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan* | | | | 86,00 % | 86,00 % | 214.875.000,00 | 214.875.000,00 | 2.663.465.500,00 | 2.448.590.500,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 1.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun* | | | | 1 Ton/hari | 1 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 2.513.000.000,00 | 2.513.000.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Kesuben Kab. Tegal, Pangkah, Dermasandi Kab. Tegal, Adiwerna, Harjosari Lor Kab. Tegal, Suradadi, Kertasari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-LAYANAN DASAR | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 214.875.000,00 | 214.875.000,00 | 150.465.500,00 | -64.409.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Aman** | | | | **100 1,37 % %** | **100 1,37 % %** | **2.994.581.300,00** | **2.994.581.300,00** | **8.576.897.900,00** | **439.400.700,00** | | | | | | | **3.433.982.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan Akses Sanitasi Aaman Cakupan Akses Sanitasi Layak* | | | | 100 % 1,37 % | 100 % 1,37 % | 2.994.581.300,00 | 2.994.581.300,00 | 8.576.897.900,00 | 5.582.316.600,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 3.433.982.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.927.103.250,00 | -72.896.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0020 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi* | | | | 50 $M^3$/Hari | 50 $M^3$/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja* | | | | 500 Rumah Tangga | 500 Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 300 Rumah Tangga | 300 Rumah Tangga | 794.581.300,00 | 794.581.300,00 | 6.476.073.650,00 | 5.681.492.350,00 | Kab. Tegal, Bojong, Cikura Kab. Tegal, Balapulang, Cilongok Kab. Tegal, Balapulang, Danareja Kab. Tegal, Lebaksiu, Kambangan Kab. Tegal, Pangkah, Grobog Kulon Kab. Tegal, Dukuhturi, Pepedan Kab. Tegal, Suradadi, Kertasari Kab. Tegal, Suradadi, Jatibogor Kab. Tegal, Warureja, Demangharjo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-LAYANAN DASAR | - | - | | | 1.183.982.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 173.721.000,00 | -26.279.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten** | | | | **68,00 %** | **68,00 %** | **14.650.000.000,00** | **14.950.000.000,00** | **16.625.000.000,00** | **-7.750.000.000,00** | | | | | | | **6.900.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ketersediaan jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten* | | | | 68,00 % | 68,00 % | 14.650.000.000,00 | 14.950.000.000,00 | 16.625.000.000,00 | 1.975.000.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 6.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 50000 M | 50000 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.050.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 500 Meter | 500 Meter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0020 | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi* | | | | 500 M | 500 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan* | | | | 1 Sistem Drainase Lingkungan | 1 Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0022 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan* | | | | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0025 | Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis* | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0026 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0027 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya* | | | | 1 Kawasan Genangan | 1 Kawasan Genangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi* | | | | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun* | | | | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 14.650.000.000,00 | 14.950.000.000,00 | 16.625.000.000,00 | 1.975.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan** | | | | **85,00 %** | **85,00 %** | **25.500.000.000,00** | **26.655.000.000,00** | **19.584.372.300,00** | **-22.225.000.000,00** | | | | | | | **3.275.000.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi*<br>*Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan* | | | | 29,20 %<br>85,00 % | 29,20 %<br>85,00 % | 25.500.000.000,00 | 26.655.000.000,00 | 19.584.372.300,00 | -5.915.627.700,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 3.275.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 1 Bangunan Gedung | 1 Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala* | | | | 3 Bangunan Gedung | 3 Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 35.343.800,00 | -14.656.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota* | | | | 5 Bantuan Teknis | 5 Bantuan Teknis | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 81.887.000,00 | -18.113.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.060.000.000,00 | 26.215.000.000,00 | 19.313.932.300,00 | -5.746.067.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | 153.209.200,00 | -136.790.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata** | | | | **100 %** | **100 %** | **8.500.000.000,00** | **8.500.000.000,00** | **8.609.756.000,00** | **-2.500.000.000,00** | | | | | | | **6.000.000.000,00** | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata* | | | | 100 % | 100 % | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | 8.609.756.000,00 | 109.756.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata* | | | | 3 Kawasan | 3 Kawasan | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | 8.609.756.000,00 | 109.756.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap** | | | | **88,00 %** | **88,00 %** | **100.092.865.600,00** | **99.149.471.020,00** | **170.019.382.020,00** | **-4.480.115.600,00** | | | | | | | **95.612.750.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap*<br>*Proporsi panjang jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap* | | | | 88,00 %<br>93,00 % | 88,00 %<br>93,00 % | 100.092.865.600,00 | 99.149.471.020,00 | 170.019.382.020,00 | 69.926.516.420,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 95.612.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 350 Dokumen | 350 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya* | | | | 847.27 KM | 847.27 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Diganti* | | | | 1 Jembatan | 1 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 5 KM | 5 KM | 11.465.000.000,00 | 11.290.000.000,00 | 14.815.500.000,00 | 3.350.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 5 KM | 5 KM | 56.207.865.600,00 | 55.364.471.020,00 | 108.270.471.020,00 | 52.062.605.420,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>OPSEN PKB | - | - | | | 15.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya* | | | | 847.27 KM | 847.27 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | 2 KM | 2 KM | 1.600.000.000,00 | 1.675.000.000,00 | 4.205.000.000,00 | 2.605.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 3.161.725.000,00 | 1.161.725.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 3 Jembatan | 3 Jembatan | 13.820.000.000,00 | 13.820.000.000,00 | 17.257.000.000,00 | 3.437.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.112.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur* | | | | 1 KM | 1 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0042 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 847.27 KM | 847.27 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 3 KM | 3 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 715.15 KM | 715.15 KM | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 22.309.686.000,00 | 7.309.686.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0048 | Pelebaran Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dilebarkan* | | | | 2 Jembatan | 2 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Rasio tenaga konstruksi yang terlatih** | | | | **80 %** | **80 %** | **950.000.000,00** | **950.000.000,00** | **860.976.680,00** | **260.000.000,00** | | | | | | | **1.210.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Rasio tenaga konstruksi yang terlatih* | | | | 80,00 % | 80,00 % | 228.371.000,00 | 228.371.000,00 | 193.200.090,00 | -35.170.910,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 63.080.000,00 | 63.080.000,00 | 53.342.500,00 | -9.737.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 28.642.000,00 | 28.642.000,00 | 33.819.000,00 | 5.177.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.759.000,00 | 8.759.000,00 | 4.379.500,00 | -4.379.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 127.890.000,00 | 127.890.000,00 | 101.659.090,00 | -26.230.910,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio tenaga konstruksi yang terlatih* | | | | 80,00 % | 80,00 % | 437.826.000,00 | 437.826.000,00 | 407.356.375,00 | -30.469.625,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 475.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan* | | | | 1 Perangkat Pendukung | 1 Perangkat Pendukung | 17.850.000,00 | 17.850.000,00 | 26.245.875,00 | 8.395.875,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 419.976.000,00 | 419.976.000,00 | 381.110.500,00 | -38.865.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Rasio tenaga konstruksi yang terlatih* | | | | 80,00 % | 80,00 % | 283.803.000,00 | 283.803.000,00 | 260.420.215,00 | -23.382.785,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 335.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 20 Bangunan Konstruksi | 20 Bangunan Konstruksi | 8.433.000,00 | 8.433.000,00 | 4.216.500,00 | -4.216.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 90 Lembaga | 90 Lembaga | 275.370.000,00 | 275.370.000,00 | 256.203.715,00 | -19.166.285,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan** | | | | **90 %** | **90 %** | **2.723.000.000,00** | **2.723.000.000,00** | **2.303.686.250,00** | **-633.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan* | | | | 90,00 % | 90,00 % | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 169.940.000,00 | -90.060.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang* | | | | 20 Publikasi | 20 Publikasi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.750.000,00 | -4.250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0008 | Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 159.190.000,00 | -85.810.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan* | | | | 90,00 % | 90,00 % | 2.048.000.000,00 | 2.048.000.000,00 | 1.820.941.750,00 | -227.058.250,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 830.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0004 | Penyusunan Peta Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data SHP Peta Dasar* | | | | 2 Peta | 2 Peta | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 151.355.000,00 | -16.645.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.880.000.000,00 | 1.880.000.000,00 | 1.669.586.750,00 | -210.413.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan* | | | | 90,00 % | 90,00 % | 324.000.000,00 | 324.000.000,00 | 268.364.500,00 | -55.635.500,00 | | | - | - | Masyarakat dan badan usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal | | 610.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 115.581.000,00 | -45.419.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 600 Layanan | 600 Layanan | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 12.940.000,00 | -30.060.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 98.833.750,00 | 30.833.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 41.009.750,00 | -10.990.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan* | | | | 93,00 % | 93,00 % | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 44.440.000,00 | -46.560.000,00 | | | - | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 21.440.000,00 | -28.560.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 23.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0011 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0012 | Penilaian Perwujudan RTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN** | | | | | | | **15.374.738.000,00** | **15.424.738.000,00** | **17.627.330.571,00** | **2.252.592.571,00** | | | | | | | **16.223.021.500,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **7.015.538.000,00** | **7.015.538.000,00** | **6.690.254.075,00** | **1.014.483.500,00** | | | | | | | **8.030.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersususnnya dokumen perencanaan perangkat daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 31.700.000,00 | -3.300.000,00 | | | - | - | Dinas | | 38.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 0,00 | 35.000.000,00 | 31.700.000,00 | 31.700.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 38.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.127.056.500,00 | 4.127.056.500,00 | 4.011.504.000,00 | -115.552.500,00 | | | - | - | Dinas | | 5.104.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 0,00 | 4.032.056.500,00 | 3.930.056.500,00 | 3.930.056.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 95.000.000,00 | 81.447.500,00 | 81.447.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 104.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 57 Orang | 57 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33.085.800,00 | -16.914.200,00 | | | - | - | Dinas | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 57 Orang | 57 Orang | 0,00 | 50.000.000,00 | 33.085.800,00 | 33.085.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 537.581.500,00 | 537.581.500,00 | 368.523.900,00 | -169.057.600,00 | | | - | - | Dinas | | 403.781.500,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.998.700,00 | 1.998.700,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 2.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 49.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 25.000.000,00 | 24.874.825,00 | 24.874.825,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 50.000.000,00 | 43.685.000,00 | 43.685.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 25.000.000,00 | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 165.000.000,00 | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 225.581.500,00 | 107.915.375,00 | 107.915.375,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 225.581.500,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terwujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 68.924.590,00 | -6.075.410,00 | | | - | - | Dinas | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 75.000.000,00 | 68.924.590,00 | 68.924.590,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.823.400.000,00 | 1.823.400.000,00 | 1.805.092.852,00 | -18.307.148,00 | | | - | - | Dinas | | 2.035.740.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 2.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 250.000.000,00 | 277.788.852,00 | 277.788.852,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 1.571.400.000,00 | 1.525.313.000,00 | 1.525.313.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 1.783.540.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 367.500.000,00 | 367.500.000,00 | 371.422.933,00 | 3.922.933,00 | | | - | - | Dinas | | 317.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 26 Unit | 26 Unit | 0,00 | 250.000.000,00 | 249.948.125,00 | 249.948.125,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 30.000.000,00 | 34.078.808,00 | 34.078.808,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 85.000.000,00 | 84.916.000,00 | 84.916.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14.806.738.000,00** | **14.856.738.000,00** | **17.142.710.571,00** | **2.335.972.571,00** | | | | | | | **16.155.021.500,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **150.540.000,00** | **150.000.000,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | - | 5 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | *Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.540.000,00 | -49.460.000,00 | | | - | - | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.540.000,00 | -49.460.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata** | | | | **25,36 Persen** | **51,28 Persen** | **75.000.000,00** | **75.000.000,00** | **46.739.375,00** | **0,00** | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 46.739.375,00 | -28.260.625,00 | | | - | - | Masyarakat | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 46.739.375,00 | -28.260.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni** | | | | **52,28 Persen** | **25,36 Persen** | **6.641.200.000,00** | **6.641.200.000,00** | **6.606.199.100,00** | **-116.200.000,00** | | | | | | | **6.525.000.000,00** | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.641.200.000,00 | 6.641.200.000,00 | 6.606.199.100,00 | -35.000.900,00 | | | - | - | Masyarakat | | 6.525.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 414 Unit Rumah | 515 Unit Rumah | 6.300.000.000,00 | 6.300.000.000,00 | 6.300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | - | - | | | 6.400.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 341.200.000,00 | 341.200.000,00 | 306.199.100,00 | -35.000.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 4. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Prosentase lingkungan yang aman didukung dengan PSU** | | | | **86,70 Persen** | **86,70 Persen** | **975.000.000,00** | **1.025.000.000,00** | **3.648.978.021,00** | **300.000.000,00** | | | | | | | **1.275.000.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Prosentase ketersediaan PSU perumahan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 975.000.000,00 | 1.025.000.000,00 | 3.648.978.021,00 | 2.673.978.021,00 | | | - | - | Masyarakat | | 1.275.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 6 Lokasi | 7 Lokasi | 800.000.000,00 | 850.000.000,00 | 2.848.602.521,00 | 2.048.602.521,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan* | | | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0,00 | 0,00 | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 250.375.500,00 | 75.375.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **568.000.000,00** | **568.000.000,00** | **484.620.000,00** | **-83.380.000,00** | | | | | | | **68.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **568.000.000,00** | **568.000.000,00** | **484.620.000,00** | **-83.380.000,00** | | | | | | | **68.000.000,00** | |
| 1. | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **530.000.000,00** | **530.000.000,00** | **465.207.500,00** | **-500.000.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 465.207.500,00 | -64.792.500,00 | | | - | - | Pemerintah Daerah | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 465.207.500,00 | -64.792.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **Persentase implementasi redistribusi tanah** | | | | **65 Persen** | **65 Persen** | **38.000.000,00** | **38.000.000,00** | **19.412.500,00** | **0,00** | | | | | | | **38.000.000,00** | |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Berita acara dalam pelaksanaan reformasi agraria* | | | | 4 Berita Acara | 4 Berita Acara | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.412.500,00 | -18.587.500,00 | | | - | - | Pemerintah Daerah | | 38.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | 2.10.06.2.01.0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.* | | | | 4 Berita Acara | 4 Berita Acara | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.412.500,00 | -18.587.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu | RETRIBUSI JASA USAHA | - | - | | | 38.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **11.772.952.900,00** | **11.772.952.900,00** | **11.466.834.825,00** | **-306.118.075,00** | | | | | | | **13.099.797.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **11.772.952.900,00** | **11.772.952.900,00** | **11.466.834.825,00** | **-306.118.075,00** | | | | | | | **13.099.797.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **11.772.952.900,00** | **11.772.952.900,00** | **11.466.834.825,00** | **-306.118.075,00** | | | | | | | **13.099.797.000,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP** | | | | **100 %** | **100 %** | **10.125.993.800,00** | **10.125.993.800,00** | **9.461.877.510,00** | **-197.434.800,00** | | | | | | | **9.928.559.000,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.351.125,00 | 351.125,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 45.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 46.506.125,00 | 1.506.125,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.845.000,00 | -1.155.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Satpol PP Kab. Tegal* | | | | 100 % | 100 % | 6.162.399.800,00 | 6.162.399.800,00 | 5.655.999.800,00 | -506.400.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 5.836.559.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 114 Orang/ bulan | 114 Orang/ bulan | 6.070.719.800,00 | 6.070.719.800,00 | 5.564.319.800,00 | -506.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.731.883.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 91.680.000,00 | 91.680.000,00 | 91.680.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 104.676.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 376.140.000,00 | 376.140.000,00 | 289.708.350,00 | -86.431.650,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 417.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 201.934.000,00 | 201.934.000,00 | 201.933.350,00 | -650,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 225.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 110 Orang | 110 Orang | 124.206.000,00 | 124.206.000,00 | 62.775.000,00 | -61.431.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 132.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tercapainya administrasi umum OPD* | | | | 100 % | 100 % | 462.718.000,00 | 462.718.000,00 | 365.830.735,00 | -96.887.265,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 315.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.998.810,00 | -1.190,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 30.999.925,00 | -75,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 45.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 136.718.000,00 | 136.718.000,00 | 126.982.000,00 | -9.736.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 150.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 13.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 151.250.000,00 | -48.750.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 39.100.000,00 | -35.900.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 85.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya pengadaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 660.860.000,00 | 660.860.000,00 | 735.310.000,00 | 74.450.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 1.262.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 1.182.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 50.860.000,00 | 50.860.000,00 | 125.310.000,00 | 74.450.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.119.876.000,00 | 2.119.876.000,00 | 2.066.802.500,00 | -53.073.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 1.582.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 2.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 184.000.000,00 | 184.000.000,00 | 132.000.000,00 | -52.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 220.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.935.876.000,00 | 1.935.876.000,00 | 1.934.802.500,00 | -1.073.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 1.360.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 296.000.000,00 | 296.000.000,00 | 299.875.000,00 | 3.875.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 470.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 | 254.880.000,00 | 3.880.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.995.000,00 | -5.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 150.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Presentase gangguan trantibun yang tertangani** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.012.766.100,00** | **1.012.766.100,00** | **1.415.129.540,00** | **387.473.900,00** | | | | | | | **1.400.240.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase gangguan trantibum yang tertangani* | | | | 100 % | 100 % | 361.000.000,00 | 361.000.000,00 | 369.073.000,00 | 8.073.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | | 681.240.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 | 298.195.000,00 | 47.195.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 559.240.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 24.980.000,00 | -15.020.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 45.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 45.898.000,00 | -24.102.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 77.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan* | | | | 100 % | 100 % | 651.766.100,00 | 651.766.100,00 | 1.046.056.540,00 | 394.290.440,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 719.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.562.500,00 | -4.437.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 48.831.500,00 | -26.168.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 99.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 566.766.100,00 | 566.766.100,00 | 991.662.540,00 | 424.896.440,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 600.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 3. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | **100 %** | **100 %** | **634.193.000,00** | **634.193.000,00** | **589.827.775,00** | **1.136.805.000,00** | | | | | | | **1.770.998.000,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Tegal* | | | | 100 % | 100 % | 599.193.000,00 | 599.193.000,00 | 566.805.775,00 | -32.387.225,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 1.710.998.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.193.000,00 | 199.193.000,00 | 166.805.775,00 | -32.387.225,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 1.270.998.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 440.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | *Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran* | | | | 100 % | 100 % | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran* | | | | 100 % | 100 % | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.022.000,00 | -6.978.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 35.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.022.000,00 | -6.978.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 35.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **7.148.488.500,00** | **7.148.488.500,00** | **6.675.444.513,00** | **-473.043.987,00** | | | | | | | **7.017.244.750,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.148.488.500,00** | **7.148.488.500,00** | **6.675.444.513,00** | **-473.043.987,00** | | | | | | | **7.017.244.750,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **7.148.488.500,00** | **7.148.488.500,00** | **6.675.444.513,00** | **-473.043.987,00** | | | | | | | **7.017.244.750,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.947.488.500,00** | **5.947.488.500,00** | **5.566.955.838,00** | **-454.243.750,00** | | | | | | | **5.493.244.750,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 26.031.375,00 | -7.968.625,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 36.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 19.375.625,00 | -4.624.375,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 25.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.098.750,00 | -901.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 4.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.557.000,00 | -2.443.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 7.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.152.222.500,00 | 3.152.222.500,00 | 2.932.532.500,00 | -219.690.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 3.469.244.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 3.090.222.500,00 | 3.090.222.500,00 | 2.870.822.500,00 | -219.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 3.399.244.750,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 61.710.000,00 | -290.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 70.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.320.000,00 | -33.680.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 85.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 30 Orang | 5 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.320.000,00 | -33.680.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 85.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 399.583.000,00 | 399.583.000,00 | 293.353.413,00 | -106.229.587,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 275.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.992.251,00 | -7.749,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 5.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 10.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 63.385.000,00 | -6.615.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 65.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.081.587,00 | -1.918.413,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 15.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 157.200.000,00 | 157.200.000,00 | 119.700.000,00 | -37.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 7.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 107.383.000,00 | 107.383.000,00 | 47.194.575,00 | -60.188.425,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 127.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | 1.073.929.750,00 | 63.929.750,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 9 Unit | 909.605.000,00 | 909.605.000,00 | 909.566.750,00 | -38.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 16 Unit | 100.395.000,00 | 100.395.000,00 | 164.363.000,00 | 63.968.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 795.683.000,00 | 795.683.000,00 | 681.593.500,00 | -114.089.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 810.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 141.247.000,00 | 141.247.000,00 | 141.247.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 654.436.000,00 | 654.436.000,00 | 540.346.500,00 | -114.089.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 660.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 506.000.000,00 | 506.000.000,00 | 543.195.300,00 | 37.195.300,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur | | 568.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 338.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 310.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 93.114.300,00 | 13.114.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 62.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 112.081.000,00 | 6.081.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 196.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.201.000.000,00** | **1.201.000.000,00** | **1.108.488.675,00** | **323.000.000,00** | | | | | | | **1.524.000.000,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 48.749.000,00 | 48.749.000,00 | 31.327.500,00 | -17.421.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Penduduk di Kawasan Rawan Bencana | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 48.749.000,00 | 48.749.000,00 | 31.327.500,00 | -17.421.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 312.251.000,00 | 312.251.000,00 | 246.009.750,00 | -66.241.250,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur dan Masyarakat | | 465.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 5 Unit | 20 Unit | 63.579.500,00 | 63.579.500,00 | 64.442.500,00 | 863.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 36.760.000,00 | 36.760.000,00 | 25.510.000,00 | -11.250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 55.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 41.612.500,00 | 41.612.500,00 | 32.073.750,00 | -9.538.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 1 laporan | 12 laporan | 29.048.000,00 | 29.048.000,00 | 21.383.500,00 | -7.664.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 4 Kawasan | 4 Kawasan | 141.251.000,00 | 141.251.000,00 | 102.600.000,00 | -38.651.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 660.000.000,00 | 660.000.000,00 | 714.958.975,00 | 54.958.975,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur dan Masyarakat | | 744.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.930.100,00 | -69.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 4.000 Orang | 4.000 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 165.940.000,00 | 85.940.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 88.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 483.677.375,00 | -16.322.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 550.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 5.411.500,00 | -14.588.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 40.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 116.192.450,00 | -63.807.550,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Aparatur dan Masyarakat | | 215.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 41.725.000,00 | -38.275.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 105.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 74.467.450,00 | -25.532.550,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | **10.233.029.000,00** | **10.233.029.000,00** | **10.880.323.630,00** | **647.294.630,00** | | | | | | | **16.313.651.350,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.233.029.000,00** | **10.233.029.000,00** | **10.880.323.630,00** | **647.294.630,00** | | | | | | | **16.313.651.350,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **10.233.029.000,00** | **10.233.029.000,00** | **10.880.323.630,00** | **647.294.630,00** | | | | | | | **16.313.651.350,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.400.501.200,00** | **4.400.501.200,00** | **4.388.378.644,00** | **1.681.707.800,00** | | | | | | | **6.082.209.000,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 31.194.950,00 | 31.194.950,00 | 26.346.950,00 | -4.848.000,00 | | | - | - | - | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 31.194.950,00 | 31.194.950,00 | 26.346.950,00 | -4.848.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.680.322.300,00 | 2.680.322.300,00 | 2.675.892.300,00 | -4.430.000,00 | | | - | - | - | | 4.770.913.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31/14 Orang/bulan | 31/14 Orang/bulan | 2.596.648.300,00 | 2.596.648.300,00 | 2.592.218.300,00 | -4.430.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 4.630.194.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 83.674.000,00 | 83.674.000,00 | 83.674.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 140.718.600,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 339.455.050,00 | 339.455.050,00 | 271.676.994,00 | -67.778.056,00 | | | - | - | - | | 377.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 39.124.000,00 | 39.124.000,00 | 39.124.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.726.000,00 | 44.726.000,00 | 46.365.000,00 | 1.639.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.401.000,00 | 3.401.000,00 | 2.544.794,00 | -856.206,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 149.000.000,00 | -48.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 43.204.050,00 | 43.204.050,00 | 22.643.200,00 | -20.560.850,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 29.620.000,00 | 29.620.000,00 | | | - | 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | - | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 29.620.000,00 | 29.620.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.130.926.000,00 | 1.130.926.000,00 | 1.182.771.000,00 | 51.845.000,00 | | | - | - | - | | 183.796.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 133.945.000,00 | -6.055.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 990.926.000,00 | 990.926.000,00 | 1.048.826.000,00 | 57.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 33.796.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 183.602.900,00 | 183.602.900,00 | 183.602.900,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 555.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 147.732.900,00 | 147.732.900,00 | 147.732.900,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 180.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 10.870.000,00 | 10.870.000,00 | 10.870.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 18.468.500,00 | -16.531.500,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 18.468.500,00 | -16.531.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan** | | | | **100 %** | **100 %** | **544.000.000,00** | **544.000.000,00** | **153.900.000,00** | **795.750.000,00** | | | | | | | **1.339.750.000,00** | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | 100 % | 100 % | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.156.650,00 | -1.843.350,00 | | | - | - | Masyarakat, Orsos, dan Non ASN | | 14.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.156.650,00 | -1.843.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | 100 % | 100 % | 536.000.000,00 | 536.000.000,00 | 147.743.350,00 | -388.256.650,00 | | | - | - | Masyarakat, Orsos, dan Non ASN | | 1.325.750.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 11.159.000,00 | -4.091.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 242.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 18 Orang | 18 Orang | 30.250.000,00 | 30.250.000,00 | 18.146.675,00 | -12.103.325,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 566.100.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 6.462.675,00 | -3.787.325,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 374.650.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 480.250.000,00 | 480.250.000,00 | 111.975.000,00 | -368.275.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 143.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.264.767.000,00** | **1.264.767.000,00** | **1.158.273.250,00** | **4.833.675.350,00** | | | | | | | **6.098.442.350,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | | | | 100 % | 100 % | 1.113.031.000,00 | 1.113.031.000,00 | 1.047.711.000,00 | -65.320.000,00 | | | - | - | penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS | | 5.548.442.350,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 975 Orang | 975 Orang | 1.047.060.450,00 | 1.047.060.450,00 | 996.539.175,00 | -50.521.275,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 5.310.569.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 29.827.500,00 | 29.827.500,00 | 28.954.250,00 | -873.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 108.900.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 36.143.050,00 | 36.143.050,00 | 22.217.575,00 | -13.925.475,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 128.973.350,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | | | | - | - | 151.736.000,00 | 151.736.000,00 | 110.562.250,00 | -41.173.750,00 | | | - | - | - | | 550.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 151.736.000,00 | 151.736.000,00 | 110.562.250,00 | -41.173.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.878.298.300,00** | **3.878.298.300,00** | **4.862.248.643,00** | **-1.987.548.300,00** | | | | | | | **1.890.750.000,00** | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | - | | | | 100 % | 100 % | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.530.375,00 | -3.469.625,00 | | | - | - | - | | 90.750.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.530.375,00 | -3.469.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 90.750.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.868.298.300,00 | 3.868.298.300,00 | 4.855.718.268,00 | 987.419.968,00 | | | - | - | - | | 1.800.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 39.087.500,00 | 39.087.500,00 | 29.938.750,00 | -9.148.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 677696 Keluarga | 677696 Keluarga | 28.912.500,00 | 28.912.500,00 | 24.265.725,00 | -4.646.775,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 1.300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5874 Keluarga | 5874 Keluarga | 3.800.298.300,00 | 3.800.298.300,00 | 4.801.513.793,00 | 1.001.215.493,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 275.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **-** | | | | **-** | **-** | **95.462.500,00** | **95.462.500,00** | **72.414.050,00** | **504.537.500,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 36.650.000,00 | 36.650.000,00 | 32.000.400,00 | -4.649.600,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1135 Orang | 1135 Orang | 25.850.000,00 | 25.850.000,00 | 24.138.400,00 | -1.711.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 7.862.000,00 | -2.938.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 58.812.500,00 | 58.812.500,00 | 40.413.650,00 | -18.398.850,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Kampung | 1 Kampung | 35.525.000,00 | 35.525.000,00 | 23.147.500,00 | -12.377.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 23.287.500,00 | 23.287.500,00 | 17.266.150,00 | -6.021.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **245.109.043,00** | **252.500.000,00** | | | | | | | **302.500.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 245.109.043,00 | 195.109.043,00 | | | - | 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | - | | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 17 Makam | 17 Makam | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 245.109.043,00 | 195.109.043,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | | | 302.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **19.136.204.000,00** | **19.136.204.000,00** | **22.642.326.075,00** | **3.506.122.075,00** | | | | | | | **23.074.522.300,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **19.136.204.000,00** | **19.136.204.000,00** | **22.642.326.075,00** | **3.506.122.075,00** | | | | | | | **23.074.522.300,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **4.913.071.000,00** | **4.913.071.000,00** | **5.152.275.100,00** | **239.204.100,00** | | | | | | | **5.189.713.800,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan Layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DP3AP2 dan KB** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **4.575.437.000,00** | **4.575.437.000,00** | **4.486.482.100,00** | **-439.579.900,00** | | | | | | | **4.135.857.100,00** | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.135.000,00 | -3.865.000,00 | | | - | - | ASN | | 23.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.135.000,00 | -3.865.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 23.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.808.055.000,00 | 2.808.055.000,00 | 2.554.105.000,00 | -253.950.000,00 | | | - | - | ASN | | 2.447.920.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 2.728.055.000,00 | 2.728.055.000,00 | 2.475.605.000,00 | -252.450.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.373.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 78.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 74.920.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.188.150,00 | -4.811.850,00 | | | - | - | ASN | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.188.150,00 | -4.811.850,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi umum PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 251.382.000,00 | 251.382.000,00 | 182.282.700,00 | -69.099.300,00 | | | - | - | ASN | | 236.646.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.108.000,00 | 108.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 44.851.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.705.700,00 | -294.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 12.305.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 29.490.000,00 | -5.510.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 23.880.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.882.000,00 | 13.882.000,00 | 10.412.000,00 | -3.470.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 12.610.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 65.067.000,00 | -59.933.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 175.030.080,00 | 150.030.080,00 | | | - | - | ASN | | 53.651.100,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 50.010.000,00 | 50.010.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | - | - | | | 18.651.100,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 121.135.080,00 | 96.135.080,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 3.885.000,00 | 3.885.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.168.000.000,00 | 1.168.000.000,00 | 1.167.725.250,00 | -274.750,00 | | | - | - | ASN | | 1.116.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.000,00 | -1.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 163.920.000,00 | 163.920.000,00 | 163.218.750,00 | -701.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 168.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.003.580.000,00 | 1.003.580.000,00 | 1.004.007.500,00 | 427.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 948.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 298.000.000,00 | 298.000.000,00 | 391.015.920,00 | 93.015.920,00 | | | - | - | ASN | | 246.140.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | 162.686.000,00 | -314.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 34.870.000,00 | -130.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA | - | - | | | 33.140.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 193.459.920,00 | 93.459.920,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BUNGA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 48.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase ARG pada belanja operasi APBD** | | | | **8,00 Persen** | **8,00 Persen** | **31.634.000,00** | **31.634.000,00** | **62.217.000,00** | **76.499.800,00** | | | | | | | **108.133.800,00** | |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *[deleted] Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan Pemda dan masyarakat* | | | | 6 Lembaga | 6 Lembaga | 31.634.000,00 | 31.634.000,00 | 62.217.000,00 | 30.583.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 108.133.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 31.634.000,00 | 31.634.000,00 | 62.217.000,00 | 30.583.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 33.133.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | - | 240 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** | | | | **7,25 Rasio** | **7,25 Rasio** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **210.721.000,00** | **176.670.000,00** | | | | | | | **241.670.000,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 44.845.000,00 | -20.155.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 69.670.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 44.845.000,00 | -20.155.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 69.670.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 96.856.000,00 | 96.856.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 30 Layanan | 0,00 | 0,00 | 96.856.000,00 | 96.856.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 69.020.000,00 | 69.020.000,00 | | | - | - | - | | 72.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | - | 240 Orang | 0,00 | 0,00 | 69.020.000,00 | 69.020.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 72.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling** | | | | **7,00 Persen** | **7,00 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.500.000,00** | | | | | | | **52.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah keluarga mendapat pelatihan peningkatan kualitas keluarga* | | | | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 52.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Perangkat Daerah | 0 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 52.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak** | | | | **50 Persen** | **50 Persen** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **37.381.000,00** | **29.718.400,00** | | | | | | | **94.718.400,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah OPD yang memiiki Data Gender dan Anak* | | | | 15 OPD | 15 OPD | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 37.381.000,00 | -27.619.000,00 | | | - | - | ASN | | 94.718.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 37.381.000,00 | -27.619.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 94.718.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak** | | | | **72 Persen** | **72 Persen** | **48.000.000,00** | **48.000.000,00** | **31.095.000,00** | **2.400.000,00** | | | | | | | **50.400.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang terbentuk* | | | | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 31.095.000,00 | -16.905.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 50.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 31.095.000,00 | -16.905.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 50.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **-** | | | | **-** | **-** | **128.000.000,00** | **128.000.000,00** | **324.379.000,00** | **378.434.500,00** | | | | | | | **506.434.500,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | | | - | - | - | | 105.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | - | 530 Orang | 0,00 | 0,00 | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 105.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rapat koordinasi Lintas sektoral layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus* | | | | 5 Kali | 5 Kali | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 222.879.000,00 | 94.879.000,00 | | | - | - | Masyarakat | | 251.434.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 89.595.000,00 | -38.405.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 116.434.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | - | 40 Layanan | 0,00 | 0,00 | 133.284.000,00 | 133.284.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 135.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **14.223.133.000,00** | **14.223.133.000,00** | **17.490.050.975,00** | **3.266.917.975,00** | | | | | | | **17.884.808.500,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **TFR (Angka Kelahiran Total)** | | | | **2,20 Angka** | **2,20 Angka** | **548.200.000,00** | **548.200.000,00** | **558.209.000,00** | **-53.024.500,00** | | | | | | | **495.175.500,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Jumlah laporan dan analisa data capaian pelayanan KB* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.030.000,00 | -2.970.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 20.225.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.030.000,00 | -2.970.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 20.225.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 528.200.000,00 | 528.200.000,00 | 541.179.000,00 | 12.979.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 474.950.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.235.000,00 | -6.765.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 20.225.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 56.944.000,00 | 56.944.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 313.800.000,00 | 313.800.000,00 | 255.000.000,00 | -58.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 236.390.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 194.400.000,00 | 194.400.000,00 | 216.000.000,00 | 21.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 98.335.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | - | 11 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)** | | | | **69,65 11,60 Persen Persen** | **69,65 11,60 Persen Persen** | **5.538.313.000,00** | **5.538.313.000,00** | **8.216.527.975,00** | **3.287.671.500,00** | | | | | | | **8.825.984.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 18 kali | 18 kali | 1.166.330.000,00 | 1.166.330.000,00 | 1.496.528.000,00 | 330.198.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 903.245.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 79.575.000,00 | 79.575.000,00 | 0,00 | -79.575.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 451.080.000,00 | 451.080.000,00 | 774.618.000,00 | 323.538.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 454.230.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 272.250.000,00 | 272.250.000,00 | 378.000.000,00 | 105.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 234.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 60.000.000,00 | -40.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 70.640.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 6 Organisasi | 6 Organisasi | 263.425.000,00 | 263.425.000,00 | 243.910.000,00 | -19.515.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | - | | | 14.375.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Persentase Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 876.000.000,00 | 876.000.000,00 | 3.345.011.000,00 | 2.469.011.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 3.169.940.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 287 Orang | 287 Orang | 861.000.000,00 | 861.000.000,00 | 574.000.000,00 | -287.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 551.040.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB* | | | | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 9.875.000,00 | -5.125.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 18.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | - | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 2.761.136.000,00 | 2.761.136.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 2.600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.852.723.000,00 | 2.852.723.000,00 | 3.148.834.975,00 | 296.111.975,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 4.082.774.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 62.100.000,00 | 900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 27.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 6750 Orang | 6750 Orang | 2.690.503.000,00 | 2.690.503.000,00 | 3.035.674.000,00 | 345.171.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB<br>DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 2.573.801.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING | - | - | | | 1.432.003.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 101.020.000,00 | 101.020.000,00 | 51.060.975,00 | -49.959.025,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO<br>DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 49.070.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Jumlah Kampung KB yang dibentuk* | | | | 210 Desa | 210 Desa | 643.260.000,00 | 643.260.000,00 | 226.154.000,00 | -417.106.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 670.025.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.992.500,00 | 4.992.500,00 | 0,00 | -4.992.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 43 Kampung | 43 Kampung | 638.267.500,00 | 638.267.500,00 | 226.154.000,00 | -412.113.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 661.025.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan** | | | | **50,00 Persen** | **50,00 Persen** | **8.136.620.000,00** | **8.136.620.000,00** | **8.715.314.000,00** | **427.028.500,00** | | | | | | | **8.563.648.500,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibentuk di kecamatan* | | | | 9 Kecamatan | 9 Kecamatan | 387.620.000,00 | 387.620.000,00 | 966.314.000,00 | 578.694.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 814.648.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)* | | | | 3 Laporan / Dokumen | 3 Laporan / Dokumen | 57.620.000,00 | 57.620.000,00 | 168.960.000,00 | 111.340.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 25.148.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 574.000.000,00 | 574.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 200.029.000,00 | -99.971.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 23.325.000,00 | -6.675.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | JASA GIRO | - | - | | | 44.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga* | | | | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 7.749.000.000,00 | 7.749.000.000,00 | 7.749.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 7.749.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | 10 laporan | 10 laporan | 3.690.000.000,00 | 3.690.000.000,00 | 3.690.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 3.690.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | 10 laporan | 10 laporan | 4.059.000.000,00 | 4.059.000.000,00 | 4.059.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | - | - | | | 4.059.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | | | | | | | **18.099.450.200,00** | **18.099.450.200,00** | **20.500.666.047,00** | **2.401.215.847,00** | | | | | | | **19.387.817.840,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **13.289.450.200,00** | **13.289.450.200,00** | **12.699.688.793,00** | **1.494.967.640,00** | | | | | | | **14.784.417.840,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"*<br>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>5 Dokumen | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>5 Dokumen | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 32.195.250,00 | -13.304.750,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 70.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 7.500.000,00 | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 132 Dokumen<br>1 Paket<br>50 Laporan | 132 Dokumen<br>1 Paket<br>50 Laporan | 278.303.400,00 | 278.303.400,00 | 274.356.350,00 | -3.947.050,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 324.383.740,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 75.303.400,00 | 73.865.600,00 | 73.865.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 77.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 30.000.000,00 | 29.995.750,00 | 29.995.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **282.803.400,00** | **282.803.400,00** | **248.025.550,00** | **-34.777.850,00** | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| 1. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan** | | | | **60 Persen** | **60 Persen** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **31.596.200,00** | **17.500.000,00** | | | | | | | **67.500.000,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Ketersediaan informasi harga dan pasokan (pemantauan harga dan pasokan)*<br>*Neraca Bahan Makanan (NBM)*<br>*Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah*<br>*Pembinaan lembaga distribusi pangan (LDPM/LUPM) (Poktan/Gapoktan)* | | | | 10 Kelompok<br>11 komoditas<br>12 laporan<br>3 kegiatan | 10 Kelompok<br>11 komoditas<br>12 laporan<br>3 kegiatan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.650.000,00 | -9.350.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.Tegal | | 40.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.650.000,00 | -9.350.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Pembinaan/Pemberdayaan (kelompok)* | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.946.200,00 | -9.053.800,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.Tegal | | 27.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.946.200,00 | -9.053.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase penguatan cadangan pangan**<br>**Persentase penanganan daerah rawan pangan dan gizi** | | | | **25**<br>**93 Persen**<br>**Persen** | **25**<br>**93 Persen**<br>**Persen** | **110.000.000,00** | **110.000.000,00** | **97.765.000,00** | **11.000.000,00** | | | | | | | **121.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Pengadaan Cadangan Pangan (ton)*<br>*Tersedianya peta FSVA Kabupaten* | | | | 15 ton<br>1 Laporan | 15 ton<br>1 Laporan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 97.765.000,00 | -12.235.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.Tegal | | 121.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 90.585.000,00 | -9.415.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.180.000,00 | -2.820.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **8.721.000,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Pengawasan Pangan Segar (komoditas)*<br>*Rekomendasi PSAT (pelaku usaha)* | | | | 15 Jenis<br>5 Rekom | 15 Jenis<br>5 Rekom | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.721.000,00 | -1.279.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.Tegal | | 20.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.721.000,00 | -1.279.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **17.816.646.800,00** | **17.816.646.800,00** | **20.252.640.497,00** | **2.435.993.697,00** | | | | | | | **19.048.817.840,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **17.816.646.800,00** | **17.816.646.800,00** | **20.252.640.497,00** | **2.435.993.697,00** | | | | | | | **19.048.817.840,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **13.289.450.200,00** | **13.289.450.200,00** | **12.699.688.793,00** | **1.494.967.640,00** | | | | | | | **14.784.417.840,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*<br>*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"*<br>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>5 Dokumen | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>5 Dokumen | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 32.195.250,00 | -13.304.750,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 70.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 26.113.250,00 | -11.886.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)*<br>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)* | | | | 166 Orang/ Bulan<br>1 Dokumen | 166 Orang/ Bulan<br>1 Dokumen | 10.439.974.800,00 | 10.439.974.800,00 | 9.921.664.800,00 | -518.310.000,00 | | | - | - | - | | 11.272.991.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 143 Orang/ bulan | 143 Orang/ bulan | 10.367.610.800,00 | 10.367.610.800,00 | 9.843.610.800,00 | -524.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.200.627.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.364.000,00 | 72.364.000,00 | 78.054.000,00 | 5.690.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 72.364.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 36.644.700,00 | -48.355.300,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 36.644.700,00 | -48.355.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*<br>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 132 Dokumen<br>1 Paket<br>50 Laporan | 132 Dokumen<br>1 Paket<br>50 Laporan | 278.303.400,00 | 278.303.400,00 | 274.356.350,00 | -3.947.050,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 324.383.740,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.750.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 132 Dokumen | 132 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.995.000,00 | -5.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 69.633.740,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 345.000.000,00 | 345.000.000,00 | 329.874.700,00 | -15.125.300,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 396.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 314.927.200,00 | -15.072.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 374.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.947.500,00 | -52.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*<br>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.665.672.000,00 | 1.665.672.000,00 | 1.597.968.750,00 | -67.703.250,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 1.876.639.200,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 991.000,00 | -9.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 253.542.000,00 | 253.542.000,00 | 268.542.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 267.896.200,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.411.130.000,00 | 1.411.130.000,00 | 1.328.435.750,00 | -82.694.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 1.607.243.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*<br>*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*<br>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 15 Unit<br>31 Unit<br>3 Unit<br>50 Unit | 15 Unit<br>31 Unit<br>3 Unit<br>50 Unit | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 | 506.984.243,00 | 76.984.243,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.Tegal | | 744.403.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.990.800,00 | -9.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 44.994.100,00 | 14.994.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 37.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 261.999.343,00 | 61.999.343,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 2.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 236.903.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Produksi Susu (kg.)**<br>**Produksi daging (kg)**<br>**Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)**<br>**Peningkatan Rasio Penggunaan Alsintan**<br>**Luas Lahan Pertanian Organik**<br>**Produksi Telur (kg.)**<br>**Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi** | | | | **476.503**<br>**13.701.613**<br>**90**<br>**63,51**<br>**2**<br>**7.748.594**<br>**80,00 kg**<br>**kg**<br>**persen**<br>**Persen**<br>**persen**<br>**kg**<br>**persen** | **476.503**<br>**13.701.613**<br>**90**<br>**63,51**<br>**2**<br>**7.748.594**<br>**80,00 kg**<br>**kg**<br>**persen**<br>**Persen**<br>**persen**<br>**kg**<br>**persen** | **1.890.000.000,00** | **1.890.000.000,00** | **2.273.729.529,00** | **475.500.000,00** | | | | | | **2.365.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Pengembangan Pertanian Organik*<br>*Penyediaan Alat Mesin Pertanian*<br>*Penyediaan Bahan Pengendali OPT*<br>*Sekolah Lapang Pengendali Hama Tanaman (SLPHT)* | | | | 10 Unit<br>18 Kegiatan<br>1 Paket<br>2 Ha | 10 Unit<br>18 Kegiatan<br>1 Paket<br>2 Ha | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | 2.218.884.529,00 | 368.884.529,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 2.315.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 2.033.158.529,00 | 433.158.529,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 1.760.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 185.726.000,00 | -64.274.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 555.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Pelayanan Iseminasi Buatan pada ternak* | | | | 1800 ekor | 1800 ekor | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 54.845.000,00 | 14.845.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | Varietas Unggul Baru (VUB) | Varietas Unggul Baru (VUB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 54.845.000,00 | 14.845.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Peningkatan Luas lahan yang terakses jaringan jalan usaha pertanian**<br>**Indeks pertanaman**<br>**Luas Lahan Sawah Lestari Yang Dipertahankan** | | | | **300**<br>**1,670**<br>**100 Ha**<br>**Indeks**<br>**Persen** | **300**<br>**1,670**<br>**100 Ha**<br>**Indeks**<br>**Persen** | **2.060.000.000,00** | **2.060.000.000,00** | **2.307.280.300,00** | **-949.000.000,00** | | | | | | | **1.111.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Koordinasi dan Pemantauan LP2B* | | | | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.025.000,00 | -4.975.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 11.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.025.000,00 | -4.975.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Panjang Jalan Usaha Pertanian*<br>*Peningkatan luas tanam lahan sawah*<br>*Penyusunan DED Pasar Hewan* | | | | 1 Paket<br>2400 Ha<br>3 Unit<br>5,79 Km | 1 Paket<br>2400 Ha<br>3 Unit<br>5,79 Km | 2.050.000.000,00 | 2.050.000.000,00 | 2.302.255.300,00 | 252.255.300,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 1.100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 396.330.250,00 | -3.669.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00 | 1.905.925.050,00 | 255.925.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Prosentase produk hasil ternak terawasi** | | | | **75 Persen** | **75 Persen** | **430.000.000,00** | **430.000.000,00** | **420.906.550,00** | **-292.000.000,00** | | | | | | | **138.000.000,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Vaksinasi ternak besar (Sapi)*<br>*Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Vaksinasi ternak kecil (kambing)* | | | | 10000 ekor<br>5000 ekor | 10000 ekor<br>5000 ekor | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 52.400.050,00 | -2.599.950,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 88.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 52.400.050,00 | -2.599.950,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 88.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)*<br>*Pembinaan Pelaku usaha terhadap NKV (Nomor Kontrol Veteriner)*<br>*Pengawasan Keamanan Produk asal hewan*<br>*Sosialisasi zoonosis* | | | | 10 kegiatan<br>10 orang<br>10 poktan<br>18 kecamatan | 10 kegiatan<br>10 orang<br>10 poktan<br>18 kecamatan | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 368.506.500,00 | -6.493.500,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik* | | | | 6 Unit<br>Usaha | 6 Unit<br>Usaha | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 368.506.500,00 | -6.493.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 5. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi** | | | | **2,5 Persen** | **2,5 Persen** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **1.999.738.675,00** | **105.000.000,00** | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Pembuatan Agens Pengendali Hayati* | | | | 4000 Liter | 4000 Liter | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.999.738.675,00 | 1.984.738.675,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 120.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | Ha | Ha | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.999.738.675,00 | 1.984.738.675,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase jumlah kelas kelompok tani yang meningkat kelasnya**<br>**Persentase peningkatan jumlah penyuluh pertanian swadaya yang terlatih** | | | | **6,38**<br>**18,29**<br>**Persen**<br>**Persen** | **6,38**<br>**18,29**<br>**Persen**<br>**Persen** | **245.000.000,00** | **245.000.000,00** | **661.240.000,00** | **415.400.000,00** | | | | | | | **660.400.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Fasilitasi Sarana Posluhes*<br>*Pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan*<br>*Pelatihan petani*<br>*Pendampingan kenaikan kelas kelompok*<br>*Peningkatan kapasitas Posluhdes*<br>*Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan dan Kab.*<br>*Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi* | | | | 10 Kelompok<br>10 Paket<br>18 Orang<br>19 Dokumen<br>1 poshludes<br>25 Orang<br>3 kelompok | 10 Kelompok<br>10 Paket<br>18 Orang<br>19 Dokumen<br>1 poshludes<br>25 Orang<br>3 kelompok | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 661.240.000,00 | 416.240.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kab.tegal | | 660.400.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 34.120.000,00 | -20.880.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Unit | 5 Unit | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 184.800.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya* | | | | - | 90 Orang | 0,00 | 0,00 | 442.320.000,00 | 442.320.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | - | | | 410.400.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **38.270.648.700,00** | **38.270.648.700,00** | **37.565.675.969,00** | **-704.972.731,00** | | | | | | | **47.185.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **38.270.648.700,00** | **38.270.648.700,00** | **37.565.675.969,00** | **-704.972.731,00** | | | | | | | **47.185.500.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **38.270.648.700,00** | **38.270.648.700,00** | **37.565.675.969,00** | **-704.972.731,00** | | | | | | | **47.185.500.000,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **9.006.966.700,00** | **9.006.966.700,00** | **8.713.954.909,00** | **888.533.300,00** | | | | | | | **9.895.500.000,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 36.548.550,00 | -8.951.450,00 | | | - | - | - | | 52.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 30.673.550,00 | -2.326.450,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 5.875.000,00 | -6.625.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 17.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyusunan DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan CALK*<br>*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 4 Dokumen<br>78 Orang | 4 Dokumen<br>78 Orang | 4.833.249.000,00 | 4.833.249.000,00 | 4.638.342.400,00 | -194.906.600,00 | | | - | - | - | | 4.910.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 78 Orang/bulan | 78 Orang/bulan | 4.743.249.000,00 | 4.743.249.000,00 | 4.550.349.000,00 | -192.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.750.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 87.993.400,00 | -2.006.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.060.000,00 | -4.940.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.060.000,00 | -4.940.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 194.877.700,00 | 194.877.700,00 | 58.445.262,00 | -136.432.438,00 | | | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 194.877.700,00 | 194.877.700,00 | 58.445.262,00 | -136.432.438,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Tersedianya Penyediaaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor Bahan Cetak, Penggandaan Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi* | | | | 100 Laporan<br>12 Dokumen<br>6 Paket | 100 Laporan<br>12 Dokumen<br>6 Paket | 605.500.000,00 | 605.500.000,00 | 494.585.225,00 | -110.914.775,00 | | | - | - | - | | 700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 15.020.000,00 | 7.020.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 133.695.500,00 | 33.695.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 130.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.025.000,00 | 10.025.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 45.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 65.277.500,00 | -21.722.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.422.300,00 | -577.700,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 157.500.000,00 | 157.500.000,00 | 120.000.000,00 | -37.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 218.000.000,00 | 218.000.000,00 | 116.144.925,00 | -101.855.075,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 59 Unit | 59 Unit | 417.140.000,00 | 417.140.000,00 | 535.208.225,00 | 118.068.225,00 | | | - | - | - | | 1.065.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 84.919.000,00 | -81.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 425.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 41.500.000,00 | 41.500.000,00 | 63.000.000,00 | 21.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 100.640.000,00 | 100.640.000,00 | 197.505.000,00 | 96.865.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 190.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 189.784.225,00 | -215.775,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 190.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 262 Laporan | 262 Laporan | 2.522.700.000,00 | 2.522.700.000,00 | 2.499.016.547,00 | -23.683.453,00 | | | - | - | - | | 1.753.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 225 Laporan | 225 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.220.200.000,00 | 2.220.200.000,00 | 2.196.516.547,00 | -23.683.453,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 1.450.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah* | | | | 62 Unit | 62 Unit | 378.000.000,00 | 378.000.000,00 | 446.748.700,00 | 68.748.700,00 | | | - | - | - | | 1.165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 243.000.000,00 | 243.000.000,00 | 243.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 98.748.700,00 | 68.748.700,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup** | | | | **36,36 %** | **36,36 %** | **739.000.000,00** | **739.000.000,00** | **528.880.500,00** | **11.000.000,00** | | | | | | | **750.000.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 99.955.500,00 | -30.044.500,00 | | | - | - | Masyarakat | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 99.955.500,00 | -30.044.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 609.000.000,00 | 609.000.000,00 | 428.925.000,00 | -180.075.000,00 | | | - | - | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 609.000.000,00 | 609.000.000,00 | 428.925.000,00 | -180.075.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3** | | | | **19.45 Persen** | **19.45 Persen** | **2.823.440.000,00** | **2.823.440.000,00** | **2.689.378.615,00** | **-658.440.000,00** | | | | | | | **2.165.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Data Informasi Kualitas Lingkungn Hidup terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut yang dipantau*<br>*Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah laporan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota*<br>*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*<br>*Jumlah peralatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeliharaan* | | | | 10 Laporan<br>2 Dokumen<br>2 Unit<br>4 Kegiatan<br>78 Lokasi<br>80 Paket | 10 Laporan<br>2 Dokumen<br>2 Unit<br>4 Kegiatan<br>78 Lokasi<br>80 Paket | 1.633.440.000,00 | 1.633.440.000,00 | 1.567.936.015,00 | -65.503.985,00 | | | - | - | Masyarakat | | 1.315.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 49.760.000,00 | 49.760.000,00 | 20.479.500,00 | -29.280.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0006 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | | | | 88 Lokasi | 88 Lokasi | 20.280.000,00 | 20.280.000,00 | 17.605.000,00 | -2.675.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.750.000,00 | -250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0010 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.155.000,00 | -2.845.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | | | | 80 Paket | 80 Paket | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 140.370.115,00 | -4.629.885,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.260.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 1.209.193.250,00 | -50.806.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0014 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 68.400.000,00 | 68.400.000,00 | 93.383.150,00 | 24.983.150,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*<br>*Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*<br>*Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*<br>*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan* | | | | 1000 m2<br>11 Kegiatan<br>1 Ha<br>2 Kegiatan | 1000 m2<br>11 Kegiatan<br>1 Ha<br>2 Kegiatan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 70.116.400,00 | -19.883.600,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan* | | | | 2 Titik | 2 Titik | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 70.116.400,00 | -19.883.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup* | | | | 1000 m2<br>11 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>1 Ha | 1000 m2<br>11 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>1 Ha | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.051.326.200,00 | -48.673.800,00 | | | - | - | - | | 800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.172.700,00 | -12.827.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0006 | Pelaksanaan remediasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1 Ha | 1 Ha | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.030.026.850,00 | -19.973.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1000 M2 | 1000 M2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 14.126.650,00 | -15.873.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH<br>Persentase Luasan Areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal** | | | | **24,50<br>24,50 %<br>%** | **24,50<br>24,50 %<br>%** | **2.868.860.000,00** | **2.868.860.000,00** | **3.531.921.400,00** | **2.406.140.000,00** | | | | | | | **5.275.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2.868.860.000,00 | 2.868.860.000,00 | 3.531.921.400,00 | 663.061.400,00 | | | - | - | Masyarakat | | 5.275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 24,5 Ha | 24,5 Ha | 2.798.860.000,00 | 2.798.860.000,00 | 2.762.049.400,00 | -36.810.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 4.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 769.872.000,00 | 699.872.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 225.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis** | | | | **70,00 %** | **70,00 %** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **41.049.500,00** | **160.000.000,00** | | | | | | | **225.000.000,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3* | | | | 10 Dokumen<br>5 Kegiatan | 10 Dokumen<br>5 Kegiatan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 41.049.500,00 | -23.950.500,00 | | | - | - | - | | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 28.549.500,00 | -11.450.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | -12.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Persetujuan Teknis (PERTEK) pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten / Kota yang diterbitkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup** | | | | **55,00 %** | **55,00 %** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **23.740.750,00** | **75.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Badan Usaha yang dilakukan pembinaan dan diawasi*<br>*Jumlah rekomendasi, Pertek, Perling dan SLO yang dilakukan pembinaan dan diawasi* | | | | 45 Badan Usaha<br>60 Dokumen | 45 Badan Usaha<br>60 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 23.740.750,00 | -11.259.250,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 45 Badan Usaha | 45 Badan Usaha | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH** | | | | **16,67 %** | **16,67 %** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **32.455.000,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tegal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 32.455.000,00 | -17.545.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 32.455.000,00 | -17.545.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **162.000.000,00** | **162.000.000,00** | **145.165.000,00** | **113.000.000,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 145.165.000,00 | -16.835.000,00 | | | - | - | Masyarakat | | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 106.475.000,00 | -5.525.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 24 Lembaga | 24 Lembaga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.690.000,00 | -11.310.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat** | | | | **26,00 %** | **26,00 %** | **77.882.000,00** | **77.882.000,00** | **64.485.250,00** | **222.118.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 10 Entitas | 10 Entitas | 77.882.000,00 | 77.882.000,00 | 64.485.250,00 | -13.396.750,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 10 Entitas | 10 Entitas | 77.882.000,00 | 77.882.000,00 | 64.485.250,00 | -13.396.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan** | | | | **90 %** | **90 %** | **22.500.000,00** | **22.500.000,00** | **13.256.300,00** | **27.500.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan jumlah panerapan sanksi administrasitif* | | | | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 13.256.300,00 | -9.243.700,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 7 Pengaduan | 7 Pengaduan | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 13.256.300,00 | -9.243.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 7 Perkara | 7 Perkara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 11. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase Pengurangan Sampah**<br>**Persentase Sampah yang tertangani** | | | | **25,00**<br>**70,00 %**<br>**%** | **25,00**<br>**70,00 %**<br>**%** | **22.420.000.000,00** | **22.420.000.000,00** | **21.781.388.745,00** | **5.620.000.000,00** | | | | | | | **28.040.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 197640 Ton | 197640 Ton | 22.420.000.000,00 | 22.420.000.000,00 | 21.781.388.745,00 | -638.611.255,00 | | | - | - | - | | 28.040.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 280.226.000,00 | 27.226.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 3.067.000.000,00 | 3.067.000.000,00 | 2.308.554.900,00 | -758.445.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.045.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 46.575.000,00 | -13.425.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0010 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 370.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | | | | 129600 Ton | 129600 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | | | | 50 Ton | 50 Ton | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.092.500,00 | -907.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 12.615.000.000,00 | 12.615.000.000,00 | 12.593.521.400,00 | -21.478.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 129000 Ton | 129000 Ton | 6.400.000.000,00 | 6.400.000.000,00 | 6.528.418.945,00 | 128.418.945,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **9.673.953.000,00** | **9.673.953.000,00** | **9.413.789.400,00** | **-260.163.600,00** | | | | | | | **10.237.897.200,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.673.953.000,00** | **9.673.953.000,00** | **9.413.789.400,00** | **-260.163.600,00** | | | | | | | **10.237.897.200,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **9.673.953.000,00** | **9.673.953.000,00** | **9.413.789.400,00** | **-260.163.600,00** | | | | | | | **10.237.897.200,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **9.101.453.000,00** | **9.101.453.000,00** | **9.083.951.750,00** | **453.269.200,00** | | | | | | | **9.554.722.200,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 17.150.950,00 | -17.849.050,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.710.950,00 | -9.289.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.440.000,00 | -8.560.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.214.496.000,00 | 5.214.496.000,00 | 4.879.216.200,00 | -335.279.800,00 | | | - | - | - | | 5.273.722.200,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 69 Orang/bulan | 69 Orang/bulan | 5.101.996.000,00 | 5.101.996.000,00 | 4.769.596.000,00 | -332.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.153.722.200,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.620.200,00 | -2.879.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 182.500.000,00 | 182.500.000,00 | 120.727.600,00 | -61.772.400,00 | | | - | - | - | | 225.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 122.500.000,00 | 122.500.000,00 | 84.672.100,00 | -37.827.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 140 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 36.055.500,00 | -23.944.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 725.000.000,00 | 725.000.000,00 | 1.115.872.000,00 | 390.872.000,00 | | | - | - | - | | 787.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 890.000.000,00 | 500.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 425.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 33.480.000,00 | -1.520.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.770.000,00 | -7.230.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 12.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.872.000,00 | -99.128.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 1.167.232.000,00 | 1.167.232.000,00 | 1.167.232.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 1.320.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 841.500.000,00 | 841.500.000,00 | 841.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.247.225.000,00 | 1.247.225.000,00 | 1.245.590.000,00 | -1.635.000,00 | | | - | - | - | | 1.343.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 430.840.000,00 | 430.840.000,00 | 430.840.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 440.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 813.385.000,00 | 813.385.000,00 | 811.750.000,00 | -1.635.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 900.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 538.163.000,00 | 8.163.000,00 | | | - | - | - | | 565.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 317.500.000,00 | 317.500.000,00 | 317.476.500,00 | -23.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 325.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 80.710.000,00 | 8.210.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 139.976.500,00 | -23.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Presentase Anak Memiliki KIA<br>Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga<br>Presentase Penduduk ber KTP el** | | | | **50<br>98<br>99 Persen<br>Persen<br>Persen** | **50<br>98<br>99 Persen<br>Persen<br>Persen** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **109.111.900,00** | **143.750.000,00** | | | | | | | **343.750.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Terlaksananya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK dan KIA)* | | | | 100 % | 100 % | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 109.111.900,00 | -90.888.100,00 | | | - | - | - | | 343.750.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 350 Dokumen | 350 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 23.330.000,00 | -6.670.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 135000 Dokumen | 135000 Dokumen | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 85.781.900,00 | -84.218.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 288.750.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **-** | | | | **-** | **-** | **185.000.000,00** | **185.000.000,00** | **99.045.750,00** | **-24.875.000,00** | | | | | | | **160.125.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 99.045.750,00 | -85.954.250,00 | | | - | - | - | | 160.125.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 26000 Dokumen | 26000 Dokumen | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 59.538.000,00 | -55.462.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 105.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 3 Layanan | 3 Layanan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 39.507.750,00 | -30.492.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.125.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **187.500.000,00** | **187.500.000,00** | **121.680.000,00** | **-8.200.000,00** | | | | | | | **179.300.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | | | | - | - | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 66.510.000,00 | -48.490.000,00 | | | - | - | - | | 111.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 28.660.000,00 | -21.340.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 37.850.000,00 | -27.150.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 56.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 55.170.000,00 | -17.330.000,00 | | | - | - | - | | 68.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan* | | | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 55.170.000,00 | -17.330.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 68.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **18.005.012.700,00** | **18.105.012.700,00** | **18.299.915.005,00** | **294.902.305,00** | | | | | | | **16.590.798.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **18.005.012.700,00** | **18.105.012.700,00** | **18.299.915.005,00** | **294.902.305,00** | | | | | | | **16.590.798.000,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **18.005.012.700,00** | **18.105.012.700,00** | **18.299.915.005,00** | **294.902.305,00** | | | | | | | **16.590.798.000,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **3.515.704.000,00** | **3.515.704.000,00** | **4.410.951.418,00** | **870.094.000,00** | | | | | | | **4.385.798.000,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 24 dokumen | 24 dokumen | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 85.645.000,00 | 37.145.000,00 | | | - | - | ASN | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 85.645.000,00 | 37.145.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 2.281.584.000,00 | 2.281.584.000,00 | 2.571.484.000,00 | 289.900.000,00 | | | - | - | ASN | | 2.348.548.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 2.201.064.000,00 | 2.201.064.000,00 | 2.491.114.000,00 | 290.050.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.263.548.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.520.000,00 | 80.520.000,00 | 80.370.000,00 | -150.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | -28.000.000,00 | | | - | - | ASN | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | -28.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tercapainya Administrasi Pelayanan Umum* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 484.620.000,00 | 484.620.000,00 | 597.035.750,00 | 112.415.750,00 | | | - | - | ASN | | 475.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.492.500,00 | -7.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 88.860.000,00 | 88.860.000,00 | 88.858.500,00 | -1.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 105.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.998.200,00 | -1.800,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 28.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 63.657.000,00 | -11.343.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 99.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 32.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1200 Dokumen | 1200 Dokumen | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 301.250.000,00 | 195.250.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.150.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 130.760.000,00 | 130.760.000,00 | 65.379.550,00 | -65.380.450,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 17.900.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 152 unit | 152 unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 197.355.000,00 | 177.355.000,00 | | | - | - | ASN | | 615.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 525.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 116 Unit | 116 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 54.000.000,00 | 34.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 31 Unit | 31 Unit | 0,00 | 0,00 | 115.815.000,00 | 115.815.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 27.540.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terwujudnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 353.000.000,00 | 353.000.000,00 | 373.410.968,00 | 20.410.968,00 | | | - | - | ASN | | 402.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 990.000,00 | -10.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 272.420.968,00 | 20.420.968,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terwujudnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Alat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 54 unit | 54 unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 586.020.700,00 | 286.020.700,00 | | | - | - | ASN | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 215.481.900,00 | 15.481.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 37 Unit | 37 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.907.800,00 | -92.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 345.631.000,00 | 270.631.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **3.300.000.000,00** | **3.300.000.000,00** | **6.291.763.600,00** | **1.700.000.000,00** | | | | | | | **5.000.000.000,00** | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Terwujudnya Penataan Desa* | | | | 8 desa | 8 desa | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 6.291.763.600,00 | 2.991.763.600,00 | | | - | - | Desa | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 6.291.763.600,00 | 2.991.763.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase Desa yang melakukan kerjasama** | | | | **82,78 Persen** | **82,78 Persen** | **176.240.700,00** | **176.240.700,00** | **169.626.350,00** | **18.759.300,00** | | | | | | | **195.000.000,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa* | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 176.240.700,00 | 176.240.700,00 | 169.626.350,00 | -6.614.350,00 | | | - | - | Desa | | 195.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 76.240.700,00 | 76.240.700,00 | 108.485.850,00 | 32.245.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 43.599.500,00 | -26.400.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.541.000,00 | -12.459.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa** | | | | **72 Persen** | **72 Persen** | **9.942.364.000,00** | **10.042.364.000,00** | **6.361.070.000,00** | **-3.957.364.000,00** | | | | | | | **5.985.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 281 desa | 281 desa | 9.942.364.000,00 | 10.042.364.000,00 | 6.361.070.000,00 | -3.581.294.000,00 | | | - | - | Desa | | 5.985.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 | 152.500.000,00 | -247.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 487.750.000,00 | 487.750.000,00 | 0,00 | -487.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 281 Orang | 281 Orang | 3.323.325.000,00 | 3.323.325.000,00 | 2.810.000.000,00 | -513.325.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa* | | | | 234 Laporan | 234 Laporan | 1.070.000.000,00 | 1.070.000.000,00 | 220.000.000,00 | -850.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | -275.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 283.194.000,00 | 283.194.000,00 | 4.020.000,00 | -279.174.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 281 Orang | 281 Orang | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 0,00 | -270.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | - | 15 Desa | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0017 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 3.433.095.000,00 | 3.433.095.000,00 | 3.089.550.000,00 | -343.545.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa** | | | | **96,30 Persen** | **96,30 Persen** | **1.070.704.000,00** | **1.070.704.000,00** | **1.066.503.637,00** | **-45.704.000,00** | | | | | | | **1.025.000.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 281 desa | 281 desa | 1.070.704.000,00 | 1.070.704.000,00 | 1.066.503.637,00 | -4.200.363,00 | | | - | - | Desa | | 1.025.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 40 Lembaga | 40 Lembaga | 220.704.000,00 | 220.704.000,00 | 196.293.750,00 | -24.410.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 80 Unit | 80 Unit | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 77.910.736,50 | -157.089.263,50 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 92.299.150,50 | -22.700.849,50 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 281 Dokumen | 281 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 700.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **73.382.881.300,00** | **72.882.881.300,00** | **79.655.010.362,00** | **6.272.129.062,00** | | | | | | | **87.501.173.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **73.382.881.300,00** | **72.882.881.300,00** | **79.655.010.362,00** | **6.272.129.062,00** | | | | | | | **87.501.173.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **73.382.881.300,00** | **72.882.881.300,00** | **79.655.010.362,00** | **6.272.129.062,00** | | | | | | | **87.501.173.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **64.639.956.300,00** | **64.639.956.300,00** | **19.890.468.832,00** | **2.164.104.700,00** | | | | | | | **66.804.061.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 25.472.500,00 | -527.500,00 | | | - | - | - | | 29.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 25.472.500,00 | -527.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 29.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Dinas Perhubungan Kab. Tegal* | | | | 100 % | 100 % | 4.285.961.300,00 | 4.285.961.300,00 | 3.960.706.300,00 | -325.255.000,00 | | | - | - | - | | 3.750.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 bulan Orang/bulan | 12 bulan Orang/bulan | 4.045.961.300,00 | 4.045.961.300,00 | 3.834.061.300,00 | -211.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.600.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 126.645.000,00 | -113.355.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 6.186.250,00 | -18.813.750,00 | | | - | - | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 145 Orang | 145 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 6.186.250,00 | -18.813.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tercapainya administrasi umum OPD* | | | | 100 % | 100 % | 453.000.000,00 | 453.000.000,00 | 410.766.242,00 | -42.233.758,00 | | | - | - | - | | 419.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.687.525,00 | -312.475,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 44.896.075,00 | -103.925,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 47.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 61.075.442,00 | 41.075.442,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 141.326.500,00 | -8.673.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 145.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.460.000,00 | -540.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 3.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 76.320.700,00 | -73.679.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya pengadaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 456.558.200,00 | 356.558.200,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | - | | 760.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 211.552.000,00 | 211.552.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 650.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 116.516.200,00 | 66.516.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 128.490.000,00 | 78.490.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 59.414.995.000,00 | 59.414.995.000,00 | 14.728.569.340,00 | -44.686.425.660,00 | | | - | - | - | | 61.488.561.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.425.000,00 | -75.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 52.253.543.000,00 | 52.253.543.000,00 | 7.376.881.840,00 | -44.876.661.160,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 60.842.677.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.158.952.000,00 | 7.158.952.000,00 | 7.349.262.500,00 | 190.310.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 642.884.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 302.210.000,00 | -32.790.000,00 | | | - | - | - | | 327.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 227.446.250,00 | -32.553.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.807.500,00 | -192.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.956.250,00 | -43.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **8.742.925.000,00** | **8.242.925.000,00** | **59.764.541.530,00** | **11.954.187.000,00** | | | | | | | **20.697.112.000,00** | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *prosentase dokumen Rencana Induk LLAJ* | | | | 100 % | 100 % | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 35.712.500,00 | -19.287.500,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 360.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 33.212.500,00 | -16.787.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan (LPJU)* | | | | 43,3 %<br>80,4 % | 43,3 %<br>80,4 % | 6.810.925.000,00 | 6.310.925.000,00 | 58.021.242.730,00 | 51.210.317.730,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 10.050.186.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | | | | 300 Unit | 300 Unit | 4.305.925.000,00 | 3.805.925.000,00 | 9.794.788.850,00 | 5.488.863.850,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB | - | - | | | 8.541.202.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 500 Unit | 500 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 154.357.500,00 | 149.357.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 500 Unit | 500 Unit | 2.300.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 3.012.532.000,00 | 712.532.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>OPSEN PKB | - | - | | | 997.904.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 500 Unit | 500 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 45.059.564.380,00 | 44.859.564.380,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | - | - | | | 311.080.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | *Prosentase jumlah penumpang terminal yang teawasi* | | | | 100 % | 100 % | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 | 595.732.500,00 | -44.267.500,00 | | | - | - | Kab. Tegal | | 1.780.138.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 635.000.000,00 | 635.000.000,00 | 593.232.500,00 | -41.767.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 1.560.138.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | *Prosentase lokasi titik parkir berizin* | | | | 50 % | 50 % | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 123.998.750,00 | -26.001.250,00 | | | - | - | Kab. Tegal | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 123.998.750,00 | -26.001.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | | | | - | - | 429.000.000,00 | 429.000.000,00 | 395.967.500,00 | -33.032.500,00 | | | - | - | - | | 744.700.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 117.990.000,00 | -17.010.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 99.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 294.000.000,00 | 294.000.000,00 | 277.977.500,00 | -16.022.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 645.700.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas* | | | | 100 % | 100 % | 463.000.000,00 | 463.000.000,00 | 455.930.050,00 | -7.069.950,00 | | | - | - | - | | 6.915.088.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.135.000,00 | -6.865.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.881.250,00 | -1.118.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 847.726.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 433.000.000,00 | 433.000.000,00 | 433.913.800,00 | 913.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 5.957.362.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Rekomendasi Dokumen Andalalin* | | | | 90 % | 90 % | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.635.000,00 | -9.365.000,00 | | | - | - | - | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.635.000,00 | -9.365.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Persentase jumlah rampcheck Angkutan umum* | | | | 100 % | 100 % | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 45.455.000,00 | -14.545.000,00 | | | - | - | - | | 132.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 66.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 42.955.000,00 | -12.045.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 66.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *persentase angkutan umum* | | | | 100 % | 100 % | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 77.367.500,00 | -32.632.500,00 | | | - | - | - | | 330.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 74.867.500,00 | -30.132.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *persentase dokumen perencanaan angkutan* | | | | 20 % | 20 % | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.10.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **8.725.431.100,00** | **8.725.431.100,00** | **8.049.551.078,00** | **-675.880.022,00** | | | | | | | **15.621.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.725.431.100,00** | **8.725.431.100,00** | **8.049.551.078,00** | **-675.880.022,00** | | | | | | | **15.621.000.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **8.279.478.500,00** | **8.279.478.500,00** | **7.728.277.561,00** | **-551.200.939,00** | | | | | | | **14.901.000.000,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.487.665.700,00** | **5.487.665.700,00** | **5.237.547.421,00** | **-2.336.665.700,00** | | | | | | | **3.151.000.000,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai* | | | | 100 % | 100 % | 49.980.000,00 | 49.980.000,00 | 33.068.000,00 | -16.912.000,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 49.980.000,00 | 49.980.000,00 | 33.068.000,00 | -16.912.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 3.460.572.000,00 | 3.460.572.000,00 | 3.165.772.000,00 | -294.800.000,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | 3.359.893.000,00 | 3.359.893.000,00 | 3.065.093.000,00 | -294.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.679.000,00 | 100.679.000,00 | 100.679.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur* | | | | 100 % | 100 % | 411.500.000,00 | 411.500.000,00 | 470.824.500,00 | 59.324.500,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 95.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 23 Orang | 23 Orang | 111.500.000,00 | 111.500.000,00 | 70.824.500,00 | -40.675.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 95.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 190.849.900,00 | 190.849.900,00 | 140.860.621,00 | -49.989.279,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 453.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.349.900,00 | 7.349.900,00 | 7.349.900,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 18.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 63.500.000,00 | 63.500.000,00 | 60.764.000,00 | -2.736.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 105.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.277.446,00 | -1.722.554,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 27.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Komunitas | 1 Komunitas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 23.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 29.469.275,00 | -45.530.725,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 208.728.000,00 | 208.728.000,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 1.250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 54.750.000,00 | 54.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 153.978.000,00 | 153.978.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 1.200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 955.286.500,00 | 955.286.500,00 | 867.024.500,00 | -88.262.000,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 513.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 149.998.600,00 | -100.001.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 703.786.500,00 | 703.786.500,00 | 715.525.900,00 | 11.739.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 210.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 419.477.300,00 | 419.477.300,00 | 351.269.800,00 | -68.207.500,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 680.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 254.339.000,00 | 254.339.000,00 | 185.833.500,00 | -68.505.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 31 Unit | 31 Unit | 30.048.300,00 | 30.048.300,00 | 30.346.300,00 | 298.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 135.090.000,00 | 135.090.000,00 | 135.090.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 270.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota** | | | | **80 %** | **80 %** | **1.370.840.800,00** | **1.370.840.800,00** | **1.170.829.200,00** | **1.129.159.200,00** | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase OPD yang melakukan KIP* | | | | 100 % | 100 % | 1.370.840.800,00 | 1.370.840.800,00 | 1.170.829.200,00 | -200.011.600,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 2.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 10 Komunitas | 10 Komunitas | 309.718.000,00 | 309.718.000,00 | 235.069.000,00 | -74.649.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 15 Permohonan | 15 Permohonan | 150.485.000,00 | 150.485.000,00 | 90.712.900,00 | -59.772.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 4 Rekomendasi | 4 Rekomendasi | 377.025.000,00 | 377.025.000,00 | 370.836.500,00 | -6.188.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME | - | - | | | 800.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 6 Media | 6 Media | 533.612.800,00 | 533.612.800,00 | 474.210.800,00 | -59.402.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME | - | - | | | 800.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo<br>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** | | | | **100<br>85 Persen<br>Persen** | **100<br>85 Persen<br>Persen** | **1.420.972.000,00** | **1.420.972.000,00** | **1.319.900.940,00** | **7.829.028.000,00** | | | | | | | **9.250.000.000,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan eGovernment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* | | | | 55 % | 55 % | 1.420.972.000,00 | 1.420.972.000,00 | 1.319.900.940,00 | -101.071.060,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 9.250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 285.073.000,00 | 285.073.000,00 | 197.051.814,00 | -88.021.186,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | | | | 5 Aplikasi | 5 Aplikasi | 60.574.000,00 | 60.574.000,00 | 39.674.600,00 | -20.899.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 750.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 31 Perangkat Daerah | 31 Perangkat Daerah | 943.400.000,00 | 943.400.000,00 | 1.009.226.051,00 | 65.826.051,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 7.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas* | | | | 6 Program | 6 Program | 131.925.000,00 | 131.925.000,00 | 73.948.475,00 | -57.976.525,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **129.801.000,00** | **129.801.000,00** | **101.550.950,00** | **-28.250.050,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia** | | | | **87.5 %** | **87.5 %** | **129.801.000,00** | **129.801.000,00** | **101.550.950,00** | **90.199.000,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data* | | | | 1175 Data | 1175 Data | 129.801.000,00 | 129.801.000,00 | 101.550.950,00 | -28.250.050,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 129.801.000,00 | 129.801.000,00 | 101.550.950,00 | -28.250.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME<br>RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **316.151.600,00** | **316.151.600,00** | **219.722.567,00** | **-96.429.033,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Tingkat keamanan Informasi** | | | | **75 %** | **75 %** | **316.151.600,00** | **316.151.600,00** | **219.722.567,00** | **183.848.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah OPD yang dilakukan assessment keamanan informasi* | | | | 10 OPD | 10 OPD | 316.151.600,00 | 316.151.600,00 | 219.722.567,00 | -96.429.033,00 | | | - | - | Kabupaten Tegal | | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 316.151.600,00 | 316.151.600,00 | 219.722.567,00 | -96.429.033,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | **15.012.170.500,00** | **15.562.170.500,00** | **16.417.859.528,00** | **1.405.689.028,00** | | | | | | | **18.099.843.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **12.562.170.500,00** | **12.562.170.500,00** | **12.498.291.153,00** | **-63.879.347,00** | | | | | | | **12.749.843.000,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **12.562.170.500,00** | **12.562.170.500,00** | **12.498.291.153,00** | **-63.879.347,00** | | | | | | | **12.749.843.000,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **11.972.210.500,00** | **11.972.210.500,00** | **11.380.843.149,00** | **-97.367.500,00** | | | | | | | **11.874.843.000,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.432.000,00 | -3.568.000,00 | | | - | - | - | | 35.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.432.000,00 | -3.568.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.578.499.518,00 | 7.578.499.518,00 | 7.079.749.518,00 | -498.750.000,00 | | | - | - | - | | 7.200.564.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 101 Orang/ bulan | 101 Orang/ bulan | 7.495.509.518,00 | 7.495.509.518,00 | 6.999.109.518,00 | -496.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.102.564.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 82.990.000,00 | 82.990.000,00 | 80.640.000,00 | -2.350.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 98.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 185.108.360,00 | -14.891.640,00 | | | - | - | - | | 223.882.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.882.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 400 Orang | 150 Orang | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 185.108.360,00 | -14.891.640,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 458.345.077,00 | 458.345.077,00 | 381.316.870,00 | -77.028.207,00 | | | - | - | - | | 548.520.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.376.000,00 | 11.376.000,00 | 11.376.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.520.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 61.810.000,00 | 61.810.000,00 | 61.810.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.994.700,00 | -5.300,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.404.000,00 | 70.404.000,00 | 70.404.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 43.774.000,00 | 43.774.000,00 | 33.417.605,00 | -10.356.395,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 624 Dokumen | 624 Dokumen | 155.280.077,00 | 155.280.077,00 | 108.720.740,00 | -46.559.337,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.701.000,00 | 75.701.000,00 | 55.593.825,00 | -20.107.175,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 140.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 292.944.083,00 | 292.944.083,00 | 199.861.083,00 | -93.083.000,00 | | | - | - | - | | 400.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 93.083.000,00 | 93.083.000,00 | 0,00 | -93.083.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 199.861.083,00 | 199.861.083,00 | 199.861.083,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 2.964.400.900,00 | 2.964.400.900,00 | 3.060.354.396,00 | 95.953.496,00 | | | - | - | - | | 3.126.877.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 400 Laporan | 400 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 990.000,00 | -10.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 393.450.900,00 | 393.450.900,00 | 501.814.396,00 | 108.363.496,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 656.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.569.950.000,00 | 2.569.950.000,00 | 2.557.550.000,00 | -12.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.467.877.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 468.020.922,00 | 468.020.922,00 | 468.020.922,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 340.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 50.990.950,00 | 50.990.950,00 | 50.990.950,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 377.029.972,00 | 377.029.972,00 | 377.029.972,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000.000,00** | | | | | | | **85.000.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 85.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 462 Unit Usaha | 462 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **189.990.000,00** | **189.990.000,00** | **799.649.350,00** | **10.010.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 189.990.000,00 | 189.990.000,00 | 799.649.350,00 | 609.659.350,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 240 Orang | 240 Orang | 189.990.000,00 | 189.990.000,00 | 799.649.350,00 | 609.659.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **-** | | | | **-** | **-** | **299.970.000,00** | **299.970.000,00** | **184.326.654,00** | **155.030.000,00** | | | | | | | **455.000.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | | | | - | - | 299.970.000,00 | 299.970.000,00 | 184.326.654,00 | -115.643.346,00 | | | - | - | - | | 455.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 119000 Unit Usaha | 119000 Unit Usaha | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 84.071.000,00 | -15.929.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 230.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 130 Orang | 130 Orang | 199.970.000,00 | 199.970.000,00 | 100.255.654,00 | -99.714.346,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 225.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **133.472.000,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **85.000.000,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 133.472.000,00 | 33.472.000,00 | | | - | - | - | | 85.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi* | | | | 12 Lembaga | 12 Lembaga | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 133.472.000,00 | 33.472.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **2.450.000.000,00** | **3.000.000.000,00** | **3.919.568.375,00** | **1.469.568.375,00** | | | | | | | **5.350.000.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **2.450.000.000,00** | **3.000.000.000,00** | **3.919.568.375,00** | **1.469.568.375,00** | | | | | | | **5.350.000.000,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **55.790.000,00** | **120.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 55.790.000,00 | -24.210.000,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 9000 Dokumen | 9000 Dokumen | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 55.790.000,00 | -24.210.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.200.000.000,00** | **2.750.000.000,00** | **3.745.304.400,00** | **2.000.000.000,00** | | | | | | | **4.200.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | | - | - | 2.200.000.000,00 | 2.750.000.000,00 | 3.745.304.400,00 | 1.545.304.400,00 | | | - | - | - | | 4.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 2.200.000.000,00 | 2.750.000.000,00 | 3.745.304.400,00 | 1.545.304.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **40.849.375,00** | **320.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.849.375,00 | -39.150.625,00 | | | - | - | - | | 400.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 500 Laporan | 500 Laporan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.849.375,00 | -39.150.625,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi* | | | | 15 Produk | 15 Produk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **36.110.000,00** | **150.000.000,00** | | | | | | | **190.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 36.110.000,00 | -3.890.000,00 | | | - | - | - | | 190.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 9510 Unit | 9510 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.460.000,00 | -2.540.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 180.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 18 Orang | 18 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.650.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **41.514.600,00** | **250.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 41.514.600,00 | -8.485.400,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 3 UMKM | 3 UMKM | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 41.514.600,00 | -8.485.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kudaile | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.674.124.500,00** | **5.674.124.500,00** | **5.164.699.398,00** | **226.596.300,00** | | | | | | | **5.900.720.800,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | Aparatur | | 17.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase tercapainya keuangan perangkat daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 3.069.228.500,00 | 3.069.228.500,00 | 2.560.828.500,00 | -508.400.000,00 | | | - | - | Aparatur | | 2.203.395.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 0,00 | 2.992.728.500,00 | 2.484.328.500,00 | 2.484.328.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.125.395.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 78.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.335.000,00 | -4.665.000,00 | | | - | - | Aparatur | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.335.000,00 | -4.665.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 346.000.000,00 | 346.000.000,00 | 320.289.898,00 | -25.710.102,00 | | | - | - | Aparatur | | 625.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 57.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 68.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 52.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 65.000.000,00 | 71.925.000,00 | 71.925.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.363.273,00 | 363.273,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 90.000.000,00 | 45.001.625,00 | 45.001.625,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang milik Perangkat Daerah* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 500.211.000,00 | 500.211.000,00 | 490.211.000,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | Gedung Kantor | | 900.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 446.811.000,00 | 446.811.000,00 | 446.811.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 800.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 43.400.000,00 | 43.400.000,00 | 43.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 1.520.685.000,00 | 1.520.685.000,00 | 1.467.035.000,00 | -53.650.000,00 | | | - | - | Aparatur | | 1.519.825.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.250.000,00 | 350.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 0,00 | 726.685.000,00 | 670.185.000,00 | 670.185.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 609.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.669.124.500,00** | **6.669.124.500,00** | **5.739.822.148,00** | **-929.302.352,00** | | | | | | | **7.936.265.600,00** | |
| | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.325.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 776.600.000,00 | 776.600.000,00 | 779.100.000,00 | 2.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 892.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarpras yang dipelihara* | | | | 51 Unit | 51 Unit | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 303.000.000,00 | 93.000.000,00 | | | - | - | Aparatur | | 510.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 210.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 68.000.000,00 | 38.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 1. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi** | | | | **85.70 Persen** | **85.70 Persen** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | **126.347.750,00** | **-50.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen peta pontensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 126.347.750,00 | -23.652.250,00 | | | - | - | Lokasi Potensi Investasi | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 83.005.500,00 | -16.994.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 43.342.250,00 | -6.657.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen** | | | | **57,1 Persen** | **57,1 Persen** | **130.000.000,00** | **130.000.000,00** | **130.000.000,00** | **220.000.000,00** | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jumlah calon yang berkomitmen* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | Peningkatan sasaran investasi | | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **61.275.000,00** | **400.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik* | | | | 7000 Pelaku Usaha | 7000 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 61.275.000,00 | -38.725.000,00 | | | - | - | Peningkatan pelayanan perizinan | | 500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 7000 Pelaku Usaha | 7000 Pelaku Usaha | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 35.005.000,00 | -24.995.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 375.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.135.000,00 | -6.865.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 3000 Kegiatan Usaha | 3000 Kegiatan Usaha | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.135.000,00 | -6.865.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Kepatuhan Perusahaan** | | | | **74,25 Persen** | **74,25 Persen** | **600.000.000,00** | **600.000.000,00** | **250.000.000,00** | **469.007.300,00** | | | | | | | **1.069.007.300,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha* | | | | 320 Pelaku usaha | 320 Pelaku usaha | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 250.000.000,00 | -350.000.000,00 | | | - | - | Pemantauan, pengawasan bimtek/Sosialisasi pelaku usaha | | 1.069.007.300,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 20 Kegiatan Usaha. | 20 Kegiatan Usaha. | 86.065.000,00 | 86.065.000,00 | 63.100.000,00 | -22.965.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 82.320.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 350 Pelaku Usaha | 350 Pelaku Usaha | 319.856.000,00 | 319.856.000,00 | 101.000.000,00 | -218.856.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 368.341.600,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 320 Kegiatan Usaha | 320 Kegiatan Usaha | 194.079.000,00 | 194.079.000,00 | 85.900.000,00 | -108.179.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | - | - | | | 618.345.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase data layanan yang termanfaatkan** | | | | **14.21 Persen** | **14.21 Persen** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **7.500.000,00** | **1.537.500,00** | | | | | | | **16.537.500,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | | | - | - | Pengolahan data | | 16.537.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Procot | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.537.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | | | | | | | **19.577.018.800,00** | **19.777.018.800,00** | **20.369.402.565,00** | **792.383.765,00** | | | | | | | **17.899.281.216,00** | |
| | **2** | **NON URUSAN** | | | | | | | **9.438.226.216,00** | **5.565.000.000,00** | **5.454.077.000,00** | **-3.984.149.216,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **9.438.226.216,00** | **5.565.000.000,00** | **5.454.077.000,00** | **-3.984.149.216,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **9.989.018.800,00** | **9.989.018.800,00** | **9.815.251.868,00** | **-89.737.584,00** | | | | | | | **9.899.281.216,00** | |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.318.123.330,00 | 4.318.123.330,00 | 4.341.360.653,00 | 23.237.323,00 | | | - | - | - | | 4.424.226.216,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 14 Laporan | 3.873.226.216,00 | 0,00 | 0,00 | -3.873.226.216,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.438.226.216,00** | **5.565.000.000,00** | **5.454.077.000,00** | **-3.984.149.216,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **9.438.226.216,00** | **5.565.000.000,00** | **5.454.077.000,00** | **-3.984.149.216,00** | | | | | | | **5.600.000.000,00** | |
| 1. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan<br>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri** | | | | **0,079<br>0.178<br>Persen<br>Persen** | **0,079<br>0.178<br>Persen<br>Persen** | **1.550.000.000,00** | **1.550.000.000,00** | **1.486.635.000,00** | **500.000.000,00** | | | | | | | **2.050.000.000,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota* | | | | 213 Orang | 213 Orang | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 986.635.000,00 | -63.365.000,00 | | | - | - | Organisasi Kepemudaan, Pemuda 16 - 30 Tahun | | 1.050.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 936.635.000,00 | -63.365.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 18 Orang | 18 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Persentase Cabang Olahraga yang dibina Peningkatan prestasi olahraga** | | | | **80,58<br>85 Persen<br>Persen** | **80,58<br>85 Persen<br>Persen** | **4.015.000.000,00** | **4.015.000.000,00** | **3.967.442.000,00** | **-465.000.000,00** | | | | | | | **3.550.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.190.000.000,00 | 1.190.000.000,00 | 1.288.800.000,00 | 98.800.000,00 | | | - | - | - | | 600.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 3 Unit | 4 Unit | 1.190.000.000,00 | 1.190.000.000,00 | 1.288.800.000,00 | 98.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 593.717.000,00 | 93.717.000,00 | | | - | - | - | | 450.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 288.426.500,00 | 38.426.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 305.290.500,00 | 55.290.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah Atlit Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 875.000.000,00 | 875.000.000,00 | 634.925.000,00 | -240.075.000,00 | | | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerima Penghargaan olahraga* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 193.605.000,00 | -6.395.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 675.000.000,00 | 675.000.000,00 | 441.320.000,00 | -233.680.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **10.138.792.584,00** | **14.212.018.800,00** | **14.915.325.565,00** | **4.776.532.981,00** | | | | | | | **12.299.281.216,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **10.138.792.584,00** | **14.212.018.800,00** | **14.915.325.565,00** | **4.776.532.981,00** | | | | | | | **12.299.281.216,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISPORAPAR** | | | | **100<br>Persen** | **100<br>Persen** | **9.989.018.800,00** | **9.989.018.800,00** | **9.815.251.868,00** | **-89.737.584,00** | | | | | | | **9.899.281.216,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 20.200.500,00 | -11.799.500,00 | | | - | - | - | | 37.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 19.132.500,00 | -10.867.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 534.000,00 | -466.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 534.000,00 | -466.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 4.348.731.800,00 | 4.348.731.800,00 | 4.289.691.300,00 | -59.040.500,00 | | | - | - | - | | 4.216.055.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 47 Orang/bulan | 57 Orang/bulan | 4.224.731.800,00 | 4.224.731.800,00 | 4.168.831.800,00 | -55.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN | - | - | | | 4.086.055.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 124.000.000,00 | 124.000.000,00 | 120.859.500,00 | -3.140.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 130.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 85.013.670,00 | 85.013.670,00 | 54.303.527,00 | -30.710.143,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 45 Orang | 45 Orang | 85.013.670,00 | 85.013.670,00 | 54.303.527,00 | -30.710.143,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 588.000.000,00 | 588.000.000,00 | 448.540.363,00 | -139.459.637,00 | | | - | - | - | | 467.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.878.251,00 | -121.749,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.999.700,00 | -300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 19.710.662,00 | 9.710.662,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 51.016.000,00 | -18.984.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 116.092.500,00 | -33.907.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 201.000.000,00 | 201.000.000,00 | 152.852.500,00 | -48.147.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 51.990.750,00 | -48.009.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 149.031.250,00 | 49.031.250,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 149.031.250,00 | 49.031.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.318.123.330,00 | 4.318.123.330,00 | 4.341.360.653,00 | 23.237.323,00 | | | - | - | - | | 4.424.226.216,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 997.500,00 | -2.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 443.897.114,00 | 443.897.114,00 | 440.897.153,00 | -2.999.961,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 14 Laporan | 0,00 | 3.873.226.216,00 | 3.899.466.000,00 | 3.899.466.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.873.226.216,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 517.150.000,00 | 517.150.000,00 | 512.124.275,00 | -5.025.725,00 | | | - | - | - | | 585.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 252.150.000,00 | 252.150.000,00 | 249.123.187,00 | -3.026.813,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 285.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.999.738,00 | -262,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 42 Unit | 42 Unit | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 94.938.225,00 | -61.775,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 95.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 128.063.125,00 | -1.936.875,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 155.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)**<br>**Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan** | | | | **85,83 95,33 Persen Persen** | **85,83 95,33 Persen Persen** | **2.150.000.000,00** | **2.350.000.000,00** | **4.235.407.947,00** | **-1.050.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.042.000,00 | -958.000,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.042.000,00 | -958.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah unit Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.950.000.000,00 | 2.150.000.000,00 | 4.064.623.447,00 | 2.114.623.447,00 | | | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.950.000.000,00 | 2.150.000.000,00 | 4.064.623.447,00 | 2.114.623.447,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 71.742.500,00 | -28.257.500,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 71.742.500,00 | -28.257.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase DTW yang dipromosikan** | | | | **94,33 Persen** | **94,33 Persen** | **650.000.000,00** | **650.000.000,00** | **812.305.000,00** | **250.000.000,00** | | | | | | | **900.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 812.305.000,00 | 162.305.000,00 | | | - | - | - | | 900.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 812.305.000,00 | 162.305.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 900.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 4. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase SDM Pariwisata yang dibina** | | | | **70,57 Orang** | **70,57 Orang** | **1.223.000.000,00** | **1.223.000.000,00** | **52.360.750,00** | **-823.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah SDM dan Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 1.123.000.000,00 | 1.123.000.000,00 | 0,00 | -1.123.000.000,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI* | | | | 240 Orang | 240 Orang | 964.444.000,00 | 964.444.000,00 | 0,00 | -964.444.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 158.556.000,00 | 158.556.000,00 | 0,00 | -158.556.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | *Jumlah SDM yang memperoleh Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 52.360.750,00 | -47.639.250,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 52.360.750,00 | -47.639.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **6.325.168.700,00** | **6.325.168.700,00** | **5.539.598.185,00** | **-785.570.515,00** | | | | | | | **5.628.164.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.325.168.700,00** | **6.325.168.700,00** | **5.539.598.185,00** | **-785.570.515,00** | | | | | | | **5.628.164.000,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **6.071.218.700,00** | **6.071.218.700,00** | **5.334.626.835,00** | **-736.591.865,00** | | | | | | | **5.255.664.000,00** | |
| 1. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat** | | | | **70.26 Angka/Skor** | **70.26 Angka/Skor** | **128.600.000,00** | **128.600.000,00** | **90.282.860,00** | **100.800.000,00** | | | | | | | **229.400.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan*<br>*Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk* | | | | 0,596489 persen<br>1,183,350 persen | 0,596489 persen<br>1,183,350 persen | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 58.797.475,00 | -26.202.525,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 25 Perpustakaan | 25 Perpustakaan | 43.811.000,00 | 43.811.000,00 | 32.517.475,00 | -11.293.525,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 41.189.000,00 | 41.189.000,00 | 26.280.000,00 | -14.909.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat*<br>*Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat* | | | | 0.021 persen<br>3 kegiatan | 0.021 persen<br>3 kegiatan | 43.600.000,00 | 43.600.000,00 | 31.485.385,00 | -12.114.615,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 129.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 20 Perpustakaan | 20 Perpustakaan | 43.600.000,00 | 43.600.000,00 | 31.485.385,00 | -12.114.615,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 129.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.942.618.700,00** | **5.942.618.700,00** | **5.244.343.975,00** | **-916.354.700,00** | | | | | | | **5.026.264.000,00** | |
| | 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 73.750.000,00 | 73.750.000,00 | 53.028.312,00 | -20.721.688,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 138.613.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 46.760.812,00 | -15.739.188,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 124.613.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 6.267.500,00 | -4.982.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasinya keuangan perangkat daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 3.344.458.700,00 | 3.344.458.700,00 | 2.735.558.700,00 | -608.900.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 2.775.551.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 39 Orang/bulan | 39 Orang/bulan | 3.281.708.700,00 | 3.281.708.700,00 | 2.672.808.700,00 | -608.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.715.451.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.750.000,00 | 62.750.000,00 | 62.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | | | 202.050.000,00 | 202.050.000,00 | 166.960.397,00 | -35.089.603,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 244.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 71 Paket | 71 Paket | 50.484.000,00 | 50.484.000,00 | 50.297.612,00 | -186.388,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 48 Paket | 48 Paket | 16.408.000,00 | 16.408.000,00 | 16.408.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 38.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.685.850,00 | -1.314.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 64 Laporan | 64 Laporan | 77.158.000,00 | 77.158.000,00 | 43.568.935,00 | -33.589.065,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | | | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.467.436.375,00 | -32.563.625,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 1.152.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.467.436.375,00 | -32.563.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 152.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 525.860.000,00 | 525.860.000,00 | 524.926.896,00 | -933.104,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 394.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 234.660.000,00 | 234.660.000,00 | 234.659.896,00 | -104,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 275.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 291.200.000,00 | 291.200.000,00 | 290.267.000,00 | -933.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 119.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 296.500.000,00 | 296.500.000,00 | 296.433.295,00 | -66.705,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal | | 321.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 220.240.000,00 | 220.240.000,00 | 220.239.920,00 | -80,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 235.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 48 Unit | 48 Unit | 26.076.000,00 | 26.076.000,00 | 26.067.000,00 | -9.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 26.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.184.000,00 | 50.184.000,00 | 50.126.375,00 | -57.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **253.950.000,00** | **253.950.000,00** | **204.971.350,00** | **-48.978.650,00** | | | | | | | **372.500.000,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Peningkatan Nilai LAKE LKD<br>Peningkatan jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI Cukup** | | | | **76<br>85 skor persen** | **76<br>85 skor persen** | **253.950.000,00** | **253.950.000,00** | **204.971.350,00** | **118.550.000,00** | | | | | | | **372.500.000,00** | |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | | | 203.950.000,00 | 203.950.000,00 | 176.462.000,00 | -27.488.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 312.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 3500 Arsip | 3500 Arsip | 203.950.000,00 | 203.950.000,00 | 176.462.000,00 | -27.488.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 312.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 46 Laporan | 46 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 28.509.350,00 | -21.490.650,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 28.509.350,00 | -21.490.650,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | | **4.895.715.700,00** | **4.895.715.700,00** | **4.650.918.031,00** | **-244.797.669,00** | | | | | | | **11.980.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **4.895.715.700,00** | **4.895.715.700,00** | **4.650.918.031,00** | **-244.797.669,00** | | | | | | | **11.980.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **4.895.715.700,00** | **4.895.715.700,00** | **4.650.918.031,00** | **-244.797.669,00** | | | | | | | **11.980.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **4.235.715.700,00** | **4.235.715.700,00** | **4.015.764.031,00** | **2.169.284.300,00** | | | | | | | **6.405.000.000,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan perencanaan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.219.800,00 | -9.780.200,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.219.800,00 | -9.780.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan keuangan* | | | | 2 sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 2.336.609.700,00 | 2.336.609.700,00 | 2.172.044.800,00 | -164.564.900,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 3.440.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.262.929.700,00 | 2.262.929.700,00 | 2.101.029.700,00 | -161.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 3.190.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.680.000,00 | 73.680.000,00 | 71.015.100,00 | -2.664.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 350.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian* | | | | 7 sub kegiatan | 7 sub kegiatan | 183.500.000,00 | 183.500.000,00 | 143.202.750,00 | -40.297.250,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 650.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 48.770.000,00 | -1.230.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 33.432.750,00 | -36.567.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 344.496.000,00 | 344.496.000,00 | 344.062.500,00 | -433.500,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 344.496.000,00 | 344.496.000,00 | 344.062.500,00 | -433.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian* | | | | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | 946.130.000,00 | 946.130.000,00 | 942.157.018,00 | -3.972.982,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 1.065.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.680.000,00 | -120.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 106.147.118,00 | -3.852.882,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 834.330.000,00 | 834.330.000,00 | 834.329.900,00 | -100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 900.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian* | | | | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | 384.980.000,00 | 384.980.000,00 | 384.077.163,00 | -902.837,00 | | | - | - | Aparatur Dinas | | 600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 48 Unit | 48 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 149.694.413,00 | -305.587,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 180.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 34.980.000,00 | 34.980.000,00 | 34.740.000,00 | -240.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.642.750,00 | -357.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000) Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)** | | | | **14.302.337 2,064,580 Rupiah Kg/Tahun** | **14.302.337 2,064,580 Rupiah Kg/Tahun** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **136.710.200,00** | **1.010.000.000,00** | | | | | | | **1.110.000.000,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan di Kab. Tegal* | | | | 2 sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 360.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil di kabupaten tegal* | | | | 2 sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 136.710.200,00 | 36.710.200,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 120.605.000,00 | 50.605.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 16.105.200,00 | -13.894.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | *Meningkatnya pengelolaan & penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Produksi Perikanan Budidaya (kg) Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)** | | | | **2.859.551 154.861.032 Kg/Tahun Rupiah** | **2.859.551 154.861.032 Kg/Tahun Rupiah** | **440.000.000,00** | **440.000.000,00** | **401.193.650,00** | **2.275.000.000,00** | | | | | | | **2.715.000.000,00** | |
| | 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan* | | | | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 90.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan* | | | | 3 sub kegiatan | 3 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan* | | | | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan* | | | | 7 sub kegiatan | 7 sub kegiatan | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 401.193.650,00 | -38.806.350,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 1.825.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 38.300.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 180 Unit | 180 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 362.893.650,00 | -37.106.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan* | | | | 0,5 Dokumen | 0,5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **38.682.400,00** | **150.000.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan di Kab. Tegal* | | | | 100 persen | 100 persen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.682.400,00 | -11.317.600,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1 Pelaku Usaha | 1 Pelaku Usaha | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.682.400,00 | -11.317.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)** | | | | **5.531.431 132.453.283 Kg/Tahun Rupiah** | **5.531.431 132.453.283 Kg/Tahun Rupiah** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **58.567.750,00** | **1.480.000.000,00** | | | | | | | **1.550.000.000,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | *Terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil* | | | | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil* | | | | 1 sub kegiatan | 1 sub kegiatan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 58.567.750,00 | -11.432.250,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 650.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 58.567.750,00 | -11.432.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 650.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku Industri pengolahan ikan* | | | | 2 sub kegiatan | 2 sub kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Tegal | | 800.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 80 Ton | 80 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 50 Pelaku Usaha | 50 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | | **DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **10.228.129.600,00** | **10.328.129.600,00** | **12.778.074.722,00** | **2.549.945.122,00** | | | | | | | **18.737.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.588.532.200,00** | **1.588.532.200,00** | **1.625.294.200,00** | **36.762.000,00** | | | | | | | **2.783.000.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **1.588.532.200,00** | **1.588.532.200,00** | **1.625.294.200,00** | **36.762.000,00** | | | | | | | **2.783.000.000,00** | |
| 1. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 0,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi<br>Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi<br>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | **6,4 Persen** | **6,7<br>6,4<br>42,41<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **1.178.532.200,00** | **1.178.532.200,00** | **1.158.746.800,00** | **641.467.800,00** | | | | | | | **1.820.000.000,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster<br>Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi* | | | | 6,70 Persen | 6,70 Persen<br>90 Persen | 1.133.532.200,00 | 1.133.532.200,00 | 1.125.351.800,00 | -8.180.400,00 | | | - | - | Pencari Kerja | | 1.620.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 300 Orang | 100 Orang | 533.532.200,00 | 533.532.200,00 | 525.541.800,00 | -7.990.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 780.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 100 Unit | 100 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.01.0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 599.810.000,00 | -190.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 240.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Persentase LPK yang terakreditasi* | | | | 7,5 Persen | 7,5 Persen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 33.395.000,00 | -11.605.000,00 | | | - | - | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 33.395.000,00 | -11.605.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 3. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah** | | | | **35 Persen** | **35 Persen** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **291.391.400,00** | **425.000.000,00** | | | | | | | **625.000.000,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 51.350.000,00 | -28.650.000,00 | | | - | - | Pencari Kerja | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 51.350.000,00 | -28.650.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota* | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.570.000,00 | -11.430.000,00 | | | - | - | Forum Bursa Kerja Khusus | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku* | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.570.000,00 | -11.430.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)* | | | | 8000 Orang | 8000 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 158.371.400,00 | 138.371.400,00 | | | - | - | Pencari Kerja | | 350.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 18100 Orang | 18100 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 158.371.400,00 | 138.371.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 43.100.000,00 | -6.900.000,00 | | | - | - | Calon Pekerja Migran Indonesia | | 75.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 43.100.000,00 | -6.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 4. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)** | | | | **8,13 Persen** | **8,13 Persen** | **210.000.000,00** | **210.000.000,00** | **175.156.000,00** | **78.000.000,00** | | | | | | | **288.000.000,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)* | | | | 51,47 Persen | 51,47 Persen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 34.914.000,00 | -10.086.000,00 | | | - | - | Perusahaan | | 83.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 34.914.000,00 | -10.086.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 83.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jumlah perusahaan yang berselisih* | | | | 1,29 Persen | 1,29 Persen | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 140.242.000,00 | -24.758.000,00 | | | - | - | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 205.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 15 Perkara | 15 Perkara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | | | | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 140.242.000,00 | -24.758.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **8.639.597.400,00** | **8.739.597.400,00** | **11.152.780.522,00** | **2.513.183.122,00** | | | | | | | **15.954.500.000,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **8.589.597.400,00** | **8.689.597.400,00** | **11.149.322.022,00** | **2.559.724.622,00** | | | | | | | **15.904.500.000,00** | |
| 1. | **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Pemenuhan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **7.463.167.400,00** | **7.563.167.400,00** | **6.991.851.067,00** | **4.406.332.600,00** | | | | | | | **11.869.500.000,00** | |
| | 3.31.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 24.144.500,00 | -25.855.500,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 11.334.500,00 | -18.665.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 12.810.000,00 | -7.190.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.31.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.878.601.400,00 | 4.878.601.400,00 | 4.338.531.400,00 | -540.070.000,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 4.600.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 4.791.056.400,00 | 4.791.056.400,00 | 4.216.156.400,00 | -574.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.545.000,00 | 87.545.000,00 | 122.375.000,00 | 34.830.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pegawai* | | | | 65 Orang | 65 Orang | 93.185.000,00 | 93.185.000,00 | 47.180.375,00 | -46.004.625,00 | | | - | - | Aparatur Sipil Negara | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 65 Orang | 65 Orang | 93.185.000,00 | 93.185.000,00 | 47.180.375,00 | -46.004.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tercukupinya Layanan Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 588.818.500,00 | 588.818.500,00 | 417.963.925,00 | -170.854.575,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 532.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 43.680.700,00 | -8.319.300,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 53.674.300,00 | -33.325.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.887.200,00 | -112.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 91.318.500,00 | 91.318.500,00 | 73.548.500,00 | -17.770.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1440 Dokumen | 1440 Dokumen | 208.500.000,00 | 208.500.000,00 | 155.174.525,00 | -53.325.475,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 71.998.700,00 | -58.001.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 132.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48.885.000,00 | 48.885.000,00 | 48.765.000,00 | -120.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 2.562.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 275.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | - | - | - | | | 587.500.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 48.885.000,00 | 48.885.000,00 | 48.765.000,00 | -120.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran yang Berkualitas* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.138.000.000,00 | 1.138.000.000,00 | 1.106.579.977,00 | -31.420.023,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 1.325.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 276.000.000,00 | 276.000.000,00 | 263.699.977,00 | -12.300.023,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 425.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 862.000.000,00 | 862.000.000,00 | 842.880.000,00 | -19.120.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 900.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 665.677.500,00 | 765.677.500,00 | 1.008.685.890,00 | 343.008.390,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Kabupaten Tegal | | 2.600.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 293.387.500,00 | 293.387.500,00 | 253.497.250,00 | -39.890.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 72.290.000,00 | 72.290.000,00 | 93.978.640,00 | 21.688.640,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 461.210.000,00 | 261.210.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 2. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **800.000.000,00** | **800.000.000,00** | **3.899.070.155,00** | **2.200.000.000,00** | | | | | | | **3.000.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK* | | | | 58 Persen | 58 Persen | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 3.899.070.155,00 | 3.099.070.155,00 | | | - | - | Pelaku Usaha / Industri | | 3.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.206.500.000,00 | 3.206.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 | 497.063.950,00 | -42.936.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 66.267.455,00 | -8.732.545,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 119.287.750,00 | -55.712.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM | - | - | | | 700.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.951.000,00 | -49.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 3. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **47.000.000,00** | **47.000.000,00** | **30.160.000,00** | **253.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 30.160.000,00 | -16.840.000,00 | | | - | - | Pelaku Usaha / Industri | | 300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 30.160.000,00 | -16.840.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 4. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)** | | | | **49.39 Persen** | **49.39 Persen** | **279.430.000,00** | **279.430.000,00** | **228.240.800,00** | **455.570.000,00** | | | | | | | **735.000.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM* | | | | 0,5 Persen | 0,5 Persen | 279.430.000,00 | 279.430.000,00 | 228.240.800,00 | -51.189.200,00 | | | - | - | Pelaku Usaha / Industri | | 735.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 258.000.000,00 | 258.000.000,00 | 209.338.800,00 | -48.661.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.430.000,00 | 21.430.000,00 | 18.902.000,00 | -2.528.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **3.458.500,00** | **-46.541.500,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 1. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **3.458.500,00** | **0,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi*<br>*Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi* | | | | 100 Persen<br>3 Kepala Keluarga | 100 Persen<br>3 Kepala Keluarga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 3.458.500,00 | -46.541.500,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Tegal | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan* | | | | 3 Kepala Keluarga | 3 Kepala Keluarga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 3.458.500,00 | -46.541.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **77.780.264.800,00** | **77.090.264.800,00** | **82.231.590.084,00** | **4.451.325.284,00** | | | | | | | **96.888.000.883,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **77.780.264.800,00** | **77.090.264.800,00** | **82.231.590.084,00** | **4.451.325.284,00** | | | | | | | **96.888.000.883,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **77.780.264.800,00** | **77.090.264.800,00** | **82.231.590.084,00** | **4.451.325.284,00** | | | | | | | **96.888.000.883,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Komposit ( IKM Setda )<br>Nilai Reformasi dan Birokrasi Komponen (RB Setda)<br>Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat<br>Persentase Indeks Reformasi Birokrasi<br>Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)<br>Predikat Nilai SAKIP Komponen<br>Nilai SAKIP Komposit (SAKIP Setda)** | | | | **87,57<br>67,69<br>50<br>100<br>68,08<br>73,14 Nilai<br>Nilai<br>Persen<br>Persen<br>Nilai<br>persen** | **87,57<br>67,69<br>100<br>50<br>68,08<br>73,14 Nilai<br>Nilai<br>Persen<br>Persen<br>Nilai<br>persen** | **37.826.264.800,00** | **37.826.264.800,00** | **43.495.511.184,00** | **-3.685.413.767,00** | | | | | | | **34.140.851.033,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *[deleted] Pelayanan Perencanaan dan Keuangan terpenuhi Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 78.957.737,00 | -26.042.263,00 | | | - | - | ASN | | 99.187.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 78.957.737,00 | -26.042.263,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 99.187.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Pelayanan Perencanaan dan Keuangan terpenuhi Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.286.722.300,00 | 12.286.722.300,00 | 11.885.578.975,00 | -401.143.325,00 | | | - | - | ASN | | 13.705.808.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 130/14 Orang/bulan | 130/14 Orang/bulan | 11.750.722.300,00 | 11.750.722.300,00 | 11.405.772.300,00 | -344.950.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.110.683.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 446.000.000,00 | 446.000.000,00 | 423.227.612,00 | -22.772.388,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 515.775.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 56.579.063,00 | -33.420.937,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 79.350.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 128.513.750,00 | -21.486.250,00 | | | - | - | ASN | | 79.350.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 128.513.750,00 | -21.486.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 79.350.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.945.500.000,00 | 2.945.500.000,00 | 3.443.473.450,00 | 497.973.450,00 | | | - | - | ASN | | 2.470.057.208,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 124.995.200,00 | -4.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 145.537.554,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 145.475.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 616.844.000,00 | 316.844.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 361.042.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.876.510.000,00 | 676.510.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 727.375.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 144.529.250,00 | -5.470.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 101.785.440,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 80.011.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 510.095.000,00 | -489.905.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 908.830.464,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.703.588.000,00 | 6.703.588.000,00 | 8.896.688.347,00 | 2.193.100.347,00 | | | - | - | ASN | | 3.292.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.160.000.000,00 | 3.160.000.000,00 | 3.160.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 3.160.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 2.796.588.000,00 | 2.796.588.000,00 | 3.586.889.547,00 | 790.301.547,00 | - | PAJAK ROKOK | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 747.000.000,00 | 747.000.000,00 | 2.149.798.800,00 | 1.402.798.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 132.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.288.599.900,00 | 6.288.599.900,00 | 6.673.598.625,00 | 384.998.725,00 | | | - | - | ASN | | 6.838.232.896,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.712.500,00 | 6.712.500,00 | 6.712.125,00 | -375,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 8.877.281,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.664.709.400,00 | 1.664.709.400,00 | 1.664.709.400,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 1.177.025.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 640.000.000,00 | 290.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 434.441.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.267.178.000,00 | 4.267.178.000,00 | 4.362.177.100,00 | 94.999.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 5.217.889.365,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.437.699.000,00 | 4.437.699.000,00 | 5.187.667.000,00 | 749.968.000,00 | | | - | - | ASN | | 1.985.950.111,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 96 Unit | 96 Unit | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.889.968.000,00 | 689.968.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 1.390.825.111,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.037.699.000,00 | 3.037.699.000,00 | 3.037.699.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 66.125.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 260.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 529.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Pelayanan perencanaan dan keuangan terpenuhi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.306.890.000,00 | 1.306.890.000,00 | 1.816.540.925,00 | 509.650.925,00 | | | - | - | ASN | | 1.432.284.693,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2/14 Orang/ Bulan | 2/14 Orang/ Bulan | 1.156.890.000,00 | 1.156.890.000,00 | 1.316.890.000,00 | 160.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.354.257.193,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 499.650.925,00 | 349.650.925,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 78.027.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Peningkatan Layanan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.409.865.600,00 | 1.409.865.600,00 | 2.595.865.600,00 | 1.186.000.000,00 | | | - | - | ASN | | 1.242.797.025,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 734.004.600,00 | 734.004.600,00 | 1.484.504.600,00 | 750.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 886.223.120,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 587.706.000,00 | 587.706.000,00 | 1.023.206.000,00 | 435.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 181.455.464,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 88.155.000,00 | 88.155.000,00 | 88.155.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 175.118.441,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Nilai SAKIP dan IKM Komponen yang terpenuhi* | | | | 73,14 Persen | 73,14 Persen | 521.000.000,00 | 521.000.000,00 | 407.295.850,00 | -113.704.150,00 | | | - | - | ASN | | 688.758.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 155.335.350,00 | 5.335.350,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 330.625.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | 116.429.250,00 | -54.570.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 172.983.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 135.531.250,00 | -64.468.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 185.150.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Kebijakan Strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat terpenuhi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.671.400.000,00 | 1.671.400.000,00 | 2.381.330.925,00 | 709.930.925,00 | | | - | - | ASN | | 2.306.175.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 1.529.232.925,00 | 999.232.925,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 704.628.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 940.000.000,00 | 940.000.000,00 | 705.006.750,00 | -234.993.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 1.220.403.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 201.400.000,00 | 201.400.000,00 | 147.091.250,00 | -54.308.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 381.144.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase pelayanan publik OPD lingkup koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang sesuai standar IKM (Nilai B) Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum** | | | | **100 100 Persen persen** | **100 100 Persen persen** | **38.927.000.000,00** | **38.237.000.000,00** | **37.966.863.900,00** | **22.469.073.270,00** | | | | | | | **61.396.073.270,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Peningkatan peraturan pemerintahan yang diimplementa-sikan Peningkatan Peraturan Pemerintahan yang diimplementasikan Peningkatan Peraturan Pemerintahan yang diimplementasikan [deleted]* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 315.828.600,00 | -204.171.400,00 | | | - | - | ASN | | 707.537.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 217.500.000,00 | 217.500.000,00 | 135.707.598,00 | -81.792.402,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK ROKOK | - | - | | | 396.750.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | 95.448.600,00 | -92.051.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 158.700.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 84.672.402,00 | -30.327.598,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 152.087.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Peningkatan Layanan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Layanan Kesejahteraan Rakyat [deleted]* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 37.650.000.000,00 | 36.960.000.000,00 | 37.052.420.300,00 | -597.579.700,00 | | | - | - | - | | 59.606.863.020,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 37.592.000.000,00 | 36.902.000.000,00 | 37.023.420.300,00 | -568.579.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 59.530.158.020,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | -12.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 33.062.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 16.500.000,00 | -16.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 43.642.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Nilai Penataan Perundang-undangan teralisasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 642.000.000,00 | 642.000.000,00 | 495.240.000,00 | -146.760.000,00 | | | - | - | ASN | | 929.585.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 137.600.000,00 | 137.600.000,00 | 74.280.000,00 | -63.320.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 198.375.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 3 Kasus | 3 Kasus | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 327.375.000,00 | -52.625.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 535.612.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 124.400.000,00 | 124.400.000,00 | 93.585.000,00 | -30.815.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 195.597.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Peningkatan kerjasama daerah yang terealisasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 103.375.000,00 | -11.625.000,00 | | | - | - | ASN | | 152.087.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 103.375.000,00 | -11.625.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 152.087.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)<br>Persentase Pelayanan Publik OPD lingkup Perekonomian dan Pembanguman yang sesuai dengan standar IKM Nilai B<br>Persentase OPD lingkup Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP<br>Tingkat standarisasi LPSE terpenuhi<br>Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi<br>Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tecapai BAIK** | | | | **75<br>17<br>100<br>100<br>100<br>3 Nilai<br>persen<br>Nilai<br>Persen<br>persen<br>Level** | **75<br>100<br>100<br>17<br>3<br>100 Nilai<br>persen<br>Nilai<br>persen<br>Level<br>Persen** | **1.027.000.000,00** | **1.027.000.000,00** | **769.215.000,00** | **324.076.580,00** | | | | | | | **1.351.076.580,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 143.920.000,00 | 16.920.000,00 | | | - | - | ASN | | 132.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 | 143.920.000,00 | 16.920.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 132.250.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 88.308.500,00 | -61.691.500,00 | | | - | - | ASN | | 227.470.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 88.308.500,00 | -61.691.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 227.470.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Indeks tata kelola pengadaan barang jasa meningkat* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 326.986.500,00 | -193.013.500,00 | | | - | - | ASN | | 683.732.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 139.000.000,00 | 139.000.000,00 | 89.475.000,00 | -49.525.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 179.860.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | 73.886.500,00 | -62.113.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 179.860.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 22 Orang | 22 Orang | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 163.625.000,00 | -81.375.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 324.012.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *[deleted] Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 210.000.000,00 | -20.000.000,00 | | | - | - | ASN | | 307.624.080,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 264.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | - | - | | | 43.124.080,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **55.067.391.300,00** | **58.749.891.300,00** | **58.492.365.523,00** | **12.798.085.000,00** | | | | | | | **67.865.476.300,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 35.220.750,00 | -9.779.250,00 | | | - | - | ASN | | 54.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 10.970.750,00 | -8.029.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 9.250.000,00 | -1.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 orang | 35 orang | 2.689.130.300,00 | 2.689.130.300,00 | 2.683.855.300,00 | -5.275.000,00 | | | - | - | ASN | | 2.960.979.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 2.520.230.300,00 | 2.520.230.300,00 | 2.520.230.300,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.754.459.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 168.900.000,00 | 168.900.000,00 | 163.625.000,00 | -5.275.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 206.520.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 35 orang | 35 orang | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 670.349.175,00 | -29.650.825,00 | | | - | - | ASN | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 33 Orang | 33 Orang | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 670.349.175,00 | -29.650.825,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Paket administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1.416.400.000,00 | 1.416.400.000,00 | 1.228.950.900,00 | -187.449.100,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 1.972.760.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 37.222.000,00 | 12.222.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 33 Paket | 33 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 180.042.950,00 | 30.042.950,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 180.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 217.650.850,00 | 17.650.850,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 356.400.000,00 | 356.400.000,00 | 378.082.750,00 | 21.682.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 736.560.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 54.600.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 67.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 179.000.000,00 | 179.000.000,00 | 185.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 179.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 117.945.000,00 | -82.055.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 58.407.350,00 | -191.592.650,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 100 persen | 100 persen | 6.922.575.000,00 | 10.405.075.000,00 | 10.474.162.233,00 | 3.551.587.233,00 | | | - | - | ASN | | 1.673.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.214.575.000,00 | 4.964.575.000,00 | 2.440.447.575,00 | -774.127.425,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 1.010.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.865.000.000,00 | 4.397.500.000,00 | 6.643.527.000,00 | 3.778.527.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 345.945.000,00 | 245.945.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 353.000.000,00 | 553.000.000,00 | 650.010.288,00 | 297.010.288,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 193.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 245.628.900,00 | 5.628.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 148.603.470,00 | -1.396.530,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 180.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.211.357.000,00 | 2.411.357.000,00 | 2.285.928.800,00 | 74.571.800,00 | | | - | - | ASN | | 2.358.992.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 365.000.000,00 | 365.000.000,00 | 364.999.750,00 | -250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 438.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.846.357.000,00 | 2.046.357.000,00 | 1.920.929.050,00 | 74.572.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.920.992.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 1.693.929.000,00 | 1.693.929.000,00 | 2.130.499.650,00 | 436.570.650,00 | | | - | - | ASN | | 2.246.820.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 668.929.000,00 | 668.929.000,00 | 822.208.000,00 | 153.279.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 1.193.820.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1041 Unit | 1041 Unit | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 214.155.650,00 | 74.155.650,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 168.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 885.000.000,00 | 1.094.136.000,00 | 1.094.136.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 885.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | **4** | **NON URUSAN** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| | **4.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **100.568.890.800,00** | **94.868.886.300,00** | **81.235.732.898,00** | **-19.333.157.902,00** | | | | | | | **114.953.166.500,00** | |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahtera an DPRD* | | | | 100 persen | 100 persen | 38.888.000.000,00 | 38.888.000.000,00 | 38.983.398.715,00 | 95.398.715,00 | | | - | - | DPRD | | 55.074.924.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 50 Orang/Bulan | 50 Orang/Bulan | 38.100.000.000,00 | 38.100.000.000,00 | 38.220.974.040,00 | 120.974.040,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 53.829.324.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 250 Paket | 250 Paket | 598.000.000,00 | 598.000.000,00 | 579.617.450,00 | -18.382.550,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 1.017.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 182.807.225,00 | -7.192.775,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 228.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Jumlah Paket Layanan Administrasi DPRD* | | | | 100 persen | 100 persen | 501.000.000,00 | 501.000.000,00 | 0,00 | -501.000.000,00 | | | - | - | DPRD | | 774.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 365 Paket | 365 Paket | 501.000.000,00 | 501.000.000,00 | 0,00 | -501.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 774.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 1. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **45.501.499.500,00** | **36.118.995.000,00** | **22.743.367.375,00** | **1.586.190.700,00** | | | | | | | **47.087.690.200,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Jumlah dokumen Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.541.710.000,00 | 4.832.380.000,00 | 3.393.117.783,00 | -2.148.592.217,00 | | | - | - | DPRD dan Masyarakat | | 5.633.421.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.889.330.000,00 | 2.380.000.000,00 | 1.761.612.358,00 | -1.127.717.642,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.144.396.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.000.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.056.775.425,00 | -943.224.575,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.821.645.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 577.380.000,00 | 577.380.000,00 | 537.230.000,00 | -40.150.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 577.380.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 37.500.000,00 | -37.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.015.865.000,00 | 4.015.865.000,00 | 2.698.615.000,00 | -1.317.250.000,00 | | | - | - | ASN dan Masyarakat | | 4.671.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 883.490.000,00 | 883.490.000,00 | 399.328.000,00 | -484.162.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.028.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 468.465.000,00 | 468.465.000,00 | 395.727.000,00 | -72.738.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 528.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 883.490.000,00 | 883.490.000,00 | 556.050.000,00 | -327.440.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.028.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 883.490.000,00 | 883.490.000,00 | 556.050.000,00 | -327.440.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.028.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 448.465.000,00 | 448.465.000,00 | 395.730.000,00 | -52.735.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 528.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 448.465.000,00 | 448.465.000,00 | 395.730.000,00 | -52.735.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 530.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 1.955.780.000,00 | 1.955.780.000,00 | 1.132.956.000,00 | -822.824.000,00 | | | - | - | DPRD dan Masyarakat | | 2.157.235.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 218.218.000,00 | 218.218.000,00 | 126.210.000,00 | -92.008.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 269.428.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 219.435.000,00 | 219.435.000,00 | 129.990.000,00 | -89.445.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 270.645.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 270.914.000,00 | 270.914.000,00 | 157.420.000,00 | -113.494.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 322.449.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 215.218.000,00 | 215.218.000,00 | 126.210.000,00 | -89.008.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 259.713.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 383.465.000,00 | 383.465.000,00 | 122.596.000,00 | -260.869.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 385.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 648.530.000,00 | 648.530.000,00 | 470.530.000,00 | -178.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Jumlah dokumen dan jumlah orang pada Peningkatan Kapasitas DPRD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.834.635.000,00 | 5.884.635.000,00 | 4.922.229.000,00 | -912.406.000,00 | | | - | - | DPRD | | 5.832.252.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.473.280.000,00 | 3.473.280.000,00 | 2.753.335.000,00 | -719.945.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 3.750.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 233.800.000,00 | 233.800.000,00 | 212.520.000,00 | -21.280.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 282.252.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 2.127.555.000,00 | 2.177.555.000,00 | 1.956.374.000,00 | -171.181.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 1.800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Jumlah Dokumen / laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.698.947.500,00 | 6.464.940.000,00 | 3.906.123.575,00 | -4.792.823.925,00 | | | - | - | DPRD dan Masyarakat | | 9.546.904.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 66.150.000,00 | 66.150.000,00 | 0,00 | -66.150.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 92.712.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 148.790.000,00 | 148.790.000,00 | 141.900.000,00 | -6.890.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 155.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 153 Dokumen | 153 Dokumen | 8.484.007.500,00 | 6.250.000.000,00 | 3.764.223.575,00 | -4.719.783.925,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.299.192.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 295.395.000,00 | 295.395.000,00 | 247.116.000,00 | -48.279.000,00 | | | - | - | DPRD | | 360.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 295.395.000,00 | 295.395.000,00 | 247.116.000,00 | -48.279.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 360.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Jumlah Laporan hasil Terfasilitasinya tugas DPRD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.159.167.000,00 | 12.670.000.000,00 | 6.443.210.017,00 | -12.715.956.983,00 | | | - | - | DPRD | | 18.886.277.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 9.242.250.000,00 | 6.000.000.000,00 | 3.072.580.167,00 | -6.169.669.833,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.267.700.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 74.375.000,00 | -45.625.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.305.877.000,00 | 800.000.000,00 | 401.704.850,00 | -904.172.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.007.577.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 46 Dokumen | 46 Dokumen | 8.491.040.000,00 | 5.750.000.000,00 | 2.894.550.000,00 | -5.596.490.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.491.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **11.040.089.600,00** | **10.940.089.600,00** | **9.577.239.325,00** | **-1.462.850.275,00** | | | | | | | **9.061.037.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **11.040.089.600,00** | **10.940.089.600,00** | **9.577.239.325,00** | **-1.462.850.275,00** | | | | | | | **9.061.037.000,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **8.791.849.600,00** | **8.691.849.600,00** | **7.766.094.425,00** | **-1.025.755.175,00** | | | | | | | **7.246.037.000,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.696.569.600,00** | **5.946.569.600,00** | **6.499.776.550,00** | **-1.010.532.600,00** | | | | | | | **4.686.037.000,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen perencanaan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.750.000,00 | 34.750.000,00 | 28.133.000,00 | -6.617.000,00 | | | - | - | ASN | | 48.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 22.708.000,00 | -4.292.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 5.425.000,00 | -2.325.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 8.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.414.547.600,00 | 3.414.547.600,00 | 3.342.047.600,00 | -72.500.000,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | ASN | | 2.829.397.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37/12 Orang/bulan | 51/12 Orang/bulan | 3.309.947.600,00 | 3.309.947.600,00 | 3.237.447.600,00 | -72.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 2.689.397.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 104.600.000,00 | 104.600.000,00 | 104.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 140.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 37.502.000,00 | -9.498.000,00 | | | - | - | ASN | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 37.502.000,00 | -9.498.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 343.845.000,00 | 338.845.000,00 | 313.694.000,00 | -30.151.000,00 | | | - | - | ASN | | 368.640.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 77.155.000,00 | 77.155.000,00 | 77.155.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 71.971.000,00 | 5.471.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 47.540.000,00 | 47.540.000,00 | 34.418.000,00 | -13.122.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1872 Dokumen | 1872 Dokumen | 17.650.000,00 | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 18.640.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 120.500.000,00 | 120.500.000,00 | 103.000.000,00 | -17.500.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 130.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 774.754.000,00 | 1.012.980.000,00 | 1.601.681.350,00 | 826.927.350,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | ASN | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 733.464.000,00 | 733.464.000,00 | 621.464.000,00 | -112.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 85 Unit | 41.290.000,00 | 279.516.000,00 | 980.217.350,00 | 938.927.350,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 421.600.000,00 | 606.600.000,00 | 645.301.000,00 | 223.701.000,00 | | | - | - | ASN | | 440.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 188.000.000,00 | 188.000.000,00 | 192.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 188.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 231.600.000,00 | 416.600.000,00 | 451.301.000,00 | 219.701.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 660.073.000,00 | 491.847.000,00 | 531.417.600,00 | -128.655.400,00 | | | - | - | ASN | | 790.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 80 Unit | 80 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 99 Unit | 99 Unit | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 129.570.600,00 | 39.570.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 315.073.000,00 | 146.847.000,00 | 146.847.000,00 | -168.226.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan** | | | | **85 100 Persen Persen** | **85 100 Persen Persen** | **649.320.000,00** | **649.320.000,00** | **442.021.600,00** | **80.680.000,00** | | | | | | | **730.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 446.500.000,00 | 446.500.000,00 | 324.270.500,00 | -122.229.500,00 | | | - | - | ASN | | 455.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 34.465.000,00 | -5.535.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 41.140.000,00 | -13.860.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 351.500.000,00 | 351.500.000,00 | 248.665.500,00 | -102.834.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 360.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan* | | | | 99 Persen | 99 Persen | 61.400.000,00 | 61.400.000,00 | 37.626.100,00 | -23.773.900,00 | | | - | - | ASN | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | 24.624.100,00 | -11.775.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* | | | | 1 Buku | 1 Buku | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 13.002.000,00 | -11.998.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 141.420.000,00 | 141.420.000,00 | 80.125.000,00 | -61.295.000,00 | | | - | - | ASN | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | 17.807.500,00 | -18.592.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya* | | | | 3 Kerja Sama | 3 Kerja Sama | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.057.500,00 | -6.942.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 90.020.000,00 | 90.020.000,00 | 54.260.000,00 | -35.760.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 115.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA<br>Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | **92.19<br>80<br>93.60<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **92.19<br>80<br>93.60<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **2.445.960.000,00** | **2.095.960.000,00** | **824.296.275,00** | **-615.960.000,00** | | | | | | | **1.830.000.000,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras*<br>*Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras* | | | | 92,19 Persen | 92,19 Persen | 494.320.000,00 | 494.320.000,00 | 281.891.225,00 | -212.428.775,00 | | | - | - | ASN | | 585.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.920.000,00 | 82.920.000,00 | 55.011.975,00 | -27.908.025,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.376.800,00 | -6.623.200,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.542.900,00 | -12.457.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.517.025,00 | -12.482.975,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 68.444.325,00 | -41.555.675,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 115.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 16.795.150,00 | -13.204.850,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 19.085.450,00 | -10.914.550,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 161.400.000,00 | 161.400.000,00 | 74.117.600,00 | -87.282.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 230.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras* | | | | 80 Persen | 80 Persen | 1.403.320.000,00 | 1.053.320.000,00 | 214.166.300,00 | -1.189.153.700,00 | | | - | - | ASN | | 525.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 206.920.000,00 | 206.920.000,00 | 114.419.250,00 | -92.500.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 220.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 12.271.075,00 | -22.728.925,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.748.725,00 | -6.251.275,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.080.000.000,00 | 730.000.000,00 | 54.792.550,00 | -1.025.207.450,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 8.307.700,00 | -13.092.300,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.604.400,00 | -14.395.600,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.520.000,00 | -7.480.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.502.600,00 | -7.497.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras* | | | | 92,62 Persen 94,58 Persen | 92,62 Persen 94,58 Persen | 548.320.000,00 | 548.320.000,00 | 328.238.750,00 | -220.081.250,00 | | | - | - | ASN | | 720.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.977.000,00 | 6.977.000,00 | 1.748.000,00 | -5.229.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.977.000,00 | 6.977.000,00 | 1.748.000,00 | -5.229.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.600.500,00 | 6.600.500,00 | 4.386.500,00 | -2.214.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 95.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 126.644.000,00 | 126.644.000,00 | 51.880.150,00 | -74.763.850,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.977.000,00 | 6.977.000,00 | 1.748.000,00 | -5.229.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.977.000,00 | 6.977.000,00 | 1.598.000,00 | -5.379.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.600.500,00 | 6.600.500,00 | 4.386.500,00 | -2.214.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 380.567.000,00 | 380.567.000,00 | 260.743.600,00 | -119.823.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **2.248.240.000,00** | **2.248.240.000,00** | **1.811.144.900,00** | **-437.095.100,00** | | | | | | | **1.815.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | **Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah** | | | | **81,2 Persen** | **81,2 Persen** | **2.248.240.000,00** | **2.248.240.000,00** | **1.811.144.900,00** | **-433.240.000,00** | | | | | | | **1.815.000.000,00** | |
| | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | *Persentase artikel hasil penelitian dan pengembangan yang tersubmit untuk dipublikasikan di jurnal terindeks minimal nasional* | | | | 80 Persen | 80 Persen | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | 874.396.300,00 | -135.603.700,00 | | | - | - | ASN | | 1.050.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset* | | | | 5 Naskah | 5 Naskah | 805.000.000,00 | 805.000.000,00 | 686.742.450,00 | -118.257.550,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 830.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 27.273.600,00 | -27.726.400,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.01.0006 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 160.380.250,00 | 10.380.250,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhsalam | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | *Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan* | | | | 83,82 Persen | 83,82 Persen | 1.238.240.000,00 | 1.238.240.000,00 | 936.748.600,00 | -301.491.400,00 | | | - | - | Masyarakat | | 765.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 91.595.300,00 | 16.595.300,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.02.0006 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.772.500,00 | -14.227.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.02.0009 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 633.240.000,00 | 633.240.000,00 | 537.986.250,00 | -95.253.750,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.03.2.02.0012 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 291.394.550,00 | -208.605.450,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **662.217.364.800,00** | **661.867.364.800,00** | **631.938.841.050,00** | **-30.278.523.750,00** | | | | | | | **497.716.962.700,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **662.217.364.800,00** | **661.867.364.800,00** | **631.938.841.050,00** | **-30.278.523.750,00** | | | | | | | **497.716.962.700,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **662.217.364.800,00** | **661.867.364.800,00** | **631.938.841.050,00** | **-30.278.523.750,00** | | | | | | | **497.716.962.700,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab Tegal)** | | | | **-** | **100 %** | **150.644.774.000,00** | **150.644.774.000,00** | **124.771.175.000,00** | **-147.613.136.300,00** | | | | | | | **3.031.637.700,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi, dan kinerja* | | | | - | 100 % | 53.710.000,00 | 53.710.000,00 | 19.805.300,00 | -33.904.700,00 | | | - | - | OPD BPKAD | | 55.410.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 45.210.000,00 | 45.210.000,00 | 13.665.400,00 | -31.544.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.210.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.274.000,00 | -426.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 970.000,00 | -330.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 970.000,00 | -330.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.300.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.225.900,00 | -1.274.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian penatausahaan keuangan perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 146.777.311.500,00 | 146.777.311.500,00 | 120.408.975.400,00 | -26.368.336.100,00 | | | - | - | OPD BPKAD Kab Tegal | | 525.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2344 Orang /bulan | 2344 Orang /bulan | 146.291.125.500,00 | 146.291.125.500,00 | 119.995.225.500,00 | -26.295.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 483.971.000,00 | 483.971.000,00 | 412.630.000,00 | -71.341.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 520.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 1.119.900,00 | -1.095.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ketercapaian Pelayanan Kepegawaian PD* | | | | - | 100 % | 155.214.000,00 | 155.214.000,00 | 56.288.350,00 | -98.925.650,00 | | | - | - | OPD BPKAD | | 75.495.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 155.214.000,00 | 155.214.000,00 | 56.288.350,00 | -98.925.650,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.495.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 526.670.500,00 | 526.670.500,00 | 472.581.950,00 | -54.088.550,00 | | | - | - | - | | 592.732.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.066.200,00 | 5.066.200,00 | 5.066.200,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.066.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 67.666.000,00 | 67.666.000,00 | 67.666.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 67.666.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 122.980.000,00 | -7.020.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 37.472.600,00 | -12.527.400,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 228.438.300,00 | 228.438.300,00 | 193.897.150,00 | -34.541.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 290.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 1.702.653.000,00 | 1.702.653.000,00 | 2.277.853.000,00 | 575.200.000,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.377.853.000,00 | 1.377.853.000,00 | 1.827.853.000,00 | 450.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 124.800.000,00 | 124.800.000,00 | 450.000.000,00 | 325.200.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 983.000.000,00 | 983.000.000,00 | 1.043.200.000,00 | 60.200.000,00 | | | - | - | - | | 1.003.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 678.000.000,00 | 678.000.000,00 | 738.200.000,00 | 60.200.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 668.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 446.215.000,00 | 446.215.000,00 | 492.471.000,00 | 46.256.000,00 | | | - | - | - | | 580.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 360.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 140 Unit | 140 Unit | 37.471.000,00 | 37.471.000,00 | 37.471.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 103.744.000,00 | 103.744.000,00 | 150.000.000,00 | 46.256.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 170.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda & Perbup Pertanggungjawaban APBD** | | | | **-** | **100 %** | **508.847.690.800,00** | **508.497.690.800,00** | **504.771.011.650,00** | **-16.762.265.800,00** | | | | | | | **492.085.425.000,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Daerah* | | | | - | 100 % | 1.280.000.000,00 | 1.280.000.000,00 | 987.968.400,00 | -292.031.600,00 | | | - | - | Seluruh OPD | | 1.180.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 28.400.000,00 | -31.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.900.000,00 | -50.100.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 303.550.850,00 | -96.449.150,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 | 243.314.550,00 | -71.685.450,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 315.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 144 Orang | 144 Orang | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 402.803.000,00 | 27.803.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Persentase Pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan* | | | | - | 100 % | 801.700.000,00 | 801.700.000,00 | 580.362.500,00 | -221.337.500,00 | | | - | - | seluruh OPD Kabupaten Tegal | | 875.425.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 275.425.000,00 | 275.425.000,00 | 124.313.000,00 | -151.112.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 275.425.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 395.425.000,00 | 395.425.000,00 | 389.607.800,00 | -5.817.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 420.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.425.000,00 | 55.425.000,00 | 16.645.200,00 | -38.779.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 144 Orang | 144 Orang | 75.425.000,00 | 75.425.000,00 | 49.796.500,00 | -25.628.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | | | | - | 100 % | 558.750.000,00 | 558.750.000,00 | 415.951.750,00 | -142.798.250,00 | | | - | - | seluruh OPD Se-Kabupaten Tegal | | 530.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 79.000.000,00 | 79.000.000,00 | 41.244.250,00 | -37.755.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 34.175.000,00 | -9.825.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 385.750.000,00 | 385.750.000,00 | 308.407.500,00 | -77.342.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 390.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 32.125.000,00 | -17.875.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Tersalurnya kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | | | | - | 100 % | 506.207.240.800,00 | 505.857.240.800,00 | 502.786.729.000,00 | -3.420.511.800,00 | | | - | - | Seluruh OPD dan Desa Se-Kabupaten Tegal | | 489.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 456.015.091.500,00 | 455.665.091.500,00 | 471.386.729.000,00 | 15.371.637.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 437.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | -4.500.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.192.149.300,00 | 40.192.149.300,00 | 25.900.000.000,00 | -14.292.149.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 42.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu** | | | | **-** | **75 %** | **2.724.900.000,00** | **2.724.900.000,00** | **2.396.654.400,00** | **-125.000.000,00** | | | | | | | **2.599.900.000,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase Terlaksananya Pengelolaan BMD* | | | | - | 100 % | 2.724.900.000,00 | 2.724.900.000,00 | 2.396.654.400,00 | -328.245.600,00 | | | - | - | Seluruh OPD se-Kabupaten Tegal | | 2.599.900.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 171.597.350,00 | -28.402.650,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 289.900.000,00 | 289.900.000,00 | 234.011.000,00 | -55.889.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 289.900.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 264.058.800,00 | 39.058.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 225.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 470.606.500,00 | 195.606.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 275.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 148.498.300,00 | -11.501.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 176.020.000,00 | 26.020.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.295.000.000,00 | 1.295.000.000,00 | 898.609.950,00 | -396.390.050,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.170.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 144 Orang | 144 Orang | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 33.252.500,00 | -96.747.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **20.427.915.000,00** | **20.427.915.000,00** | **20.026.176.698,00** | **-401.738.302,00** | | | | | | | **28.512.501.400,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **20.427.915.000,00** | **20.427.915.000,00** | **20.026.176.698,00** | **-401.738.302,00** | | | | | | | **28.512.501.400,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **20.427.915.000,00** | **20.427.915.000,00** | **20.026.176.698,00** | **-401.738.302,00** | | | | | | | **28.512.501.400,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **16.591.382.000,00** | **16.591.382.000,00** | **16.763.906.948,00** | **3.841.119.400,00** | | | | | | | **20.432.501.400,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.170.000,00 | -9.830.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 65.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 24.125.000,00 | -5.875.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.045.000,00 | -3.955.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.853.967.000,00 | 14.853.967.000,00 | 14.748.767.000,00 | -105.200.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 16.662.501.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 48 Orang/bulan | 48 Orang/bulan | 14.693.247.000,00 | 14.693.247.000,00 | 14.590.847.000,00 | -102.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.462.501.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 134.760.000,00 | 134.760.000,00 | 134.760.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.960.000,00 | 18.960.000,00 | 18.960.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 71.001.337,00 | -3.998.663,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 71.001.337,00 | -3.998.663,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 290.967.000,00 | 290.967.000,00 | 218.018.125,00 | -72.948.875,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 530.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.499.500,00 | -500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 84.999.625,00 | -375,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.467.000,00 | 13.467.000,00 | 13.467.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 32.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.050.000,00 | -4.950.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 60.002.000,00 | -59.998.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 360.982.500,00 | 334.982.500,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | Masyarakat dan ASN | | 1.200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 316.262.500,00 | 316.262.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 350.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 44.720.000,00 | 18.720.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 650.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 0,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 982.325.000,00 | 982.325.000,00 | 1.011.849.736,00 | 29.524.736,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 1.085.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 246.485.000,00 | 246.485.000,00 | 276.009.736,00 | 29.524.736,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 325.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 731.340.000,00 | 731.340.000,00 | 731.340.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 750.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 323.123.000,00 | 323.123.000,00 | 323.118.250,00 | -4.750,00 | | | - | - | Masyarakat dan ASN | | 790.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 102.150.000,00 | 102.150.000,00 | 102.147.775,00 | -2.225,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.999.975,00 | -25,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 115.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 70.973.000,00 | 70.973.000,00 | 70.970.500,00 | -2.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 75.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI JASA UMUM | - | - | | | 500.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah<br>Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah<br>Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah** | | | | **55<br>10<br>100 %<br>%<br>%** | **10<br>55<br>100 %<br>%<br>%** | **3.836.533.000,00** | **3.836.533.000,00** | **3.262.269.750,00** | **4.243.467.000,00** | | | | | | | **8.080.000.000,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | | | | - | - | 3.836.533.000,00 | 3.836.533.000,00 | 3.262.269.750,00 | -574.263.250,00 | | | - | - | Masyarakat | | 8.080.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 204.015.000,00 | -55.985.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 405.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 247.569.000,00 | -52.431.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 450.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 665.000.000,00 | 665.000.000,00 | 495.068.750,00 | -169.931.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 900.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 35000 Laporan | 35000 Laporan | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 539.480.500,00 | -260.519.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 156.476.250,00 | -43.523.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 250.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 9 Layanan | 9 Layanan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 48.819.500,00 | -26.180.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 287 Desa Dokumen | 287 Desa Dokumen | 1.186.533.000,00 | 1.186.533.000,00 | 1.278.700.750,00 | 92.167.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 2.000.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 75.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 136.090.000,00 | -63.910.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 700.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 131.050.000,00 | -18.950.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 800.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) | - | - | | | 300.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **11.651.620.000,00** | **11.651.620.000,00** | **10.981.378.546,00** | **-670.241.454,00** | | | | | | | **12.671.341.600,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **11.651.620.000,00** | **11.651.620.000,00** | **10.981.378.546,00** | **-670.241.454,00** | | | | | | | **12.671.341.600,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **8.131.244.000,00** | **8.131.244.000,00** | **7.770.171.546,00** | **-361.072.454,00** | | | | | | | **7.635.091.600,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.881.486.400,00** | **5.881.486.400,00** | **5.888.898.246,00** | **-839.159.800,00** | | | | | | | **5.042.326.600,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia* | | | | 2 subkegiatan | 100 Persen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 34.243.500,00 | -30.756.500,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 56.076.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.300.000,00 | 300.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 3.943.500,00 | -31.056.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 28.576.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan* | | | | 2 subkegiatan | 100 Persen | 4.170.354.000,00 | 4.170.354.000,00 | 4.134.820.146,00 | -35.533.854,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 3.957.818.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 812 Orang/ bulan | 812 Orang/ bulan | 4.086.054.000,00 | 4.086.054.000,00 | 4.053.654.000,00 | -32.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.902.818.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 84.300.000,00 | 84.300.000,00 | 81.166.146,00 | -3.133.854,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek* | | | | 1 subkegiatan | 100 Persen | 71.174.400,00 | 71.174.400,00 | 10.076.500,00 | -61.097.900,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 58 Orang | 58 Orang | 71.174.400,00 | 71.174.400,00 | 10.076.500,00 | -61.097.900,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah subkegiatan terlaksana* | | | | 6 subkegiatan | 6 subkegiatan | 272.500.000,00 | 272.500.000,00 | 221.087.500,00 | -51.412.500,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 195.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 19.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 12.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.991.500,00 | -8.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 33.885.000,00 | -1.115.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.670.000,00 | -3.330.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK REKLAME | - | - | | | 7.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 94.041.000,00 | -55.959.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK REKLAME | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah subkegiatan terlaksana* | | | | 4 subkegiatan | 3 Persen | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 524.178.000,00 | 194.178.000,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 335.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 290.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 45.180.000,00 | 15.180.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 281.348.000,00 | 181.348.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 197.650.000,00 | -2.350.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang urusan yang terbayar* | | | | 2 subkegiatan | 100 Persen | 527.458.000,00 | 527.458.000,00 | 539.378.850,00 | 11.920.850,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 277.458.000,00 | 277.458.000,00 | 289.378.850,00 | 11.920.850,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah subkegiatan terlaksana* | | | | 3 subkegiatan | 3 subkegiatan | 445.000.000,00 | 445.000.000,00 | 425.113.750,00 | -19.886.250,00 | | | - | - | ASN BKPSDM | | 223.432.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 175.225.350,00 | -19.774.650,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 125.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 58 Unit | 58 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 49.987.900,00 | -12.100,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 45.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.900.500,00 | -99.500,00 | Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 53.432.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Persentase Jabatan manajerial terisi<br>Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi<br>Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan<br>Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)<br>Rasio pegawai fungsional (%)** | | | | **0.05<br>96,50<br>45,50<br>45.50<br>27,50<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **96,50<br>45,50<br>0.05<br>45.50<br>27,50<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **2.249.757.600,00** | **2.249.757.600,00** | **1.881.273.300,00** | **343.007.400,00** | | | | | | | **2.592.765.000,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *persentase formasi CASN terisi* | | | | 5 subkegiatan | 100 Persen | 1.104.757.600,00 | 1.104.757.600,00 | 1.058.142.500,00 | -46.615.100,00 | | | - | - | Masyarakat | | 1.215.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 38.305.000,00 | -55.695.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 398.757.600,00 | 398.757.600,00 | 387.161.800,00 | -11.595.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 860.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 674 Dokumen | 674 Dokumen | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 67.803.700,00 | -44.196.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 222.500.000,00 | 72.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 205.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 342.372.000,00 | -7.628.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi* | | | | 3 subkegiatan | 98,15 Persen | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 254.754.500,00 | -125.245.500,00 | | | - | - | PNS | | 634.765.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 40.156.000,00 | -19.844.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 1500 Dokumen | 1500 Dokumen | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 74.666.500,00 | -45.333.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 109.765.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 139.932.000,00 | -60.068.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 465.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Persentase PNS mengikuti uji potensi dan uji kompetensi* | | | | 5 subkegiatan | 2,56 Persen | 385.000.000,00 | 385.000.000,00 | 298.006.300,00 | -86.993.700,00 | | | - | - | PNS | | 380.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | 173.824.000,00 | -46.176.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 210.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 43.505.000,00 | -11.495.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.245.750,00 | -6.754.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Fungsional yang Dibina* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.172.250,00 | -6.827.750,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 35 Orang | 35 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 44.259.300,00 | -15.740.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Persentase PNS melaporkan penilaian kinerjanya melalui kinerja BKN* | | | | 8 subkegiatan | 100 Persen | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 270.370.000,00 | -109.630.000,00 | | | - | - | ASN KAB. TEGAL | | 363.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 24.700.000,00 | -10.300.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 8500 Dokumen | 8500 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.250.000,00 | -6.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 450 Orang | 450 Orang | 247.000.000,00 | 247.000.000,00 | 187.417.500,00 | -59.582.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 210.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.037.500,00 | -4.962.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 15.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 19.550.000,00 | -13.450.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 40.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 43 Laporan | 43 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 17.750.000,00 | -7.250.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.665.000,00 | -2.335.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 7.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **3.520.376.000,00** | **3.520.376.000,00** | **3.211.207.000,00** | **-309.169.000,00** | | | | | | | **5.036.250.000,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase ASN mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda** | | | | **60,5 Persen** | **60,5 Persen** | **3.520.376.000,00** | **3.520.376.000,00** | **3.211.207.000,00** | **1.515.874.000,00** | | | | | | | **5.036.250.000,00** | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM* | | | | 3 subkegiatan | 7,81 Persen | 963.020.000,00 | 963.020.000,00 | 822.797.000,00 | -140.223.000,00 | | | - | - | ASN KAB. TEGAL | | 1.520.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 9.396.500,00 | -5.603.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 65.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 933.020.000,00 | 933.020.000,00 | 805.790.500,00 | -127.229.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 1.425.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.610.000,00 | -7.390.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar* | | | | 100 Persen 3 subkegiatan | 100 Persen | 2.557.356.000,00 | 2.557.356.000,00 | 2.388.410.000,00 | -168.946.000,00 | | | - | - | ASN KAB. TEGAL | | 3.516.250.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.620.000,00 | -7.380.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 2.527.356.000,00 | 2.527.356.000,00 | 2.372.498.000,00 | -154.858.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 3.481.250.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.292.000,00 | -6.708.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **11.143.018.900,00** | **11.143.018.900,00** | **10.569.448.232,00** | **-6.038.018.900,00** | | | | | | | **5.105.000.000,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evauasi Kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 41.363.125,00 | -33.636.875,00 | | | - | - | Inspektorat Kabupaten Tegal | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 32.823.750,00 | -27.176.250,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 75.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.539.375,00 | -6.460.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.746.959.152,00 | 4.746.959.152,00 | 4.783.899.152,00 | 36.940.000,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 58 Orang/bulan | 58 Orang/bulan | 4.661.959.152,00 | 4.661.959.152,00 | 4.699.959.152,00 | 38.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 83.940.000,00 | -1.060.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.191.535.625,00 | -308.464.375,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal | | 1.500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.191.535.625,00 | -308.464.375,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA | - | - | | | 1.500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 990.000.000,00 | 990.000.000,00 | 719.017.505,00 | -270.982.495,00 | | | - | - | Inspektorat Kabupaten Tegal | | 970.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 54.999.835,00 | -15.000.165,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 70.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 93.309.350,00 | -6.690.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 77.305.515,00 | 7.305.515,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 138.450.000,00 | -11.550.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 254.952.805,00 | -195.047.195,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.226.059.748,00 | 2.226.059.748,00 | 2.225.536.686,00 | -523.062,00 | | | - | - | Inspektorat Kabupaten Tegal | | 950.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 776.774.000,00 | 776.774.000,00 | 776.562.000,00 | -212.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 486.059.748,00 | 486.059.748,00 | 486.027.686,00 | -32.062,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 963.226.000,00 | 963.226.000,00 | 962.947.000,00 | -279.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 805.000.000,00 | 805.000.000,00 | 808.728.439,00 | 3.728.439,00 | | | - | - | Inspektorat Kabupaten Tegal | | 710.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 370.000.000,00 | 372.920.939,00 | 372.920.939,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | **6** | **NON URUSAN** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | **6.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **14.798.018.900,00** | **14.798.018.900,00** | **13.350.981.407,00** | **-1.447.037.493,00** | | | | | | | **8.760.000.000,00** | |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 425.807.500,00 | 807.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 799.367.700,00 | -632.300,00 | | | - | - | Inspektorat Kabupaten Tegal | | 800.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 29 Unit | 29 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.992.825,00 | -7.175,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 90 Unit | 90 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.887.375,00 | -112.625,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 299.487.500,00 | -512.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 1. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase pengawasan kinerja pemerintah daerah<br>Persentase tindak lanjut hasil pengawasan<br>Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel<br>Persentase desa menyajikan laporan keuangan secara akuntabel** | | | | **80<br>92.50<br>80<br>15 %<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **80<br>92.50<br>80<br>15 %<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **2.560.000.000,00** | **2.560.000.000,00** | **1.788.785.675,00** | **0,00** | | | | | | | **2.560.000.000,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal* | | | | 213 lapoan | 213 lapoan | 1.860.000.000,00 | 1.860.000.000,00 | 1.305.353.175,00 | -554.646.825,00 | | | - | - | OPD dan Desa | | 1.860.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 59 Laporan | 59 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 27.612.500,00 | -22.387.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 111.624.975,00 | -88.375.025,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 135.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 27.187.500,00 | -22.812.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 84 Laporan | 84 Laporan | 1.435.000.000,00 | 1.435.000.000,00 | 1.076.303.200,00 | -358.696.800,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 62.625.000,00 | -62.375.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 125.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 483.432.500,00 | -216.567.500,00 | | | - | - | OPD, Desa dan Masyarakat | | 700.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 483.432.500,00 | -216.567.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 700.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan<br>Persentase meningkatnya kualitas pendampingan pengawasan dan asistensi** | | | | **100<br>80 Persen<br>Persen** | **100<br>80 Persen<br>Persen** | **1.095.000.000,00** | **1.095.000.000,00** | **992.747.500,00** | **0,00** | | | | | | | **1.095.000.000,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 100.505.000,00 | -94.495.000,00 | | | - | - | OPD | | 195.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 42.162.500,00 | -32.837.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 75.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 58.342.500,00 | -61.657.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 120.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | | | | - | - | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 892.242.500,00 | -7.757.500,00 | | | - | - | OPD dan Masyarakat | | 900.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 48 perangkat daerah | 48 perangkat daerah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 114.600.000,00 | -85.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 13 perangkat daerah | 13 perangkat daerah | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | 222.972.500,00 | -67.027.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 290.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 29 Kegiatan | 29 Kegiatan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 549.670.000,00 | 149.670.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 0 perangkat daerah | 0 perangkat daerah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) | - | - | | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN ADIWERNA** | | | | | | | **2.891.460.500,00** | **2.891.460.500,00** | **2.685.525.500,00** | **-205.935.000,00** | | | | | | | **2.881.365.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.891.460.500,00** | **2.891.460.500,00** | **2.685.525.500,00** | **-205.935.000,00** | | | | | | | **2.881.365.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.891.460.500,00** | **2.891.460.500,00** | **2.685.525.500,00** | **-205.935.000,00** | | | | | | | **2.881.365.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan** | | | | **100 persentase** | **100 persentase** | **2.531.187.500,00** | **2.531.187.500,00** | **2.402.922.500,00** | **-56.822.500,00** | | | | | | | **2.474.365.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.704.000,00 | 6.704.000,00 | 4.429.400,00 | -2.274.600,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 10.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 4.313.000,00 | 4.313.000,00 | 3.149.000,00 | -1.164.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 | 1.280.400,00 | -1.110.600,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu<br>Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu<br>Jumlah dokumen pengelolaan keuangan di susun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 100 persentase 12 Dokumen | 100 persentase 12 Dokumen | 1.620.238.500,00 | 1.620.238.500,00 | 1.548.538.500,00 | -71.700.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 1.760.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 1.565.728.500,00 | 1.565.728.500,00 | 1.494.028.500,00 | -71.700.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.700.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 0 | 12 0 | 54.510.000,00 | 54.510.000,00 | 54.510.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 46.350.000,00 | 46.350.000,00 | 46.350.000,00 | 0,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 46.350.000,00 | 46.350.000,00 | 46.350.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 157.481.500,00 | 157.481.500,00 | 103.903.600,00 | -53.577.900,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 183.735.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.423.000,00 | 5.423.000,00 | 5.423.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.585.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.784.000,00 | 18.784.000,00 | 18.784.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 19.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.227.500,00 | 11.227.500,00 | 11.227.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 42.874.000,00 | 42.874.000,00 | 23.770.000,00 | -19.104.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 53.510.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.469.000,00 | 10.469.000,00 | 7.824.100,00 | -2.644.900,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.640.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 622 Laporan | 622 Laporan | 66.064.000,00 | 66.064.000,00 | 34.235.000,00 | -31.829.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD ( jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 364.162.000,00 | 364.162.000,00 | 363.449.500,00 | -712.500,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 80.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 53.430.000,00 | 53.430.000,00 | 52.717.500,00 | -712.500,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 140.986.000,00 | 140.986.000,00 | 140.986.000,00 | 0,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 143.630.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 52.356.000,00 | 52.356.000,00 | 52.356.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 87.530.000,00 | 87.530.000,00 | 87.530.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 87.530.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 195.265.500,00 | 195.265.500,00 | 195.265.500,00 | 0,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 247.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 86.824.500,00 | 86.824.500,00 | 86.824.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 6.230.000,00 | 6.230.000,00 | 6.230.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 102.211.000,00 | 102.211.000,00 | 102.211.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Prosentase Peningkatan Nilai IKM Kecamatan** | | | | **81,00 persentase** | **81,00 persentase** | **47.231.000,00** | **47.231.000,00** | **45.559.000,00** | **11.269.000,00** | | | | | | | **58.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 44.981.000,00 | 44.981.000,00 | 44.709.000,00 | -272.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 55.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 44.981.000,00 | 44.981.000,00 | 44.709.000,00 | -272.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Desa yang lunas PBB*<br>*Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur*<br>*Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksanakan* | | | | 100 persentase<br>12 Dokumen<br>21 desa | 100 persentase<br>12 Dokumen<br>21 desa | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 850.000,00 | -1.400.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 3.500.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 850.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase desa mandiri dan maju Kecamatan Adiwerna**<br>**Persentase desa maju Kecamatan Adiwerna** | | | | **4,76 14,29 persentase persentase** | **4,76 14,29 persentase persentase** | **78.999.000,00** | **78.999.000,00** | **55.442.000,00** | **16.001.000,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data perkembangan desa* | | | | 52,38 persentase | 52,38 persentase | 78.999.000,00 | 78.999.000,00 | 55.442.000,00 | -23.557.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 95.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 34.470.000,00 | 34.470.000,00 | 31.370.000,00 | -3.100.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.324.000,00 | 3.324.000,00 | 1.950.000,00 | -1.374.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 41.205.000,00 | 41.205.000,00 | 22.122.000,00 | -19.083.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Prosentase desa yang difasilitasi penanggulangan bencana** | | | | **100 persentase** | **100 persentase** | **8.516.000,00** | **8.516.000,00** | **3.564.000,00** | **1.484.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 21 desa | 21 desa | 3.186.000,00 | 3.186.000,00 | 1.054.000,00 | -2.132.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 4.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 3.186.000,00 | 3.186.000,00 | 1.054.000,00 | -2.132.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan* | | | | 100 persentase 12 Laporan | 100 persentase 12 Laporan | 5.330.000,00 | 5.330.000,00 | 2.510.000,00 | -2.820.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 6.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.330.000,00 | 5.330.000,00 | 2.510.000,00 | -2.820.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum** | | | | **100 persentase** | **100 persentase** | **154.227.000,00** | **154.227.000,00** | **135.461.000,00** | **4.273.000,00** | | | | | | | **158.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 154.227.000,00 | 154.227.000,00 | 135.461.000,00 | -18.766.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 158.500.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 97.239.000,00 | 97.239.000,00 | 82.199.000,00 | -15.040.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 21 Orang | 21 Orang | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 1.830.000,00 | -990.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 54.168.000,00 | 54.168.000,00 | 51.432.000,00 | -2.736.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Prosentase Desa yang tertib administrasi** | | | | **100 persentase** | **100 persentase** | **71.300.000,00** | **71.300.000,00** | **42.577.000,00** | **13.700.000,00** | | | | | | | **85.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang tertib administrasi* | | | | 100 persentase | 100 persentase | 71.300.000,00 | 71.300.000,00 | 42.577.000,00 | -28.723.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah | | 85.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.800.000,00 | -4.200.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 24.217.000,00 | -5.783.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 12.560.000,00 | -18.740.000,00 | Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN ADIWERNA |
| | | **KECAMATAN BALAPULANG** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.665.175.018,00** | **2.665.175.018,00** | **2.602.583.518,00** | **-537.771.618,00** | | | | | | | **2.127.403.400,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.424.000,00 | 8.424.000,00 | 6.090.000,00 | -2.334.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 13.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.804.000,00 | 6.804.000,00 | 4.680.000,00 | -2.124.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.410.000,00 | -210.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.390.126.728,00 | 1.390.126.728,00 | 1.360.650.728,00 | -29.476.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 1.074.379.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.312.246.728,00 | 1.312.246.728,00 | 1.282.796.728,00 | -29.450.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 995.379.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 77.880.000,00 | 77.880.000,00 | 77.854.000,00 | -26.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 79.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | 3.980.000,00 | -1.980.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 5.960.000,00 | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | - | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 104.747.900,00 | 104.747.900,00 | 86.044.900,00 | -18.703.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 105.302.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.678.000,00 | 3.678.000,00 | 3.678.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.800.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.326.100,00 | 27.326.100,00 | 27.098.600,00 | -227.500,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 26.102.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 5.674.800,00 | 5.674.800,00 | 5.674.800,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.022.978.800,00** | **3.022.978.800,00** | **2.890.724.218,00** | **-132.254.582,00** | | | | | | | **2.557.627.000,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.992.000,00 | 25.992.000,00 | 25.992.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 28.264.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.726.000,00 | 7.726.000,00 | 5.794.500,00 | -1.931.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.620.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.951.000,00 | 31.951.000,00 | 15.407.000,00 | -16.544.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 29.116.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 423.052.540,00 | 423.052.540,00 | 431.202.540,00 | 8.150.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 395.732.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 345.019.500,00 | 345.019.500,00 | 345.019.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 310.732.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 78.033.040,00 | 78.033.040,00 | 86.183.040,00 | 8.150.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 233.408.000,00 | 233.408.000,00 | 207.008.000,00 | -26.400.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 223.730.400,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.200.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 45.728.000,00 | 45.728.000,00 | 45.728.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.630.400,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 186.580.000,00 | 186.580.000,00 | 160.180.000,00 | -26.400.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 185.900.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 465.629.850,00 | 465.629.850,00 | 468.129.850,00 | 2.500.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 277.260.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 59.499.850,00 | 59.499.850,00 | 61.999.850,00 | 2.500.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.500.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.760.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 33.826.000,00 | 33.826.000,00 | 39.477.500,00 | 5.651.500,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.826.000,00 | 33.826.000,00 | 39.477.500,00 | 5.651.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **55.512.310,00** | **55.512.310,00** | **49.927.500,00** | **25.850.190,00** | | | | | | | **81.362.500,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 40.622.310,00 | 40.622.310,00 | 38.787.500,00 | -1.834.810,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 71.122.500,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.217.810,00 | 8.217.810,00 | 6.383.000,00 | -1.834.810,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.404.500,00 | 32.404.500,00 | 32.404.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 63.122.500,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 11.140.000,00 | -3.750.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 10.240.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 11.140.000,00 | -3.750.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.240.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **92.055.072,00** | **92.055.072,00** | **72.168.300,00** | **46.293.528,00** | | | | | | | **138.348.600,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 92.055.072,00 | 92.055.072,00 | 72.168.300,00 | -19.886.772,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 138.348.600,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 22.860.000,00 | 22.860.000,00 | 20.610.000,00 | -2.250.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.640.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 6.344.900,00 | -1.795.100,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.075.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.055.072,00 | 61.055.072,00 | 45.213.400,00 | -15.841.672,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 104.633.600,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.364.900,00** | **25.364.900,00** | **18.074.900,00** | **-1.764.900,00** | | | | | | | **23.600.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 11.444.900,00 | 11.444.900,00 | 10.214.900,00 | -1.230.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 18.220.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.444.900,00 | 11.444.900,00 | 10.214.900,00 | -1.230.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.220.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 13.920.000,00 | 13.920.000,00 | 7.860.000,00 | -6.060.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 5.380.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.920.000,00 | 13.920.000,00 | 7.860.000,00 | -6.060.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.380.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **118.071.500,00** | **118.071.500,00** | **107.240.000,00** | **-6.071.500,00** | | | | | | | **112.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 118.071.500,00 | 118.071.500,00 | 107.240.000,00 | -10.831.500,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 112.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 56.727.500,00 | 56.727.500,00 | 56.660.000,00 | -67.500,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.344.000,00 | 61.344.000,00 | 50.580.000,00 | -10.764.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **66.800.000,00** | **66.800.000,00** | **40.730.000,00** | **8.112.500,00** | | | | | | | **74.912.500,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 66.800.000,00 | 66.800.000,00 | 40.730.000,00 | -26.070.000,00 | | | - | - | Kecamatan Balapulang | | 74.912.500,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.740.000,00 | 15.740.000,00 | 11.765.000,00 | -3.975.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.185.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.210.000,00 | 34.210.000,00 | 18.265.000,00 | -15.945.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 37.727.500,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.850.000,00 | 16.850.000,00 | 10.700.000,00 | -6.150.000,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BALAPULANG |
| | | **KECAMATAN BOJONG** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.535.065.700,00** | **2.535.065.700,00** | **2.463.160.625,00** | **-703.796.700,00** | | | | | | | **1.831.269.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.820.975,00 | -5.179.025,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 12.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.054.800,00 | -2.945.200,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.766.175,00 | -2.233.825,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.594.087.200,00 | 1.594.087.200,00 | 1.577.687.200,00 | -16.400.000,00 | | | - | - | ASN Kecamatan Bojong | | 1.225.439.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.531.037.200,00 | 1.531.037.200,00 | 1.514.637.200,00 | -16.400.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.170.779.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 63.050.000,00 | 63.050.000,00 | 63.050.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 54.660.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 53.881.000,00 | 53.881.000,00 | 0,00 | -53.881.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 22 Orang | 22 Orang | 53.881.000,00 | 53.881.000,00 | 0,00 | -53.881.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.972.500,00 | 105.972.500,00 | 88.717.350,00 | -17.255.150,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 153.900.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.871.000,00 | 6.871.000,00 | 6.871.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.548.000,00 | 24.548.000,00 | 22.964.000,00 | -1.584.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Bojong | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 24.900.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.535.000,00 | 5.535.000,00 | 5.535.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.530.000,00 | 13.530.000,00 | 13.530.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 2.535.000,00 | -1.080.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.033.500,00 | 48.033.500,00 | 33.442.350,00 | -14.591.150,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 384.767.000,00 | 384.767.000,00 | 408.235.000,00 | 23.468.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 92.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 51.335.000,00 | 51.335.000,00 | 74.803.000,00 | 23.468.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 62.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.896.769.200,00** | **2.896.769.200,00** | **2.753.981.975,00** | **-142.787.225,00** | | | | | | | **2.206.269.000,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 156.460.800,00 | 156.460.800,00 | 156.460.800,00 | 0,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 158.930.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.530.800,00 | 35.530.800,00 | 35.530.800,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.930.000,00 | 120.930.000,00 | 120.930.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 120.930.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam Kondisi Baik* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 229.897.200,00 | 229.897.200,00 | 227.239.300,00 | -2.657.900,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 139.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 94.357.200,00 | 94.357.200,00 | 94.357.200,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 129.980.000,00 | 129.980.000,00 | 127.322.100,00 | -2.657.900,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Bojong** | | | | **90,83 Persen** | **90,83 Persen** | **63.678.000,00** | **63.678.000,00** | **52.798.600,00** | **2.322.000,00** | | | | | | | **66.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan kegiatan layanan Publik Terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 54.540.000,00 | 54.540.000,00 | 48.418.600,00 | -6.121.400,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 54.540.000,00 | 54.540.000,00 | 48.418.600,00 | -6.121.400,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.138.000,00 | 9.138.000,00 | 4.380.000,00 | -4.758.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.138.000,00 | 9.138.000,00 | 4.380.000,00 | -4.758.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **90.253.200,00** | **90.253.200,00** | **67.095.775,00** | **4.246.800,00** | | | | | | | **94.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa* | | | | 17 Desa | 17 Desa | 90.253.200,00 | 90.253.200,00 | 67.095.775,00 | -23.157.425,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 94.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 27.423.400,00 | 27.423.400,00 | 22.563.400,00 | -4.860.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 2.010.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 59.469.800,00 | 59.469.800,00 | 42.522.375,00 | -16.947.425,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 58.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **8.020.000,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **17.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Desa Terfasilitasi Penanggulangan Bencana* | | | | 17 Desa | 17 Desa | 9.055.000,00 | 9.055.000,00 | 4.930.000,00 | -4.125.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.055.000,00 | 9.055.000,00 | 4.930.000,00 | -4.125.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 3.090.000,00 | -2.855.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 3.090.000,00 | -2.855.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **139.392.300,00** | **139.392.300,00** | **131.863.300,00** | **-1.892.300,00** | | | | | | | **137.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 139.392.300,00 | 139.392.300,00 | 131.863.300,00 | -7.529.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 137.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 81.588.300,00 | 81.588.300,00 | 79.668.300,00 | -1.920.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 | 1.915.000,00 | -1.895.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 53.994.000,00 | 53.994.000,00 | 50.280.000,00 | -3.714.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.500.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase rata-rata tertib administrasi desa Kecamatan Bojong** | | | | **72 Persen** | **72 Persen** | **53.380.000,00** | **53.380.000,00** | **31.043.675,00** | **6.620.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa Tertib Administrasi* | | | | 17 Desa | 17 Desa | 53.380.000,00 | 53.380.000,00 | 31.043.675,00 | -22.336.325,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.780.000,00 | 9.780.000,00 | 6.733.675,00 | -3.046.325,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 15.430.000,00 | -10.770.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 4.385.000,00 | -5.015.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.495.000,00 | -3.505.000,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BOJONG |
| | | **KECAMATAN BUMIJAWA** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.343.060.000,00** | **2.343.060.000,00** | **2.484.619.500,00** | **-1.761.060.000,00** | | | | | | | **582.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.739.500,00 | -3.260.500,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 3.624.500,00 | -2.371.500,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.996.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.004.000,00 | 4.004.000,00 | 3.115.000,00 | -889.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.004.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.503.248.000,00 | 1.503.248.000,00 | 1.673.348.000,00 | 170.100.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 0,00 | 1.450.328.000,00 | 1.620.428.000,00 | 1.620.428.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.920.000,00 | 52.920.000,00 | 52.920.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 70.326.000,00 | 70.326.000,00 | 0,00 | -70.326.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 72.066.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 70.326.000,00 | 70.326.000,00 | 0,00 | -70.326.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 72.066.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 133.214.000,00 | 133.214.000,00 | 131.216.000,00 | -1.998.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 132.194.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.388.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.812.900,00 | 24.812.900,00 | 24.812.900,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 24.812.900,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.001.700,00 | 5.001.700,00 | 5.001.700,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.001.700,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 53.504.000,00 | 53.504.000,00 | 53.504.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 53.504.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.440.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.600.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 35.467.400,00 | 33.469.400,00 | 33.469.400,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 34.447.400,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 384.374.000,00 | 384.374.000,00 | 379.618.000,00 | -4.756.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 78.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 29.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 40.642.000,00 | 40.642.000,00 | 39.886.000,00 | -756.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 150.060.000,00 | 150.060.000,00 | 150.060.000,00 | 0,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 137.902.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.640.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.731.060.000,00** | **2.731.060.000,00** | **2.815.001.500,00** | **83.941.500,00** | | | | | | | **970.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.160.000,00 | 28.160.000,00 | 28.160.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.142.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 119.260.000,00 | 119.260.000,00 | 119.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 115.120.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 91.838.000,00 | 91.838.000,00 | 143.638.000,00 | 51.800.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 91.838.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 76.738.000,00 | 76.738.000,00 | 76.738.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 76.738.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.100.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 59.800.000,00 | 51.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **67.500.000,00** | **67.500.000,00** | **61.242.500,00** | **0,00** | | | | | | | **67.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 56.030.000,00 | -2.470.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 58.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 56.030.000,00 | -2.470.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 58.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.212.500,00 | -3.787.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.212.500,00 | -3.787.500,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **85.500.000,00** | **85.500.000,00** | **71.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **85.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa* | | | | 18 Desa | 18 Desa | 85.500.000,00 | 85.500.000,00 | 71.000.000,00 | -14.500.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 85.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 31.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.215.000,00 | -2.285.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | 37.285.000,00 | -12.215.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 49.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **19.000.000,00** | **19.000.000,00** | **11.070.000,00** | **0,00** | | | | | | | **19.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 18 Desa | 18 Desa | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 7.830.000,00 | -6.670.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 14.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 7.830.000,00 | -6.670.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.240.000,00 | -1.260.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.240.000,00 | -1.260.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **161.000.000,00** | **161.000.000,00** | **149.499.600,00** | **0,00** | | | | | | | **161.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 149.499.600,00 | -11.500.400,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 161.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 95.189.800,00 | -6.310.200,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 101.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.823.800,00 | -2.676.200,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 52.486.000,00 | -2.514.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa** | | | | **65 Persen** | **65 Persen** | **55.000.000,00** | **55.000.000,00** | **37.569.900,00** | **0,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 37.569.900,00 | -17.430.100,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Bumijawa | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.029.500,00 | -3.970.500,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 19.346.000,00 | -7.654.000,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.419.400,00 | -1.580.600,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.775.000,00 | -4.225.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN BUMIJAWA |
| | | **KECAMATAN DUKUHTURI** | | | | | | | **2.895.962.000,00** | **2.895.962.000,00** | **2.483.250.100,00** | **-412.711.900,00** | | | | | | | **1.095.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.895.962.000,00** | **2.895.962.000,00** | **2.483.250.100,00** | **-412.711.900,00** | | | | | | | **1.095.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.895.962.000,00** | **2.895.962.000,00** | **2.483.250.100,00** | **-412.711.900,00** | | | | | | | **1.095.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.432.963.000,00** | **2.432.963.000,00** | **2.143.561.800,00** | **-1.813.963.000,00** | | | | | | | **619.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 12.060.000,00 | 12.060.000,00 | 3.852.500,00 | -8.207.500,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.515.000,00 | 5.515.000,00 | 1.466.400,00 | -4.048.600,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.545.000,00 | 6.545.000,00 | 2.386.100,00 | -4.158.900,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 1.668.150.000,00 | 1.668.150.000,00 | 1.421.250.000,00 | -246.900.000,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1.615.230.000,00 | 1.615.230.000,00 | 1.368.330.000,00 | -246.900.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 52.920.000,00 | 52.920.000,00 | 52.920.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai yang terlayani* | | | | 18 orang | 18 orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 0,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Paket kegiatan administrasi umum Kantor yang Disediakan* | | | | 7 paket | 7 paket | 138.191.000,00 | 138.191.000,00 | 105.047.500,00 | -33.143.500,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 134.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.363.000,00 | 4.363.000,00 | 4.363.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.447.000,00 | 17.447.000,00 | 17.447.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.376.000,00 | 9.376.000,00 | 9.376.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48.370.000,00 | 48.370.000,00 | 40.778.000,00 | -7.592.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 46.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.888.000,00 | 7.888.000,00 | 5.916.000,00 | -1.972.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 4.224.000,00 | 4.224.000,00 | 4.224.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 46.523.000,00 | 46.523.000,00 | 22.943.500,00 | -23.579.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 356.672.000,00 | 356.672.000,00 | 356.672.000,00 | 0,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 85.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 45.940.000,00 | 45.940.000,00 | 45.940.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 93.844.000,00 | 93.844.000,00 | 91.564.000,00 | -2.280.000,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 135.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.194.000,00 | 31.194.000,00 | 31.194.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 58.720.000,00 | -2.280.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD yang terpelihara* | | | | 3 jenis | 3 jenis | 164.046.000,00 | 164.046.000,00 | 165.175.800,00 | 1.129.800,00 | | | - | - | Aparatur Kecamatan Dukuhturi | | 190.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 53.696.000,00 | 53.696.000,00 | 55.560.800,00 | 1.864.800,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 99.265.000,00 | -735.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Dukuhturi** | | | | **80,44 %** | **80,44 %** | **74.500.000,00** | **74.500.000,00** | **62.502.300,00** | **20.500.000,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat* | | | | 80,44 % | 80,44 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 48.867.300,00 | -1.132.700,00 | | | - | - | Masyarakat Kecamatan Dukuhturi | | 65.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 48.867.300,00 | -1.132.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Prosentase Desa lunas PBB* | | | | 73 % | 73 % | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 13.635.000,00 | -10.865.000,00 | | | - | - | Masyarakat | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 13.635.000,00 | -10.865.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi** | | | | **71 %** | **71 %** | **115.355.000,00** | **115.355.000,00** | **79.819.900,00** | **-3.355.000,00** | | | | | | | **112.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 115.355.000,00 | 115.355.000,00 | 79.819.900,00 | -35.535.100,00 | | | - | - | Masyarakat | | 112.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 35.355.000,00 | 35.355.000,00 | 31.064.900,00 | -4.290.100,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 48.755.000,00 | -31.245.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi** | | | | **100 %** | **100 %** | **146.976.000,00** | **146.976.000,00** | **132.687.200,00** | **3.024.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 146.976.000,00 | 146.976.000,00 | 132.687.200,00 | -14.288.800,00 | | | - | - | Masyarakat Kecamatan Dukuhturi | | 150.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 82.776.000,00 | 82.776.000,00 | 73.197.700,00 | -9.578.300,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 8.937.500,00 | -2.662.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | 50.552.000,00 | -2.048.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi** | | | | **72 %** | **72 %** | **126.168.000,00** | **126.168.000,00** | **64.678.900,00** | **-7.168.000,00** | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi* | | | | 18 desa | 18 desa | 126.168.000,00 | 126.168.000,00 | 64.678.900,00 | -61.489.100,00 | | | - | - | Pemerintah Desa Se-Kecamatan Dukuhturi | | 119.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 20.752.000,00 | 20.752.000,00 | 14.143.500,00 | -6.608.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 36.120.000,00 | 36.120.000,00 | 27.150.400,00 | -8.969.600,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 42.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 48.726.000,00 | 48.726.000,00 | 12.165.000,00 | -36.561.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 20.570.000,00 | 20.570.000,00 | 11.220.000,00 | -9.350.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHTURI |
| | | **KECAMATAN DUKUHWARU** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.261.466.300,00** | **2.261.466.300,00** | **1.915.734.300,00** | **-219.734.300,00** | | | | | | | **2.041.732.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.242.000,00 | -7.758.000,00 | | | - | - | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.121.000,00 | -3.879.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.121.000,00 | -3.879.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.510.734.300,00 | 1.510.734.300,00 | 1.201.314.300,00 | -309.420.000,00 | | | - | - | - | | 1.367.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.445.734.300,00 | 1.445.734.300,00 | 1.139.334.300,00 | -306.400.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.300.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 61.980.000,00 | -3.020.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 67.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 119.500.000,00 | 119.500.000,00 | 94.412.000,00 | -25.088.000,00 | | | - | - | - | | 56.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.996.550,00 | -3.450,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.939.175,00 | -60.825,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.723.775,00 | -276.225,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.002.500,00 | 4.002.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 26.250.000,00 | -23.750.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 395.732.000,00 | 395.732.000,00 | 394.849.500,00 | -882.500,00 | | | - | - | - | | 380.732.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 310.732.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 84.117.500,00 | -882.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 129.119.000,00 | -1.381.000,00 | | | - | - | - | | 116.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.000,00 | -5.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.004.000,00 | -996.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 0,00 | 100.000.000,00 | 99.620.000,00 | 99.620.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.606.466.300,00** | **2.606.466.300,00** | **2.197.585.050,00** | **-408.881.250,00** | | | | | | | **2.389.732.000,00** | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 93.797.500,00 | -1.202.500,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.917.500,00 | -82.500,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.608.000,00 | -392.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.272.000,00 | -728.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **63.000.000,00** | **63.000.000,00** | **58.248.000,00** | **12.000.000,00** | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 8.248.000,00 | -4.752.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 8.248.000,00 | -4.752.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **85.000.000,00** | **85.000.000,00** | **62.502.250,00** | **5.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 62.502.250,00 | -22.497.750,00 | | | - | - | - | | 90.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 17.230.000,00 | -2.770.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 45.272.250,00 | -19.727.750,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **6.925.000,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.175.000,00 | -1.825.000,00 | | | - | - | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.175.000,00 | -1.825.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.750.000,00 | -1.250.000,00 | | | - | - | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.750.000,00 | -1.250.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **112.000.000,00** | **112.000.000,00** | **105.000.500,00** | **-7.000.000,00** | | | | | | | **105.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 105.000.500,00 | -6.999.500,00 | | | - | - | - | | 105.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 53.359.500,00 | -6.640.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 51.641.000,00 | -359.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **75.000.000,00** | **75.000.000,00** | **49.175.000,00** | **-9.000.000,00** | | | | | | | **66.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 49.175.000,00 | -25.825.000,00 | | | - | - | - | | 66.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.360.000,00 | -9.640.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.515.000,00 | -6.485.000,00 | Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.300.000,00 | -9.700.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN DUKUHWARU |
| | | **KECAMATAN JATINEGARA** | | | | | | | **2.498.549.000,00** | **2.498.549.000,00** | **2.467.626.692,00** | **-30.922.308,00** | | | | | | | **2.460.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.498.549.000,00** | **2.498.549.000,00** | **2.467.626.692,00** | **-30.922.308,00** | | | | | | | **2.460.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.498.549.000,00** | **2.498.549.000,00** | **2.467.626.692,00** | **-30.922.308,00** | | | | | | | **2.460.500.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.094.049.000,00** | **2.094.049.000,00** | **2.149.464.292,00** | **-90.549.000,00** | | | | | | | **2.003.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.236.000,00 | -5.764.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 12.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.118.000,00 | -2.882.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.118.000,00 | -2.882.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Keuangan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.276.017.000,00 | 1.276.017.000,00 | 1.254.117.000,00 | -21.900.000,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 1.350.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.232.817.000,00 | 1.232.817.000,00 | 1.210.917.000,00 | -21.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.300.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum SKPD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 63.742.000,00 | -16.758.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 82.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.631.000,00 | -869.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 16.111.000,00 | -15.889.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 461.732.000,00 | 461.732.000,00 | 458.695.000,00 | -3.037.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 170.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 378.732.000,00 | 378.732.000,00 | 370.725.000,00 | -8.007.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 35.030.000,00 | 5.030.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 52.940.000,00 | -60.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 157.500.000,00 | 157.500.000,00 | 152.416.992,00 | -5.083.008,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 158.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.497.000,00 | -3.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.999.992,00 | -8,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 119.920.000,00 | -5.080.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 125.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 108.300.000,00 | 108.300.000,00 | 216.257.300,00 | 107.957.300,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 231.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 73.350.000,00 | 73.350.000,00 | 81.347.300,00 | 7.997.300,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.990.000,00 | -10.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.450.000,00 | 16.450.000,00 | 116.450.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.470.000,00 | -30.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **86.000.000,00** | **86.000.000,00** | **67.786.000,00** | **6.000.000,00** | | | | | | | **92.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 55.601.000,00 | -5.899.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 65.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 55.601.000,00 | -5.899.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 12.185.000,00 | -12.315.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 27.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 12.185.000,00 | -12.315.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara** | | | | **60 Persen** | **60 Persen** | **90.000.000,00** | **90.000.000,00** | **73.994.900,00** | **7.000.000,00** | | | | | | | **97.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data perkembangan desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 73.994.900,00 | -16.005.100,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 97.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 17 Lembaga Kemasyarakatan | 17 Lembaga Kemasyarakatan | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.595.000,00 | -1.405.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 51.399.900,00 | -14.600.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **3.465.000,00** | **0,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.465.000,00 | -2.535.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.465.000,00 | -2.535.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **139.500.000,00** | **139.500.000,00** | **124.121.500,00** | **-4.500.000,00** | | | | | | | **135.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 139.500.000,00 | 139.500.000,00 | 124.121.500,00 | -15.378.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 135.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 72.791.500,00 | -12.208.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.050.000,00 | -1.450.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 50.280.000,00 | -1.720.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara** | | | | **75 Persen** | **75 Persen** | **83.000.000,00** | **83.000.000,00** | **48.795.000,00** | **44.000.000,00** | | | | | | | **127.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa tertib administrasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 48.795.000,00 | -34.205.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara | | 127.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 7.575.000,00 | -8.425.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 14.030.000,00 | -14.970.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 20.725.000,00 | -2.275.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.965.000,00 | -3.035.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN JATINEGARA |
| | | **KECAMATAN KEDUNGBANTENG** | | | | | | | **2.858.764.400,00** | **2.858.764.400,00** | **2.660.884.900,00** | **-197.879.500,00** | | | | | | | **2.547.347.700,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.858.764.400,00** | **2.858.764.400,00** | **2.660.884.900,00** | **-197.879.500,00** | | | | | | | **2.547.347.700,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.858.764.400,00** | **2.858.764.400,00** | **2.660.884.900,00** | **-197.879.500,00** | | | | | | | **2.547.347.700,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.606.083.400,00** | **2.606.083.400,00** | **2.457.156.900,00** | **-333.026.200,00** | | | | | | | **2.273.057.200,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.819.100,00 | 14.819.100,00 | 8.542.100,00 | -6.277.000,00 | | | - | - | - | | 27.412.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.916.700,00 | 12.916.700,00 | 7.115.500,00 | -5.801.200,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 24.532.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 | 1.426.600,00 | -475.800,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.880.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.747.892.400,00 | 1.747.892.400,00 | 1.521.692.400,00 | -226.200.000,00 | | | - | - | - | | 1.748.192.400,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23/14 Orang/bulan | 23/14 Orang/bulan | 1.698.032.400,00 | 1.698.032.400,00 | 1.472.132.400,00 | -225.900.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Kedungbanteng | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.698.032.400,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.860.000,00 | 49.860.000,00 | 49.560.000,00 | -300.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.160.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 85.210.100,00 | 85.210.100,00 | 70.364.350,00 | -14.845.750,00 | | | - | - | - | | 53.387.800,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 3.693.000,00 | 3.693.000,00 | 3.693.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.308.900,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 28 Paket | 15.910.700,00 | 15.910.700,00 | 15.910.700,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.245.500,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 23 Paket | 23 Paket | 6.833.000,00 | 6.833.000,00 | 6.833.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.412.900,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 17.686.000,00 | 17.686.000,00 | 17.686.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.410.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 3.005.400,00 | 3.005.400,00 | 2.253.900,00 | -751.500,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.529.500,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 38.082.000,00 | 38.082.000,00 | 23.987.750,00 | -14.094.250,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.481.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 379.774.000,00 | 379.774.000,00 | 406.680.250,00 | 26.906.250,00 | | | - | - | - | | 82.172.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 340.607.000,00 | 340.607.000,00 | 340.532.000,00 | -75.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 16.172.000,00 | 16.172.000,00 | 27.507.250,00 | 11.335.250,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.172.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 22.995.000,00 | 22.995.000,00 | 38.641.000,00 | 15.646.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 268.946.400,00 | 268.946.400,00 | 240.436.400,00 | -28.510.000,00 | | | - | - | - | | 261.640.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 550.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.596.400,00 | 39.596.400,00 | 39.686.400,00 | 90.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 33.090.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 228.800.000,00 | 228.800.000,00 | 200.200.000,00 | -28.600.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 228.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 109.441.400,00 | 109.441.400,00 | 209.441.400,00 | 100.000.000,00 | | | - | - | - | | 100.253.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 85.681.400,00 | 85.681.400,00 | 85.681.400,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 83.650.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 13.640.000,00 | 13.640.000,00 | 13.640.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.810.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.120.000,00 | 10.120.000,00 | 110.120.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.793.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **52.338.000,00** | **52.338.000,00** | **43.592.000,00** | **2.662.000,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 45.188.000,00 | 45.188.000,00 | 39.128.000,00 | -6.060.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.188.000,00 | 45.188.000,00 | 39.128.000,00 | -6.060.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 4.464.000,00 | -2.686.000,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 4.464.000,00 | -2.686.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **52.980.000,00** | **52.980.000,00** | **40.624.000,00** | **-1.689.500,00** | | | | | | | **51.290.500,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 52.980.000,00 | 52.980.000,00 | 40.624.000,00 | -12.356.000,00 | | | - | - | - | | 51.290.500,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 16.990.000,00 | 16.990.000,00 | 15.014.000,00 | -1.976.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.950.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 31.990.000,00 | 31.990.000,00 | 22.660.000,00 | -9.330.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 26.290.500,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.410.000,00** | **7.410.000,00** | **3.834.000,00** | **590.000,00** | | | | | | | **8.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 2.904.000,00 | -2.336.000,00 | | | - | - | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 2.904.000,00 | -2.336.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 930.000,00 | -1.240.000,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 930.000,00 | -1.240.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **111.483.000,00** | **111.483.000,00** | **98.443.000,00** | **8.517.000,00** | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 111.483.000,00 | 111.483.000,00 | 98.443.000,00 | -13.040.000,00 | | | - | - | - | | 120.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 58.583.000,00 | 58.583.000,00 | 46.783.000,00 | -11.800.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 1.380.000,00 | -1.240.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **28.470.000,00** | **28.470.000,00** | **17.235.000,00** | **11.530.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 28.470.000,00 | 28.470.000,00 | 17.235.000,00 | -11.235.000,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.140.000,00 | 14.140.000,00 | 7.180.000,00 | -6.960.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.910.000,00 | 4.910.000,00 | 3.430.000,00 | -1.480.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 2.315.000,00 | -2.795.000,00 | Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG |
| | | **KECAMATAN KRAMAT** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.586.830.400,00** | **3.586.830.400,00** | **3.475.621.846,00** | **1.947.023.868.700,00** | | | | | | | **1.950.610.699.100,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 15.428.000,00 | 15.428.000,00 | 8.424.000,00 | -7.004.000,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 15.901.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11.978.000,00 | 11.978.000,00 | 6.274.000,00 | -5.704.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 12.500.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 2.150.000,00 | -1.300.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.401.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 2.090.467.400,00 | 2.090.467.400,00 | 2.001.622.400,00 | -88.845.000,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 1.949.293.700.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 2.016.767.400,00 | 2.016.767.400,00 | 1.933.367.400,00 | -83.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.949.220.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 73.700.000,00 | 73.700.000,00 | 68.255.000,00 | -5.445.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 73.700.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 7.000.000,00 | -35.600.000,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 48.750.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.150.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 7.000.000,00 | -35.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 41.600.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 208.182.700,00 | 208.182.700,00 | 183.700.600,00 | -24.482.100,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 203.990.100,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 18.349.100,00 | 18.349.100,00 | 18.349.100,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.763.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 43 Paket | 43 Paket | 47.146.700,00 | 47.146.700,00 | 45.146.700,00 | -2.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.965.700,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 35 Paket | 35 Paket | 37.804.700,00 | 37.804.700,00 | 36.804.700,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 29.108.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 42.854.000,00 | 42.854.000,00 | 39.452.000,00 | -3.402.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.223.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 18.606.200,00 | 18.606.200,00 | 14.358.000,00 | -4.248.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.725.900,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.240.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.182.000,00 | 39.182.000,00 | 25.350.100,00 | -13.831.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 38.964.500,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 % | 100 % | 703.211.000,00 | 703.211.000,00 | 799.099.500,00 | 95.888.500,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 546.706.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 376.732.000,00 | 376.732.000,00 | 368.732.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 241.972.000,00 | 241.972.000,00 | 285.290.500,00 | 43.318.500,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 121.600.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 84.507.000,00 | 84.507.000,00 | 145.077.000,00 | 60.570.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 139.106.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 220.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 266.931.000,00 | 266.931.000,00 | 183.041.046,00 | -83.889.954,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 244.552.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.650.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 116.891.000,00 | 64.521.046,00 | 64.521.046,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 92.762.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 0,00 | 148.940.000,00 | 117.420.000,00 | 117.420.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.140.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.139.176.400,00** | **5.139.176.400,00** | **4.794.085.500,00** | **-345.090.900,00** | | | | | | | **1.951.708.820.100,00** | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 260.010.300,00 | 260.010.300,00 | 292.734.300,00 | 32.724.000,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 257.100.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 89.010.300,00 | 89.010.300,00 | 89.010.300,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 89.150.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 18.810.000,00 | -2.190.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 17.950.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 184.914.000,00 | 34.914.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **73.700.000,00** | **73.700.000,00** | **54.242.300,00** | **-400.000,00** | | | | | | | **73.300.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 % | 100 % | 57.700.000,00 | 57.700.000,00 | 44.422.300,00 | -13.277.700,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 57.500.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 57.700.000,00 | 57.700.000,00 | 44.422.300,00 | -13.277.700,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 57.500.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 % | 100 % | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 9.820.000,00 | -6.180.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 15.800.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 9.820.000,00 | -6.180.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.800.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.235.559.500,00** | **1.235.559.500,00** | **1.068.643.400,00** | **-449.971.000,00** | | | | | | | **785.588.500,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data lembaga kemasyarakatan desa* | | | | 19 Desa | 19 Desa | 121.559.500,00 | 121.559.500,00 | 73.582.500,00 | -47.977.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 121.588.500,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.300.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.210.000,00 | 5.210.000,00 | 3.920.000,00 | -1.290.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.040.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 92.649.500,00 | 92.649.500,00 | 45.962.500,00 | -46.687.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 91.248.500,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Ketersediaan Data Perkembangan Kelurahan* | | | | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 1.114.000.000,00 | 1.114.000.000,00 | 995.060.900,00 | -118.939.100,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 664.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 10.525.000,00 | -3.475.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 899.575.900,00 | -100.424.100,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | | | 550.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 6 Pokmas / Ormas | 6 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 84.960.000,00 | -15.040.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **22.847.500,00** | **22.847.500,00** | **16.618.954,00** | **-10.000,00** | | | | | | | **22.837.500,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 19 Desa | 19 Desa | 19.637.500,00 | 19.637.500,00 | 13.127.500,00 | -6.510.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 19.737.500,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.637.500,00 | 19.637.500,00 | 13.127.500,00 | -6.510.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 19.737.500,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.491.454,00 | 281.454,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 3.100.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 3.491.454,00 | 281.454,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.100.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **146.229.000,00** | **146.229.000,00** | **136.099.000,00** | **-1.819.000,00** | | | | | | | **144.410.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 % | 100 % | 146.229.000,00 | 146.229.000,00 | 136.099.000,00 | -10.130.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 144.410.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 130 Orang | 130 Orang | 92.739.000,00 | 92.739.000,00 | 83.839.000,00 | -8.900.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 91.150.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 1.980.000,00 | -1.230.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.980.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.280.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **74.010.000,00** | **74.010.000,00** | **42.860.000,00** | **-2.025.000,00** | | | | | | | **71.985.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen tertib administrasi desa* | | | | 266 Dokumen | 266 Dokumen | 74.010.000,00 | 74.010.000,00 | 42.860.000,00 | -31.150.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat | | 71.985.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.520.000,00 | 13.520.000,00 | 2.410.000,00 | -11.110.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 12.150.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 40.850.000,00 | 40.850.000,00 | 29.250.000,00 | -11.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 24.260.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.300.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 13.130.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.500.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 900.000,00 | -6.240.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.945.000,00 | KECAMATAN KRAMAT |
| | | **KECAMATAN LEBAKSIU** | | | | | | | **2.768.824.400,00** | **2.768.824.400,00** | **2.492.551.856,00** | **-276.272.544,00** | | | | | | | **2.896.624.400,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.768.824.400,00** | **2.768.824.400,00** | **2.492.551.856,00** | **-276.272.544,00** | | | | | | | **2.896.624.400,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.768.824.400,00** | **2.768.824.400,00** | **2.492.551.856,00** | **-276.272.544,00** | | | | | | | **2.896.624.400,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.327.330.400,00** | **2.327.330.400,00** | **2.138.657.456,00** | **52.194.000,00** | | | | | | | **2.379.524.400,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 11.889.850,00 | -8.110.150,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN | | 20.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.046.250,00 | -3.953.750,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.843.600,00 | -4.156.400,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.560.692.400,00 | 1.560.692.400,00 | 1.414.792.400,00 | -145.900.000,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | ASN di Lingkungan Kecamatan Lebaksiu | | 1.560.692.400,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 1.533.092.400,00 | 1.533.092.400,00 | 1.387.192.400,00 | -145.900.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 1.533.092.400,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.600.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.263.750,00 | -2.736.250,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.263.750,00 | -2.736.250,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 84.500.000,00 | 84.500.000,00 | 70.686.900,00 | -13.813.100,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN | | 99.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.994.100,00 | -5.900,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 21.614.000,00 | -886.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 22.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.002.500,00 | -997.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.887.500,00 | -112.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 13.188.800,00 | -11.811.200,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 382.232.000,00 | 382.232.000,00 | 380.846.000,00 | -1.386.000,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | ASN dan Non ASN | | 434.832.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 312.822.000,00 | 2.090.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 310.732.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.100.000,00 | 34.100.000,00 | 30.811.000,00 | -3.289.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 34.100.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.213.000,00 | -187.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 131.500.000,00 | 131.500.000,00 | 131.315.944,00 | -184.056,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN | | 131.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.331.250,00 | -168.750,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.999.694,00 | -306,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 89.985.000,00 | -15.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 133.406.000,00 | 133.406.000,00 | 116.862.612,00 | -16.543.388,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN | | 118.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 72.978.762,00 | -21.238,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 73.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.992.500,00 | -7.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 45.406.000,00 | 45.406.000,00 | 28.891.350,00 | -16.514.650,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Lebaksiu** | | | | **84,00 Persen** | **84,00 Persen** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **64.252.400,00** | **0,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.240.000,00 | -760.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 55.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 54.240.000,00 | -760.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.012.400,00 | -4.987.600,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.012.400,00 | -4.987.600,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi** | | | | **66,67 Persen** | **66,67 Persen** | **79.000.000,00** | **79.000.000,00** | **62.443.500,00** | **0,00** | | | | | | | **79.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data perkembangan desa* | | | | 15 Desa | 15 Desa | 79.000.000,00 | 79.000.000,00 | 62.443.500,00 | -16.556.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 79.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.857.500,00 | -3.142.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.286.000,00 | -1.714.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.300.000,00 | -11.700.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **8.357.500,00** | **0,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 15 Desa | 15 Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.357.500,00 | -6.642.500,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.357.500,00 | -6.642.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **113.100.000,00** | **113.100.000,00** | **103.026.500,00** | **0,00** | | | | | | | **113.100.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 113.100.000,00 | 113.100.000,00 | 103.026.500,00 | -10.073.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 113.100.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 130 Orang | 130 Orang | 57.100.000,00 | 57.100.000,00 | 50.701.500,00 | -6.398.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 57.100.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 52.325.000,00 | -3.675.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 56.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase rata-rata tertib administrasi desa Kecamatan Lebaksiu** | | | | **73,33 Persen** | **73,33 Persen** | **164.394.000,00** | **164.394.000,00** | **115.814.500,00** | **75.606.000,00** | | | | | | | **240.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa tertib administrasi desa* | | | | 11 Desa | 11 Desa | 164.394.000,00 | 164.394.000,00 | 115.814.500,00 | -48.579.500,00 | | | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | Masyarakat, ASN dan Non ASN | | 240.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 30.026.000,00 | 30.026.000,00 | 18.506.000,00 | -11.520.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 23.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 39.392.000,00 | 39.392.000,00 | 29.581.000,00 | -9.811.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 62.526.000,00 | 62.526.000,00 | 49.995.000,00 | -12.531.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 97.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 6.275.000,00 | -75.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 1.010.000,00 | -6.090.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.277.500,00 | 277.500,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.170.000,00 | -8.830.000,00 | Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LEBAKSIU |
| | | **KECAMATAN MARGASARI** | | | | | | | **3.992.526.500,00** | **3.992.526.500,00** | **3.863.764.300,00** | **-128.762.200,00** | | | | | | | **2.862.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.992.526.500,00** | **3.992.526.500,00** | **3.863.764.300,00** | **-128.762.200,00** | | | | | | | **2.862.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.992.526.500,00** | **3.992.526.500,00** | **3.863.764.300,00** | **-128.762.200,00** | | | | | | | **2.862.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **3.606.398.000,00** | **3.606.398.000,00** | **3.546.494.700,00** | **-1.216.398.000,00** | | | | | | | **2.390.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 6.762.000,00 | 6.762.000,00 | 3.631.000,00 | -3.131.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.735.000,00 | 4.735.000,00 | 2.751.000,00 | -1.984.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 880.000,00 | -1.147.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.783.052.500,00 | 1.783.052.500,00 | 1.717.652.500,00 | -65.400.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 1.592.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 1.720.652.500,00 | 1.720.652.500,00 | 1.655.252.500,00 | -65.400.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 92.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 47.420.000,00 | 47.420.000,00 | 47.420.000,00 | 0,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 18 Orang | 18 Orang | 47.420.000,00 | 47.420.000,00 | 47.420.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 75.406.300,00 | 75.406.300,00 | 56.820.300,00 | -18.586.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 95.500.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.789.600,00 | 2.789.600,00 | 2.789.600,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.786.200,00 | 15.786.200,00 | 15.786.200,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.828.500,00 | 7.828.500,00 | 7.828.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.963.000,00 | 15.963.000,00 | 14.523.000,00 | -1.440.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.075.000,00 | 5.075.000,00 | 4.323.000,00 | -752.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.276.000,00 | 25.276.000,00 | 8.882.000,00 | -16.394.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 29.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 75 Persen | 75 Persen | 1.005.884.800,00 | 1.005.884.800,00 | 996.455.500,00 | -9.429.300,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 265.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - | - | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 24.690.000,00 | 24.690.000,00 | 17.000.000,00 | -7.690.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 42.154.500,00 | 42.154.500,00 | 42.154.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 400.308.300,00 | 400.308.300,00 | 399.516.000,00 | -792.300,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.053.000,00 | -947.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.800.400,00 | 105.800.400,00 | 103.290.900,00 | -2.509.500,00 | | | - | - | - | | 128.500.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.500.400,00 | 42.500.400,00 | 39.990.900,00 | -2.509.500,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 582.072.000,00 | 582.072.000,00 | 621.224.500,00 | 39.152.500,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 198.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 58.400.000,00 | 58.400.000,00 | 58.799.500,00 | 399.500,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 68.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.552.000,00 | 15.552.000,00 | 55.548.000,00 | 39.996.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 498.757.000,00 | -1.243.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Margasari** | | | | **82,45 Persen** | **82,45 Persen** | **67.458.200,00** | **67.458.200,00** | **59.689.500,00** | **-7.458.200,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 52.433.200,00 | 52.433.200,00 | 49.709.200,00 | -2.724.000,00 | | | - | - | - | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 52.433.200,00 | 52.433.200,00 | 49.709.200,00 | -2.724.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 15.025.000,00 | 15.025.000,00 | 9.980.300,00 | -5.044.700,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.025.000,00 | 15.025.000,00 | 9.980.300,00 | -5.044.700,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari** | | | | **66.67 Persen** | **66.67 Persen** | **139.225.800,00** | **139.225.800,00** | **110.078.100,00** | **27.774.200,00** | | | | | | | **167.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Terbina* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 139.225.800,00 | 139.225.800,00 | 110.078.100,00 | -29.147.700,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 167.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 27.050.000,00 | 27.050.000,00 | 16.270.000,00 | -10.780.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.619.900,00 | -1.580.100,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 108.975.800,00 | 108.975.800,00 | 92.188.200,00 | -16.787.600,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 130.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **22.304.000,00** | **22.304.000,00** | **15.766.000,00** | **13.696.000,00** | | | | | | | **36.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Desa yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana* | | | | 13 Desa | 13 Desa | 22.304.000,00 | 22.304.000,00 | 15.766.000,00 | -6.538.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 36.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 22.304.000,00 | 22.304.000,00 | 15.766.000,00 | -6.538.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **124.155.500,00** | **124.155.500,00** | **111.569.500,00** | **10.844.500,00** | | | | | | | **135.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 124.155.500,00 | 124.155.500,00 | 111.569.500,00 | -12.586.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 135.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 72.600.500,00 | 72.600.500,00 | 60.659.500,00 | -11.941.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 51.555.000,00 | 51.555.000,00 | 50.910.000,00 | -645.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari** | | | | **78.20 Persen** | **78.20 Persen** | **32.985.000,00** | **32.985.000,00** | **20.166.500,00** | **41.015.000,00** | | | | | | | **74.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen tertib administrasi desa* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 32.985.000,00 | 32.985.000,00 | 20.166.500,00 | -12.818.500,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari | | 74.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.954.000,00 | 9.954.000,00 | 5.670.500,00 | -4.283.500,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 16.910.000,00 | 16.910.000,00 | 9.600.000,00 | -7.310.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.121.000,00 | 6.121.000,00 | 4.896.000,00 | -1.225.000,00 | Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARGASARI |
| | | **KECAMATAN PAGERBARANG** | | | | | | | **2.615.043.400,00** | **2.715.043.400,00** | **2.606.830.000,00** | **-8.213.400,00** | | | | | | | **1.939.366.400,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.615.043.400,00** | **2.715.043.400,00** | **2.606.830.000,00** | **-8.213.400,00** | | | | | | | **1.939.366.400,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.615.043.400,00** | **2.715.043.400,00** | **2.606.830.000,00** | **-8.213.400,00** | | | | | | | **1.939.366.400,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.184.557.500,00** | **2.284.557.500,00** | **2.252.954.500,00** | **-710.121.200,00** | | | | | | | **1.474.436.300,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 4.490.000,00 | -2.310.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 6.035.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 2.750.000,00 | -730.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.135.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 1.740.000,00 | -1.580.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.900.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.265.421.400,00 | 1.265.421.400,00 | 1.254.811.400,00 | -10.610.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 1.079.276.400,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 13 Orang/bulan | 13 Orang/bulan | 1.209.311.400,00 | 1.209.311.400,00 | 1.199.911.400,00 | -9.400.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.029.406.400,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 56.110.000,00 | 56.110.000,00 | 54.900.000,00 | -1.210.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 49.870.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 12.336.000,00 | 12.336.000,00 | 6.326.000,00 | -6.010.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 9.345.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.336.000,00 | 7.336.000,00 | 6.326.000,00 | -1.010.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.345.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 99.391.000,00 | 99.391.000,00 | 74.090.900,00 | -25.300.100,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 86.457.900,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.536.500,00 | 2.536.500,00 | 2.536.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.253.900,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.360.800,00 | 19.360.800,00 | 19.360.800,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.406.700,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.559.200,00 | 11.559.200,00 | 6.152.100,00 | -5.407.100,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.365.300,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.210.000,00 | 21.210.000,00 | 21.210.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 19.235.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.952.000,00 | 4.952.000,00 | 3.704.000,00 | -1.248.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.492.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.760.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.012.500,00 | 37.012.500,00 | 18.367.500,00 | -18.645.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.945.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 75 Persen | 75 Persen | 379.002.000,00 | 379.002.000,00 | 390.602.000,00 | 11.600.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 86.370.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.690.000,00 | 34.690.000,00 | 34.690.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 34.690.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 33.580.000,00 | 33.580.000,00 | 45.180.000,00 | 11.600.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 51.680.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 110.441.500,00 | 110.441.500,00 | 107.681.500,00 | -2.760.000,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 105.221.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.171.500,00 | 48.171.500,00 | 48.171.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 42.951.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 61.170.000,00 | 61.170.000,00 | 58.410.000,00 | -2.760.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 61.170.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 311.165.600,00 | 411.165.600,00 | 414.952.700,00 | 103.787.100,00 | | | - | - | ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 101.730.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 63.185.600,00 | 63.185.600,00 | 66.972.700,00 | 3.787.100,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 61.760.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.120.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 31.740.000,00 | 31.740.000,00 | 31.740.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 31.850.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Pagerbarang** | | | | **84 Persen** | **84 Persen** | **65.267.500,00** | **65.267.500,00** | **50.057.500,00** | **6.095.000,00** | | | | | | | **71.362.500,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 57.107.500,00 | 57.107.500,00 | 44.442.500,00 | -12.665.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 63.122.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 57.107.500,00 | 57.107.500,00 | 44.442.500,00 | -12.665.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 63.122.500,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 5.615.000,00 | -2.545.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 8.240.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 5.615.000,00 | -2.545.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.240.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbina** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **99.410.400,00** | **99.410.400,00** | **86.970.000,00** | **1.438.200,00** | | | | | | | **100.848.600,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa* | | | | 13 Desa | 13 Desa | 99.410.400,00 | 99.410.400,00 | 86.970.000,00 | -12.440.400,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 100.848.600,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 21.655.000,00 | 21.655.000,00 | 21.655.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 21.955.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 4.900.000,00 | -2.510.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.940.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 70.345.400,00 | 70.345.400,00 | 60.415.000,00 | -9.930.400,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 71.953.600,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **23.170.000,00** | **23.170.000,00** | **19.420.000,00** | **-2.045.000,00** | | | | | | | **21.125.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 13 Desa | 13 Desa | 19.170.000,00 | 19.170.000,00 | 16.760.000,00 | -2.410.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 16.745.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.170.000,00 | 19.170.000,00 | 16.760.000,00 | -2.410.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.745.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.660.000,00 | -1.340.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 4.380.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.660.000,00 | -1.340.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.380.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **178.343.000,00** | **178.343.000,00** | **168.418.000,00** | **3.261.000,00** | | | | | | | **181.604.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 178.343.000,00 | 178.343.000,00 | 168.418.000,00 | -9.925.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 181.604.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 125.073.000,00 | 125.073.000,00 | 116.488.000,00 | -8.585.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 127.954.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 1.650.000,00 | -1.340.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.370.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.280.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa** | | | | **52,44 Persen** | **52,44 Persen** | **64.295.000,00** | **64.295.000,00** | **29.010.000,00** | **25.695.000,00** | | | | | | | **89.990.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen tertib administrasi desa* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 64.295.000,00 | 64.295.000,00 | 29.010.000,00 | -35.285.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang | | 89.990.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.425.000,00 | -1.075.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.770.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 13.520.000,00 | 13.520.000,00 | 8.670.000,00 | -4.850.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 21.640.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41.350.000,00 | 41.350.000,00 | 11.990.000,00 | -29.360.000,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 39.900.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.680.000,00 | KECAMATAN PAGERBARANG |
| | | **KECAMATAN PANGKAH** | | | | | | | **2.788.720.800,00** | **2.788.720.800,00** | **2.589.380.150,00** | **-199.340.650,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.788.720.800,00** | **2.788.720.800,00** | **2.589.380.150,00** | **-199.340.650,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.788.720.800,00** | **2.788.720.800,00** | **2.589.380.150,00** | **-199.340.650,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah** | | | | **undefined undefined** | **undefined undefined** | **2.278.159.600,00** | **2.278.159.600,00** | **2.162.612.050,00** | **-2.278.159.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 11.940.000,00 | 11.940.000,00 | 6.524.450,00 | -5.415.550,00 | | | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 | 4.083.350,00 | -1.886.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 | 2.441.100,00 | -3.528.900,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 1.479.678.800,00 | 1.479.678.800,00 | 1.412.278.800,00 | -67.400.000,00 | | | - | - | ASN | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 1.432.988.800,00 | 1.432.988.800,00 | 1.365.588.800,00 | -67.400.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46.690.000,00 | 46.690.000,00 | 46.690.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawaia yang mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Peningkatan Kapasitas Pegawai)* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 43.296.000,00 | 43.296.000,00 | 0,00 | -43.296.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 21 Orang | 21 Orang | 43.296.000,00 | 43.296.000,00 | 0,00 | -43.296.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *kebutuhan administrasi umum dan sarana prasarana perangkat daerah* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 109.629.962,00 | 109.629.962,00 | 109.629.962,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.167.800,00 | 2.167.800,00 | 2.167.800,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.168.100,00 | 15.168.100,00 | 15.168.100,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.718.900,00 | 8.718.900,00 | 8.718.900,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 31.143.000,00 | 31.143.000,00 | 31.143.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.531.162,00 | 4.531.162,00 | 4.531.162,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.141.000,00 | 40.141.000,00 | 40.141.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Pengadaan Mebel*<br>*Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 376.602.500,00 | 376.602.500,00 | 376.602.500,00 | 0,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 340.019.500,00 | 340.019.500,00 | 340.019.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 16.617.500,00 | 16.617.500,00 | 16.617.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 19.965.500,00 | 19.965.500,00 | 19.965.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 152.510.738,00 | 152.510.738,00 | 153.074.738,00 | 564.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 47.150.738,00 | 47.150.738,00 | 47.714.738,00 | 564.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 104.260.000,00 | 104.260.000,00 | 104.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 104.501.600,00 | 104.501.600,00 | 104.501.600,00 | 0,00 | | | - | - | ASN | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 65.491.600,00 | 65.491.600,00 | 65.491.600,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 29.670.000,00 | 29.670.000,00 | 29.670.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Pangkah** | | | | **89.64 Nilai** | **89.64 Nilai** | **90.111.900,00** | **90.111.900,00** | **90.011.900,00** | **-90.111.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75.801.900,00 | 75.801.900,00 | 75.801.900,00 | 0,00 | | | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 75.801.900,00 | 75.801.900,00 | 75.801.900,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 14.310.000,00 | 14.310.000,00 | 14.210.000,00 | -100.000,00 | | | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.310.000,00 | 14.310.000,00 | 14.210.000,00 | -100.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Jumlah LKD yang Terfasilitasi Kecamatan Pangkah** | | | | **undefined undefined** | **undefined undefined** | **116.466.900,00** | **116.466.900,00** | **110.033.800,00** | **-116.466.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *ketersediaan data perkembangan desa* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 116.466.900,00 | 116.466.900,00 | 110.033.800,00 | -6.433.100,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 35.452.300,00 | 35.452.300,00 | 35.452.300,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.567.500,00 | 5.567.500,00 | 4.380.000,00 | -1.187.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 75.447.100,00 | 75.447.100,00 | 70.201.500,00 | -5.245.600,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah** | | | | **undefined undefined** | **undefined undefined** | **18.510.000,00** | **18.510.000,00** | **12.160.000,00** | **-18.510.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 15.410.000,00 | 15.410.000,00 | 10.810.000,00 | -4.600.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.410.000,00 | 15.410.000,00 | 10.810.000,00 | -4.600.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.350.000,00 | -1.750.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.350.000,00 | -1.750.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **188.222.400,00** | **188.222.400,00** | **185.122.400,00** | **-188.222.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*<br>*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*<br>*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanana Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI*<br>*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 12 Dokumen<br>130 Orang<br>23 Orang<br>3 Kegiatan<br>undefined undefined | 12 Dokumen<br>130 Orang<br>23 Orang<br>3 Kegiatan<br>undefined undefined | 188.222.400,00 | 188.222.400,00 | 185.122.400,00 | -3.100.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 133.642.400,00 | 133.642.400,00 | 133.342.400,00 | -300.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.500.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib adminstrasi Kecamatan Pangkah** | | | | **undefined undefined** | **undefined undefined** | **97.250.000,00** | **97.250.000,00** | **29.440.000,00** | **-97.250.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 97.250.000,00 | 97.250.000,00 | 29.440.000,00 | -67.810.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pangkah | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 18.050.000,00 | -2.050.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.760.000,00 | 65.760.000,00 | 0,00 | -65.760.000,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKAH |
| | | **KECAMATAN SLAWI** | | | | | | | **13.147.021.200,00** | **13.447.021.200,00** | **13.051.668.972,00** | **-95.352.228,00** | | | | | | | **10.248.657.900,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **13.147.021.200,00** | **13.447.021.200,00** | **13.051.668.972,00** | **-95.352.228,00** | | | | | | | **10.248.657.900,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **13.147.021.200,00** | **13.447.021.200,00** | **13.051.668.972,00** | **-95.352.228,00** | | | | | | | **10.248.657.900,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.834.533.400,00** | **6.834.533.400,00** | **6.416.221.400,00** | **-936.420.400,00** | | | | | | | **5.898.113.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.128.000,00 | -4.872.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.675.000,00 | -2.325.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.453.000,00 | -2.547.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.342.796.400,00 | 4.342.796.400,00 | 3.919.324.400,00 | -423.472.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 3.780.165.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 55 Orang/bulan | 55 Orang/bulan | 4.256.796.400,00 | 4.256.796.400,00 | 3.844.896.400,00 | -411.900.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.694.165.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 74.428.000,00 | -11.572.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 86.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.640.000,00 | -2.360.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.640.000,00 | -2.360.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 224.200.000,00 | 224.200.000,00 | 218.950.000,00 | -5.250.000,00 | | | - | - | Aparatur | | 217.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 56.406.000,00 | 6.406.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.923.000,00 | -77.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 15.596.000,00 | -3.404.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 19.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 24.025.000,00 | -8.175.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.404.537.000,00 | 1.404.537.000,00 | 1.420.347.000,00 | 15.810.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 1.022.948.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 366.732.000,00 | 366.732.000,00 | 366.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 64.600.000,00 | -26.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 142.760.000,00 | 42.260.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.066.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 846.305.000,00 | 846.305.000,00 | 846.255.000,00 | -50.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 847.882.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 561.000.000,00 | 561.000.000,00 | 545.600.000,00 | -15.400.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 561.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 170.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 389.740.000,00 | 389.740.000,00 | 374.340.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 388.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondsi baik* | | | | 41 Unit | 41 Unit | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 299.232.000,00 | 17.232.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 297.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 196.000.000,00 | 196.000.000,00 | 199.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 182.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 21.960.000,00 | 10.960.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 42.672.000,00 | 2.672.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 34.500.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Slawi** | | | | **85.71 Nilai** | **85.71 Nilai** | **112.900.000,00** | **112.900.000,00** | **93.963.000,00** | **-5.900.000,00** | | | | | | | **107.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 97.300.000,00 | 97.300.000,00 | 83.208.000,00 | -14.092.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 92.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 97.300.000,00 | 97.300.000,00 | 83.208.000,00 | -14.092.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 92.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 10.755.000,00 | -4.845.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 15.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 10.755.000,00 | -4.845.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.981.637.800,00** | **6.281.637.800,00** | **6.348.935.572,00** | **-1.949.647.900,00** | | | | | | | **4.031.989.900,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data perkembangan desa* | | | | 5 Desa | 5 Desa | 175.400.000,00 | 175.400.000,00 | 124.707.000,00 | -50.693.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 166.800.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 31.050.000,00 | -3.950.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 12.852.000,00 | -12.148.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 115.400.000,00 | 115.400.000,00 | 80.805.000,00 | -34.595.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 106.800.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Ketersediaan data perkembangan kelurahan* | | | | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 5.806.237.800,00 | 6.106.237.800,00 | 6.224.228.572,00 | 417.990.772,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 3.865.189.900,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 46.080.000,00 | 46.080.000,00 | 34.380.000,00 | -11.700.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 4.920.157.800,00 | 5.220.157.800,00 | 5.564.041.572,00 | 643.883.772,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | | | 2.920.189.900,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 625.807.000,00 | -214.193.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 900.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **38.750.000,00** | **38.750.000,00** | **35.711.000,00** | **0,00** | | | | | | | **38.750.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 10 Desa/Kelurahan | 10 Desa/Kelurahan | 38.750.000,00 | 38.750.000,00 | 35.711.000,00 | -3.039.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 38.750.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 38.750.000,00 | 38.750.000,00 | 35.711.000,00 | -3.039.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 38.750.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **78.800.000,00** | **78.800.000,00** | **78.150.000,00** | **-995.000,00** | | | | | | | **77.805.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 78.800.000,00 | 78.800.000,00 | 78.150.000,00 | -650.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 77.805.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 27.350.000,00 | -650.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.800.000,00 | 50.800.000,00 | 50.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.805.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **100.400.000,00** | **100.400.000,00** | **78.688.000,00** | **-5.400.000,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen tertib administrasi desa daerah sesuai ketentuan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100.400.000,00 | 100.400.000,00 | 78.688.000,00 | -21.712.000,00 | | | - | - | Aparatur dan Masyarakat | | 95.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 72.900.000,00 | 72.900.000,00 | 66.204.000,00 | -6.696.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 12.484.000,00 | -15.016.000,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN SLAWI |
| | | **KECAMATAN SURADADI** | | | | | | | **2.577.099.800,00** | **2.577.099.800,00** | **2.110.348.650,00** | **-466.751.150,00** | | | | | | | **1.949.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.577.099.800,00** | **2.577.099.800,00** | **2.110.348.650,00** | **-466.751.150,00** | | | | | | | **1.949.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.577.099.800,00** | **2.577.099.800,00** | **2.110.348.650,00** | **-466.751.150,00** | | | | | | | **1.949.500.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.186.378.700,00** | **2.186.378.700,00** | **1.810.174.350,00** | **-627.663.800,00** | | | | | | | **1.558.714.900,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 6.030.000,00 | 6.030.000,00 | 4.155.000,00 | -1.875.000,00 | | | - | - | - | | 6.035.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 1.905.000,00 | -805.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.135.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 2.250.000,00 | -1.070.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.900.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.451.237.800,00 | 1.451.237.800,00 | 1.078.337.800,00 | -372.900.000,00 | | | - | - | - | | 1.134.370.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 1.401.367.800,00 | 1.401.367.800,00 | 1.028.467.800,00 | -372.900.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.084.500.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.870.000,00 | 49.870.000,00 | 49.870.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 49.870.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 12.680.000,00 | 12.680.000,00 | 7.680.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 11.680.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.680.000,00 | 7.680.000,00 | 7.680.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.680.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 92.140.250,00 | 92.140.250,00 | 68.270.900,00 | -23.869.350,00 | | | - | - | - | | 96.829.900,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.846.500,00 | 2.846.500,00 | 2.846.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.253.900,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.234.100,00 | 16.234.100,00 | 16.234.100,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.245.700,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.246.300,00 | 10.246.300,00 | 10.246.300,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.243.800,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.586.000,00 | 7.586.000,00 | 7.586.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.736.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.667.350,00 | 11.667.350,00 | 8.511.000,00 | -3.156.350,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.605.500,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.760.000,00 | 40.760.000,00 | 20.047.000,00 | -20.713.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.945.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 % | 100 % | 393.982.000,00 | 393.982.000,00 | 419.962.000,00 | 25.980.000,00 | | | - | - | - | | 94.550.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 345.422.000,00 | 345.422.000,00 | 341.422.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 34.690.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 | 12.680.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.680.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 32.880.000,00 | 32.880.000,00 | 65.860.000,00 | 32.980.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 44.180.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 126.381.200,00 | 126.381.200,00 | 126.381.200,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 111.870.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.071.200,00 | 36.071.200,00 | 36.071.200,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 89.760.000,00 | 89.760.000,00 | 89.760.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 89.770.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 103.927.450,00 | 103.927.450,00 | 105.387.450,00 | 1.460.000,00 | | | - | - | - | | 103.380.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 72.807.450,00 | 72.807.450,00 | 72.807.450,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 63.410.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 9.580.000,00 | 1.460.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.120.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 31.850.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Suradadi** | | | | **81.26 %** | **81.26 %** | **70.997.500,00** | **70.997.500,00** | **59.722.500,00** | **5.000,00** | | | | | | | **71.002.500,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 % | 100 % | 62.207.500,00 | 62.207.500,00 | 54.392.500,00 | -7.815.000,00 | | | - | - | - | | 62.762.500,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 62.207.500,00 | 62.207.500,00 | 54.392.500,00 | -7.815.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 62.762.500,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan* | | | | 100 % | 100 % | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 5.330.000,00 | -3.460.000,00 | | | - | - | - | | 8.240.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 8.790.000,00 | 8.790.000,00 | 5.330.000,00 | -3.460.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.240.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi** | | | | **83.33 %** | **83.33 %** | **95.433.600,00** | **95.433.600,00** | **62.864.800,00** | **0,00** | | | | | | | **95.433.600,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Terbina* | | | | 100 % | 100 % | 95.433.600,00 | 95.433.600,00 | 62.864.800,00 | -32.568.800,00 | | | - | - | - | | 95.433.600,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 23.480.000,00 | 23.480.000,00 | 22.959.800,00 | -520.200,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.480.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 71.953.600,00 | 71.953.600,00 | 39.905.000,00 | -32.048.600,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 71.953.600,00 | KECAMATAN SURADADI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi** | | | | **100 %** | **100 %** | **22.338.000,00** | **22.338.000,00** | **19.128.000,00** | **-1.213.000,00** | | | | | | | **21.125.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Desa yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana* | | | | 11 Desa | 11 Desa | 17.868.000,00 | 17.868.000,00 | 16.268.000,00 | -1.600.000,00 | | | - | - | - | | 16.745.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.868.000,00 | 17.868.000,00 | 16.268.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.745.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 2.860.000,00 | -1.610.000,00 | | | - | - | - | | 4.380.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 2.860.000,00 | -1.610.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.380.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi** | | | | **100 %** | **100 %** | **131.507.000,00** | **131.507.000,00** | **126.404.000,00** | **1.227.000,00** | | | | | | | **132.734.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum* | | | | 100 % | 100 % | 131.507.000,00 | 131.507.000,00 | 126.404.000,00 | -5.103.000,00 | | | - | - | - | | 132.734.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 81.227.000,00 | 81.227.000,00 | 76.124.000,00 | -5.103.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 82.454.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.280.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi** | | | | **68 %** | **68 %** | **70.445.000,00** | **70.445.000,00** | **32.055.000,00** | **45.000,00** | | | | | | | **70.490.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa Kecamatan Suradadi* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 70.445.000,00 | 70.445.000,00 | 32.055.000,00 | -38.390.000,00 | | | - | - | - | | 70.490.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.845.000,00 | 7.845.000,00 | 7.805.000,00 | -40.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.870.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 18.740.000,00 | 18.740.000,00 | 16.720.000,00 | -2.020.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.760.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 3.570.000,00 | -36.330.000,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 39.900.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.960.000,00 | KECAMATAN SURADADI |
| | | **KECAMATAN TALANG** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.509.533.500,00** | **2.509.533.500,00** | **2.319.460.000,00** | **-8.382.500,00** | | | | | | | **2.501.151.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 19.154.500,00 | 19.154.500,00 | 2.646.000,00 | -16.508.500,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 18.226.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 7.679.250,00 | 1.494.000,00 | 1.494.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.115.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 0,00 | 11.475.250,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 7.111.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.442.737.000,00 | 1.442.737.000,00 | 1.325.837.000,00 | -116.900.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 1.442.917.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 0,00 | 1.398.037.000,00 | 1.281.137.000,00 | 1.281.137.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.398.037.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 44.880.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 945.000,00 | -150.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 995.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 1.095.000,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 995.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 51.454.700,00 | 51.454.700,00 | 1.625.500,00 | -49.829.200,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 48.163.200,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 0,00 | 4.235.500,00 | 875.500,00 | 875.500,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 944.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 47.219.200,00 | 47.219.200,00 | 750.000,00 | -46.469.200,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 47.219.200,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 112.314.400,00 | 112.314.400,00 | 73.752.400,00 | -38.562.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 109.404.900,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 4.316.800,00 | 4.316.800,00 | 4.316.800,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.024.700,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 21.719.100,00 | 17.604.600,00 | 17.604.600,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.772.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 6.413.000,00 | 6.143.000,00 | 6.143.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.089.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 25.746.000,00 | 21.176.000,00 | 21.176.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 47.055.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.186.500,00 | 12.186.500,00 | 7.280.000,00 | -4.906.500,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.151.200,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 365 Dokumen | 365 Dokumen | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.825.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 88 Laporan | 88 Laporan | 0,00 | 38.333.000,00 | 13.632.000,00 | 13.632.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 36.488.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 434.710.000,00 | 434.710.000,00 | 468.127.000,00 | 33.417.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 572.730.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 0 | 0 0 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 310.732.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.780.000,00 | 34.780.000,00 | 30.780.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 34.780.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 16.780.000,00 | 16.780.000,00 | 16.780.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 28.690.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 27.228.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.528.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 45.190.000,00 | 46.585.000,00 | 46.585.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 180.000.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 117.387.888,00 | 117.387.888,00 | 104.739.088,00 | -12.648.800,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 108.744.800,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 330.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 55.317.888,00 | 42.669.088,00 | 42.669.088,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 46.674.800,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 61.740.000,00 | 61.740.000,00 | 61.740.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 61.740.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 67 Unit | 67 Unit | 330.680.012,00 | 330.680.012,00 | 341.788.012,00 | 11.108.000,00 | | | - | - | - | | 199.969.600,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 0,00 | 62.280.000,00 | 73.388.000,00 | 73.388.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 58.660.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.073.769.000,00** | **3.073.769.000,00** | **2.798.606.500,00** | **-275.162.500,00** | | | | | | | **2.718.094.200,00** | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.510.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 256.750.012,00 | 256.750.012,00 | 256.750.012,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 136.799.600,00 | KECAMATAN TALANG |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Talang** | | | | **89.50 Nilai** | **89.50 Nilai** | **150.887.100,00** | **150.887.100,00** | **117.822.100,00** | **-99.141.300,00** | | | | | | | **51.745.800,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.177.100,00 | 49.177.100,00 | 48.967.100,00 | -210.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 50.035.800,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.177.100,00 | 49.177.100,00 | 48.967.100,00 | -210.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.035.800,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 101.710.000,00 | 101.710.000,00 | 68.855.000,00 | -32.855.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 1.710.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 101.710.000,00 | 101.710.000,00 | 68.855.000,00 | -32.855.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.710.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **252.689.600,00** | **252.689.600,00** | **240.891.600,00** | **-228.749.600,00** | | | | | | | **23.940.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data lembaga kemasayarakatan desa* | | | | 19 Desa | 19 Desa | 252.689.600,00 | 252.689.600,00 | 240.891.600,00 | -11.798.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 23.940.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 18.340.000,00 | 18.340.000,00 | 16.580.000,00 | -1.760.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.820.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 234.349.600,00 | 234.349.600,00 | 224.311.600,00 | -10.038.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.120.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **4.815.000,00** | **4.815.000,00** | **855.000,00** | **-3.105.000,00** | | | | | | | **1.710.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang - Undangan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 855.000,00 | -3.960.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 1.710.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 855.000,00 | -3.960.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.710.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **110.927.800,00** | **110.927.800,00** | **110.277.800,00** | **-15.403.300,00** | | | | | | | **95.524.500,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 110.927.800,00 | 110.927.800,00 | 110.277.800,00 | -650.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 95.524.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 136 Orang | 136 Orang | 63.287.800,00 | 63.287.800,00 | 62.637.800,00 | -650.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 47.884.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 47.640.000,00 | 47.640.000,00 | 47.640.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 47.640.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Keuangan Desa di Kecamatan Talang**<br>**Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Umum Desa di Kecamatan Talang**<br>**Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang**<br>**Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Penduduk Desa di Kecamatan Talang**<br>**Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Pembangunan Desa di Kecamatan Talang**<br>**Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Lainya Desa di Kecamatan Talang** | | | | **13,33**<br>**2,22**<br>**31**<br>**4**<br>**5**<br>**6,67**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen** | **13,33**<br>**2,22**<br>**31**<br>**4**<br>**5**<br>**6,67**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen**<br>**Persen** | **44.916.000,00** | **44.916.000,00** | **9.300.000,00** | **-893.100,00** | | | | | | **44.022.900,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa tertib administrasi* | | | | 19 Desa | 19 Desa | 44.916.000,00 | 44.916.000,00 | 9.300.000,00 | -35.616.000,00 | | | - | - | Kecamatan Talang | | 44.022.900,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 21.480.000,00 | 21.480.000,00 | 2.890.000,00 | -18.590.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.217.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 38 Dokumen | 38 Dokumen | 14.716.000,00 | 14.716.000,00 | 3.460.000,00 | -11.256.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 9.317.900,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.720.000,00 | 4.720.000,00 | 1.100.000,00 | -3.620.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.585.000,00 | KECAMATAN TALANG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.850.000,00 | -2.150.000,00 | Kab. Tegal, Talang, Pesayangan | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.902.500,00 | KECAMATAN TALANG |
| | | **KECAMATAN TARUB** | | | | | | | **3.103.527.600,00** | **3.103.527.600,00** | **2.947.051.600,00** | **-156.476.000,00** | | | | | | | **2.568.815.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.103.527.600,00** | **3.103.527.600,00** | **2.947.051.600,00** | **-156.476.000,00** | | | | | | | **2.568.815.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.103.527.600,00** | **3.103.527.600,00** | **2.947.051.600,00** | **-156.476.000,00** | | | | | | | **2.568.815.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.713.165.100,00** | **2.713.165.100,00** | **2.666.452.600,00** | **-558.165.100,00** | | | | | | | **2.155.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.771.000,00 | -4.229.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.860.000,00 | -1.140.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.911.000,00 | -3.089.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.654.535.600,00 | 1.654.535.600,00 | 1.392.295.600,00 | -262.240.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 1.592.240.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1.592.795.600,00 | 1.592.795.600,00 | 1.343.395.600,00 | -249.400.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.540.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.740.000,00 | 61.740.000,00 | 48.900.000,00 | -12.840.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 52.240.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 5.390.000,00 | -70.610.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 85.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 26 Orang | 26 Orang | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 5.390.000,00 | -70.610.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 113.727.500,00 | 113.727.500,00 | 123.770.000,00 | 10.042.500,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 93.760.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.849.000,00 | 6.849.000,00 | 6.849.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 41.105.000,00 | 16.105.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 14.760.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.760.000,00 | 9.760.000,00 | 9.760.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.810.000,00 | 35.810.000,00 | 35.810.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.011.000,00 | 10.011.000,00 | 8.221.000,00 | -1.790.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.297.500,00 | 22.297.500,00 | 18.025.000,00 | -4.272.500,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)* | | | | 100 %; Tahunan | 100 %; Tahunan | 619.532.000,00 | 619.532.000,00 | 648.532.000,00 | 29.000.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 155.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 339.732.000,00 | 29.000.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 142 Unit | 142 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 119.052.000,00 | 119.052.000,00 | 169.156.000,00 | 50.104.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 109.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 57.512.000,00 | 57.512.000,00 | 77.616.000,00 | 20.104.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 60.440.000,00 | 60.440.000,00 | 90.440.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 58.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD dalam kondisi baik* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 120.318.000,00 | 120.318.000,00 | 321.538.000,00 | 201.220.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | | 110.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 79.918.000,00 | 79.918.000,00 | 79.918.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 6.620.000,00 | 1.220.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 235.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Tarub** | | | | **86.05 Nilai** | **86.05 Nilai** | **73.113.000,00** | **73.113.000,00** | **59.571.000,00** | **-14.298.000,00** | | | | | | | **58.815.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan* | | | | 100 % | 100 % | 51.061.000,00 | 51.061.000,00 | 51.061.000,00 | 0,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 51.061.000,00 | 51.061.000,00 | 51.061.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan* | | | | 100 % | 100 % | 22.052.000,00 | 22.052.000,00 | 8.510.000,00 | -13.542.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | 8.815.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 22.052.000,00 | 22.052.000,00 | 8.510.000,00 | -13.542.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.815.000,00 | KECAMATAN TARUB |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub** | | | | **66.67 Persen** | **66.67 Persen** | **91.786.000,00** | **91.786.000,00** | **64.521.000,00** | **-1.786.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan data perkembangan desa* | | | | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 91.786.000,00 | 91.786.000,00 | 64.521.000,00 | -27.265.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 20.330.000,00 | 20.330.000,00 | 13.130.000,00 | -7.200.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 71.456.000,00 | 71.456.000,00 | 51.391.000,00 | -20.065.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **18.100.000,00** | **18.100.000,00** | **10.010.000,00** | **6.900.000,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana* | | | | 20 Desa | 20 Desa | 14.270.000,00 | 14.270.000,00 | 8.210.000,00 | -6.060.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.270.000,00 | 14.270.000,00 | 8.210.000,00 | -6.060.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan* | | | | 100 % | 100 % | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 1.800.000,00 | -2.030.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 1.800.000,00 | -2.030.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **149.941.500,00** | **149.941.500,00** | **118.067.000,00** | **20.058.500,00** | | | | | | | **170.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum* | | | | 100 % 100 %; Tahunan | 100 % 100 %; Tahunan | 149.941.500,00 | 149.941.500,00 | 118.067.000,00 | -31.874.500,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | 170.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 95.820.000,00 | 95.820.000,00 | 72.987.000,00 | -22.833.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 115.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 3.841.500,00 | 3.841.500,00 | 1.800.000,00 | -2.041.500,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.280.000,00 | 50.280.000,00 | 43.280.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub** | | | | **52.44 Persen** | **52.44 Persen** | **57.422.000,00** | **57.422.000,00** | **28.430.000,00** | **12.578.000,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah desa tertib administrasi* | | | | 20 Desa | 20 Desa | 57.422.000,00 | 57.422.000,00 | 28.430.000,00 | -28.992.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | 70.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 8.672.000,00 | 8.672.000,00 | 2.960.000,00 | -5.712.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 23.460.000,00 | 23.460.000,00 | 16.620.000,00 | -6.840.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.070.000,00 | 17.070.000,00 | 7.050.000,00 | -10.020.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.220.000,00 | 8.220.000,00 | 1.800.000,00 | -6.420.000,00 | Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TARUB |
| | | **KECAMATAN WARUREJO** | | | | | | | **2.811.055.600,00** | **2.811.055.600,00** | **2.456.010.651,00** | **-355.044.949,00** | | | | | | | **2.516.591.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.811.055.600,00** | **2.811.055.600,00** | **2.456.010.651,00** | **-355.044.949,00** | | | | | | | **2.516.591.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.811.055.600,00** | **2.811.055.600,00** | **2.456.010.651,00** | **-355.044.949,00** | | | | | | | **2.516.591.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **2.389.625.600,00** | **2.389.625.600,00** | **2.173.575.108,00** | **-356.407.600,00** | | | | | | | **2.033.218.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan disusun tepat waktu* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 12.878.000,00 | 12.878.000,00 | 3.503.000,00 | -9.375.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 14.294.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 9.145.000,00 | 9.145.000,00 | 2.704.750,00 | -6.440.250,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 10.188.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.733.000,00 | 3.733.000,00 | 798.250,00 | -2.934.750,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.106.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.675.853.600,00 | 1.675.853.600,00 | 1.475.991.100,00 | -199.862.500,00 | | | - | - | ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 1.697.917.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 1.620.323.600,00 | 1.620.323.600,00 | 1.415.923.600,00 | -204.400.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.638.591.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 55.530.000,00 | 55.530.000,00 | 60.067.500,00 | 4.537.500,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 59.326.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 69.554.000,00 | 69.554.000,00 | 54.255.488,00 | -15.298.512,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 76.081.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.388.288,00 | -11.712,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.840.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.646.475,00 | -53.525,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 8.470.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.486.725,00 | -13.275,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 6.050.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 21.800.000,00 | -4.600.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 29.040.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.275.000,00 | 4.275.000,00 | 3.206.250,00 | -1.068.750,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.703.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.178.000,00 | -22.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 2.420.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.079.000,00 | 19.079.000,00 | 9.549.750,00 | -9.529.250,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 20.558.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Ketersediaan BMD (Jumlah tersedia/Jumlah Kebutuhan)* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 397.122.000,00 | 397.122.000,00 | 405.877.000,00 | 8.755.000,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 9.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 397.122.000,00 | 397.122.000,00 | 397.047.000,00 | -75.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 130.468.000,00 | 130.468.000,00 | 123.236.370,00 | -7.231.630,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 148.465.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 303.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 30.987.120,00 | 1.387.120,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 37.510.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 100.593.000,00 | 100.593.000,00 | 91.974.250,00 | -8.618.750,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 110.652.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 103.750.000,00 | 103.750.000,00 | 110.712.150,00 | 6.962.150,00 | | | - | - | ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 87.461.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 69.918.000,00 | 69.918.000,00 | 73.856.150,00 | 3.938.150,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 67.285.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 7.541.000,00 | 7.541.000,00 | 10.583.250,00 | 3.042.250,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 4.940.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 26.291.000,00 | 26.291.000,00 | 26.272.750,00 | -18.250,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.236.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kecamatan Warureja** | | | | **81 Persen** | **81 Persen** | **75.580.000,00** | **75.580.000,00** | **63.299.300,00** | **7.558.000,00** | | | | | | | **83.138.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Terkoordinasikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 63.338.000,00 | 63.338.000,00 | 55.893.300,00 | -7.444.700,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 64.172.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 63.338.000,00 | 63.338.000,00 | 55.893.300,00 | -7.444.700,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 64.172.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.242.000,00 | 12.242.000,00 | 7.406.000,00 | -4.836.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 18.966.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.242.000,00 | 12.242.000,00 | 7.406.000,00 | -4.836.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Warureja, Warureja | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 18.966.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Jumlah LKD Yang Terfasilitasi** | | | | **70 Persen** | **70 Persen** | **96.555.000,00** | **96.555.000,00** | **66.711.000,00** | **9.656.000,00** | | | | | | | **106.211.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Ketersediaan Data Perkembangan Desa* | | | | 12 Desa | 12 Desa | 96.555.000,00 | 96.555.000,00 | 66.711.000,00 | -29.844.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 106.211.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 40.027.000,00 | 40.027.000,00 | 39.127.000,00 | -900.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 44.030.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.050.000,00 | -2.950.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 51.528.000,00 | 51.528.000,00 | 25.534.000,00 | -25.994.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 56.681.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan Kecamatan Warureja** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **14.759.000,00** | **3.000.000,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Desa Yang Tertangani Bencana* | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 11.139.000,00 | -8.861.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 22.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 11.139.000,00 | -8.861.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 12 Desa | 12 Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.620.000,00 | -6.380.000,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 11.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.620.000,00 | -6.380.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **147.655.000,00** | **147.655.000,00** | **106.373.243,00** | **18.065.000,00** | | | | | | | **165.720.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 147.655.000,00 | 147.655.000,00 | 106.373.243,00 | -41.281.757,00 | | | - | - | Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja | | 165.720.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 520 Orang | 520 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 50.957.743,00 | -29.042.257,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 88.000.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 56 Orang | 56 Orang | 12.292.000,00 | 12.292.000,00 | 4.304.000,00 | -7.988.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.821.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 55.363.000,00 | 55.363.000,00 | 51.111.500,00 | -4.251.500,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 60.899.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **71.640.000,00** | **71.640.000,00** | **31.293.000,00** | **23.664.000,00** | | | | | | | **95.304.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa Tertib Administrasi sesuai ketentuan* | | | | 12 Desa | 12 Desa | 71.640.000,00 | 71.640.000,00 | 31.293.000,00 | -40.347.000,00 | | | - | - | Semua desa di lingkungan kecamatan warureja | | 95.304.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 6.360.000,00 | -28.640.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 21.640.000,00 | 21.640.000,00 | 18.866.000,00 | -2.774.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 23.804.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.067.000,00 | -8.933.000,00 | Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN WARUREJO |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.829.469.300,00** | **2.829.469.300,00** | **3.031.833.964,00** | **86.664.500,00** | | | | | | | **2.916.133.800,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.230.000,00 | -270.000,00 | | | - | - | - | | 34.650.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.730.000,00 | -270.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 33.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.650.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.488.303.800,00 | 1.488.303.800,00 | 1.338.303.800,00 | -150.000.000,00 | | | - | - | - | | 1.494.403.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1.427.303.800,00 | 1.427.303.800,00 | 1.277.303.800,00 | -150.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.427.303.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 67.100.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 23.560.000,00 | -6.440.000,00 | | | - | - | - | | 33.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 23.560.000,00 | -6.440.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 33.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 179.883.500,00 | 179.883.500,00 | 123.958.164,00 | -55.925.336,00 | | | - | - | - | | 197.380.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 3.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 36.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 21.220.000,00 | -3.780.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 27.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.829.764,00 | -7.170.236,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.883.500,00 | 3.883.500,00 | 3.883.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 5.280.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 40.024.900,00 | -44.975.100,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 93.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 407.732.000,00 | 407.732.000,00 | 843.782.000,00 | 436.050.000,00 | | | - | - | - | | 455.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 310.732.000,00 | 310.732.000,00 | 725.732.000,00 | 415.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 400.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **8** | **NON URUSAN** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 47.000.000,00 | 68.050.000,00 | 68.050.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **8** | **NON URUSAN** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.679.012.800,00** | **10.779.012.800,00** | **10.329.413.164,00** | **-349.599.636,00** | | | | | | | **5.388.133.800,00** | |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 300.050.000,00 | 300.050.000,00 | 291.950.000,00 | -8.100.000,00 | | | - | - | - | | 326.700.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 248.950.000,00 | 248.950.000,00 | 240.850.000,00 | -8.100.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 270.490.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 392.000.000,00 | 392.000.000,00 | 379.050.000,00 | -12.950.000,00 | | | - | - | - | | 375.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 152.050.000,00 | -12.950.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 181.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 16.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 22.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 155.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 1. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.922.000.000,00** | **1.922.000.000,00** | **1.686.111.150,00** | **-1.067.000.000,00** | | | | | | | **855.000.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | | | | - | - | 1.922.000.000,00 | 1.922.000.000,00 | 1.686.111.150,00 | -235.888.850,00 | | | - | - | - | | 855.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 330 Orang | 330 Orang | 1.270.000.000,00 | 1.270.000.000,00 | 1.092.230.000,00 | -177.770.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 440.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 625.000.000,00 | 625.000.000,00 | 567.101.150,00 | -57.898.850,00 | Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 385.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.780.000,00 | -220.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.766.543.500,00** | **3.866.543.500,00** | **3.807.808.050,00** | **-3.607.043.500,00** | | | | | | | **159.500.000,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | | | | - | - | 3.766.543.500,00 | 3.866.543.500,00 | 3.807.808.050,00 | 41.264.550,00 | | | - | - | - | | 159.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 7 Partai Politik Orang | 7 Partai Politik Orang | 2.766.543.500,00 | 2.766.543.500,00 | 2.766.543.500,00 | 0,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.041.264.550,00 | 41.264.550,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 159.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **425.000.000,00** | **425.000.000,00** | **400.450.000,00** | **-287.500.000,00** | | | | | | | **137.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | | | | - | - | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 400.450.000,00 | -24.550.000,00 | | | - | - | - | | 137.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 400.450.000,00 | -24.550.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 137.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **206.000.000,00** | **206.000.000,00** | **161.804.500,00** | **14.000.000,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | | | | - | - | 206.000.000,00 | 206.000.000,00 | 161.804.500,00 | -44.195.500,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 206.000.000,00 | 206.000.000,00 | 161.804.500,00 | -44.195.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.530.000.000,00** | **1.530.000.000,00** | **1.241.405.500,00** | **-430.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | | | | - | - | 1.530.000.000,00 | 1.530.000.000,00 | 1.241.405.500,00 | -288.594.500,00 | | | - | - | - | | 1.100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 1200 Orang | 1200 Orang | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 233.775.500,00 | -66.224.500,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | - | - | | | 440.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.230.000.000,00 | 1.230.000.000,00 | 1.007.630.000,00 | -222.370.000,00 | Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 660.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **3.080.300.038.200,00** | **3.080.300.038.200,00** | **3.227.089.518.826,00** | **146.789.480.626,00** | | | | | | | **4.981.849.230.891,00** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Utama | Target 2025 | Satuan | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,33 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,06 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 3 | Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas | 67,09 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 4 | Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,84 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 5 | Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan | 4,12 | Persen; tahunan | Sekretariat Daerah |
| 6 | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,43 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 7 | Laju PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,16 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 8 | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,51 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,48 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 10 | Indeks Risiko Bencana | 125,00 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Pendidikan | 0,612 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Kesehatan | 0,86 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 13 | Persentase Kemiskinan | 6,40 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 14 | Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 84,44 | Persen; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 15 | Indeks Pembangunan Keluarga | 64,63 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 16 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 83,66 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |
| 17 | Indeks Reformasi Birokrasi | 86,06 | Poin; Tahunan | Sekretariat Daerah |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

## 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran (dampak/*impact*) Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| I | **GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 83,71 |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | 9,90 |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 75,48 |
| 4 | Cakupan Akses Sanitasi Aman | % | 3,00 |
| 5 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 18,33 |
| 6 | Penurunan Emisi GRK Kumulatif | TonCO2eq | 57.736,27 |
| 7 | Indeks Risiko Bencana | Angka | 125,00 |
| 8 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,85 |
| 9 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,00 |
| 10 | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 55,75 |
| 11 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Angka | 6,31 |
| 12 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | 5,25 |
| 13 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment ) | Angka | 10,32 |
| 14 | Jumlah Kasus Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | per 100.000 KH | 17,00 |
| 15 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74,49 |
| II | **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | |
| 16 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,33 |
| 17 | Tingkat Kemiskinan | % | 6,40 |
| 18 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7,51 |
| 19 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 72,06 |
| 20 | Prevalensi Stunting | % | 17,00 |
| 21 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | % | 90,07 |
| 22 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | % | 90,39 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| 23 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | % | 88,00 |
| 24 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | % | 51,53 |
| 25 | Rata-Rata Lama Sekolah | Nilai | 7,38 |
| 26 | Harapan Lama Sekolah | NIlai | 12,98 |
| 27 | Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | % | 76,25 |
| 28 | Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | % | 77,85 |
| 29 | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional | % | 65,25 |
| 30 | Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional | % | 72,50 |
| 31 | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) | % | |
| 32 | a) Literasi Membaca SD/Sederajat | % | 62,23 |
| 33 | b) Literasi Membaca SMP/Sederajat | % | 71,05 |
| 34 | c) Numerasi SD/Sederajat | % | 50,07 |
| 35 | d) Numerasi SMP/Sederajat | % | 62,95 |
| 36 | Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun | % | 6,31 |
| 37 | Tingkat pemanfaatan perpustakaan | % | 0,16 |
| 38 | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia | Angka | 20,43-20,58 |
| 39 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | Angka | 1,13 |
| 40 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota | Angka | 31,02-34,48 |
| 41 | Persentase Desa Mandiri | % | 12,59 |
| 42 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 86,06 |
| 43 | Disparitas Harga (%) | Angka | ± 10 |
| 44 | Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB | | 0,62 |
| 45 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Angka | 83,66 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| 46 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 64,63 |
| 47 | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,31 |
| 48 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 89,95 |
| 49 | Predikat kabupaten Layak Pemuda | Angka | utama |
| 50 | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan | % | 23,63 |
| 51 | Jumlah pengunjung tempat bersejarah | orang | 99987,00 |
| 52 | Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan" | % | 64,04 |
| 53 | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir | % | 18,87 |
| 54 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 23,34 |
| III | **DAYA SAING DAERAH** | | |
| 55 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 37,52 |
| 56 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | % | 6,41 |
| 57 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | % | |
| 58 | Rasio Kewirausahaan Daerah | % | 3,98 |
| 59 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 74,13 |
| 60 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 53,57 |
| 61 | Return on Asset (ROA) BUMD | Angka | 4,75 |
| 62 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Rp. | 23,79 |
| 63 | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | Angka | 27,92 |
| 64 | Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas | Angka | 67,09 |
| 65 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | % | 79,66 |
| 66 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,70 |
| 67 | Tingkat Inflasi | % | |
| 68 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | orang | 20,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| 69 | Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) | % | 0,58 |
| 70 | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 78,75 |
| 71 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | % | 85,25 |
| 72 | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" | % | 43,73 |
| IV | **PELAYANAN UMUM** | | |
| 73 | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 59,48 |
| 74 | Indeks Pemerintahan Digital | Angka | 2,20 |
| 75 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 4,29 |
| 76 | Indeks Integritas Nasional | Angka | 78,64 |
| 78 | Jumlah Kejadian Konflik SARA | kejadian | 0,00 |
| 79 | Persentase Penegakan Perda | % | |
| 80 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | % | 93,98 |
| 82 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 4,10 |
| 83 | Kapabilitas Inovasi | Angka | 2,54 |
| **V** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH** | | |
| | **Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar** | | |
| | **Pendidikan** | | |
| | RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) | Angka | 7,38 |
| | HLS (Harapan Lama Sekolah) | Angka | 12,98 |
| | Persentase kinerja akses layanan pendidikan | Persen | 100,00 |
| | Persentase kinerja mutu layanan pendidikan | Persen | 74,81 |
| | **KESEHATAN** | | |
| | Angka Harapan Hidup | Angka | 74,49 |
| | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 KH | 75,00 |
| | Angka Kematian Bayi | per 1.000 KH; | 7,60 |
| | Angka Kematian Balita | per 1.000 KH | 10,20 |
| | prevalensi stunting | Persenl | 17,00 |
| | Nilai IKM RSUD RSUD dr Soeselo | Angka | 100,00 |
| | Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo | Angka | 84 (AA) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Suradadi | Angka | 100,00 |
| | Nilai Kesehatan kinerja BLUD RSUD Suradadi | Angka | 78,36 (A) |
| | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Indeks Infrastruktur publik dan penataan wilayah | Persen | 61,26 |
| | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap | Persen | 64,35 |
| | Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap | Persen | 71,95 |
| | Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Mantap | Persen | 50,99 |
| | Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih | Persen | 90,00 |
| | Persentase Kepatuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan | Persen | 89,00 |
| | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | |
| | Indeks sarana dan prasarana hunian yang berkualitas | Persen | 63,53 |
| | Presentase Infrastruktur Perumahan yang Layak | Persen | 52,50 |
| | Presentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak | Persen | 45,88 |
| | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | |
| | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum | Angka | 100,00 |
| | Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 100,00 |
| | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Angka | 0,88 |
| | Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana | Angka | 0,81 |
| | **SOSIAL** | | |
| | Tingkat Kemiskinan | Persen | 6,40 |
| | Index Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial | Angka | 81,00 |
| | Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 57,47 |
| | Indeks Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial | Persen | 81,00 |
| | **URUSAN WAJIB yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar** | | |
| | **TENAGA KERJA** | | |
| | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | Persen | 92,49 |
| | laju peningkatan penempatan pencari kerja | Persen | 2,50 |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Angka | 0,31 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Skor Pencapaian PPE (Penghargaan Parahita Ekapraya) | Angka | 913,3 |
| | Skor Pencapaian KLA (Kabupaten Layak Anak) | Angka | 905,00 |
| | Pangan | | |
| | Indek Produksi Tanaman Pangan | Angka | 104,38 |
| | angka kecukupan energi | kkal/kapita/hari | 2483,00 |
| | **PERTANAHAN** | | |
| | Presentase Penataan Tanah yang digunakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah | Persen | 98,75 |
| | Lingkungan Hidup | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 75,48 |
| | Indeks Kualitas Air | Angka | 58,85 |
| | Indeks Kualitas Udara | Angka | 86,03 |
| | Indeks Kualitas Lahan | Angka | 40,71 |
| | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capil | Angka | 81,00 |
| | Indeks Administrasi Kependudukan | Angka | 84,56 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | **NILAI IDM KABUPATEN BERDASAR RILIS RESMI TIAP TAHUNNYA (BERDASARKAN DATA IDM)** | | |
| | Mandiri | Nilai | 3,00 |
| | Maju | Nilai | 90,00 |
| | Berkembang | Nilai | 176,00 |
| | Tertinggal | Nilai | 12,00 |
| | Persentase Desa Tertib Lppd | Persen | 100,00 |
| | Jumlah Peningkatan Desa Mandiri Di Kab. Tegal (Berdasarkan Data Idm) | Jumlah | 2 |
| | Persentase Aparatur Pemerintah Desa Yang Kompeten | Persen | 100,00 |
| | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | |
| | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | Angka | 64,85 |
| | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | Angka | 64,85 |
| | **PERHUBUNGAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Indeks Kinerja Perhubungan | Persen | 59,00 |
| | Rasio Konektivitas | Angka | 0,79 |
| | Rasio V/C | Angka | 0,37 |
| | Rasio Keselamatan | Angka | 3,37 |
| | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | |
| | Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman | OPD | 48,00 |
| | Nilai KIP Badan Publik Pemkab Tegal | Nilai | 89,50 |
| | Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses | Angka | 1,52 |
| | Tingkat Kematangan Kepuasan Pengguna | Angka | 0,38 |
| | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | Persentase Koperasi Modern | Persen | 0,08 |
| | Persentase koperasi berpredikat minimal cukup sehat | Persen | 0,14 |
| | Rasio kewirausahaan di Kabupaten Tegal | Angka | 0,01 |
| | persentase UMKM naik kelas | Persen | 0,08 |
| | **PENANAMAN MODAL** | | |
| | persentase nilai investasi PMA | Persen | 17,00 |
| | persentase kenaikan nilai investasi PMDN | Persen | 89,00 |
| | nilai minat investasi PMA | Rp | 1.742 t |
| | nilai minat investasi PMDN | Rp | 1.558 T |
| | nilai IKM DPMPTSP | Nilai | 91,00 |
| | persentase kepatuhan perusahaan | Persen | 74,50 |
| | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | |
| | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | Angka | 0,32 |
| | Kabupaten /Kota Layak Pemuda (level) | Level | utama |
| | Persentase Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis (%/Tahun) | Persen | 30,80 |
| | Rasio Atlet Berprestasi (% / Tahun) | Angka | 27,48 |
| | Rasio Atlet Berprestasi (% / Tahun) | Persen | 27,48 |
| | **STATISTIK** | | |
| | Indeks Pembangunan Statistik | Angka | 2,75 |
| | **PERSANDIAN** | | |
| | Indeks Keamanan Informasi | Angka | 500,00 |
| | **KEBUDAYAAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase Kesenian yang dimanfaatkan | Persen | 40,63 |
| | Persentase Kesenian yang dikembangkan | Persen | 49,28 |
| | **PERPUSTAKAAN** | | |
| | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Angka | 48,10 |
| | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca | Angka | 70,20 |
| | **KEARSIPAN** | | |
| | Status hasil pengawasan kearsipan ANRI | Angka | 76,00 |
| | Nilai pengawasan (Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)) | Angka | 76,00 |
| | Urusan Pemerintahan Pilihan | | |
| | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | |
| | indeks produksi perikanan | Angka | 100,00 |
| | prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap | Persen | 1,36 |
| | prosentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan budidaya | Persen | 0,25 |
| | prosentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan budidaya | Persen | 0,27 |
| | **PARIWISATA** | | |
| | Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan (%/Tahun) | Persen | 1,40 |
| | Laju PAD Sektor Pariwisata (% / Tahun) | Persen | 1,10 |
| | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%/Tahun) | Persen | |
| | **PERTANIAN** | | |
| | Indeks Gabungan Produksi Pertanian | Angka | 102,44 |
| | Indeks Produksi Tanaman Perkebunan | Angka | 98,28 |
| | Indeks Produksi Tanaman Hortikultura | Angka | 101,61 |
| | Indeks Produksi Peternakan | Angka | 104,10 |
| | **PERDAGANGAN** | | |
| | nilai sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil pada PDRB | Angka | 0,16 |
| | laju pertumbuhan PAD sektor perdagangan | Angka | 0,03 |
| | **PERINDUSTRIAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | persentase penyelesaian hubungan industrial | Persen | 64,29 |
| | Rasio nilai industri terhadap tenaga kerja | Angka | |
| | Prosentase komoditas industri unggulan yang berdaya saing | Persen | 50,00 |
| | **TRANSMIGRASI** | | |
| | persentase transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari provinsi | KK | 100,00 |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 86,06 |
| | Indeks Pemerintahan Digital | Angka | 2,20 |
| | Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 86,26 |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Angka | 4,39 |
| | Sekretariat DPRD | | |
| | persentase implementasi RKT | Persen | 90,00 |
| | persentase implementasi renja DPRD dalam Renja Sekretariat DPRD | Persen | 90,00 |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **PERENCANAAN** | | |
| | Indeks Perencanaan dan Riset Inovasi | Angka | 91,04 |
| | Indeks Perencanaan | Angka | 96,17 |
| | Indeks Riset Inovasi | Angka | 83,34 |
| | **KEUANGAN** | | |
| | Persentase Pengelolaan Keuangan dan BMD yg sesuai ketentuan & tepat waktu | Persen | 73,03 |
| | Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi Dokumen Penganggaran | Persen | 84,62 |
| | Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi Dokumen Perbendaharaan | Persen | 66,67 |
| | Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi laporan | Persen | 75,00 |
| | Persentase ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan Rekonsiliasi BMD | Persen | 75,00 |
| | Persentase ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan penatausahaan BMD | Persen | 78,57 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 23,00 |
| | Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | PERSEN;tahunan | 53,00 |
| | **KEPEGAWAIAN** | | |
| | Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) | Angka | 83,45 |
| | Persentase ASN mengikuti pengembangan kompetensi | Persen | 87,68 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 70,75 |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | |
| | indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) | Persen | 2,85 |
| | presentase tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan | Persen | 93,00 |
| | level kapabilitas APIP | Persen | 3,00 |
| | **KEWILAYAHAN** | | |
| | IKM Kecamatan Adiwerna | Angka | 80,57 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Adiwerna | Persen | 85,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Balapulang | Angka | 84,20 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Balapulang | Persen | 60,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Bojong | Angka | 90,93 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong | Persen | 80,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Bumijawa | Angka | 88,50 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bumijawa | Persen | 66,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Dukuhturi | Angka | 81,11 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi | Persen | 85,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Dukuhwaru | Angka | 85,00 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhwaru | Persen | 100,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Jatinegara | Angka | 86,70 |
| | Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara | Persen | 80,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Kedungbanteng | Angka | 86,00 |
| | Persentase LKD yang terfasilitasi kedungbanteng | Persen | 83,33 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Kramat | Angka | 84,35 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan kramat | Persen | 85,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Lebaksiu | Angka | 82,25 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan lebaksiu | Persen | 80,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Margasari | Angka | 83,24 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari | Persen | 71,33 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | IKM Kecamatan Pagerbarang | Angka | 84,30 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pagerbarang | Persen | 83,33 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Pangkah | Angka | 90,01 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pangkah | Persen | 83,33 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Slawi | Angka | 86,17 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi | Persen | 100,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Suradadi | Angka | 81,98 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi | Persen | 100,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Talang | Angka | 90,50 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang | Persen | 100,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Tarub | Angka | 87,05 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub | Persen | 83,33 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub | Persen | 100,00 |
| | IKM Kecamatan Warureja | Angka | 82,00 |
| | Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Warureja | Persen | 75,00 |
| | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja | Persen | 86,00 |
| | Unsur Pemerintahan Umum | | |
| | Kesatuan Bangsa dan Politik | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Indeks wawasan kebangsaan | Angka | |
| | Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persen | 95,00 |
| **VI** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | |
| | **PENDIDIKAN** | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun | Persen | 100,00 |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun | Persen | 100,00 |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Kesetaraan | Persen | 100,00 |
| | Rata-rata Nilai Kelulusan SD | Nilai | 79,20 |
| | Rata-rata Nilai Kelulusan SMP | Nilai | 84,00 |
| | Kemampuan literasi SD | Persen | 77,55 |
| | Kemampuan literasi SMP | Persen | 78,14 |
| | Kemampuan numerasi SD | Persen | 65,79 |
| | Kemampuan numerasi SMP | Persen | 72,98 |
| | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | Persen | 74,99 |
| | Iklim Keamanan SD | Persen | 71,83 |
| | Iklim Kebinekaan SD | Persen | 73,09 |
| | Iklim Inklusivitas SD | Persen | 55,02 |
| | Iklim Keamanan SMP | Persen | 69,94 |
| | Iklim Kebinekaan SMP | Persen | 74,15 |
| | Iklim Inklusivitas SMP | Persen | 58,34 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Muatan Lokal dalam KBM | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | Persen | 83,37 |
| | Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar | Persen | 37,93 |
| | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN | Persen | 65,04 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah | Persen | 100,00 |
| | **KESEHATAN** | | |
| PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | Nilai | 0,90 |
| | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Persen | 98,25 |
| | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100,00 |
| | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 100,00 |
| | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 100,00 |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 100,00 |
| | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan | Persen | 100,00 |
| | Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis | Persen | 93,10 |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN | Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut | Persen | 69,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| MAKANAN MINUMAN | pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Persen | 87,00 |
| | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten dengan mantap | Persen | 64,35 |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap | Persen | 72,50 |
| | Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap | Persen | 72,50 |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak | Persen | 100,00 |
| | Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman | Persen | 36,16 |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Cakupan Akses Sanitasi Layak | Persen | 100,00 |
| | Cakupan Akses Sanitasi Aman | Persen | 2,95 |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terlatih | Persen | 90,00 |
| Program Penyelanggaraan Penataan Ruang | Jumlah kepatuhan terhadap ITR yang diajukan | Persen | 89,00 |
| | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan | Nilai | 49,25 |
| | Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten | Persen | 70,85 |
| | Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan | Persen | 57,50 |
| | Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persen | 32,50 |
| | Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata | Persen | 24,66 |
| | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | Persen | 81,90 |
| | Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap | Persen | 93,09 |
| | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persen | 0,37 |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persen | 100,00 |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Presentase Ketersediaan PSU Perumahan | Persen | 36,50 |
| Program Kawasan Permukiman | Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan | Persen | 64,52 |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Presentase penanganan perumahan tidak layak huni | Persen | 27,23 |
| | **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | |
| Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase gangguan trantibum yang tertangani | Persen | 100,00 |
| | Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Persen | 100,00 |
| | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Persen | 100,00 |
| | Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 100,00 |
| | Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun | Persen | 100,00 |
| | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Persen | 100,00 |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 |
| | **SOSIAL** | | |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS, Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Persen | 87,34 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / Kabupaten | Persen | 100,00 |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti. | Persen | 76,54 |
| Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS perseorangan,Keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan. | Persen | 20,86 |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Presentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persen | 100,00 |
| Program Penanganan Fakir Miskin | Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin | Persen | |
| Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Cakupan Fasilitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang | Persen | 100,00 |
| | **TENAGA KERJA** | | |
| program perencanaan tenaga kerja | persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 100,00 |
| program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | persentase tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan | Persen | 4,40 |
| program penempatan tenaga kerja | persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah | Persen | 45,00 |
| program hubungan industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persen | 9,19 |
| | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja operasi APBD | Persen | 4,75 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Nilai bulanan | 3,21 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling | Persen | 0,03 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER DAN ANAK | Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan Anak | Persen | 35,42 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak | Persen | 90,50 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat kabupaten | Persen | 0,01 |
| | **PANGAN** | | |
| program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | skor pola pangan harapan | Persen | 94.00 |
| program penanganan kerawanan pangan | persentase desa rawan pangan | Persen | 12.20 |
| program pengawasan keamanan pangan | persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan | Persen | 114,40 |
| | **PERTANAHAN** | Persen | |
| Program Penatagunaan Tanah | Persentase Tanah yang tertata | Persen | 100,00 |
| Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah | Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat | | 0,98 |
| | **LINGKUNGAN HIDUP** | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | Persen | 19,94 |
| | Persentae Peningkatan Status Mutu Air Sungai | Nilai | 18,70 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Luasan ruang terbuka yang dilakukan penghijauan | Hektar | 3,00 |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN | Persentase Limbah B3 yang terkelola | Persen | 60,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| BERACUN (LIMBAH B3) | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Persen | 72,00 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Presentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya | Persen | 70,00 |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat | Persen | 38,89 |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Sampah yang tertangani | Persen | 33,00 |
| | Persentase Sampah Terkelola | Persen | 29,00 |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | Persen | 98,00 |
| | Presentase Perekaman KTP el | Persen | 99,00 |
| | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA | Persen | 50,00 |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 98,00 |
| | Persentase penduduk ber akta kematian | Persen | 75,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Presentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El | Persen | 15,00 |
| | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | |
| Program penataan desa | Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya | Persen | 100,00 |
| Program Administrasi Pemerintah Desa | Jumlah Desa tertib Administrasi Pemerintahan Desa | Persen | 100,00 |
| Program Pengembangan Desa | Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang | Persen | 100,00 |
| | Persentase Pengembangan Desa | Persen | 100,00 |
| | Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan | Persen | 100,00 |
| program pemberdayaan lembaga, kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat | persentase lembaga kemasyarakatan yang berdaya | Persen | 76,48 |
| | prosentase ekonomi masyarakat yang berdaya | Persen | 64,58 |
| Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Desa yang melakukan kerjasama | Persen | 82,81 |
| | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR (Angka kelahiran Total) | Poin | 2,14 |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) | Persen | 7,67 |
| PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA | Persentase Keluarga yang mendapat pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan | Persen | 0,52 |
| | **PERHUBUNGAN** | | |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase trayek aktif | Persen | 77,00 |
| | Persentase kinerja lalu lintas | Persen | 0,33 |
| | Persentase sarana dan prasarana keselamatan yang berfungsi | Persen | 1,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | |
| Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Nilai Website dan Medsos PPID | Nilai | 88,00 |
| | Nilai Rata-rata SAQ, Visitasi dan Uji Publik | Nilai | 89,93 |
| Program pengelolaan aplikasi informatika | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo | Persen | 66,67 |
| | Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan | Persen | 100,00 |
| | **KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | |
| Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | persentase pengawasan pemeriksaan koperasi | Persen | 84,78 |
| Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian | persentase SDM koperasi yang berkualitas | Persen | 75,60 |
| Program pemberdayaan perlindungan koperasi | persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas | Persen | 80,00 |
| | Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi | Persen | 100,00 |
| | Persentase SDM Koperasi yang memliki kompetensi | Persen | 58,00 |
| | Persentase Koperasi bermitra | Persen | 6,23 |
| Program pemberdayaan UMKM | persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal | Persen | 46,52 |
| program pengembangan UMKM | proporsi usaha mikro yang menjalin kemitraan | Persen | 46,52 |
| | Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra | Persen | 12,10 |
| | Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil | Persen | 12,10 |
| | **PENANAMAN MODAL** | | |
| program pengembangan iklim penanaman modal | persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi | Persen | 90,00 |
| | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persen | 92,00 |
| program promosi penanaman modal | persentase peningkatan investor yang berinvestasi | Persen | 92,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| program pelayanan penanaman modal | persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan | Persen | 85,00 |
| | persentase perizinan non berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan | Persen | 85,00 |
| program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal | Persen | 53,52 |
| program pengendalian penanaman modal | persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha | Persen | 93,00 |
| | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | |
| program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri | Persen | 0,05 |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | Persen | 0,22 |
| program pengembangan daya saing keolahragaan | persentase atlet berprestasi yang masuk provinsi atau nasional | Persen | 28,00 |
| | Persentase Cabang Olahraga yang dibina | Persen | 81,00 |
| | **STATISTIK** | | |
| Program penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100,00 |
| | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100,00 |
| | **PERSANDIAN** | | |
| program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi | Tingkat keamanan Informasi | Persen | 70,96 |
| | **KEBUDAYAAN** | Persen | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada | Persen | 87,21 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian yang dilestarikan | Persen | 55,57 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan | Persen | 87,98 |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 71,43 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase museum yang terkelola | Persen | 100,00 |
| | **PERPUSTAKAAN** | | |
| Program Pembinaan Perpustakaan | KETERSEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN PER KAPITA | Nilai | 0,02 |
| | PEMUSTAKA PER KAPITA | Nilai | 0,01 |
| | KEARSIPAN | | |
| Program pengelolaan arsip | PERSENTASE KETERSEDIAAN ARSIP | Persen | 0,18 |
| Program perlindungan dan penyelamatan arsip | PERSENTASE PERLINDUNGAN ARSIP | Persen | 0,18 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | |
| | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | |
| Program pengelolaan perikanan tangkap | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.) | Rupiah | 64.238.576,00 |
| | Produksi Perikanan Tangkap (Kg.) | Kilogram | 2.267.744,00 |
| Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | prosentase wilayah perairan umum daratan (PUD) yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya | Persen | 33,33 |
| Program pengelolaan perikanan budidaya | Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) | Rupiah | 124905744,00 |
| | Produksi Perikanan Budidaya (kg) | Kilogram | 2875877,00 |
| Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) | Rupiah | 151181640,00 |
| | Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan | Kilogram | 5851776,00 |
| | **PARIWISATA** | | |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang / Tahun) | Orang/Tahunan | 1110328,00 |
| program pemasaran pariwisata | Persentase DTW yang dipromosikan | Kegiatan/tahunan | 59,65 |
| program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM pariwisata yang dibina | Orang/Tahunan | 33,33 |
| | **PERTANIAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Persen | 93.00 |
| | Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen | Nilai | 67,63 |
| | Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen | Persen | 20,24 |
| | Luas Lahan Pertanian Organik | Persen | 10.00 |
| program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Luas Lahan LP2B yang dipertahankan | Persen | 100.00 |
| | Cakupan Jaringan Irigasi | Ha | 500.00 |
| | Cakupan JaringanJalan Usaha Tani | Ha | 150.00 |
| program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) | persen | 94.00 |
| | Populasi Ternak Besar | jumlah | 6926,00 |
| | Populasi Ternak Kecil | jumlah | 247671,00 |
| program penyuluhan pertanian | persentase SDM pertanian yang ditingkatkan | Persen | 6,00 |
| | peningkatan kelas kelompok tani | Persen | 5,34 |
| program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | rasio serangan hama penyakit tanaman | Nilai | 4.50 |
| | **PERDAGANGAN** | Persen | |
| Program perijinan pendaftaran perusahaan | persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi | Persen | 100,00 |
| Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya | Persen | 64,00 |
| Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting | persentase stabilisasi harga bapokting | Persen | 90,00 |
| Program standarisasi perlindungan konsumen | indeks tertib ukur | Nilai | 60,00 |
| program pengembangan ekspor | persentase pertumbuhan pelaku usaha ekspor | Persen | 9,00 |
| program pengggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | persentase promosi produk lokal yang difasilitasi | Persen | 50,00 |
| | Persentase Pasar dalam kondisi tidak rusak berat | Persen | 35,28 |
| | Persentase pasar e-ritribusi | Persen | 95,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik | Persen | 100,00 |
| | Persentase harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting stabil tahunan | Persen | 90,00 |
| | Persentase Laju Nilai Ekspor | Persen | 15,00 |
| | Persentase alat UTTP sesuai standar | Persen | 85,69 |
| | Persentase Laju Penggunaan PDN | Persen | 65,95 |
| | **PERINDUSTRIAN** | | |
| Program perencanaan dan pembangunan industri | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan sentra industri unggulan daerah | Persen | 40,00 |
| program pengendalian izin usaha industri kabupatan/kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 |
| program pengelolaan sistem informasi industri nasional | Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SIINas) | Persen | 55,00 |
| | **TRANSMIGRASI** | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi | Persen | 100,00 |
| | | | |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN | Rata-rata kinerja OPD Rumpun Pemerintahan Tercapai LKJIP | Persen | 51,58 |
| | Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Pemerintahan Yang Sesuai Standard (IKM) | Persen | 85,85 |
| Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rata-rata Nilai kinerja OPD Rumpun Kesra Tercapai LKJIP | Persen | 87,56 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Kesra Yang Sesuai Standard (IKM) | Persen | 85,40 |
| Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - BAGIAN HUKUM | Persentase Pembentukan Perda Yang Terselesaikan | Persen | 100,00 |
| | Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi | Persen | 100,00 |
| Program Perekonomian dan Pembangunan- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase OPD rumpun Perekonomian dan Pembangunan tercapai LKJIP | Persen | 55,61 |
| | Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai dengan standar (IKM) | Persen | 87,67 |
| Program Perekonomian dan Pembangunan- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK | Persen | 100,00 |
| | Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi | Level | 3,00 |
| | Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi | Tingkat | 17,00 |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD | Persen | 90,00 |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **PERENCANAAN** | | |
| program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD | NA | 96,60 |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD | NA | 100,00 |
| program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | NA | 95,52 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA | NA | 95,52 |
| | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | NA | 95,52 |
| | **KEUANGAN** | | |
| Program pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| | 2. Persentase Tersusunya Dokumen Perbendaharaan sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| | 3. Persentase Tersusunya Laporan laporan keuangan sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| | Persentase Tersusunya Dokumen Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1. Persentase Tersusunya Laporan Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| | 2. Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan BMD sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| | 3. Persentase Tersusunya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai ketentuan | Persen | 100,00 |
| Program pengelolaan pendapatan daerah | Rasio Target PAD Terhadap Potensi PAD ( BIDANG RENBANG ) | PERSEN | 50,00 |
| | Rasio Realisasi Ketetapan Terhadap Ketetapan Pajak Daerah ( BIDANG PP ) | Persen | 100,00 |
| | Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD ( BIDANG DALEV ) | Persen | 100,00 |
| | **KEPEGAWAIAN** | | |
| Program Kepegawaian | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN | Persen | 68,27 |
| | % jabatan manajerial terisi | Persen | 86,50 |
| | % pegawai pendidikan tinggi dan mernegah dasar (tidak termasuk guru & kesehatan) | Persen | 93,00 |
| | % rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru & kesehatan) | Persen | 97,50 |
| | % JF bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru & kesehatan) | Persen | 51,50 |
| | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN mengikuti seminar/workshop/sejenisnya sesuai tupoksi jabatan | Persen | 89,20 |
| | RISET DAN INOVASI | | |
| program Riset dan Inovasi Daerah | Persentase hasil Riset Inovasi yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah | Persen | 88,05 |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | |
| Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah | Persen | 100,00 |
| | Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan desa | Persen | 20,00 |
| | Persentase perangkat daerah berkinerja tinggi dan sangat tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | Persen | 66,67 |
| | Persentase Perangkat Daerah berakuntabiltas kinerja minimal Baik | Persen | 66,67 |
| | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Persen | 85,00 |
| | Persentase pemantauan TPTGR | Persen | 95,00 |
| Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi pembangunan ZI | Persen | 100,00 |
| | Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penerapan Manajemen Risiko | Persen | 100,00 |
| | Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penilaian mandiri maturitas SPIP | Persen | 100,00 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| KECAMATAN | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna | Persen | 90,60 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong | | |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 88,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub | Persen | 100,00 |
| | Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja | Persen | 100,00 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna | Persen | 76,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang | Persen | 70,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong | Persen | 76,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa | Persen | 66,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi | Persen | 74,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara | Persen | 85,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng | Persen | 92,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat | Persen | 70,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu | Persen | 74,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari | Persen | 78,90 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang | Persen | 61,44 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah | Persen | 94,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi | Persen | 100,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi | Persen | 71,00 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang | Persen | 39,40 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub | Persen | 62,26 |
| | Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja | Persen | 81,00 |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | |
| Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persen | 95,00 |
| Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik | Persen | 100,00 |
| | Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelengarakan pendidikan politik | Persen | 74,00 |
| program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Persentase Ormas yang terbina | Persen | 100,00 |
| program pembinaan dan pengembangan | Persentase konflik yang tertangani | Persen | 100,00 |

| NO. | Indikator | SATUAN | 2025 |
|---|---|---|---|
| ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | | |
| Program peningkatan kewaspadaaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | persentase gangguan KAMTIBMAS yang tertangani | Persen | 100,00 |

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025*

# BAB VII
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen transisi sebagai pedoman Penjabat Kepala Daerah untuk peneyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026 selama proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025 dan juga sebagai dokumen penyesuaian terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 tetap memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BUPATI TEGAL

Ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Bappedalitbang Kabupaten Tegal
Tahun 2025